



WALIKOTA MADIUN

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2021 sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2020;
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
33. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2021 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Maret 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

**Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015**

**BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 6/G**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

A. SEKRETARIAT DAERAH

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Sekretariat Daerah

No	Permasalahan
Bagian Pemerintahan	
1	Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka untuk status kinerja Penyelenggaraan Pemda ada perubahan
2	Belum tertibnya pengisian buku administrasi Kecamatan dan Kelurahan serta penginputan Profil Desa Kelurahan dan Evaluasi Profil Desa Kelurahan
3	Dengan gencarnya pembangunan infrastruktur di Kota Madiun maka terjadi perubahan bentuk rupa bumi yang signifikan sehingga data yang ada belum update
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
1	Kurangnya sinkronisasi data dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pembangunan
2	Kurangnya perangkat aplikasi penunjang dalam pelaksanaan moitoring dan Evaluasi
3	Kurangnya harmonisasi payung hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa antar Lembaga Terkait
Bagian Hukum	
1	Adanya ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan di daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
2	Adanya gugatan kepada Pemerintah Daerah
3	Adanya kasus yang membutuhkan bantuan hukum kepada masyarakat miskin
4	Adanya ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan di daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
Bagian Umum	
1	Belum optimalnya penanganan kepegawaian di Sekretariat Daerah
2	Administrasi surat menyurat ke pimpinan lambat
3	Belum tersosialisasikannya secara menyeluruh terkait aturan keprotokolan, pimpinan daerah kepada Perangkat Daerah maupun kepada masyarakat
4	Belum optimalnya pelayanan kerumahtanggaan pimpinan

No	Permasalahan
Bagian Organisasi	
1	Perbedaan pemahaman terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 terkait kewenangan urusan pada perangkat daerah dalam penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja maupun Tata Kerja Perangkat Daerah
2	Kurangnya Pengetahuan Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah tentang kelembagaan
3	Kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah tentang Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan, dan Kompetensi Jabatan
4	Kurangnya ketaatan terhadap ketatalaksanaan oleh Perangkat Daerah (tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, standart operasional prosedur)
5	Kurangnya Sarana dan Prasarana kebutuhan disabel
6	Kurangnya budaya inovasi
7	Kurangnya Informasi tentang Standart Pelayanan dari penyelenggara layanan ke masyarakat
8	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan di perangkat daerah
9	Belum sinkronnya antar dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10	Belum terintegrasinya antara aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan
11	Penyusunan Anggaran belum berdasarkan Cascading maupun Proses Bisnis
12	Perbedaan pemahaman terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 terkait perencanaan, penganggaran yang berpengaruh terhadap dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
1	Kurangnya kompetensi verifikator data penerima hibah bantuan sosial
2	Kurangnya kompetensi yang dimiliki dalam mengevaluasi laporan bulanan Badan Usaha Milik Daerah
3	Kurangnya kompetensi untuk menganalisa komoditas yang berpotensi menjadi pemicu inflasi

Isu Strategis Sekretariat Daerah

No	Isu Strategis
Bagian Pemerintahan	
1	Perubahan Regulasi
2	Administrasi Kurang Tertib
3	Data Kurang Update
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	
1	Perumusan Standar Kebijakan Pembangunan
2	Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi
3	Harmonisasi Kebijakan
Bagian Hukum	
1	Harmonisasi Produk Hukum Daerah
2	Fasilitasi Bantuan Hukum

No	Isu Strategis
3	Optimalisasi pengelolaan dokumentasi, informasi dan publikasi produk hukum Pemerintah Kota Madiun
Bagian Umum	
1	Pelayanan kepegawaian di Sekretariat Daerah berbasis Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja
2	Pelayanan kepada pimpinan berbasis pada Teknologi Informasi Komunikasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelayanan prima terhadap semua kebutuhan pimpinan.
3	Pelayanan keprotokolan kepada pimpinan sesuai aturan yang berlaku
Bagian Organisasi	
1	Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur
2	Kebijakan Baru terkait Standarisasi Jabatan
3	Aparatur Sipil Negara bekerja sesuai prosedur
4	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum sesuai target yang telah ditetapkan
6	Kebijakan Baru terkait Pengelolaan Keuangan (Perencanaan dan Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan)
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
1	Input data penerima hibah bantuan sosial belum optimal
2	Penerapan regulasi penilaian tingkat kesehatan BUMD belum optimal
3	Belum adanya analisis terhadap komoditas yang berpotensi menjadi pemicu inflasi

Tujuan dan Sasaran Kota yang Didukung Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis <i>smart cities</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Tujuan Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Persentase Perangkat Daerah yang Indeks RB-nya bernilai baik	-	57,14%	64,28%	71,43%	78,57%

Sasaran Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	30,50	31	31,50	32
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP-nya bernilai A	-	80,00%	83,00%	86,00%	90,00%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai rerata hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	80	85	90	95
4	Meningkatnya kinerja penyelenggara pelayanan publik	Persentase penyelenggara pelayanan publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya bernilai baik	-	100%	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	-	82,75	83,00	83,25	83,50

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2024			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Persentase Perangkat Daerah yang Indeks RB nya bernilai Baik								57.14%		64.28%		71.43%		71,43%		Sekretariat Daerah	Kota Madiun		
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				30,50		31,00		31,50		32,00		32,00		?	Sekretariat Daerah	Kota Madiun	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP-nya bernilai A				80%		83,00%		86,00%		90,00%		90,00%			Sekretariat Daerah	Kota Madiun	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Rerata Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80		85		90		95		95					
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggara Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik				100%		100%		100%		100%		100%					
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah				82,75		83,00		83,25		83,50		83,50					
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,01	80,01	31.53 2.944. 012	81	46.525. 246.260	82	53.360.8 79.400	83	47.195. 889.500	83	47.195.889.500		
						BAGIAN PEMERINTAHAN														

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda			888,3 24,50 0.00		1,116,1 57,500. 00		1,106,15 7,500.00		1,131,1 57,500. 00		1,131,157,500.0 0		
				Kegiatan Perencanaan, Penggangan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan , Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	7,417, 000.0 0	100%	10,000, 000.00	100%	10,000,0 00.00	100%	10,000, 000.00	100%	10,000,000.00		
				Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	7,417, 000.0 0										
				Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	6 Dokum en	10,000, 000.00	6 Dokum en	10,000,0 00.00	6 Dokume n	10,000, 000.00	6 Dokum en	10,000,000.00		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	100%	499,157,500.00	100%	499,157,500.00	100%	499,157,500.00	100%	499,157,500.00	100%	499,157,500.00		
				Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	12 Orang/Bulan	499.157.500,00	12 Orang/Bulan	499.157.500,00	12 Orang/Bulan	499.157.500,00	12 Orang/Bulan	499.157.500,00		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	80	100,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	100%	100.000,000.00										
				Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	12 laporan	100.000.000,00	24 Laporan	200.000.000,00	24 Laporan	200.000.000,00	24 Laporan	200.000.000,00		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	100%	60,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	3 unit	75.000.000,00	3 unit	75.000.000,00		
				Sub keg Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	15 Unit	50.000.000,00	-	-	-	-		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	244,250,000,00	100%	300,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	300,000,000.00		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100%	100%	244.250.000,00										

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 laporan	226.882 .600,00	12 laporan	300.000. 000,00	12 laporan	300.000 .000,00	12 laporan	300.000.000,00		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	100%	100%	37,50 0,000. 00	100%	47,000, 000.00	100%	47,000,0 00.00	100%	47,000, 000.00	100%	47,000,000.00		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/j abatan yang layak 100% digunakan	100%	100%	20.00 0.000, 00										
				Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	4 unit	20.000. 000,00	4 unit	20.000.0 00,00	4 unit	20.000. 000,00	4 unit	20.000.000,00		
				Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	100%	7.500. 000,0 0										

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	-	-	-	1 unit	7.500.000,00	1 unit	15.000.000,00	1 unit	15.000.000,00	1 unit	15.000.000,00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100%	100%	10.000.000,00										
				Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	-	-	-	17 unit	12.000.000,00	17 unit	12.000.000,00	17 unit	12.000.000,00	17 unit	12.000.000,00		
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	% Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100	1.865.261.500,00	100	2.421.137.500,00	100	2.475.000.000,00	100	2.495.000.000,00	100	2.495.000.000,00	KOTA MADIUN	
				Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase laporan administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu		100%	1.505.289.500,00	100%	1.976.137.500,00	100%	2.030.000.000,00	100%	2.050.000.000,00	100%	2.050.000.000,00	KOTA MADIUN	
				Sub Keg Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan		10 kali	1.201.239.500,00	10 kali	1.561.137.500,00	-	-	-	-	-	-	KOTA MADIUN	

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		-	-	-	-	4 dokumen	1.700.000.000,00	4 dokumen	1.700.000.000,00	8 dokumen	1.700.000.000,00			
				Sub Keg Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen rupa bumi		1 Dokumen	49.050.000,00	2 Dokumen	90.000.000,00	-	-		--	-	-	KOTA MADIUN		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		-	-	-	-	-	-	1 dokumen	15.000.000-	1 dokumen	15.000.000-			
				Sub Keg Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan otonomi daerah		5 dokumen	255.000.000,00	5 dokumen	325.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	KOTA MADIUN	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		-	-	-	-	7 dokumen	330.000.000,00	7 dokumen	350.000.000,00	7 dokumen	350.000.000,00			
				Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Prosentase kerjasama yang difasilitasi		100%	359.972.000,00	-	-	-	-	100%	445.000.000,00	100%	445.000.000,00	KOTA MADIUN		
				Sub Keg Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah fasilitas kerjasama yang dilaksanakan				5 kali	445.000.000,00	5 kali	445.000.000,00	5 kali	445.000.000,00	5 kali	445.000.000,00	KOTA MADIUN		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		-	-	-	-	5 dokumen	445.000.000,00	5 dokumen	445.000.000,00	5 dokumen	445.000.000,00		
				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA														
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80,08	80,01	1.164.160.000	A	1.765.101.000	A	2.004.611.100	A	2.181.121.200	A	7.114.993.300		
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	22.000.000	6 Dokumen	24.000.000	6 Dokumen	24.000.000,00		
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	22.000.000	6 Dokumen	24.000.000	6 Dokumen	24.000.000,00		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	100%	505.500.000											
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	13	505.500.000,00	13	1.099.842.780,	13	1.025.442.780,00	13	1.025.442.780,00	100%	1.025.442.780			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	100%	180.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	198.000.000,00	100%	216.000.000,00	100%	216.000.000,00			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	100 %	100%	180.000.000											
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	180.000.000,00	25	180.000.000,00	25	198.000.000,00	25	216.000.000,00	25	216.000.000,00			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentasi tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	100%	276.960.000,00	100%	385.500.000,00	100%	424.050.000,00	100%	462.600.000,00	100%	462.600.000,00	462.600.000,00		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Penyedia Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase Pemenuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang representatif	100 %	100%	276.960.000										
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	276.960.000,00	12	385.500.000,00	12	424.050.000,00	12	462.600.000,00	12	462.600.000,00		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah	100%	100%	63.000.000,00	100%	63.000.000,00	100%	63.000.000,00	100%	63.000.000,00	100%	63.000.000,00		
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000,00		
				Pengadaan Peralatan dan Mesina Lainnya	Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								3 unit	50.000.000	3 unit	50.000.000,00			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	63.000.000											
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			63.000.000	1 unit	63.000.000	1 unit	3.265.065	1 unit	80.000.000	1 unit	80.000.000			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	100%	118.700.000,00	100%	59.950.000,00	100%	65.945.000,00	100%	71.940.000,00	100%	71.940.000,00	71.940.000,00		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	22.000.000											

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			22.000.000	11 unit	22.000.000	11 unit	22.000.000	11 unit	22.000.000	11 unit	22.000.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantot yang lauk digunakan	100%	100%	87.500.000										
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi			87.500.000	1 unit	28.750.000	1 unit	28.750.000	1 unit	34.745.000	1 unit	34.745.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Sarana dan Prasarana Gedung yang Representatif	100%	100%	9.200.000										
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi			9.200.000	31 unit	9.200.000	31 unit	9.200.000	31 unit	9.200.000	31 unit	9.200.000		
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	80,08		6.849.063.710,00		7.201.761.318	80,08	7.921.937.450	80,08	8.642.113.582	80,08	8.642.113.581,60		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat	80,08		6.849.063.710		7.201.761.318	80,08	7.921.937.449	80,08	8.642.113.581	80,08	8.642.113.581,00		
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	80,08%		6.949.063.710										
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual			6.849.063.710	6 dokumen	7.201.761.318,00	6 dokumen	7.921.937.449,0	6 dokumen	8.642.113.581	6 dokumen	8.642.113.581		
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang perekonomian dan pembangunan			623.733.600,00		866.000.000		628.100.000		685.200.000		685.200.000		
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang perekonomian dan pembangunan	80,98%		483.733.600,00		571.000.000		628.100.000		685.200.000		685.200.000		
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan sesuai target	80,98 %		330.000.000										

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		2 laporan	330.000,00	2 laporan	370.000.000	2 laporan	398.550.000	2 laporan	427.100.000	2 laporan	427.100.000		
				Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan sesuai target	100 %		157.733,60										
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		3 dokumen	153.733,60	3 dokumen	201.000.000	3 dokumen	229.550.000	3 dokumen	258.100.000	3 dokumen	258.100.000		
				Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	100%	100%	140.000,00	100%	295.000.000	100%	324.500.000,00	100%	354.000.000,00	100%	354.000.000		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Presentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%		140.000,00										
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan,				2 dokumen	295.000.000	-	-	-	-	-	354.000.000		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustrian , KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja													
					BAGIAN HUKUM													
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80,9	80,01	1.733. 745.3 20	81	1.733.7 45.320	A skor	2.708.20 3.000	A skor	2.773.5 79.000	A skor	2.913.579.000		
				Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	38.92 3.200	100%	38.923. 200	100%	12.000.0 00	100%	12.000. 000	100%	12.000.000	Bagian Hukum	Kota Madiun
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja	6 Dokumen	6 Dokumen	38.92 3.200	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	-	-	6 Laporan	38.923.200	6 Laporan	12.000.000	6 Laporan	12.000.000	6 Laporan	12.000.000		
				Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	100%	1.197.330.000	100%	1.197.30.000	100%	1.998.203.000	100%	2.075.079.000	100%	2.075.079.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	100%	1.197.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	-	-	9 Orang/bulan	1.197.30.000	10 Orang/bulan	1.998.203.000	10 Orang/bulan	2.075.079.000	10 Orang/bulan	2.075.079.000		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	82,75	82,85	130.000.000	83	130.000.000	83,15	130.000.000	83,20	130.000.000	83,20	130.000.000		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	100%	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	-	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	170.000.000	100%	130.000.000	100%	270.000.000		
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lainnya yang layak digunakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	4 Unit	140.000.000	-	-	4 Unit	140.000.000		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	-	100%	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	2 Unit	20.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000		
				Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang layak digunakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	305.514.00	100%	305.551.400	100%	350.000.000	100%	375.000.000	100%	375.000.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100%	100%	305.514.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	12 Laporan	305.551.400	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	375.000.000	12 Laporan	375.000.000		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	100%	100%	41.940.720	100%	41.940.720	100%	48.000.000	100%	51.500.000	100%	51.500.000		
				Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	20.547.600	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	-	-	4 Unit	20.547.600-	4 Unit	26.500.000	8 Unit	30.000.000	8 Unit	30.000.000		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	100%	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	1 Unit	2.500.000	1 Unit	2.500.000	1 Unit	2.500.000	1 Unit	2.500.000		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya	Prosentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	100%	18.893.120	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	-	-	-	40 Unit	18.893.120	40 Unit	19.000.000	40 Unit	19.000.000	40 Unit	19.000.000		
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	870.852.680	100%	997.778.880	100%	1.205.702.000	100%	1.205.702.000	100%	1.205.702.000		
				Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang disusun	100%	100%	870.852.680	100%	997.778.880	100%	1.205.702.000	100%	1.205.702.000	100%	1.205.702.000		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Perda/Raperda	19 Perda/Raperda	19 Perda/Raperda	388.850.080	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	20 Dokumen	-	-	20 Dokumen	388.850.080	20 Dokumen	422.750.000	20 Dokumen	422.750.000	20 Dokumen	422.750.000		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum	3 kegiatan	3 kegiatan	282.928.800	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus			1 Kasus	282.928.800	20 Kasus	337.502.000	20 Kasus	337.502.000	20 Kasus	337.502.000			
					Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah	3 jenis	3 jenis	199.073.800	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Sub Kegiatan Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen	-	-	400 Dokumen	326.000.000	400 Dokumen	445.450.000	400 Dokumen	445.450.000	400 Dokumen	445.450.000			
				BAGIAN UMUM															
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80,01	80,01	24.544.397.355,00	80,01	38.232.357.247	80,01	35.463.703.320	80,01	37.905.000.000	80,01	37.905.000.000	Bagian Umum	Kota Madiun	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	145.008.000,00	100%	145.008.000.000	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	-	-	-	6 dokumen	145.008.000.000	6 dokumen	5.000.000,00	6 dokumen	5.000.000,00	6 dokumen	5.000.000,00			

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	100%	9.985.034.800,00	100%	10.739.383.967	100%	12.616.719.810	100%	11.500.000.000	100%	11.500.000.000		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang	10.739.383.967	125 orang	12.616.719.810	125 orang	11.500.000.000	125 orang	11.500.000.000		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	100%	100%	2.581.930.770,00	100%	4.905.645.120	100%	8.294.786.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				4 paket	4.905.645.120	3 paket	8.294.786.000	3 paket	10.000.000.000	3 paket	10.000.000.000		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	100%	995.910.600,00	100%	2.238.407.600	100%	2.338.407.600	100%	2.250.000.000	100%	2.250.000.000		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				324 laporan	1.988.407.600	324 laporan	2.088.407.600	324 laporan	2.000.000.000	324 laporan	2.000.000.000		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	424.515.790,00	100%	7.732.845.000	100%	936.055.320	100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000		
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-	16 unit	7.498.300.000	41 unit	829.000.000	1 unit	500.000.000,00	1 unit	500.000.000		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 unit	85.150.000	26 unit	15.800.000	3 unit	500.000.000	3 unit	500.000.000		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	43 unit	149.395.000	69 unit	91.255.320	5 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4.951.372.100,00	100%	5.196.731.035	100%	4.686.554.640	100%	5.500.000.000,00	100%	5.500.000.000		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 laporan	5.196.731.035	12 laporan	4.686.554.640	12 laporan	5.500.000.000,00	12 laporan	5.500.000.000		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	100%	2.110.638.845,00	100%	2.229.816.895	100%	1.657.211.450	100%	2.275.000.000,00	100%	2.275.000.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				188 unit	1.479.816.895	94 unit	868.174.950	94 unit	1.500.000.000,00	94 unit	1.500.000.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				1 unit	900.000.000	1 unit	500.000.000,00	1 unit	500.000.000,00	1 unit	500.000.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				233 unit	250.000.000	129 unit	289.036.500	129 unit	275.000.000,00	129 unit	275.000.000		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	853.575.520,00	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 orang/bulan	400.000.000	2 orang/bulan	400.000.000,00	2 orang/bulan	400.000.000,00	2 orang/bulan	400.000.000		
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 orang/bulan	600.000.000	2 orang/bulan	600.000.000,00	2 orang/bulan	600.000.000,00	2 orang/bulan	600.000.000		
				Kegiatan Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase rumah tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.769.824.050,00	100%	1.871.503.250	100%	2.000.000.000	100%	1.875.000.000,00	100%	1.875.000.000		
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 paket	1.010.792.150	1 paket	1.100.000.000,00	1 paket	925.000.000,00	1 paket	925.000.000		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 paket	550.000 .000	1 paket	575.000. 000,00	1 paket	600.000 .000,00	1 paket	600.000.000			
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 paket	310.711 .100	1 paket	325.000. 000,00	1 paket	350.000 .000,00	1 paket	350.000.000			
				Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi keprotokola n pimpinan	100%	100%	726.5 86.88 0,00	100%	2.173.0 16.380	100%	1.928.96 8.500	100%	2.350.0 00.000, 00	100%	2.350.000.000			
				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	500 kali	500 kali	726.5 86.88 0,00	500 kali	2.173.0 16.380	500 laporan	1.928.96 8.500	500 laporan	2.350.0 00.000, 00	500 laporan	2.350.000.000			
				BAGIAN ORGANISASI															
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI EVALUASI IMPLEMENT ASI SAKIP SETDA			2.225. 206.2 53		2.610.6 46.998		3.326.46 7.500		3.331.4 67.500		3.331.467.500			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan , Pengendalia n dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%		100%	15.000. 000	100%	20.000.0 00	100%	25.000. 000	100%	25.000.000	Bagian Organisasi	Kota Madiun	

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Dokumen	20.000.000,00	6 Dokumen	25.000.000,00	6 Dokumen	25.000.000,00	6 Dokumen	25.000.000,00		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan		100%	396.509.500,00	100%	437.447.500,00	100%	485.567.500,00	100%	485.567.500,00	100%	485.567.500,00		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	100%	396.509.500	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	9 orang	437.447.500,00	9 orang	485.567.500,00	9 orang	485.567.500,00	9 orang	485.567.500,00		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	82,75	82,85	73.354.000,00	83	167.326.280,00	83,15	295.500.000,00	83,20	295.500.000,00	83,20	295.500.000,00		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	100%	73.354.000	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	12 laporan	167.326.280,00	12 laporan	295.500.000	12 laporan	295.500.000	12 laporan	295.500.000		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	212.847.108,00	100%	212.847.108,00	100%	239.250.000,00	100%	239.250.000,00	100%	239.250.000,00		
				Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	100%	100%	212.847.108										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 laporan	212.847.108,00	12 laporan	239.250.000,00	12 laporan	239.250.000,00	12 laporan	239.250.000,00		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	55.376.925,00								55.376.925,00		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								1 unit	34.837.905	1 unit	34.837.905			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							2 unit	14.604.714	2 unit	14.604.714				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin		2 unit	55.376.925	-	-	-	-	-	-	-	-	55.376.925		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 unit	23.600.000	2 unit	23.600.000	-	-			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	100%	100%	36.768.000,00	100%	33.873.000,00	100%	48.792.000,00	100%	48.792.000,00	100%	48.792.000,00			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Perorangan / Jabatan yang Layak Digunakan	100%	100%	20.427.000	-	-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	6 unit	18.963.000,00	6 unit	27.315.000,00	6 unit	27.315.000,00	6 unit	27.315.000,00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	100%	1.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	-	-	-	1 unit	1.680.000,00	1 unit	2.420.000,00	1 unit	2.420.000,00	1 unit	2.420.000,00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana / Prasarana Gedung Yang Layak Digunakan	100%	100%	14.661.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	-	-	-	21 unit	13.230.000,00	21 unit	19.057.000,00	21 unit	19.057.000,00	21 unit	19.057.000,00		
				Kegiatan Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	28.1 (Sedang)	28.2 (Sedang)	1.450.350.720,00	28.3 (Sedang)	1.744.153.110,00	28.4 (Sedang)	2.237.358.000,00	28.5 (Sedang)	2.237.358.000,00	28.5 (Sedang)	2.237.358.000,00		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Besar dan Urusan Kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	348.096.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	-	2 dokumen	450.000.000,00	2 dokumen	500.000.000	2 dokumen	500.000.000	2 dokumen	500.000.000		
				Peningkatan Kinerja dan Keformasi Birokrasi	Persentase kecukupan dokumen kinerja yang disusun dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	431.046.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	2 dokumen	549.000.000,00	2 dokumen	642.150.000	2 dokumen	642.150.000	2 dokumen	642.150.000		
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	2,7 indeks	2,7 indeks	671.208.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	2 dokumen	745.153.110,00	2 dokumen	1.095.208.000	2 dokumen	1.095.208.000	3,15 (baik)	1.095.208.000		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN														
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	-	-	-	-	2.594.471.000,00	-	22.964.340.432,00	-	2.230.000.000,00	-	2.230.000.000	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	Kota Madiun
				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	23.706.000,00	100%	41.636.000,00	100%	14.358.960,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	21 dokumen	21 dokumen	23.706.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-	12 laporan	41.636.000,00	12 laporan	14.358.960,00	12 laporan	15.000.000,00	12 laporan	15.000.000,00		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	100%	935.367.500,00	100%	1.233.270.000,00	100%	1.596.391.040,00	100%	1.600.000.000,00	100%	1.600.000.000,00		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	100%	935.367.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	15 Orang/Bulan	1.233.270.000,00	15 Orang/Bulan	1.596.391.040,00	15 Orang/Bulan	1.600.000.000,00	15 Orang/Bulan	1.600.000.000,00		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	100%	95.798.950,00	100%	98.194.000,00	100%	98.194.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	100%	95.798.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	12 laporan	98.194.000,00	12 laporan	98.194.000,00	12 laporan	100.000.000,00	12 laporan	100.000.000,00		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100%	100%	356.249.710,00-	100%	4.300.000,00	100%	152.917.633,00	100%	100.000.000,00	100%	80.000.000,00		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	3 Unit	110.000.000,00						
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100%	100%	356.249.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	4.300.000,00	5 Unit	42.917.633,00	8 Unit	80.000.000,00	8 Unit	80.000.000,00		
				Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	100%	287.747.626,00	100%	363.091.000,00	100%	297.748.799,00	100%	365.000.000,00	100%	365.000.000,00		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/pe rlengkapan kantor yang representatif	100%	100%	287.747.626,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 laporan	363.091.000,00	12 laporan	297.748.799,00	12 laporan	365.000.000,00	12 laporan	365.000.000,00		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan		100%	29.296.958,00	100%	853.980.000,00	100%	804.730.000,00	100%	70.000.000,00	100%	70.000.000,00		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100%	100%	14.946.958,00										
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		-	-	7 unit	15.321.000,00	7 unit	19.321.000,00	7 unit	20.000.000,00	7 unit	20.000.000,00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	100%	2.000.000,00										

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		-	-	1 unit	826.000.000,00	1 unit	766.250.000,00	1 unit	30.000.000,00	1 unit	30.000.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100%	100%	12.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	-	-	-	40 unit	12.659.000,00	40 unit	19.159.000,00	40 unit	20.000.000,00	40 unit	20.000.000	-	-
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	781.786.292,00	100%	600.700.000,00	100%	830.000.000,00	100%	915.000.000,00	100%	915.000.000	-	-
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	100%	100%	389.403.983,00	100%	130.300.000,00	100%	141.905.000,00	100%	154.599.000,00	100%	154.599.000	-	-

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2 dokumen	2 dokumen	299.080.438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-	1 dokumen	299.080.438,00	1 dokumen	28.500.000	1 dokumen	29.925.000	1 dokumen	31.421.000	4 dokumen	31.421.000		
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pembangunan yang terealisasi sesuai target	12 dokumen	12 dokumen	90.323.545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	12 laporan	101.800.000,00	12 laporan	111.980.000,00	12 laporan	123.178.000,00	48 laporan	123.178.000		
				Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Presentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	100%	100%	392.382.309	100%	470.400.000	100%	485.383.000	100%	500.944.000	100%	500.944.000		

1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tender/seleksi yang dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan perundang-undangan	100%	100%	166.388.129,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	12 dokumen	185.850.000	12 dokumen	195.142.000,00	12 dokumen	204.899.000,00	48 dokumen	204.899.000		
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase tender/seleksi yang terumumkan di sistem LPSE	100%	100%	225.994.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	12 dokumen	284.550.000	12 dokumen	290.241.000,00	12 dokumen	296.045.000,00	48 dokumen	296.045.000		

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	-Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	A (30,05)	A (31,00)	A (31,5)	A (32,0)	A (32,0)
2.	Perentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya bernilai A	-	-	80%	81%	81,5%	82%	82%
3.	Nilai Rerata Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	80	81	82	82
4.	Persentase Penyelenggara Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya bernilai Baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	-	-	82,75	83	83,25	83,50	83,50

Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Indeks reformasi birokrasi	(B) 67,34	(B) 65,55	(B) 67	(B) 68	(B) 69	(BB) 70,01	(BB) 70,01	Lanjutan Indikator Tujuan Kota
2.	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	B (63,5)	BB (70,01)	BB (73)	BB (76)	BB (79)	A (80,01)	A (80,01)	Lanjutan indikator sasaran kota
3.	Persentase Penyediaan data dan informasi yang mutakhir, valid, komprehensif, aman, transparan dan cepat dalam rangka fasilitasi pengambilan keputusan	-	-	100%					Indikator Tujuan PD
4.	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,3056 Sangat Tinggi	3,385 Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Lanjutan Indikator Sasaran Kota

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	82,85 (baik)	85,501 (baik)	82,85 (baik)	83 (baik)	85 (baik)	86 (baik)	86 (baik)	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
6.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	B	C	B	B	B	B	Indikator Sasaran Rutin Semua PD dan Indikator Tujuan Kecamatan
7.	Nilai evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A	Indikator Program Rutin Semua PD
8.	Persentase Indeks RB Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun bernilai baik	-	-	70%	72%	74%	76%	78%	Indikator Tujuan PD
9.	Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun yang berpredikat BB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
10.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			80,08				80,08	Indikator Program PD
12.	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan			80,98				80,98	Indikator Program PD
14.	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
15.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd
16.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	3,93%	21,52%	21,55%	21,60%	21,65%	21,70%	21,70%	Lppd
17.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	83,35%	87,42%	87,50%	87,60%	87,70%	87,80%	87,80%	Lppd
18.	Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kota (LKJ Kota) Sesuai Target yang ditetapkan	-	74%	-	-	-	-	74%	Indikator Lama
19.	Persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
20.	Persentase OPD yang melaporkan progres fisik dan keuangan tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
21.	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	-	15	-	-	-	-	15	Indikator Lama
22.	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23.	Nilai IKM Bagian Umum	-	81	-	-	-	-	81	Indikator Lama
24.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Administrasi dan Keuangan	-	81	-	-	-	-	81	Indikator Lama
25.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Kerumahtanggaan	-	81	-	-	-	-	81	Indikator Lama
26.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang keprotokolan dan kepegawaian	-	81	-	-	-	-	81	Indikator Lama
27.	Pelayanan di bidang Hukum	-	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis	Indikator Lama
28.	Persentase Pencapaian Kinerja Pemerintahan Tepat waktu	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
29.	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	-	105	-	-	-	-	105	Indikator Lama
30.	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat syarat	-	6 dokumen	-	-	-	-	6 dokumen	Indikator Lama
31.	Jumlah Perjanjian Kerjasama	-	10 Kerjasama	-	-	-	-	10 Kerjasama	Indikator Lama
32.	Persentase Produk Hukum yang Berkualitas	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
33.	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	-	2,75	-	-	-	-	2,75	Indikator Lama
34.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
35.	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerja Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah Bernilai Sangat Baik (≥ 100)	-	94,12	-	-	-	-	94,12	Indikator Lama
36.	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
37.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	-	0	-	-	-	-	0	Indikator Lama
38.	Jumlah kegiatan pendukung aktivitas ekonomi	-	4	-	-	-	-	4	Indikator Lama
39.	Jumlah kegiatan terkait penyelesaian peredaran rokok ilegal	-	2	-	-	-	-	2	Indikator Lama
40.	Tingkat Inflasi	-	1,8	-	-	-	-	1,8	Indikator Lama
41.	Persentase Kelompok Sosial Ekonomi yang difasilitasi	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
42.	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai Yang Dilaksanakan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN KEDUA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024

Permasalahan Sekretariat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Permasalahan
1	Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum optimal
2	Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya
3	Dalam analisis pengarusutamaan gender, keterlibatan perempuan dalam politik masih rendah
4	Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
7	Struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8	Seringnya terjadi perubahan peraturan perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah
9	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10	Semakin besarnya volume kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
11	Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12	Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai organisasi yang inferior

Isu Strategis Sekretraiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Isu Strategis
1	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis system informasi dan teknologi serta inovasi.
2	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3	Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk mencapai ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi.

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di Dukung
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun

Tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang profesional	Persentase Terpenuhinya Hak Keuangan dan Administratif DPRD sesuai ketentuan Peratuarn Perundang-Undangan)	-	-	100	-	-
		Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80	80	80	85	86

Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	80,01 (A)	80,50 (A)	-	-
2	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan administrasi umum	Persentase tertib administrasi	-	100 %	100 %	100 %	100 %
3	meningkatkan kualitas SDM	Persentase kompetensi sumber daya manusia	-	100 %	100 %	100 %	100 %
4	meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	84	-	-
		Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas	-	100 %	100 %	100 %	100 %
5	meningkatkan kualitas fasilitasi perundang-undangan	Persentase fasilitasi penyusunan produk huikum yang sesuai dengan standar pelayanan	-	100 %	100 %	100 %	100 %
6	meningkatkan kualitas fasilitasi penganggaran APBD	Persentase fasilitasi penganggaran APBD yang sesuai dengan standar pelayanan	-	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Meningkatnya kualitas fasilitasi pelaksanaan pengawasan penggunaan anggaran	Persentase fasilitasi pengawasan pelaksanaan APBD yang sesuai dengan standar pelayanan	-	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	-	25,75 (BB)	26,25 (BB)	27,25 (A)	27,30 (A)

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
				2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
				Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tujuan: Terwujudnya pelayanan sekretariat DPRD yang profesional			Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	80		80		85		86		86		
Sasaran(1):Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran			Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80,01 (A)		80,50 (A)		81,00 (A)		81,50 (A)		81,50 (A)		
Sasaran(2):Meningkatkan kualitas administrasi keuangan dan administrasi umum			Persentase tertib administrasi	100%		100%		100%		100%		100%		
Sasaran(3) meningkatkan kualitas SDM			Persentase kompetensi SDM	100%		100%		100%		100%		100%		
Sasaran (4) meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan			Persentase sarpras yang berkualitas	100%		100%		100%		100%		100%		
Sasaran(5) meningkatnya kualitas fasilitasi perundang-undangan			Persentase fasilitasi penyusunan produk hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	100%		100%		100%		100%		100%		

Tujuan / Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi			
							2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
							Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan		
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Sasaran(6) meningkatkan kualitas fasilitasi penganggaran APBD						Persentase fasilitasi penganggaran APBD yang sesuai dengan standar pelayanan	100%		100%		100%		100%		100%			
Sasaran(7) Meningkatnya kualitas fasilitasi pelaksanaan pengawasan penggunaan anggaran						Persentase fasilitasi pengawasan pelaksanaan APBD yang sesuai dengan standar pelayanan	100%		100%		100%		100%		100%			
Sasaran(8) Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah						Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	25,75 (BB)		26,25 (BB)		27,25 (A)		27,30 (A)		27,30 (A)			
		02				SEKRETARIAT DPRD		Rp 40.888.776.863		Rp 41.213.913.217		Rp 38.653.217.556		Rp 51.354.678.755		Rp 51.354.678.755		
	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	80,01 (A)	Rp 28.062.224.608	80,50 (A)	Rp 26.626.426.832	81,00 (A)	Rp 26.399.381.136	81,50 (A)	Rp 34.049.837.565	81,50 (A)	Rp 34.049.837.565		
	4	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 57.492.240	100%	Rp 181.303.736	100%	Rp 75.329.977	100%	Rp 82.862.975	100%	Rp 82.862.975		

Tujuan / Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
								2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
								Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4	02	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/RKA/PK)	6 Dokumen	Rp 57.492.240	6 Dokumen	Rp 181.303.736	6 Dokumen	Rp 75.329.977	6 Dokumen	Rp 82.862.975	6 Dokumen	Rp 82.862.975	SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN
	4	02	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	Rp 2.202.117.518	100%	Rp 2.495.474.176	100%	Rp 3.679.743.078	100%	Rp 4.047.717.386	100%	Rp 4.047.717.386	
	4	02	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	100%	Rp 2.202.117.518	100%	Rp 2.495.474.176							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					19 orang/bulan	Rp 3.679.743.078	19 orang/bulan	Rp 4.047.717.386	19 orang/bulan	Rp 4.047.717.386	
	4	02	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100%	Rp 31.686.336	100%	Rp 31.686.336	100%	Rp 291.087.294	100%	Rp 297.569.183	100%	Rp 297.569.183	
	4	02	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	Rp 29.700.000	100%	Rp 29.700.000							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1 Paket	Rp 64.818.894	1 Paket	Rp 71.300.783	1 Paket	Rp 71.300.783	

Tujuan / Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi			
								2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
								Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan		Target	pendanaan	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	4	02	01	2.05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Peserta yang Paham	100%	Rp 1.986.336	100%	Rp 1.986.336							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan					19 Orang	Rp 226.268.400	19 Orang	Rp 226.268.400	19 Orang	Rp 226.268.400		
	4	02	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi ASN	100%	Rp 715.563.000	100%	Rp 736.655.000	100%	Rp 937.733.258	100%	Rp 937.733.258	100%	Rp 937.733.258		
	4	02	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas/Operasional ASN	100%	Rp 715.563.000	100%	Rp 736.655.000							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					44 Laporan	Rp 937.733.258	44 Laporan	Rp 937.733.258	44 Laporan	Rp 937.733.258		
	4	02	01	2.07		Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	100%	Rp 1.140.525.325	100%	Rp 124.750.000	100%	Rp 348.489.090	100%	Rp 355.458.872	100%	Rp 355.458.872		

Tujuan / Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi			
								2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
								Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan		Target	pendanaan	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	4	02	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpenuhi	100%	Rp 1.140.525.325	100%	Rp 124.750.000							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan					10 Unit	Rp 348.489.090	1 Unit	Rp 355.458.872	1 Unit	Rp 355.458.872		
	4	02	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	100%	Rp 2.826.180.687	100%	Rp 2.485.552.892	100%	Rp 2.536.057.009	100%	Rp 2.586.778.149	100%	Rp 2.586.778.149		
	4	02	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp 2.826.180.687	100%	Rp 2.485.552.892							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					24 Laporan	Rp 2.536.057.009	24 Laporan	Rp 2.586.778.149	24 Laporan	Rp 2.586.778.149		
	4	02	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peralatan atau Aset Kantor yang Dipelihara	100%	Rp 1.496.996.322	100%	Rp 838.466.180	100%	Rp 713.401.390	100%	Rp 838.600.413	100%	Rp 838.600.413		

Tujuan / Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi			
								2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
								Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan		Target	pendanaan	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	4	02	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Kendaraan Dinas yang Layak Digunakan	100%	Rp 319.961.570	100%	Rp 296.474.810							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					26 Unit	Rp 308.841.290	26 Unit	Rp 315.018.116	26 Unit	Rp 315.018.116		
	4	02	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Peralatan Gedung Kantor yang Layak Digunakan	100%	Rp 315.391.900	100%	Rp 252.354.600							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					179 Unit	Rp 330.921.350	186 Unit	Rp 337.539.777	186 Unit	Rp 337.539.777		
	4	02	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Gedung Kantor yang Layak Digunakan	100%	Rp 861.642.852	100%	Rp 289.636.770							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN	

Tujuan / Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
								2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
								Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					6 Unit	Rp 73.638.750	6 Unit	Rp 186.042.520	6 Unit	Rp 186.042.520	
	4	02	01	2.15		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	100%	Rp 13.747.408.350	100%	Rp 15.980.033.562	100%	Rp 15.912.152.890	100%	Rp 17.492.868.179	100%	Rp 17.492.868.179	
	4	02	01	2.15	01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terpenuhinya Hak Keuangan DPRD	12 Bulan	Rp 13.388.553.750	12 Bulan	Rp 15.591.621.870							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD					30 Orang/Bulan	Rp 15.553.173.870	30 Orang/Bulan	Rp 17.108.491.257	30 Orang/Bulan	Rp 17.108.491.257	
	4	02	01	2.15	02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Dicumkupi	5 Jenis	Rp 277.854.600	5 jenis	Rp 283.411.692							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan					2 Paket	Rp 253.979.020	2 Paket	279.376.922	2 Paket	Rp 279.376.922	
	4	02	01	2.15	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terpenuhinya Hak Layanan Kesehatan DPRD	1 kali/orang	Rp 81.000.000	1 kali/orang	Rp 105.000.000							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN

Tujuan / Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
								2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
								Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD					30 Orang	Rp 105.000.000	30 Orang	Rp 105.000.000	30 Orang	Rp 105.000.000	
	4	02	01	2.16		Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%	Rp 5.844.254.830	100%	Rp 3.752.504.950	100%	Rp 1.905.387.150	100%	Rp 7.410.249.150	100%	Rp 7.410.249.150	
	4	02	01	2.16	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi	4 Dokumen	Rp 38.496.150	4 Dokumen	Rp 37.327.950							SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD					8 Laporan	Rp 37.957.150	8 Laporan	Rp 37.957.150	8 Laporan	Rp 37.957.150	
	4	02	01	2.16	03	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas/Operasional DPRD	100%	Rp 5.805.758.680	100%	Rp 3.715.177.000							SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					12 Laporan	Rp 1.867.430.000	28 Laporan	Rp 7.372.292.000	28 Laporan	Rp 7.372.292.000	
	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi DPRD	79 Skor	Rp 12.826.552.255	80 Skor	Rp 14.587.486.385	81 Skor	Rp 12.253.836.420	82 Skor	Rp 17.304.841.190	82 Skor	Rp 17.304.841.190	

Tujuan / Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
								2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
								Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Prosentase terpenuhinya fasilitasi fungsi DPRD di bidang Perundang-undangan dan Publikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku					100%		100%		100%		
							Prosentase terpenuhinya fasilitasi fungsi DPRD di bidang anggaran dan pengawasan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku					100%		100%		100%		
	4	02	02	2.01		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	100%	Rp 5.979.806.800	100%	Rp 5.483.315.700	100%	Rp 4.781.493.140	100%	Rp 8.584.013.750	100%	Rp 8.584.013.750	
	4	02	02	2.01	02	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang Dibahas	19 Raperda	Rp 5.034.898.800	24 Raperda	Rp 3.732.587.100							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					21 Dokumen	Rp 3.218.753.660	21 Dokumen	Rp 4.245.176.690	21 Dokumen	Rp 4.245.176.690	

Tujuan / Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
								2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
								Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan		Target	pendanaan
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4	02	02	2.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang Dilaksanakan	3 dokumen	Rp 944.908.000	3 dokumen	Rp 1.750.728.600	6 dokumen	Rp 1.562.739.480	6 dokumen	Rp 4.338.837.060	6 dokumen	Rp 4.338.837.060	SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN
	4	02	02	2.02		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	100%	Rp 899.228.000	100%	Rp 1.391.589.000	100%	Rp 1.516.935.100	100%	Rp 1.685.432.400	100%	Rp 1.685.432.400	
	4	02	02	2.02	03	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Pembahasan KUA-PPAS, KUPA-PPASP dan APBD, PAPBD sesuai jadwal/tepat waktu	4 Dokumen	Rp 899.228.000	4 Dokumen	Rp 1.391.589.000							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD					5 Dokumen	Rp 1.516.935.100	5 Dokumen	Rp 1.685.432.400	5 Dokumen	Rp 1.685.432.400	
	4	02	02	2.03		Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	100%	Rp 366.095.400	100%	Rp 1.296.299.875	100%	Rp 574.554.900	100%	Rp 574.554.900	100%	Rp 574.554.900	
	4	02	02	2.03	06	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan	Rekomendasi DPRD atas Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	1 Dokumen	Rp 114.821.200	1 Dokumen	Rp 398.977.750							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN

Tujuan / Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
								2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
								Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					1 Dokumen	Rp 338.831.780	1 Dokumen	Rp 338.831.780	1 Dokumen	Rp 338.831.780	
	4	02	02	2.03	07	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pembahasan LKPJ dan LPJ yang tepat waktu	2 Dokumen	Rp 251.274.200	2 Dokumen	Rp 897.322.125							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran					1 Dokumen	Rp 235.723.120	1 Dokumen	Rp 235.723.120	1 Dokumen	Rp 235.723.120	
	4	02	02	2.04		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	100%	Rp 4.542.826.705	100%	Rp 5.284.244.140	100%	Rp 4.204.257.280	100%	Rp 5.284.244.140	100%	Rp 5.284.244.140	
	4	02	02	2.04	02	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah bimbingan teknis yang dilakukan	6 bimtek	Rp 2.241.785.920	6 bimtek	Rp 2.878.004.500							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					6 Dokumen	Rp 2.003.790.000	6 Dokumen	Rp 2.878.004.500	6 Dokumen	Rp 2.878.004.500	
	4	02	02	2.04	03	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan	50 Kegiatan	Rp 1.498.204.795	50 Kegiatan	Rp 1.367.704.160							SEKRETA RIAT DPRD KOTA MADIUN

Tujuan / Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
								2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
								Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1				120 Dokumen	Rp 1.307.556.800	120 Dokumen	Rp 1.367.704.160	120 Dokumen	Rp 1.367.704.160	
	4	02	02	2.04	07	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Program Kerja DPRD Tepat Waktu	2 Dokumen	Rp 802.835.990	2 Dokumen	Rp 1.038.535.480							SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD					1 Dokumen	Rp 892.910.480	1 Dokumen	Rp 1.038.535.480	1 Dokumen	Rp 1.038.535.480	
	4	02	02	2.05		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD	100%	Rp 1.038.595.350	100%	Rp 1.132.037.670	100%	Rp 1.176.596.000	100%	Rp 1.176.596.000	100%	Rp 1.176.596.000	
	4	02	02	2.05	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang diserap	90 Dokumen	Rp 1.038.595.350	90 Dokumen	Rp 1.132.037.670							SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					90 Dokumen	Rp 1.176.596.000	90 Dokumen	Rp 1.176.596.000	90 Dokumen	Rp 1.176.596.000	

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-		80,01 (A)	80,50 (A)	81,00 (A)	81,50 (A)	81,50 (A)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	-	84	-	-	84
3	Persentase Tertib Administrasi	-		100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia	-		100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Sarana dan Prasarana yang berkualitas	-		100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	-		100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Fasilitasi Penganggaran APBD yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	-		100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	-		100%	100%	100%	100%	100%
9	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah			25,75 (BB)	26,25 (BB)	27,25 (A)	27,30 (A)	27,30 (A)

Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	80	80	85	86	86	Indikator Tujuan PD	
2	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah		-	80,01 (A)	80,50 (A)	81,00 (A)	81,50 (A)	81,50 (A)	Indikator Sasaran PD	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	-	84	-	-	84	Indikator Sasaran PD	
4	Persentase Tertib Administrasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Sarana dan Prasarana yang berkualitas	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
8	Persentase Fasilitasi Penganggaran APBD yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
9	Persentase Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
10	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah			25,75 (BB)	26,25 (BB)	27,25 (A)	27,30 (A)	27,30 (A)	Indikator Sasaran PD
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	81,29	90,42	79	80	81	82	82	Indikator Program PD
12	Prosentase terpenuhinya fasilitasi fungsi DPRD di bidang Perundang-undangan dan Publikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku			100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
13	Prosentase terpenuhinya fasilitasi fungsi DPRD di bidang anggaran dan pengawasan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku			100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
14	Persentase Terpenuhinya Hak Keuangan dan Administratif DPRD sesuai ketentuan Peratuarn Perundang-Undangan)	-	-	-	100%	-	-	100%	Indikator Tujuan PD lama
15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	-	80	-	-	-	-	80	Indikator Lama

C. DINAS PENDIDIKAN

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Dinas Pendidikan

No	Permasalahan
1	Adanya lembaga Paud yang belum terakreditasi
2	Belum optimalnya pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
3	Kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar, termasuk belum terpenuhinya rasio jumlah lembaga dengan jumlah pengawas sekolah.
4	Terbatasnya kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama

Isu Strategis Dinas Pendidikan

No	Isu Strategis
1	Belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Nasional Pendidikan.
2	Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkomten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada jenjang Sekolah Dasar

Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah

Tujuan Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya kualitas pendidikan yang berstandart nasional dan berkelanjutan	Persentase pencapaian menuju Standart Nasional Pendidikan (SNP)	86%	86%	100%	100%	100%

	berbasis teknologi	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik			65%	66%	67%
		Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Dasar			100%	100%	100%

Sasaran Dinas Pendidikan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2020	2022	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks RB	-	-	10,10 skor	16,10 skor	18,10 skor
2	Meningkatnya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi	persentase siswa yang memenuhi passing grade	-	-	-	100%	100%
		jumlah siswa yang memiliki hasil belajar yang sesuai standar	-	-	3290 orang	3290 orang	3290 orang
3	Meningkatnya implementasi kurikulum di sekolah	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	-	-	-	100%	100%
		Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	-	-	100%	100%	100%
4	Meningkatnya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional	Persentase sekolah yang dikelola dengan baik	-	-	-	100%	100%
		Persentase sekolah yang memenuhi SNP	-	-	100%	100%	100%

No.	Sasaran	Indikator	2020	2022	2022	2023	2024
5	Meningkatkan pengelolaan pembiayaan pendidikan sesuai standar Nasional	Persentase sekolah yang pembiayaannya terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan bersertifikasi	-	-	-	67%	68%
		Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompetensi	-	-	65%	66%	67%
7	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart Nasional	persentase sarpras sekolah yang terpenuhi standar ruang kelas dan dalam kondisi baik	-	-	-	80%	90%
		APM Paud, SD, dan SMP	100%	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatnya keberlanjutan pendidikan penduduk kurang mampu	Jumlah pendidikan penduduk kurang mampu ke jenjang lebih tinggi	-	-	-	1000 Mahasiswa	1000 Mahasiswa

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
								2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah				
								Targ et	Pendanaan	Targ et	Pendanaan	Targ et	Pendana an	Targ et	Pendanaan	Targ et	Pendanaan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Terwujud nya kualitas pendidikan yang berstandar mutu dan berkelanjutan berbasis Teknologi	Persentase pencapaian menuju Standart Nasional Pendidikan (SNP)	Meningkat nya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai sapik perangkat daerah	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
				1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			321.442.652.241		278.077.536.522		340.162.887.205		342.209.605.125		1.281.892.681.093	
				1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Skor	A Skor	199.816.763.917	A Skor	205.213.092.252	A Skor	202.345.219.300	A Skor	202.345.219.300	A Skor	809.720.294.769
				1	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100%	6.175.801.107	100	7.678.390.464	100	7.925.625.000	100	7.925.625.000	100	29.705.441.571
				1	011	002	201	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6 laporan	6.175.801.107	6 laporan	7.678.390.464	6 laporan	7.925.625.000	6 laporan	7.925.625.000	6 laporan	29.705.441.571
				1	1	1	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100%	186.058.357.958	100%	189.482.568.348	100%	186.278.180.000	100%	186.278.180.000	100%	748.097.286.306
		Meningkat nya implementasi	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai	1	011	002	201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1540	186.058.357.958	1549	189.482.568.348	1549	186.278.180.000	1549	186.278.180.000	1549	748.097.286.306
				1	1	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi	%	100%	6.398.798.452	100%	7.372.908.340	100%	6.412.189.200	100%	6.412.189.200	100%	26.596.085.192

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
		kurikulum di sekolah Meningkatkan nya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional	standar mutu Persentase sekolah yang dikelola dengan baik	1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	35	6.122.093.152	37	7.091.958.340	37	6.131.239.200	37	6.131.239.200	37	25.476.529.892
				1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	144	276.705.300	148	280.950.000	148	280.950.000	148	280.950.000	148	1.119.555.300
		Meningkatkan pengelolaan pembiayaan pendidikan sesuai standart Nasional	Persentase sekolah yang pembiayaannya terpenuhi	1	0	0	2	1													
				1	1	1	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100%	537.906.400	100%	-	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	2.537.906.400
				1	0	0	2	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1.000.000.000		-		1.000.000.000	
		Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan bersertifikasi	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan bersertifikasi	1	0	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	48	537.906.400		-			50	1.000.000.000	50	1.537.906.400
				1	1	1	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100%	645.900.000	100%	679.225.100	100%	729.225.100	100%	729.225.100	100%	2.783.575.300
		Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standart Nasional	persentase sarpras sekolah yang terpenuhi standar ruang kelas dan dalam kondisi baik	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	215	146.100.000	216	147.242.800	216	167.242.800	216	167.242.800	216	627.828.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1 0 1 1 0 9	2 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	329.000.000	1	382.278.000	1	382.278.000	1	382.278.000	1	1.475.834.000
		Meningkatnya keberlanjutan pendidikan penduduk kurang mampu	Jumlah pendidikan penduduk mampu ke jenjang lebih tinggi	1 1 1 0 9	2 1 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	907	170.800.000	206	149.704.300	206	179.704.300	206	179.704.300	206	679.912.900
				1 1 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	wajib belajar 9 tahun		100%	119.094.672.764	100%	67.421.236.524	100%	129.743.179.643	100%	131.784.897.563	100%	448.043.986.494
				1 1 2	2 0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP		100%	76.664.784.769	100%	29.604.852.641	100%	61.239.558.500	100%	61.239.558.500	100%	228.748.754.410
				1 1 2 0 1	2 0 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	49	13.476.463.000	16	4.321.694.150	119	32.388.500.000	119	32.388.500.000	303	82.575.157.150
				1 1 2 0 1	2 1 6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket/Unit	1	36.621.250.000		-	1	-		-		36.621.250.000
				1 1 2 0 1	2 2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	335.096.670	1	360.480.445	1	465.096.000	1	465.096.000	1	1.625.769.115
				1 1 2 0 1	2 2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	146.350.000	1	136.576.723	1	172.350.000	1	172.350.000	1	627.626.723
				1 1 2 0 1	2 2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	133.320.000	1	208.175.500	1	237.320.000	1	237.320.000	1	816.135.500
				1 1 2 0 1	2 2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	369.531.000	1	285.565.150	1	395.531.000	1	395.531.000	1	1.446.158.150
				1 1 2 0 1	2 2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	198.129.000	1	167.915.638	1	224.129.000	1	224.129.000	1	814.302.638

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)				
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	359.225.000	1	310.973.000	1	411.225.000	1	411.225.000	1	1.492.648.000
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	158.493.000	1	128.625.965	1	158.493.000	1	158.493.000	1	604.104.965
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Oro Oro Ombo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	339.512.000	1	297.487.320	1	391.512.000	1	391.512.000	1	1.420.023.320
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	128.506.000	1	117.946.400	1	154.506.000	1	154.506.000	1	555.464.400
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	149.605.000	1	154.184.250	1	175.605.000	1	175.605.000	1	654.999.250
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	170.952.000	1	212.441.450	1	248.952.000	1	248.952.000	1	881.297.450
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	198.637.000	1	204.491.885	1	250.637.000	1	250.637.000	1	904.402.885
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	273.839.000	1	280.000.533	1	351.839.000	1	351.839.000	1	1.257.517.533
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	151.748.000	1	118.396.200	1	151.748.000	1	151.748.000	1	573.640.200
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	365.105.000	1	361.728.250	1	495.105.000	1	495.105.000	1	1.717.043.250
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	206.048.000	1	175.596.200	1	232.048.000	1	232.048.000	1	845.740.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1 0 0 2 2 1	1 2 .0 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	168.951.000	1	120.669.218	1	168.951.000	1	168.951.000	1	627.522.218
				1 1 2 .0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	184.224.000	1	167.888.240	1	236.224.000	1	236.224.000	1	824.560.240
				1 1 2 .0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	371.490.000	1	299.546.000	1	397.490.000	1	397.490.000	1	1.466.016.000
				1 1 2 .0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	303.519.000	1	268.426.113	1	355.519.000	1	355.519.000	1	1.282.983.113
				1 1 2 .0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	141.796.000	1	150.417.800	1	193.796.000	1	193.796.000	1	679.805.800
				1 1 2 .0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	168.202.000	1	166.271.300	1	194.202.000	1	194.202.000	1	722.877.300
				1 1 2 .0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	157.449.000	1	108.928.495	1	157.449.000	1	157.449.000	1	581.275.495
				1 1 2 .0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	599.577.000	1	579.661.875	1	755.577.000	1	755.577.000	1	2.690.392.875
				1 1 2 .0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	309.448.000	1	296.886.200	1	387.448.000	1	387.448.000	1	1.381.230.200
				1 1 2 .0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	358.790.000	1	407.673.500	1	495.590.000	1	495.590.000	1	1.757.643.500
				1 1 2 .0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	180.742.000	1	267.111.553	1	310.742.000	1	310.742.000	1	1.069.337.553

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1 0 0 2 2 1	1 1 2 . 0 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	144.272.000	1	151.727.225	1	170.272.000	1	170.272.000	1	636.543.225
				1 1 2 . 0 1	1 1 2 . 0 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	308.382.000	1	296.431.395	1	360.382.000	1	360.382.000	1	1.325.577.395
				1 1 2 . 0 1	1 1 2 . 0 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	137.641.000	1	125.281.715	1	163.641.000	1	163.641.000	1	590.204.715
				1 1 2 . 0 1	1 1 2 . 0 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	261.752.000	1	247.103.986	1	339.752.000	1	339.752.000	1	1.188.359.986
				1 1 2 . 0 1	1 1 2 . 0 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	153.215.000	1	132.349.750	1	153.215.000	1	153.215.000	1	591.994.750
				1 1 2 . 0 1	1 1 2 . 0 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	139.024.000	1	102.975.600	1	139.024.000	1	139.024.000	1	520.047.600
				1 1 2 . 0 1	1 1 2 . 0 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	330.056.000	1	250.205.150	1	330.056.000	1	330.056.000	1	1.240.373.150
				1 1 2 . 0 1	1 1 2 . 0 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	143.959.000	1	152.333.350	1	169.959.000	1	169.959.000	1	636.210.350
				1 1 2 . 0 1	1 1 2 . 0 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	243.277.000	1	330.011.468	1	373.277.000	1	373.277.000	1	1.319.842.468
				1 1 2 . 0 1	1 1 2 . 0 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	199.313.000	1	136.464.705	1	199.313.000	1	199.313.000	1	734.403.705
				1 1 2 . 0 1	1 1 2 . 0 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	376.959.000	1	364.180.863	1	480.959.000	1	480.959.000	1	1.703.057.863

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)				
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	117.158.000	1	135.707.585	1	169.158.000	1	169.158.000	1	591.181.585
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	181.879.000	1	224.678.350	1	259.879.000	1	259.879.000	1	926.315.350
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	301.614.000	1	262.315.983	1	353.614.000	1	353.614.000	1	1.271.157.983
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	342.723.000	1	392.289.950	1	446.723.000	1	446.723.000	1	1.628.458.950
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	406.319.000	1	394.878.770	1	510.319.000	1	510.319.000	1	1.821.835.770
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	218.388.000	1	202.044.700	1	244.388.000	1	244.388.000	1	909.208.700
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	480.739.000	1	422.377.865	1	558.739.000	1	558.739.000	1	2.020.594.865
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	363.163.000	1	297.710.660	1	415.163.000	1	415.163.000	1	1.491.199.660
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	277.382.000	1	256.967.263	1	329.382.000	1	329.382.000	1	1.193.113.263
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	231.313.000	1	178.486.620	1	257.313.000	1	257.313.000	1	924.425.620
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	321.444.000	1	261.444.983	1	373.444.000	1	373.444.000	1	1.329.776.983

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)				
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	160.138.000	1	149.302.075	1	186.138.000	1	186.138.000	1	681.716.075
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	166.692.000	1	143.761.800	1	192.692.000	1	192.692.000	1	695.837.800
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	180.738.000	1	219.139.700	1	258.738.000	1	258.738.000	1	917.353.700
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	162.955.000	1	150.900.750	1	214.955.000	1	214.955.000	1	743.765.750
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	151.428.000	1	116.238.200	1	151.428.000	1	151.428.000	1	570.522.200
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	152.729.000	1	156.213.850	1	178.729.000	1	178.729.000	1	666.400.850
				1	0	0	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	136.482.000	1	178.078.001	1	214.482.000	1	214.482.000	1	743.524.001
				1	0	0	2	2		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	73	517.986.530		-		-		-		517.986.530
				1	0	0	2	2		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	124	379.929.561	76	518.730.000	76	545.611.500	76	545.611.500	76	1.989.882.561
				1	0	0	2	2		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	96	670.290.503	56	768.210.976	56	730.469.000	56	730.469.000	56	2.899.439.479

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)		
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	345.591.295	1	338.580.000	1	338.580.000	1	1.361.331.295
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	46.531.000	1	46.530.000	1	46.530.000	1	186.121.000
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	60.677.199	1	60.390.000	1	60.390.000	1	241.847.199
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	345.811.864	1	344.520.000	1	344.520.000	1	1.379.371.864
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	126.876.708	1	126.720.000	1	126.720.000	1	507.036.708
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	344.710.090	1	343.530.000	1	343.530.000	1	1.375.300.090
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	88.110.245	1	88.110.000	1	88.110.000	1	352.440.245
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Oro Oro Ombo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	252.650.738	1	251.460.000	1	251.460.000	1	1.007.030.738
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	107.647.900	1	97.020.000	1	97.020.000	1	398.707.900
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	53.156.734	1	52.470.000	1	52.470.000	1	210.566.734
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	83.345.817	1	78.210.000	1	78.210.000	1	317.975.817
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	166.086.856	1	162.360.000	1	162.360.000	1	653.166.856
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	176.290.000	1	163.350.000	1	163.350.000	1	666.340.000
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sukosari)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	33.120.960	1	34.500.000	1	34.650.000	1	136.920.960
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Pilangbango)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	207.919.745	1	200.970.000	1	200.970.000	1	810.829.745

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)		
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	160.560.000	1	163.350.000	1	163.350.000	1	650.610.000
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	143.642.000	1	83.160.000	1	83.160.000	1	393.122.000
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kelun)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	171.270.000	1	171.270.000	1	171.270.000	1	685.080.000
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	286.276.416	1	286.110.000	1	286.110.000	1	1.144.606.416
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	310.915.431	1	300.900.000	1	300.960.000	1	1.213.735.431
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	188.237.516	1	126.720.000	1	126.720.000	1	568.397.516
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	116.051.623	1	115.830.000	1	115.830.000	1	463.541.623
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	116.820.632	1	116.820.000	1	116.820.000	1	467.280.632
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	497.671.875	1	493.020.000	1	493.020.000	1	1.976.731.875
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	334.745.734	1	333.630.000	1	333.630.000	1	1.335.635.734
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	472.062.919	1	445.500.000	1	445.500.000	1	1.808.562.919
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	124.380.000	1	123.750.000	1	123.750.000	1	495.630.000
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	90.750.000	1	92.070.000	1	92.070.000	1	366.960.000
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	329.473.667	1	323.730.000	1	323.730.000	1	1.300.663.667
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	127.073.195	1	126.720.000	1	126.720.000	1	507.233.195

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)		
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	323.280.034	1	322.740.000	1	322.740.000	1	1.291.500.034
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	54.300.414	1	53.460.000	1	53.460.000	1	214.680.414
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Ngegong)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	166.096.911	1	158.400.000	1	158.400.000	1	641.296.911
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Patihan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	318.290.001	1	302.940.000	1	302.940.000	1	1.227.110.001
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	72.520.411	1	72.270.000	1	72.270.000	1	289.330.411
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	314.511.200	1	299.970.000	1	299.970.000	1	1.214.421.200
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sogaten)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	171.658.854	1	171.270.000	1	171.270.000	1	685.468.854
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	432.885.446	1	430.650.000	1	430.650.000	1	1.724.835.446
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	80.066.904	1	76.230.000	1	76.230.000	1	308.756.904
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	111.434.595	1	105.930.000	1	105.930.000	1	429.224.595
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	363.204.373	1	335.610.000	1	335.610.000	1	1.370.034.373
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	352.613.252	1	317.790.000	1	317.790.000	1	1.305.983.252
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Banjarejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	417.337.234	1	415.800.000	1	415.800.000	1	1.664.737.234
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	106.659.814	1	101.970.000	1	101.970.000	1	412.569.814
				1	0	0	2	2		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	513.146.533	1	506.880.000	1	506.880.000	1	2.033.786.533

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1 0 1 2 .0 1	2 2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	338.861.683	1	334.620.000	1	334.620.000	1	334.620.000	1	1.342.721.683
				1 0 1 2 .0 1	2 2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	306.891.165	1	296.010.000	1	296.010.000	1	296.010.000	1	1.194.921.165
				1 0 1 2 .0 1	2 2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	167.695.887	1	164.340.000	1	164.340.000	1	164.340.000	1	660.715.887
				1 0 1 2 .0 1	2 2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	192.060.139	1	192.060.000	1	192.060.000	1	192.060.000	1	768.240.139
				1 0 1 2 .0 1	2 2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	133.022.241	1	131.670.000	1	131.670.000	1	131.670.000	1	528.032.241
				1 0 1 2 .0 1	2 2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	161.395.865	1	161.370.000	1	161.370.000	1	161.370.000	1	645.505.865
				1 0 1 2 .0 1	2 2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	178.344.598	1	177.210.000	1	177.210.000	1	177.210.000	1	709.974.598
				1 0 1 2 .0 1	2 2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	176.095.597	1	173.250.000	1	173.250.000	1	173.250.000	1	695.845.597
				1 0 1 2 .0 1	2 2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	88.244.199	1	88.110.000	1	88.110.000	1	88.110.000	1	352.574.199
				1 0 1 2 .0 1	2 2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kejuron)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	54.130.137	1	52.470.000	1	52.470.000	1	52.470.000	1	211.540.137
				1 0 1 2 .0 1	2 2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kuncen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	76.240.859	1	76.230.000	1	76.230.000	1	76.230.000	1	304.930.859
				1 1 2 .0 2	2 2 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP		100%	32.111.385.147	100%	28.352.092.068	100%	50.333.907.550	100%	50.333.907.550	100%	161.131.292.315
				1 0 1 2 .0 2	2 0 3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1 0 1 2 .0 2	2 1 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	19	5.773.360.000	15	4.590.763.000	77	23.307.439.550	77	23.307.439.550	188	56.979.002.100
				1 0 1 2 .0 2	2 2 7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket/kain seragam	1	3.384.371.000	1	3.384.371.000	1	3.384.371.000	1	3.384.371.000	1	13.537.484.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
				1 0 1 2 .0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	926.439.941	1	771.088.858	1.056.440.000	1	1.056.440.000	1	3.810.408.799
				1 0 1 2 .0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	806.751.000	1	1.007.728.150	1.222.751.000	1	1.222.751.000	1	4.259.981.150
				1 0 1 2 .0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	607.714.000	1	532.463.100	711.714.000	1	711.714.000	1	2.563.605.100
				1 0 1 2 .0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	753.383.000	1	689.638.950	961.383.000	1	961.383.000	1	3.365.787.950
				1 0 1 2 .0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	580.908.000	1	614.326.505	814.908.000	1	814.908.000	1	2.825.050.505
				1 0 1 2 .0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	712.369.000	1	681.836.545	868.369.000	1	868.369.000	1	3.130.943.545
				1 0 1 2 .0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	719.101.000	1	685.295.650	875.101.000	1	875.101.000	1	3.154.598.650
				1 0 1 2 .0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	543.935.000	1	411.846.760	647.935.000	1	647.935.000	1	2.251.651.760
				1 0 1 2 .0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	814.886.000	1	638.529.255	918.886.000	1	918.886.000	1	3.291.187.255
				1 0 1 2 .0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	832.342.000	1	855.919.545	1.092.342.000	1	1.092.342.000	1	3.872.945.545
				1 0 1 2 .0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	733.300.000	1	599.169.867	863.300.000	1	863.300.000	1	3.059.069.867

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1 0 1 2 .0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	662.016.000	1	697.774.350	1	896.016.000	1	896.016.000	1	3.151.822.350
				1 0 1 2 .0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	606.371.000	1	575.359.233	1	762.371.000	1	762.371.000	1	2.706.472.233
				1 0 1 2 .0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	461.863.000	1	415.520.818	1	591.863.000	1	591.863.000	1	2.061.109.818
				1 0 1 2 .0 2	3 7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	23 Lembaga	442.992.745	23 Lembaga	227.812.475	23 Lembaga	239.373.000	23 Lembaga	239.373.000	23 Lembaga	1.149.551.220
				1 0 1 2 .0 2	3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	131	403.411.740	105	582.134.405	105	723.700.000	105	723.700.000	105	2.432.946.145
				1 0 1 2 .0 2	4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	96	418.843.997	96	100.767.202	96	105.805.000	96	105.805.000	96	731.221.199
				1 0 1 2 .0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.062.971.689	1	923.136.400	1	923.230.000	1	923.230.000	1	3.832.568.089
				1 0 1 2 .0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.321.075.132	1	930.490.000	1	930.490.000	1	930.490.000	1	4.112.545.132
				1 0 1 2 .0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	758.011.881	1	677.600.000	1	677.600.000	1	677.600.000	1	2.790.811.881
				1 0 1 2 .0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.095.204.362	1	986.150.000	1	986.150.000	1	986.150.000	1	4.053.654.362
				1 0 1 2 .0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	645.513.042	1	532.400.000	1	532.400.000	1	532.400.000	1	2.242.713.042
				1 0 1 2 .0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	849.400.000	1	768.350.000	1	768.350.000	1	768.350.000	1	3.154.450.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1 0 1 2 0 2	2 4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	965.067.628	1	882.090.000	1	882.090.000	1	882.090.000	1	3.611.337.628
				1 0 1 2 0 2	2 4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	659.804.500	1	648.560.000	1	648.560.000	1	648.560.000	1	2.605.484.500
				1 0 1 2 0 2	2 4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	605.788.805	1	504.570.000	1	504.570.000	1	504.570.000	1	2.119.498.805
				1 0 1 2 0 2	2 4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	684.912.623	1	613.470.000	1	613.470.000	1	613.470.000	1	2.525.322.623
				1 0 1 2 0 2	2 4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 11)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	787.392.499	1	775.610.000	1	775.610.000	1	775.610.000	1	3.114.222.499
				1 0 1 2 0 2	2 4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 12)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	857.702.827	1	767.140.000	1	767.140.000	1	767.140.000	1	3.159.122.827
				1 0 1 2 0 2	2 4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 13)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.183.651.814	1	854.260.000	1	854.260.000	1	854.260.000	1	3.746.431.814
				1 0 1 2 0 2	2 4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 14)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	450.529.922	1	425.920.000	1	425.920.000	1	425.920.000	1	1.728.289.922
				1 1 2 2 0 3	2 2 3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD yang terakreditasi		100%	8.263.808.828	100%	8.563.920.185	100%	17.093.722.593	100%	19.135.440.513	100%	53.056.892.119
				1 0 1 2 0 3	2 0 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	-	-	-	-	7.458.282.080		9.500.000.000		16.958.282.080	
				1 0 1 2 0 3	2 1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik		316.089.480		319.425.865		319.425.865		319.425.865		1.274.367.075
				1 0 1 2 0 3	2 1 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1000	3.195.000.000	1000	3.600.000.000	1000	3.600.000.000	1000	3.600.000.000	1000	13.995.000.000
				1 0 1 2 0 7	2 1 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan	Satuan Pendidikan	163	4.752.719.348	163	1.137.254.320	163	2.208.774.648	163	2.208.774.648	163	10.307.522.96

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
							3		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen												
								Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	-	-	160	3.507.240.000	160	3.507.240.000	160	3.507.240.000	160	10.521.720.000	
				1	1	2	2,04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase lembaga non formal yang terakreditasi		100%	2.054.694.020	100%	1.205.271.630	100%	1.380.891.000	100%	1.380.891.000	100%	6.326.647.650	
				1	01	02	204	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Orang	175	918.689.600	175	900.371.630	175	964.624.000	175	964.624.000	175	3.748.309.230
				1	01	02	204	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		150.561.670	-	-	-	-	-	-	150.561.670	
				1	01	02	204	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	7	985.442.750	7	-	111.367.000	7	111.367.000	7	1.208.176.750	
									Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan			7	304.900.000	7	304.900.000	7	304.900.000	7	914.700.000
				1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP		100%	572.110.560	100%	3.480.307.746	100%	5.319.203.262	100%	5.324.203.262	100%	14.695.824.830
				1	1	3	201		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8 standar pendidikan pada kualitas standar proses dan penilaian pendidikan		100%	572.110.560	100%	2.885.323.588	100%	4.438.648.262	100%	4.443.648.262	100%	12.339.730.672
				1	01	03	201	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	-	-	1.244.648.568		1.832.547.853		1.837.547.853		4.914.744.274	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
				1 0 1 3 0 1	0 2 0 2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	-	-	924.010.610		1.488.221.610		1.488.221.610		3.900.453.830
				1 1 3 0 1	0 2 0 4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	572.110.560		716.664.410		1.117.878.799		1.117.878.799		3.524.532.568
				1 1 3 2 0 2	2 0 2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP		100%	-	100%	100%	880.555.000	100%	880.555.000	100%	2.356.094.158
				1 1 3 0 2	0 2 0 2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	-	-	594.984.158		880.555.000		880.555.000		2.356.094.158
				1 1 4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi		65%	1.959.105.000	65%	66%	2.450.385.000	67%	2.450.385.000	60%	8.517.875.000
				1 1 4 2 0 1	2 0 1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase tenaga pendidik yang bersertifikasi		100%	1.959.105.000	100%	100%	2.450.385.000	100%	2.450.385.000	100%	8.517.875.000
				1 0 1 4 0 1	2 0 1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	6	1.622.500.000	6	6	1.541.925.000	6	1.541.925.000	6	5.998.350.000
				1 0 1 4 0 1	2 0 2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	2	336.605.000	2	2	908.460.000	2	908.460.000	2	2.519.525.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
						an												

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	APM Paud, SD, dan SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompentensi	-	-	65%	65%	66%	67%	67%
3.	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rata-rata Lama Sekolah	11,12	11,14	11,14	11,15	11,16	11,16	11,16	Indikator sasaran kota
2	Harapan Lama Sekolah	14,39	14,39	14,4	14,41	14,42	14,43	14,43	Indikator sasaran kota
3	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik	-	65%	65%	65%	66%	67%	67%	Indikator Tujuan PD
4	Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Dasar	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
5	APM Paud, SD, dan SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompentensi	-	-	65%	65%	66%	67%	67%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
8	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
9	Wajib belajar 9 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
10	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	78,98%	81.25%	20%	20%	25%	25%	25%	Indikator Program PD
12	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	5.768	5.122	4.500	4.210	4.000	3.750	3.750	Lppd
13	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	19.687	18.229	17.000	16.750	16.500	16.000	16.000	Lppd
14	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	8.442	8.819	8.000	7.750	7.500	7.250	7.250	Lppd
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	202	200	195	180	170	170	Lppd
16	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	99	99	16	16	16	16	16	Lppd
17	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1	49	50	50	50	50	50	Lppd
18	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan		109	90	90	90	90	90	Lppd
19	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD		01.15	01.14	01.14	01.13	01.13	01.13	Lppd
20	Jumlah pendidik pada PAUD	483	483	475	470	465	460	460	Lppd
21	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		473	470	465	460	455	455	Lppd
22	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang		15	10	10	10	12	93	Lppd
23	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	70	70	70	70	70	70	70	Lppd
24	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		2.658	2.658	2.658	2.658	2.658	2.658	Lppd
25	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		3.284	3.284	3.284	3.284	3.284	3.284	Lppd
26	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan		11.482	11.400	11.400	11.000	11.000	11.000	Lppd
27	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan		10.957	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000	Lppd
28	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar		01.24	01.23	01.23	01.22	01.20	01.20	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
29	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		01.29	01.28	01.28	01.27	01.27	01.27	Lppd
30	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		831	803	760	715	674	674	Lppd
31	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		649	629	371	538	513	513	Lppd
32	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		01.04	01.04	01.04	01.04	01.04	01.04	Lppd
33	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	01.07	01.07	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	Lppd
34	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		184	176	171	165	161	167	Lppd
35	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama		90	86	80	72	68	68	Lppd
36	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		818	833	648	658	668	668	Lppd
37	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		642	656	666	681	696	696	Lppd
38	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		65	70	70	73	73	73	Lppd
39	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		19	20	20	23	23	23	Lppd
40	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		184	180	175	170	165	165	Lppd
41	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		90	80	78	75	70	70	Lppd
42	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi		3	1	1	1	1	1	Lppd
43	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	0	Lppd
44	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan		0	0	0	0	0	0	Lppd
45	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan		01.15	01.25	01.27	01.29	01.30	01.30	Lppd
46	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan		61	40	37	35	30	30	Lppd
47	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		61	40	37	35	30	30	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
48	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		65	70	70	73	73	73	Lppd
49	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1		6	6	6	6	6	6	Lppd
50	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	31.801	30.204	26.937	26.450	26.311	26.301	26.214	spm
51	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	96	202	200	210	225	230	230	spm
52	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5.768	5.122	4.500	4.250	4.000	3.750	3.750	spm
53	Indeks Pengetahuan	0,77	0,77	-	-	-	-	0,77	Indikator Lama
54	Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	-	85	-	-	-	-	85	Indikator Lama
55	Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	76,66	76,66	-	-	-	-	76,66	Indikator Lama
56	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	152,99	127,04	-	-	-	-	127,04	Indikator Lama
57	Angka Partisipasi Kasar PAUD	-	95,61	-	-	-	-	95,61	Indikator Lama
58	Jumlah Lembaga non formal yang Terakreditasi	-	106 lembaga	-	-	-	-	106 lembaga	Indikator Lama

**D. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

**Permasalahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana**

No	Permasalahan
1	Belum optimalnya Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2	Keterlambatan pembayaran Klaim oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial namun pelayanan tetap harus optimal
3	Adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sehingga diperlukan beberapa penyesuaian standart
4	Kondisi sarana dan prasarana secara kuantitas sudah sesuai standart, tetapi secara kualitas masih belum sesuai standar, baik secara persyaratan teknis, luasan dan kenyamanan masih kurang representatif
5	Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia, terutama kecukupan Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum dan Tenaga Fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedik, Fisikawan Medik, Radiografer, Nutrisisionis, Dietisien, Tenaga Terapi Okupasi, Tenaga Teknik Kefarmasian, Tenaga Teknis Transfusi Darah, Perawat Terampil bersertifikat keahlian khusus (Untuk kebutuhan Pelayanan Anestesi, Hemodialisis, dan <i>Intensive Care Unit</i>) dan akuntan
6	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik
7	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit belum optimal, yang terkoneksi ke seluruh unit terutama billing system
8	Belum optimalnya sistem budaya kerja
9	Kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan rumah sakit untuk selalu siap memberikan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang diberikan harus aman, efektif, berfokus pada pasien, tepat waktu, efisien dan adil serta
10	Terbatasnya jangkauan pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan
11	Meningkatnya kunjungan pasien geriatri menjadi peluang rumah sakit untuk mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut
12	Perkembangan tingkat sosial ekonomi, teknologi dan informasi mengakibatkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit
13	Kemajuan Teknologi dan Informasi, mengharuskan rumah sakit untuk menuju digitalisasi layanan kesehatan sehingga tidak tertinggal
14	Semakin banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di Kota Madiun semakin tinggi

No	Permasalahan
15	Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular
16	Adanya Pandemi Covid-19, menyebabkan : <ul style="list-style-type: none"> • berkurangnya kunjungan pasien • tidak Terlaksananya kegiatan upaya kegiatan berbasis masyarakat secara optimal • kegiatan monitoring dan evaluasi ke sarana pelayanan kesehatan tidak dapat dilaksanakan
17	Belum terpenuhinya target Standart Pelayanan Minimal pelayanan bidang kesehatan sesuai standar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
18	Data Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang belum sinkron
19	Masih terbatasnya tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu dalam penanggulangan covid-19
20	Masih terdapat balita gizi buruk dan balita stunting
21	Adanya kematian bayi, dimana angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 adalah sebesar 6,64 dan angka kematian balita pada tahun 2018 adalah sebesar 8,59 per 1.000 kelahiran hidup
22	Angka Kematian Ibu pada Tahun 2019 sebesar 39,53, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 39,53 ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu sebanyak 1 orang ibu.
23	Adanya pandemik Covid-19, sehingga jumlah absolut Kejadian Luar Biasa sebanyak 408
24	Layanan kegiatan Kelompok Rentan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) tidak berjalan dengan baik
25	Layanan Keluarga Berencana di masa pandemi bisa menjadikan akseptor malas untuk mencari layanan Keluarga Berencana yang akan berakibat pada penurunan angka <i>modern Contraceptive Prevalence Rate</i> serta meningkatnya <i>baby boomer</i> yang berakibat pada meningkatnya <i>Age Specific Fertility Rate</i> 15-19 th
26	Adanya persyaratan khusus untuk layanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
27	Pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2021 di masa pandemi akan mengalami banyak kendala di lapangan (mis: responden sulit dihubungi dll) sehingga tidak mendapatkan data parameter kependudukan yang tidak valid
28	Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan belum optimal
29	Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana belum optimal
30	Pelaksanaan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan 5 pilar belum optimal

Isu Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Isu Strategis
1	Optimalisasi Pelayanan Rumah Sakit
2	Tenaga Kesehatan berkompetensi khusus masih kurang
3	Pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi
4	Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular
5	Pelayanan Kesehatan Tidak Berjalan dengan optimal selama pandemi Covid-19
6	Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan
7	Dibutuhkan tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu pada era <i>New Normal</i>
8	Masih diperlukan upaya peningkatan dan penanganan gizi masyarakat
9	Angka Kematian Ibu dan Bayi belum sesuai target yang ditetapkan
10	Pandemi Covid-19
11	masih diperlukan layanan kelompok rentan yang ada bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang mengikuti poktan tersebut
12	Layanan Keluarga Berencana dan atau Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Adaptasi Kebiasaan Baru:
13	optimalisasi pelaksanaan kampung Keluarga Berencana

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup

Tujuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat	Persentase Keluarga Sehat	0%	50%	52%	54%	56%

Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Persentase rumah tangga sehat	68,00%	69,00%	70,00%	71,00%	72,00%
2	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan	Persentase rumah sehat	84,00%	86,00%	88,00%	89,00%	90,00%
3	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Persentase rata-rata upaya kesehatan bersumber masyarakat berstrata puri	60,38%	61,50%	62,00%	62,50%	63,00%
4	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,45	0,50	0,52	0,54	0,56
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%
6	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan (ASPAK) Puskesmas	84,32%	84,32%	84,60%	84,80%	85,00%
7	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan kefarmasian	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standart	70,00%	72,00%	74,00%	76,00%	78,00%
8	Terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat kota	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Meningkatnya responsivitas pelayanan kesehatan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat puskesmas se- Kota Madiun	83,57%	86,00%	86,20%	86,40%	86,60%
10	Meningkatnya tanggungjawab pelayanan kesehatan	Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas	92,34%	86,63%	86,92%	87,53%	88,11%
11	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk di Kota Madiun	<i>Contraception Prevalency Rate</i> diatas rata-rata nasional	72,76%	62,17%	62,54%	63,00%	64,00%
12	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	22,26	22,76	23,26

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Keluarga Sehat		0,00%		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%		56,00%		
	NILAI SAKIP	A			83.5 (Skor)										
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (RB)		14,05		-		22,26		22,76		23,26		23,26		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	84,41 (Skor)		83.5 (Skor)	54.717.355.896	84 (Skor)	144.172.163.268	84.5 (Skor)	149.316.580.549	85 (Skor)	175.542.012.139	85 (Skor)	523.748.111.852	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	100%			100%	218.278.000	100%	307.609.000	100%	434.187.600	100%	228.145.412	100%	1.188.220.012	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	11 dokumen			11 dokumen	218.278.000	11 dokumen	307.609.000							Dinas Kesehatan, PP dan KB

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								3 Laporan	226.782.680	3 Laporan	326.342.388	3 Laporan	752.669.680	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								8 Dokumen	74.685.210		82.153.731		156.838.941	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5 Laporan	132.719.710		145.991.681		278.711.391	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%		100%	50.653.907.416	100%	57.888.599.028	100%	65.840.962.660	100%	59.768.495.483	100%	234.151.964.587	Dinas Kesehatan, PP dan KB	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%		100%	29.691.891.460	100%	32.651.806.176							Dinas Kesehatan, PP dan KB	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								331 Orang/Bulan	42.032.515.200	346 Orang/Bulan	31.684.936.532	346 Orang/Bulan	136.061.149.368	
	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah (RSUD)	100%		100%	20.962.015.956	100%	25.236.792.852							RSUD	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)								228 Orang/Bulan	23.808.447.460	274 Orang/Bulan	28.083.558.951	274 Orang/Bulan	98.090.815.219	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100%	2.273.541.480	100%	2.649.906.720	100%	2.560.031.626	100%	2.781.934.416	100%	10.265.414.242	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%			100%	1.973.541.480	100%	2.110.546.720							Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								1 Paket	2.096.811.626	1 Paket	2.209.727.392	1 Paket	8.390.627.218	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%			100%	300.000.000	100%	539.360.000							Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								120Laporan	463.220.000	145 Laporan	572.207.024	145 Laporan	1.874.787.024	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang (RSUD)	100%			100%	1.274.000.000	100%	1.239.700.000	100%	1.239.700.000	100%	1.429.435.350	100%	5.182.835.350	RSUD
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah (RSUD)	100%			100%	1.274.000.000	100%	1.239.700.000							RSUD
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								14 Laporan	1.239.700.000	14 Laporan	1.429.435.350	14 Laporan	5.182.835.350	RSUD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100%	297.629.000	100%	540.144.000	100%	702.817.600	100%	556.044.213	100%	2.096.634.813	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%			100%	201.098.000	100%	339.210.000							Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								80 Unit	346.771.300	80 Unit	359.867.889	80 Unit	1.246.947.189	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%			100%	14.126.000	100%	16.019.000							Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								1 Unit	74.595.300	1 Unit	16.994.557	1 Unit	104.740.300	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%			100%	82.405.000	100%	184.915.000							Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								273 Unit	281.451.000	280 Unit	196.176.324	280 Unit	744.947.324	Dinas Kesehatan, PP dan KB

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah (RSUD)						100%	81.546.204.520	100%	78.538.881.063	100%	110.777.957.265	100%	270.863.042.848	RSUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD (RSUD)						100%	81.546.204.520							RSUD
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								1 Unit Kerja	78.538.881.063	1 Unit Kerja	110.777.957.265	1 Unit Kerja	270.863.042.848	RSUD
	Persentase indikator SPM mencapai target	75%	-		50,00%		-		-		-		-		
	Indeks Keluarga Sehat		0,45		-		0,52		0,54		0,56		0,56		
	Persentase rumah sehat		84,00%				88,00%		89,00%		90,00%		90,00%		
	Persentase capaian Aplikasi Sarana Prasarana Kesehatan (ASPAK) Puskesmas		84,32%		-		84,60%		84,80%		85,00%		85,00%		
	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan		96,00%		-		98,00%		99,00%		100,00%		100,00%		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)		92,34%		-		86,92%		87,53%		88,11%		88,11%		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	0,33			0,50	57.656.746.415									
	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target		66,67%		-		66,67%	82.687.756.549	75,00%	92.718.042.555	75,00%	140.803.146.766	75,00%	373.865.692.285	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target				86,96%	15.188.868.035	88,04%	21.778.024.971	89,13%	49.869.776.791	90,22%	66.667.842.898	90,22%	153.504.512.695	
Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara (RSUD)	2 unit			2 unit	2.763.520.000	3 unit	3.704.902.925							
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit								1 unit	544.352.000	2 Unit	973.210.500	8 Unit	7.985.985.425	RSUD
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan (RSUD)				2 unit	3.114.374.000	5 jenis	3.662.542.171							

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan								3 unit	34.502.467.000	2 Unit	37.952.713.700	12 Unit	79.232.096.871	RSUD
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan (RSUD)			20 jenis	-	17 jenis	3.887.685.500								
	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan								198 unit	1.933.520.134	30 Unit	2.126.872.147	228 Unit	7.948.077.781	RSUD
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas								1 Unit	246.629.080	1 Unit	271.291.988	1 Unit	517.921.068	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	-		2 kegiatan	1.740.099.110	2 kegiatan	2.144.069.364								
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan								778 Unit	2.870.580.400	180 Unit	2.400.268.707	180 Unit	9.155.017.581	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan (RSUD)	47 jenis		32 jenis	3.020.650.000	1 jenis	3.061.600.000								

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (RSUD)								17 Unit	1.413.119.000	15 Unit	16.354.244.724	32 Unit	23.849.613.724	RSUD
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah jenis alat kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan kalibrasi			28 jenis	-	24 jenis	106.092.000								
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center								619 Unit	143.404.500	420 Unit	112.553.003	420 Unit	362.049.503	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah paket pengadaan obat dan vaksin	-		1 paket	3.196.091.000	1 paket	2.486.947.630								
	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan								25 Paket	3.128.867.000	20 Paket	2.476.985.076	20 Paket	11.288.890.706	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Jenis obat/vaksin yang diadakan (RSUD)	16 jenis		6 jenis	502.009.000	2 jenis	1.997.371.545								
	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (RSUD)								6 Paket	4.999.852.477	6 Paket	3.000.000.000	6 Paket	10.499.233.022	RSUD
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	-		2 kegiatan	852.124.925	2 kegiatan	726.813.836								
	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan								0 Paket	-	2 Paket	904.019.333	2 Paket	2.482.958.094	Dinas Kesehatan, PP dan KB

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar								162 Unit	86.985.200	162 Unit	95.683.720	162 Unit	182.668.920	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target			50%	42.467.878.380	66,67%	60.909.731.578	75,00%	42.848.265.764	75,00%	74.135.303.868	75,00%	220.361.179.590		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%		100%	258.249.990	100%	450.537.020								
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							2490 Orang	475.987.940	2.450 Orang	362.032.146	2.450 Orang	1.546.807.096	Dinas Kesehatan, PP dan KB	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%		100%	23.339.000	100%	61.848.500								
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							2377 Orang	68.326.900	2.338 Orang	62.594.797	2.338 Orang	216.109.197	Dinas Kesehatan, PP dan KB	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%		100%	40.809.000	100%	55.068.750								
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							2264 Orang	111.405.450	2.227 Orang	24.008.167	2.227 Orang	231.291.367	Dinas Kesehatan, PP dan KB	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%			100%	28.089.000	100%	235.565.550							
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								9218 Orang	248.995.000	9.081 balita	216.826.795	9.081 balita	729.476.345	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			100%	20.115.000	100%	79.719.000							
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								31972 Orang	104.608.200	31855 Orang	28.537.149	31855 Orang	232.979.349	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	79,49%			100%	58.235.000	100%	222.209.500							
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								115490 Orang	143.399.258	169969 Orang	554.012.059	169969 Orang	977.855.817	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	65,62%			100%	1.440.000	100%	71.483.000							
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								28597 Orang	70.258.100	169968 Orang	55.796.020	169968 Orang	198.977.120	Dinas Kesehatan, PP dan KB

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82,60%			100%	4.000.000	100%	9.477.000							
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								68.973 org	13.567.000	68.973 org	10.054.149	68.973 org	37.098.149	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83,55%			100%	3.850.000	100%	29.020.000							
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								8.143 org	29.020.000	8.143 org	30.787.318	8.143 org	92.677.318	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%			100%	40.565.000	100%	171.966.200							
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar								338 Orang	63.190.600	... Orang	182.438.942	... Orang	458.160.742	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%			100%	19.320.000	100%	220.133.900							

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								5.076 org	53.619.750	5.044 org	244.661.575	5.044 org	537.735.225	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	101,27%			100%	152.359.000	100%	327.297.000							
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								5.780 org	267.518.650	5.780 org	347.229.387	5.780 org	1.094.404.037	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB					-	100%	241.376.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar								1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	241.376.000	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Manguharjo	persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB					-	100%	699.043.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar								2 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	544.243.822	1 Dokumen	1.453.286.822	Puskesmas

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Ngegong	persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB				-	100%	694.686.000								
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar							2 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	540.857.429	1 Dokumen	1.445.543.429	Puskesmas	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sukosari	persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB				-	100%	742.692.000								
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar							2 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	578.232.936	1 Dokumen	1.530.924.936	Puskesmas	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Tawangrejo	persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB				-	100%	768.929.000								
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar							2 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	598.660.566	1 Dokumen	1.577.589.566	Puskesmas	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)Banjarejo	persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB				-	100%	791.190.000								

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar								2 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	615.992.489	1 Dokumen	1.617.182.489	Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Demangan	persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB				-	100%	729.000.000								
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar								2 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	567.581.500	1 Dokumen	1.506.581.500	Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi kasus stunting	9,79%		9,70%	93.844.150	9,50%	59.009.860								
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								3 Dokumen	191.682.250	2 Dokumen	17.879.242	2 Dokumen	362.415.502	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Manguharjo	Prevalensi kasus stunting	-			-	14,00%	266.050.000								
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								3 Dokumen	310.665.000	3 Dokumen	282.252.445	3 Dokumen	858.967.445	Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Ngegong	Prevalensi kasus stunting	-			-	12,00%	212.330.000								

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								3 Dokumen	342.402.000	3 Dokumen	225.260.897	3 Dokumen	779.992.897	Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Sukosari	Prevalensi kasus stunting	-				-	9,50%	281.900.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								3 Dokumen	469.350.000	3 Dokumen	299.067.710	3 Dokumen	1.050.317.710	Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Tawangrejo	Prevalensi kasus stunting	-				-	9,50%	249.475.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								3 Dokumen	249.475.000	3 Dokumen	264.668.028	3 Dokumen	763.618.028	Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Banjarejo	Prevalensi kasus stunting	-				-	11,50%	346.215.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								3 Dokumen	672.959.000	3 Dokumen	367.299.494	3 Dokumen	1.386.473.494	Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Demangan	Prevalensi kasus stunting	-				-	11,00%	326.000.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								3 Dokumen	536.250.000	3 Dokumen	345.853.400	3 Dokumen	1.208.103.400	Puskesmas

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pekerja yang dilayani	-			40%	61.459.550	41%	96.391.700							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								3 Dokumen	402.773.450	3 Dokumen	91.263.286	3 Dokumen	651.887.986	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase TTU Sehat	85%			60%	118.431.090	61%	1.127.991.310							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								5 Dokumen	213.650.740	5 Dokumen	586.809.824	5 Dokumen	2.046.882.964	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam	100%			100%	190.862.000	100%	114.780.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan								3 Dokumen	115.931.000	1 Dokumen	140.335.852	1 Dokumen	561.908.852	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100%			100%	122.713.000	100%	162.910.950							
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan								338 Orang	161.108.290	338 Orang	172.832.227	338 Orang	619.564.467	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	-			100%	83.380.000	100%	213.562.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								2 Dokumen	277.410.000	1 Dokumen	226.567.926	1 Dokumen	800.919.926	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	83.859 orang			88.966 orang	23.627.334.000	87.520 orang	29.368.633.280							

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								36 Dokumen	16.996.972.080	36 Dokumen	42.534.768.390	36 Dokumen	112.527.707.750	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Kelurahan yang melaksanakan tatanan kelurahan sehat	-			48%	88.218.760	52%	691.002.050							
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								10 Dokumen	350.584.900	10 Dokumen	165.266.153	10 Dokumen	1.295.071.863	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Operasional Pelayanan Puskesmas Manguharjo	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	90%	94,39%		89,00%	2.687.530.000	89,00%	2.864.596.000							
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas								4 Dokumen	2.855.880.149	4 Dokumen	3.039.049.896	4 Dokumen	11.447.056.045	Puskesmas
Operasional Pelayanan Puskesmas Ngegong	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	88%	91,61%		85,00%	2.016.602.840	85,50%	2.360.253.000							
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas								4 Dokumen	2.517.594.600	4 Dokumen	2.503.992.408	4 Dokumen	9.398.442.848	Puskesmas
Operasional Pelayanan Puskesmas Sukosari	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	86%	94,00%		87,80%	2.514.274.240	88,00%	2.809.017.000							
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas								4 Dokumen	2.514.257.000	4 Dokumen	2.980.086.135	4 Dokumen	10.817.634.375	Puskesmas
Operasional Pelayanan Puskesmas Tawangrejo	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	90%	91,27%		89,00%	2.422.391.720	89,00%	2.607.873.000							
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas								4 Dokumen	2.674.373.000	4 Dokumen	3.558.837.851	4 Dokumen	11.263.475.571	Puskesmas
Operasional Pelayanan Puskesmas Banjarejo	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	93%	93,72%		85,00%	3.064.193.200	85,00%	3.354.546.000							

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas								4 Dokumen	3.140.507.000	4 Dokumen	3.558.837.851	4 Dokumen	13.118.084.051	Puskesmas
Operasional Pelayanan Puskesmas Demangan	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	87%	89,06%		84,00%	2.673.853.600	85,00%	2.710.699.880							
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas								4 Dokumen	2.782.842.000	4 Dokumen	2.875.781.503	4 Dokumen	11.043.176.983	Puskesmas
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan yang melaksanakan survei IKM	100%			6 Faskes	1.285.628.240	6 Faskes	2.778.847.328							
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								7 Dokumen	1.499.351.307	7 Dokumen	2.948.079.130	7 Dokumen	8.511.906.005	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	100%			100%	307.491.000	100%	489.298.000							
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota								6 Unit	23.629.650	6 Unit	519.096.248	6 Unit	1.339.514.898	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase pelaksanaan pelayanan gawat darurat	-			100%	459.300.000	100%	817.108.800							
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								1 Unit	638.720.500	1 Unit	866.870.726	1 Unit	2.782.000.026	Dinas Kesehatan, PP dan KB

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Indeks Kepuasan Masyarakat				81,99										
	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi		88,00%		-		90,00%		91,00%		92,00%		92,00%		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	-	88%		89%	239.036.000	90%	279.413.000	91%	248.769.050	92%	232.009.812	93%	999.227.862	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standar	1 dokter			1 dokter	30.000.000	1 dokter	48.750.000	1 dokter	48.750.000	1 dokter	51.718.875	1 dokter	179.218.875	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standar	1 dokter			1 dokter	30.000.000	1 dokter	48.750.000							
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)								1 Orang	48.750.000	0 Orang	51.718.875	0 Orang	179.218.875	Dinas Kesehatan, PP dan KB

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	-	88%		89%	209.036.000	90%	230.663.000	91%	200.019.050	92%	180.290.937	92%	820.008.987	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	-			89%	209.036.000	90%	230.663.000							
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya								500 Orang	200.019.050	200 Orang	180.290.937	200 Orang	820.008.987	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standar		70%		-		74%		76%		78%		78%		
	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas se-Kota Madiun		83,57		-		86,2		86,4		86,6		86,6		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar		85%		86%	202.270.000	87%	226.563.000	88%	242.027.300	89%	240.360.686	89%	103.415.815	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar				85%	196.245.000	86%	196.057.000	87%	207.506.300	88%	207.996.871	88%	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	-			85%	196.245.000	86%	196.057.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								2 Dokumen	207.506.300	1 Dokumen	207.996.871	1 Dokumen	807.805.171	Dinas Kesehatan, PP dan KB

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)				70%	6.025.000	73%	30.506.000	76%	34.521.000	80%	32.363.815	80%	103.415.815	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)				70%	6.025.000	73%	30.506.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								3 Dokumen	34.521.000	3 Dokumen	32.363.815	3 Dokumen	103.415.815	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Persentase rumah tangga sehat		68%		-		70%		71%		72%		72%		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase rata-rata Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berstrata PURI		60,38%		-		62,00%		62,50%		63,00%		63%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	-	60,38%		61,50%	973.197.000	62%	2.492.754.000	62,50%	2.669.250.720	63,00%	1.191.894.628	63,00%	7.327.096.348	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	-			100%	83.275.000	100%	351.315.000	100%	412.736.220	100%	376.176.044	100%	1.223.502.264	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah jenis media promosi yang dihasilkan	-			6 jenis	83.275.000	6 jenis	351.315.000							
	Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan	-			3 Kegiatan		3 kegiatan								
	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								1 Dokumen	412.736.220	1 Dokumen	376.176.044	1 Dokumen	1.223.502.264	Dinas Kesehatan, PP dan KB

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	-			74,07%	889.922.000	77,78%	2.141.439.000	77,78%	2.256.514.500	77,78%	815.718.584	77,78%	6.103.594.084	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri				81,48%		81,48%		81,48%		81,48%		81,48%		
	Persentase Posyandu Balita berstrata puri				85,93%		85,93%		86,67%		86,67%		86,67%		
	Persentase Posyandu Lansia berstrata puri				95,65%		96,38%		97,10%		97,10%		97,10%		
	Persentase Poskestren berstrata puri				45,45%		45,45%		45,45%		54,55%		54,55%		
	Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri				40,00%		40,00%		40,00%		40,00%		40,00%		
	Persentase Posbindu PTM berstrata puri				69,23%		69,87%		71,15%		71,15%		71,15%		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	-			20 Kelurahan	889.922.000	21 Kelurahan	2.141.439.000							

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Jumlah Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri				22 Poskeskel		22 Poskeskel								
	Jumlah Posyandu Balita berstrata puri				232 Posyandu		232 Posyandu								
	Jumlah Posyandu Lansia berstrata puri				132 Posyandu		133 Posyandu								
	Jumlah Poskestren berstrata puri				5 Poskestren		5 Poskestren								
	Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri				6 Pos UKK		6 Pos UKK								
	Jumlah Posbindu PTM berstrata puri				108 Posbindu PTM		109 Posbindu PTM								
	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								1 Dokumen	2.256.514.500	1 Dokumen	815.718.584	1 Dokumen	6.103.594.084	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	<i>Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total</i>				<2.1										
	<i>Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional</i>		72,76%		-		62,54%		63,00%		64,00%		64,00%		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah SSK	-	4 SSK		4 SSK	227.126.340	7 SSK	755.101.420	8 SSK	541.909.000	9 SSK	764.937.424	9 SSK	2.289.074.184	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna		3 KAMPUNG KB		3 KAMPUNG KB		4 KAMPUNG KB		5 KAMPUNG KB		6 KAMPUNG KB		6 KAMPUNG KB		Dinas Kesehatan, PP dan KB

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK	-			4 sekolah	5.000.000	5 Sekolah	110.146.200	6 Sekolah	98.183.000	7 Sekolah	22.937.931	7 Sekolah	236.267.131	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah SSK baru yang dibentuk	-			2 SSK	5.000.000	3 SSK	110.146.200							
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota								7 Dokumen	98.183.000	7 Dokumen	22.937.931	7 Dokumen	236.267.131	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data keluarga yang diupdating	-			100%	222.126.340	100%	644.955.220	100%	443.726.000	100%	741.999.493	100%	2.052.807.053	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah kelurahan yang telah melakukan updating data keluarga	-			27 kelurahan	222.126.340	27 kelurahan	644.955.220							
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga								27 Laporan	391.211.000	27 Laporan	684.232.993	27 Laporan	1.942.525.553	Dinas Kesehatan, PP dan KB

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB								24 Dokumen	52.515.000	24 Dokumen	57.766.500	24 Dokumen	110.281.500	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya <i>Unmet Need</i>	-	11,60%		16,93%	2.733.736.500	8,00%	2.554.439.400	7,50%	2.014.412.412	7,00%	4.472.681.808	7,00%	11.775.270.120	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	-			100%	1.507.430.000	100%	309.395.000	100%	601.248.212	100%	745.627.833	100%	3.163.701.045	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja								27 Organisasi	5.450.900	27 Organisasi	5.995.990	27 Organisasi	11.446.890	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal								2 Dokumen	256.957.200	2 Dokumen	282.652.920	2 Dokumen	539.610.120	
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPk	Jumlah jenis sarana KIE Program KKBPk	-			4 Jenis	-	4 Jenis	187.895.000							
	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)								4 unit	41.216.200	4 Unit	45.337.820	4 Unit	274.449.020	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	82.500.000	2 Dokumen	157.500.000	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								12 Laporan	46.800.000	12 Laporan	51.480.000	12 Laporan	98.280.000	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Kelompok yang terpapar Program Bangga Kencana (BKB, BKR, PIK R, UPPKS, BKL, IMP, PKB, PUS)	3 balai			6 Kelompok	1.507.430.000	6 Kelompok	121.500.000							
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)								72 Laporan	135.823.912	12 Laporan	233.661.103	12 Laporan	1.998.415.015	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK								2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	44.000.000	2 Laporan	84.000.000	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase kader yang melakukan updating data	-			100%		100%	128.520.000	100%	748.155.200	100%	952.212.040	100%	1.828.887.240	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia								3 Unit	740.654.000	3 Unit	814.719.400	3 Unit	1.555.373.400	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang melakukan updating data	-			148 kader	-	148 kader	128.520.000							
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)								150 Orang	7.501.200	150 Orang	137.492.640	150 Orang	273.513.840	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka Drop Out				<15%	1.226.306.500	<19.5%	1.995.774.400	<18%	544.259.000	<17.5%	2.308.374.760	<17.5%	6.074.714.660	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alokon dan sarana penunjang pelayanan KB	-			22 faskes	-	22 faskes	30.000.000							

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								22 Laporan	16.200.000	27 Laporan	54.918.549	27 Laporan	101.118.549	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah aseptor yang mendapatkan pelayanan KB baru MKJP	-			651 aseptor	128.299.500	661 Aseptor	797.070.400							
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)								651 Orang	482.760.000	661 Orang	1.274.664.985	661 Orang	2.682.794.885	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah paket pengadaan	-			2 paket	1.098.007.000	5 paket	1.168.704.000							
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB							.. Unit	2 Unit	31.499.000	2 Unit	963.611.226	2 Unit	3.261.821.226	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								4 Laporan	13.800.000	4 Laporan	15.180.000	4 Laporan	28.980.000	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan, IMP dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan Kesertaan ber KB	-			100%	-	100%	120.750.000	100%	120.750.000	100%	466.467.175	100%	707.967.175	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB								7 Dokumen	-	7 Dokumen	305.091.554	7 Dokumen	305.091.554	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	-			3 kegiatan	-	3 kegiatan	120.750.000							
	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB								7 Kampung	120.750.000	7 Kampung	161.375.621	7 Kampung	402.875.621	Dinas Kesehatan, PP dan KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	81,67%	82,25%		80,25%	210.526.080	81,00%	1.331.867.514	82,00%	1.023.624.500	83,00%	1.272.086.827	83,00%	3.838.104.921	Dinas Kesehatan, PP dan KB

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	-			28%	210.526.080	30%	1.331.867.514	31%	1.023.624.500	32%	1.272.086.827	32%	3.838.104.921	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-			2 Kegiatan	13.412.600	2 Kegiatan	818.750.514							
	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								210 Orang	204.706.500	230 Orang	79.991.383	230 Orang	1.116.860.997	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-			3 Kegiatan	197.113.480	3 Kegiatan	513.117.000							

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								32 Laporan	397.178.000	12 Laporan	728.181.444	12 Laporan	1.835.589.924	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								225 Orang	421.740.000	225 Orang	463.914.000	225 Orang	885.654.000	
TOTAL				-		116.959.994.231		234.500.058.151		248.774.616.086		324.519.130.090		923.945.993.387	

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase rumah tangga sehat	-	68,00%	69,00%	70,00%	71,00%	72,00%	72,00%
2	Persentase rumah sehat	-	84,00%	86,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%
3	Persentase rata-rata upaya kesehatan bersumber masyarakat berstrata puri	-	60,38%	61,50%	62,00%	62,50%	63,00%	63,00%
4	Indeks Keluarga Sehat	-	0,45	0,50	0,52	0,54	0,56	0,56

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	-	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%	92,00%
6	Persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan (ASPAK) Puskesmas	-	84,32%	84,32%	84,60%	84,80%	85,00%	85,00%
7	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standart	-	70,00%	72,00%	74,00%	76,00%	78,00%	78,00%
8	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	-	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%
9	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat puskesmas se-Kota Madiun	-	83,57%	86,00%	86,20%	86,40%	86,60%	86,60%
10	Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas	-	92,34%	86,63%	86,92%	87,53%	88,11%	88,11%
11	<i>Contraception Prevalency Rate</i> diatas rata-rata nasional	-	72,76%	62,17%	62,54%	63,00%	64,00%	64,00%

Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Angka Harapan Hidup	72,75	72,81	72,81	72,81	72,81	72,81	72,81	Indikator sasaran kota
2	Persentase Keluarga Sehat		0%	50%	52%	54%	56%	56%	Indikator tujuan PD
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,84	83,54	81,99	-	-	-	82,66	Indikator Sasaran PD (Lama)
4	Persentase Indikator Standart Pelayanan Minimal mencapai target	66,67%	50,00%	50,00%	-	-	-	58,33%	Indikator Sasaran PD (Lama)
5	Persentase rumah tangga sehat		68,00%	69,00%	70,00%	71,00%	72,00%	72,00%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase rumah sehat		84,00%	86,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase rata-rata upaya kesehatan bersumber masyarakat berstrata puri		60,38%	61,50%	62,00%	62,50%	63,00%	63,00%	Indikator Sasaran PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Indeks Keluarga Sehat		0,45	0,5	0,52	0,54	0,56	0,56	Indikator Sasaran PD
9	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi		88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%	92,00%	Indikator Sasaran PD
10	Persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan Puskesmas		84,32%	84,32%	84,60%	84,80%	85,00%	85,00%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standart		70,00%	72,00%	74,00%	76,00%	78,00%	78,00%	Indikator Sasaran PD
12	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan		96,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	Indikator Sasaran PD
13	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat puskesmas se- Kota Madiun		83,57%	86,00%	86,20%	86,40%	86,60%	86,60%	Indikator Sasaran PD
14	Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas		92,34%	86,63%	86,92%	87,53%	88,11%	88,11%	Indikator Sasaran PD
15	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan mencapai target		66,67%	50,00%	66,67%	75,00%	75,00%	75,00%	Indikator Program PD
16	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	-	88%	89%	90%	91%	92%	92%	Indikator Program PD
17	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	-	85%	86%	87%	88%	89%	89%	Indikator Program PD
18	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	68,63%	60,38%	61,50%	62%	62,50%	63,00%	63,00%	Indikator Program PD
19	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	Lppd
20	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
21	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	99.31%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
22	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,04%	100.04%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
23	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100.72%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
24	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,12%	98.82%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
25	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,51%	79.41%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
26	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	107,18%	104.63%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
27	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93,20%	76.10%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
28	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89,21%	55.85%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
29	Persentase penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	106,54%	112.74%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
30	Persentase Orang dengan gangguan Jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	107,44%	108.90%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
31	Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar	83,43%	63,78%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
32	Persentase orang dengan resiko terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i> mendapatkan pelayanan deteksi dini <i>Human Immunodeficiency Virus</i> sesuai standar	103,70%	111.81%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
33	Jumlah Rumah Sakit Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	-	8	8	8	8	8	8	Lppd
34	Jumlah Rumah Sakit dibina dan dipersiapkan akreditasinya	-	8	8	8	8	8	8	Lppd
35	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Lppd
36	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Antenatal	-	330	330	330	330	330	330	Lppd
37	Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan Yang Tersedia	-	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
38	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	-	291	291	291	291	291	291	Lppd
39	Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan Yang Tersedia	-	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	Lppd
40	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Neonatal Esensial Sesuai Standar	-	289	289	289	289	289	289	Lppd
41	Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan Yang Tersedia	-	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	Lppd
42	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	-	571	571	571	571	571	571	Lppd
43	Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan Yang Tersedia	-	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Lppd
44	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	-	371	371	371	371	371	371	Lppd
45	Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan Yang Tersedia	-	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
46	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	578	578	578	578	578	578	Lppd
47	Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan Yang Tersedia	-	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
48	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1286	1286	1286	1286	1286	1286	Lppd
49	Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan Yang Tersedia	-	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
50	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	156	156	156	156	156	156	Lppd
51	Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan Yang Tersedia	-	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
52	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	169	169	169	169	169	169	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
53	Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan Yang Tersedia	-	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
54	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	30	30	30	30	30	30	Lppd
55	Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan Yang Tersedia	-	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	Lppd
56	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	748	748	748	748	748	748	Lppd
57	Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan Yang Tersedia	-	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
58	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	376	376	376	376	376	376	Lppd
59	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	100%	99.31%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
60	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,04%	100.04%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
61	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	100%	100.72%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
62	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100,12%	98.82%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
63	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	97,51%	79.41%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
64	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	107,18%	104.63%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
65	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	93,20%	76.10%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
66	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	89,21%	55.85%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
67	Persentase Penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	106,54%	112.74%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
68	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	107,44%	108.90%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
69	Persentase orang terduga Tuberculosis mendapatkan pelayanan Tuberculosis sesuai standar	83,43%	63,78%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
70	Persentase orang dengan resiko terinfeksi <i>human immunodeficiency virus</i> mendapatkan pelayanan deteksi dini <i>human immunodeficiency virus</i> sesuai standar	103,70%	111.81%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
71	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	-	-	-	-	0,81	Indikator Lama
72	Status Akreditasi Standart Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	-	Lulus Paripurna Akreditasi SNARS	-	-	-	-	Lulus Paripurna Akreditasi SNARS	Indikator Lama
73	Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	-	79,17	-	-	-	-	79,17	Indikator Lama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
74	Persentase Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	-	50	-	-	-	-	50	Indikator Lama
75	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	100	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
76	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
77	Persentase Penyediaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	-	91,15	-	-	-	-	91,15	Indikator Lama
78	Persentase Penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100	95,17	-	-	-	-	95,17	Indikator Lama
79	Persentase Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standart	-	25	-	-	-	-	25	Indikator Lama
80	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa	-	-1940	-	-	-	-	-1940	Indikator Lama
81	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	-	75	-	-	-	-	75	Indikator Lama
82	<i>Contraception Prevalency Rate diatas rata-rata nasional</i>		72,76%	62,17%	62,54%	63,00%	64,00%	64,00%	Indikator Sasaran PD
83	Persentase Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	≤ 5.58%	≤ 4.95%	≤ 4.8%	-	-	-	≤ 4.8%	Indikator Program PD (Lama)
84	Menurunnya Unmet Need	4.2%	11,60%	16,93%	8,00%	7,50%	7,00%	7,00%	Indikator Program PD
85	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	79,10%	82,25%	80,25%	81,00%	82,00%	83,00%	83,00%	Indikator Program PD
86	Meningkatnya Jumlah SSK		4 SSK	4 SSK	7 SSK	8 SSK	9 SSK	9 SSK	Indikator Program PD
87	Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna		3 KAMPUNG KB	3 KAMPUNG KB	4 KAMPUNG KB	5 KAMPUNG KB	6 KAMPUNG KB	6 KAMPUNG KB	Indikator Program PD
88	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	-	72,76%	62,17%	62,54%	63,00%	64,00%	64,00%	Lppd
89	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	4.2%	11,60%	16,93%	8,00%	7,50%	7,00%	7,00%	Lppd
90	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan	-	Sudah ada dokumen GDPK tetapi masi belum diperdakan	Sudah ada dokumen GDPK tetapi masi belum diperdakan	-	-	-	Sudah ada dokumen GDPK tetapi masi belum diperdakan	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
91	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	-	27 Tahun	Wanita >21 tahun	Wanita >21 tahun	Wanita >21 tahun	Wanita >21 tahun	Wanita >21 tahun	Lppd
92	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	0,45	0,46	0,54	0,53	0,52	0,51	0,51	Lppd
93	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Lppd
94	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	-	17	16	16	16	16	16	Lppd
95	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	-	98,04%	97,78%	97,78%	97,78%	97,78%	97,78%	Lppd
96	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	72,76	50,00%	51,00%	52,00%	53,00%	53,00%	Lppd
97	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	-	56	56	56	56	56	56	Lppd
98	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	-	44,90%	45,00%	45,01%	45,02%	45,03%	45,03%	Lppd
99	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	-	64,96%	64,96%	64,96%	64,96%	64,96%	64,96%	Lppd
100	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
101	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total	1,91	1,98	<2.1	-	-	-	<2,1	Indikator Lama
102	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	-	42,88	-	-	-	-	42,88	Indikator Lama

E. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Permasalahan
1	Masih perlunya peningkatan dan penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat sebagai tempat pedestrian untuk penunjang aktivitas masyarakat
2	Kurang optimalnya pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Madiun dengan daerah sekitar
3	Belum optimalnya fungsi dan kondisi infrastruktur drainase kota
4	Belum optimalnya revitalisasi sarana dan prasarana pengendalian banjir
5	Belum optimalnya kualitas bangunan gedung di Kota Madiun
6	Belum berjalannya kegiatan RTBL dikarenakan masih penyusunan RTRW dan RDTR
7	Belum adanya penyusunan data base dan monitoring yang lebih komprehensif sebagai pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sesuai Permendagri 59 Tahun 2021.
8	Belum adanya penyesuaian tupoksi untuk menyesuaikan SOTK baru sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai arahan dan regulasi yang berlaku dan meminimalkan tumpang tindih bidang pekerjaan.
9	Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum terincinya tata ruang
10	Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan Ruang Kota
11	Belum terwujudnya kerjasama antar daerah di Bidang Penataan Ruang
12	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
13	Belum terpenuhinya luasan Ruang Terbuka Hijau sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
14	Belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog

No	Permasalahan
15	Belum adanya pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang di Bidang Penataan Ruang
16	Belum adanya kesesuaian regulasi yang berlaku di Kota Madiun dengan perkembangan hukum di bidang Penataan Ruang
17	Belum optimalnya pencapaian Standart Pelayanan terkait persetujuan bangunan gedung (PBG)
18	Belum adanya regulasi pada kawasan cepat tumbuh
19	Belum dilaksanakannya sosialisasi peruntukan Penataan ruang

Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Isu Strategis
1	Pembangunan Jalan dan jembatan untuk kenyamanan masyarakat
2	Penanganan banjir di wilayah tertentu di Madiun
3	Penyediaan akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang /hari
4	Penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama maks 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun seta pengoptimalan sistem drainase kota yang disebabkan tingginya sedimentasi pada saluran
5	Penyediaan pelatihan sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi
6	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pencapaian Standart Pelayanan Minimal penataan ruang tidak tercapai. Pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota juga terkadang melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana Penataan ruang yang ada
7	Sebagai wilayah perkotaan, alih fungsi lahan di Kota Madiun cukup tinggi mengingat keterbatasan lahan dan permintaan lahan yang tinggi maka amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terkait dengan Ruang Terbuka Hijau belum terpenuhi. Peningkatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya publik menghadapi masalah dengan terbatasnya jumlah lahan yang dapat di dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau
8	Belum sepenuhnya Rencana Penataan Ruang Wilayah menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana Penataan ruang
9	Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana Penataan ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain
10	Belum adanya dokumen perencanaan teknis sebagai pedoman pemberian perijinan pemanfaatan ruang yang melibatkan masyarakat pada seluruh kawasan prioritas

No	Isu Strategis
11	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja
12	Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan, di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan Penataan ruang daerah yang telah ditetapkan
13	Tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota
14	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan ruang dan pengawasan bangunan

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Indeks Kenyamanan Kota (livable city)	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks infrastruktur
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya infrastruktur Kota Yang Mantab	Indeks infrastruktur	96,85	98,06	98,25	98,42	98,59

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	18.31	20.31	22.31	24.31
2	Meningkatnya Aksesibilitas kota yang merata	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	94%	94.5%	95%	95.5%	96%

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan	Persentase rawan banjir/genangan	-	20.05%	19.09%	18.47%	17.34%
		Persentase kawasan bebas banjir/genangan			80,89%	81,58%	82,82%
		Persentase Terbangunnya saluran Limbah Domestik	-	-	15%	15%	15%
		Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas pembangunan gedung pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	-	100%	100%	100%	100%
5	Pemanfaatan ruang yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
				2021		Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	2022		Indikator Sesuai Kemedagri Nomor 0505889 tahun 2021	2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah				
				Target	pendanaan		Target	pendanaan		Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Sasaran			Meningkatnya kualitas pembangunan gedung pemerintah	Persentase bangunan gedug sesuai dengan ketentuan	100%				100%			100%		100%				
	1	038	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	20.613.450.000	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	18.746.270.000	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	87.050.109.000	100%	28.514.618.000	100%	28.514.618.000		
	1	038	201 KEGIATAN Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah daerah kabupaten/ kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	20.613.450.000	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	18.746.270.000	Jumlah bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	87.050.109.000	100%	28.514.618.000	100%	28.514.618.000		
	1	038	20101 SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran tenaga ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase jumlah permohonan yang ditindaklanjuti	50 pemohon	200.000.000	Jumlah permohonan yang ditindaklanjuti	50 pemohon	220.000.000	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran tenaga ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	50 dokumen	220.000.000	50 dokumen	266.200.000	50 pemohon	266.200.000		

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	1	0	0	2	02	SUB KEGIATAN Perencanaan , Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Perencanaan yang ditindaklanjuti	5 gedung	20.413.450.000	Jumlah gedung yang ditindaklanjuti	8 gedung	18.526.270.000	Jumlah Dokumen Perencanaan , Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	8 Dokumen	86.830.109.000	8 Dokumen	28.248.418.000	10 gedung	28.248.418.000
	1	0	1			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	-	500.000.000	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	47.68 %	540.000.000	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	62.83 %	500.000.000	77.98 %	653.400.000	94.95 %	653.400.000
	1	0	1	2		KEGIATAN Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat	100 orang	250.000.000	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat	200 orang	270.000.000	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat	200 orang	250.000.000	200 orang	326.700.000	200 orang	326.700.000
	1	0	1	2	04	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	Jumlah peserta	100 orang	250.000.000	Jumlah peserta	200 orang	270.000.000	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknis atau analis yang mengikuti pelatihan	200 orang	250.000.000	200 orang	326.700.000	200 orang	326.700.000
	1	0	1	2		KEGIATAN Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	-	250.000.000	Jumlah rekomendasi IUJK	47.68 %	270.000.000	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	62.83 %	250.000.000	77.98 %	326.700.000	94.95 %	326.700.000
	1	0	1	2	03	SUB KEGIATAN Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Kontruksi	Jumlah BUJK	50 BUJK	250.000.000	Jumlah BUJK	50 BUJK	270.000.000	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha dan konstruksi	50 Orang	250.000.000	50 Orang	326.700.000	50 BUJK	326.700.000
Sasaran						Meningkatnya kualitas Sanitasi Lingkungan	Persentase terbangunnya Limbah Domestik						Persentase terbangunnya Limbah Domestik	15%		15%		15%	
	1	0	0			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Presentase bangunan sesuai ketentuan	100%	17.433.500.000		100%	14.499.606.270	Presentase bangunan sesuai ketentuan	100%	150.221.657.291	100%	23.296.118.408	100%	23.296.118.408

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	1	0	0	2		KEGIATAN Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya di Daerah/ Kota	Presentase bangunan sesuai ketentuan	100%		100%	14.499.606.270	Presentase bangunan sesuai ketentuan	100%	150.221.657.291	100%	23.296.118.408	100%	23.296.118.408
	1	0	0	2	03	SUB KEGIATAN Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Jumlah lokasi	3 Kec		3 Kec	14.499.606.270	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 Kawasan	149.621.657.291	27 Kawasan	23.296.118.408	3 Kec	23.296.118.408
	1	0	0	2	04	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Dan Lingkungan						Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Sistem Perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	27 kawasan	600.000.000	27 kawasan	650.000.000	27 Kawasan	650.000.000
	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum			100%	101.669.000	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	100%	20.000.000	100%	123.019.490	100%	123.019.490
	1	0	0	2		KEGIATAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum			100%	101.669.000	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	100%	20.000.000	100%	123.019.490	100%	123.019.490

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	1	0	0	2	01	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen			Jumlah dokumen	1 dokumen	101.669.000	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	123.019.490	1 dokumen	123.019.490
	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rawan Banjir/Genangan		12.926.919.000	Persentase Rawan Banjir/Genangan	20.5%	8.369.843.440	Persentase Rawan Banjir/Genangan	19.09%	34.632.790.040	18.47%	31.368.781.730	17.34%	
	1	0	0	2		KEGIATAN Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah	Persentase Rawan Banjir/Genangan		12.926.919.000	Persentase Rawan Banjir/Genangan	20.5%	8.369.843.440	Persentase Rawan Banjir/Genangan	19.09%	34.632.790.040	18.47%	31.368.781.730	17.34%	
	1	0	0	2	28	SUB KEGIATAN Rehabilitasi stasiun pompa banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhab	1 stasiun	194.913.000	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhab	1 stasiun	470.353.000	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	1 Unit	249.500.000	1 Unit	278.424.630	1 stasiun	278.424.630
	1	0	0	2	11	SUB KEGIATAN Pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir	Jumlah pintu air/bendung yang dibangun	2 pintu air	2.686.133.500	Jumlah pintu air/bendung yang dibangun	2 pintu air	3.559.900.400	Jumlah pintu air atau bendung pengendali banjir yang dibangun	2 Unit	-	2 Unit	6.655.000.000	2 pintu air	6.655.000.000
	1	0	0	2	38	SUB KEGIATAN Peningkatan Stasiun Pompa banjir							Jumlah Stasiun pompa Banjir yang Ditingkatkan		12.130.350.000				
	1	0	0	2	46	SUB KEGIATAN Normalisasi/ Restorasi sungai	Panjang sungai yang dinormalisasikan	1.5 km	9.590.582.500	Panjang sungai yang dinormalisasikan	1.5 km	3.241.050.040	Panjang sugai yang dinormalisasi atau direstorasi	1.5 km	21.052.940.040	1.5 km	23.884.456.200	1.5 km	23.884.456.200
	1	0	0	2	55	SUB KEGIATAN Operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir	Persentase Berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	100%	455.290.000	Persentase Berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	100%	1.098.540.000	Jumlah stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit	1.200.000.000	1 Unit	550.900.900	100%	550.900.900
	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Rawan Banjir/Genangan		19.218.292.000	Presentase panjang drainase dalam kondisi baik	20.5%	20.731.396.010	Presentase panjang drainase dalam kondisi baik	19.09%	40.694.770.000	18.47%	53.518.980.020	17.34%	53.518.980.020

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	1	0	0	2		KEGIATAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten/ Kota	Panjang drainase kondisi baik	90,50 %	19.218.292.000	Panjang drainase kondisi baik	90,5%	20.731.396.010	Panjang drainase kondisi baik	95%	40.694.770.000	95%	53.518.980.020	95%	53.518.980.020
	1	0	0	2	01	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti	8 dok	997.400.000	Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti	8 dok	992.400.000	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	8 Dokumen	1.500.000.000	8 Dokumen	1.206.854.000	8 dok	1.206.854.000
	1	0	0	2	05	SUB KEGIATAN Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dibangun	1.5 km	16.007.692.000	Panjang drainase yang dibangun	1.5 km	17.141.500.000	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	8 m	36.594.770.000	8 m	46.100.789.460	1.5 km	46.100.789.460
	1	0	0	2	09	SUB KEGIATAN Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dipelihara	10 km	2.213.200.000	Panjang drainase yang dipelihara	3 kecamatan	2.597.496.010	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	8 m	2.600.000.000	8 m	6.211.336.560	3 kecamatan	6.211.336.560
Sasaran						Meningkatnya aksesibilitas kota yang merata	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	94,5%		Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	95%	-	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab atau bendung pengendali banjir kondisi mantab	95.5%	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab atau bendung pengendali banjir kondisi mantab -	96%	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab atau bendung pengendali banjir kondisi mantab	96%	
	1	0	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	94,5%	54.776.338.872	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95%	49.495.103.351	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	96%	144.441.800.000	96%	120.503.535.596	96%	132.553.889.156
	1	0	1	2		KEGIATAN Penyelenggaraan Jalan Kab/ Kota	Panjang jalan dalam kondisi mantap	94%	54.776.338.872	Panjang jalan dalam kondisi mantap	95%	49.495.103.351	Panjang jalan dalam kondisi mantap	96%	144.441.800.000	96%	120.503.535.596	96%	132.553.889.156
	1	0	1	2	01	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan teknis sistem	Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti	10 dok	2.514.650.000	Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti	10 dok	1.045.332.800	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan atvis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis,	10 dok	755.700.000	10 dok	1.460.409.500	10 dok	1.606.450.450

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						pengembangan jalan						bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian						
	1	0	1	2	02	SUB KEGIATAN Pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan jalan	Luas lahan yang dibebaskan	1,5 ha	308.250.000	Luas lahan yang dibebaskan	1.5 ha	500 m2	51.634.000.000	500 m2	36.338.115.000	1.5 ha	39.971.926.500	
	1	0	1	2	04	SUB KEGIATAN Survey kondisi jalan/ jembatan	Jumlah Dokumen	2 dok	411.900.000	Dokumen hasil survey	2 dok	2 dok	407.100.000	2 dok	494.321.300	2 dok	543.753.430	
	1	0	1	2	05	SUB KEGIATAN Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun	200 meter	27.628.115.672	Panjang jalan yang dibangun	2 km	2 km	16.130.900.000	2 km	47.296.865.070	2 km	52.026.551.577	
	1	0	1	2	06	SUB KEGIATAN Pelebaran jalan menuju standart	Jumlah ruas yang dilebarkan	6 ruas	1.725.850.000	Jumlah ruas yang dilebarkan		2 km	216.050.000	2 km	-		-	
	1	0	1	2	07	SUB KEGIATAN Pelebaran jalan menambah lajur	Jumlah ruas yang ditambah lajurnya	1 ruas	3.123.750.000	Jumlah ruas yang ditambah lajurnya	1 ruas	2 km	38.451.900.000	2 km	4.493.673.800	1 ruas	4.943.041.180	
	1	0	1	2		SUB KEGIATAN Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhab			Panjang jalan yang direhab			-		-		-	
	1	0	1	2	10	SUB KEGIATAN Pemeliharaan berkala jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	6 km	15.223.050.000	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	6 km	12 km	26.889.900.000	12 km	24.016.243.834	6 km	26.417.868.217	
	1	0	1	2	11	SUB KEGIATAN Pemeliharaan rutin jalan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	28 ruas	2.326.123.200	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	28 ruas	17 km	5.805.900.000	17 km	2.951.595.592	28 ruas	3.246.755.151	
	1	0	1	2	12	SUB KEGIATAN Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	1 jembatan	1.293.800.000	Jumlah jembatan yang dibangun	1 jembatan	28 m	3.922.100.000	28 m	3.179.335.500	28 m	3.497.269.050	
	1	0	1	2	19	SUB KEGIATAN Pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	10 jembatan	220.850.000	Jumlah jembatan yang dipelihara	10 jembatan	120 m	228.250.000	120 m	272.976.000	120 m	300.273.600	

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Sasaran					Pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	100%		Persentase ketaatan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	100%		-	100%	-				
	1	0	1		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RT RW	100%	1.500.000.000	Ketaatan terhadap RT RW		2.730.000.000	Ketaatan terhadap RT RW		1.100.000.000		2.274.800.000		
	1	0	1	2	KEGIATAN Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kota/ Kab	Dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 dok	800.000.000	Dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 dok	1.960.000.000	Dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 dok	800.000.000	1 dok	1.343.100.000	1 dok	1.343.100.000
	1	0	1	2	01 SUB KEGIATAN Pelaksanaan , persetujuan, substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kab/ Kota	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	800.000.000	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	180.000.000	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 dok	200.000.000	1 dok	217.800.000	1 dok	217.800.000
		0	1	2	02 SUB KEGIATAN Pelaksanaan , persetujuan, substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen yang disusun			Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	850.000.000	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	1 dok	200.000.000	1 dok	1.028.500.000	1 dok	1.028.500.000
		0	1	2	03 SUB KEGIATAN Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi			Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	850.000.000	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	1 dok	200.000.000	1 dok	1.028.500.000	1 dok	1.028.500.000
		0	1	2	04 SUB KEGIATAN Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah terlaksananya sosialisasi peraturan daerah dibidang penataan ruang			Jumlah terlaksananya sosialisasi peraturan daerah dibidang penataan ruang	3 kali	80.000.000	Jumlah dokumen sosialisasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 dok	200.000.000	1 dok	96.800.000	3 kali	96.800.000
	1	0	1	2	KEGIATAN Koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	1 dok	300.000.000	Dokumen Pemanfaatan Ruang	1 dok	330.000.000	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	1 dok	100.000.000	1 dok	399.300.000	1 dok	399.300.000

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
				3															
	1	0	1	2	01	SUB KEGIATAN Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan Ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	100%	300.000.000	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	1 dok	330.000.000	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	1 dok	100.000.000	1 dok	399.300.000	1 dok	399.300.000
	1	0	1	2		KEGIATAN Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan Ruang daerah Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 dok	400.000.000	Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 dok	440.000.000	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 dok	200.000.000	1 dok	532.400.000	1 dok	532.400.000
	1	0	1	2	02	SUB KEGIATAN Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Persentase penanganan pelanggaran penataan ruang	100%	400.000.000	Persentase penanganan pelanggaran penataan ruang	1 dok	440.000.000	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	1 dok	200.000.000	1 dok	532.400.000	1 dok	532.400.000
Sasaran						Meningkatnya kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	-		Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	18.31 %		Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	20.31	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	22.31 %	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	24.31 %	
	SUB JUMLAH A							126.968.499.872		215.085.333.260		458.661.126.331		260.253.253.245					
	1	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	100%	10.318.181.500			10.888.336.546	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah		14.290.176.175		12.801.800.000		
	1	0	0	0		KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	39.666.240		100%	40.000.000	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	50.000.000	100%	48.400.000	100%	53.240.000

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	1	0	0	0	01	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan	8 dok	39.666.240		8 dok	40.000.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dok	50.000.000	8 dok	48.400.000	8 dok	53.240.000
	1	0	0	0		KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	6.134.492.500		100%	6.138.831.500	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	7.855.377.620	100%	7.260.000.000	100%	7.986.000.000
	1	0	0	0	01	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	6.134.492.500		100%	6.138.831.500	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 orang	7.855.377.620	50 orang	7.260.000.000	100%	7.986.000.000
	1	0	0	0		KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	222.044.000		100%	240.000.000	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	250.000.000	100%	290.400.000	100%	319.440.000
	1	0	0	0	09	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi kebutuhan perjalanan dinas	60 kali	222.044.000		60 kali	240.000.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 laporan	250.000.000,00	60 laporan	290.400.000	60 kali	319.440.000
	1	0	0	0		KEGIATAN Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan pemerintah daerah	100%	82.423.855		100%	89.800.000	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan pemerintah daerah	100%	1.485.048.555	100%	108.900.000	100%	119.790.000
	1	0	0	0	10	SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	2 paket	82.423.855		2 paket	89.800.000	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor	10 unit	201.015.930,00	10 unit	108.900.000	2 paket	119.790.000
	0	0	0	0	02	SUB KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas	1 Unit			1 Unit		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	1.284.032.625,00	2 unit			
	1	0	0	0		KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Urusan pemerintah daerah	100%	3.166.896.705		100%	3.649.955.046	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	100%	3.450.000.000	100%	4.210.800.000	100%	4.631.880.000
	1	0	0	0	03	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa	Jumlah pemenuhan peralatan/	10 jenis	3.166.896.7		10 jenis	3.649.955	Jumlah laporan jasa peralatan dan	10 laporan	3.450.000	10 laporan	4.210.800	10 jenis	4.631.880.0

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			2		peralatan dan perlengkapan kantor	perlengkapan kantor yang representatif		05		.046	n	.000	n	.000		00		
	1	0	0	0	KEGIATAN Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	100%	672.658.200	100%	729.750.000	100%	1.199.750.000	100%	883.300.000	100%	971.630.000		
	1	0	0	0	01	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan	59 buah	315.408.200	59 buah	340.000.000	59 unit	750.000.000	59 unit	411.400.000	59 buah	452.540.000	
	1	0	0	0	10	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung	1 gedung	357.250.000	1 gedung	389.750.000	1 unit	449.750.000	1 unit	471.900.000	1 gedung	519.090.000	
SUB JUMLAH B								10.318.181.500		10.816.500.000		14.290.176.175		12.801.800.000				
TOTAL								137.286.681.372	-	126.102.224.617		472.951.302.506		273.055.053.245				

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase rawan banjir/genangan	-	-	20.05%	19.09%	18.47%	17.34%	17.34%
	Persentase terbangunnya saluran limbah domestik	-	-	-	15%	15%	15%	15%
4	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	93,64%	94,03%	94,50%	95,00%	95,50%	96%	96%

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Infrastruktur	96,72	96,85	98,06	98,25	98,42	98,59	98,59	Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
2	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	-	-	79,84%	80,89%	81,58%	82,82%	82,82%	Indikator Sasaran PD
3	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran dan Indikator Program PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase Rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	93,64%	94,03%	94,50%	95,00%	95,50%	96%	96%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase jalan dalam kondisi mantab			94,50%	95,00%	95,50%	96%	96%	Indikator Program PD
8	Persentase rawan banjir/genangan			20,05	19,09	18,47	17,34	17,34	Indikator Program PD
9	Persentase pelaku jasa kontruksi yang memenuhi standar kompetensi	-	-	47,68%	62,83%	77,98%	94,95%	94,95%	Indikator Program PD
10	Persentase Rumah Tangga yang terlayani kebutuhan air minum	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
11	Presentase panjang drainase dalam kondisi baik	90,96%	90,40%	80,03%	80,06%	80,09%	80,12%	80,12%	Indikator Program PD
12	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
13	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
14	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	-	79.47%	79.47%	79.47%	79.47%	79.47%	79.47%	Lppd
15	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
16	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
17	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	-	96.58%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
18	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	Lppd
19	Rasio kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan kab/kota	-	72.65%	72,67	72,68	72,69	72,7	72,7	Lppd
20	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	-	94.03%	94,04%	94,05%	94,06%	94,08%	94,08%	Lppd
21	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	48%	54.5%	59.4%	67.8%	59%	78%	Lppd
22	Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Suangai kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	3,8 Km ²	3,7 Km	3,5 Km	3,3Km	3,2 Km	3,2 Km	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	19.334 M	19.334 M	19.334 M	19.334 M	19.334 M	19.334 M	Lppd
24	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota (HA)	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
25	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di Wilayah Sungai kewenangan kab/kota (ha)	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
26	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Suangai Kewenangan kabupaten/kota	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
27	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
28	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
29	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
30	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
31	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
32	Penetapan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum kabupaten/kota (Ada /Tidak)	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
33	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kab/Kota (Ada/Tidak)	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
34	Jumlah Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Unit Pelayanan Teknis Daerah Kab/Kota Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Ada/Tidak)	-	1	1	1	1	1	1	Lppd
35	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
36	Jumlah kerjasama penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
37	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
38	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
39	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
40	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	-	0	0	0	0	0	0	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
41	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
42	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
43	Kinerja penyediaan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat akses dasar	-	100	100	100	100	100	100	Lppd
44	Kinerja penyediaan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat akses aman	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
45	Kinerja penyediaan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat akses aman	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
46	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
47	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
48	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
49	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
50	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
51	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	-	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Lppd
52	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	-	400	410	415	420	425	425	Lppd
53	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
54	Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
55	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	-	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Lppd
56	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	-	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Lppd
57	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota	-	230	230	230	230	230	230	Lppd
58	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Lppd
59	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam Surat Keputusan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	433,095 Km	433,095 Km	433,095 Km	433,095 Km	433,095 Km	433,095 Km	Lppd
60	Panjang jalan yang dibangun	-	0,654 Km	0,5 km	0,45 km	0,45 km	0,4 km	0,4 km	Lppd
61	Panjang jembatan yang dibangun	-	0	18 m	20 m	20 m	10 m	10 m	Lppd
62	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	-	5,32 Km	3,5 km	3,5 km	3,5 km	3,5 km	3,5 km	Lppd
63	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
64	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	-	14,422 Km	9,4 km	5 km	5 km	5 km	5 km	Lppd
65	Panjang jembatan yang direhabilitasi	-	0	0	0	0	0	0	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
66	Panjang jalan yang dipelihara	-	46 Km	40 km	40 km	40 km	40 km	40 km	Lppd
67	Panjang jembatan yang dipelihara	-	3,9 Km	3,9 Km	3,8 km	3,8 km	3,8 km	3,8 km	Lppd
68	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	-	2	3	3	3	3	3	Lppd
69	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	-	80	125	125	125	130	130	Lppd
70	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	-	30	30	30	30	30	30	Lppd
71	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
72	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
73	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
74	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
75	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
76	Tersedianya data dan profil Organisasi Perangkat Daerah sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	-	1	1	1	1	1	1	Lppd
77	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
78	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
79	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
80	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
81	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi badan usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang disetujui	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
82	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
83	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
84	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
85	Jumlah badan usaha yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional di wilayah kabupaten/kota	-	100	125	122	100	115	115	Lppd
86	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata di wilayah kabupaten/kota	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
87	Jumlah badan usaha yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-	50	50	50	50	50	50	Lppd
88	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-	100	100	100	100	100	100	Lppd
89	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi badan usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang disetujui	-	30	30	30	30	30	30	Lppd
90	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	50	50	50	50	50	50	Lppd
91	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
92	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	100	100	100	100	100	100	Lppd
93	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100	100	100	100	100	SPM
94	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	90	90	90	90	90	90	SPM
95	Persentase Ruang yang dimanfaatkan Rencana Tata Ruang Wilayah	100	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
96	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	92,41	94.03%	-	-	-	-	94.03%	Indikator Lama
97	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Tergenang	-	12 titik	-	-	-	-	12 titik	Indikator Lama

F. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Permasalahan
1	Rasio rumah layak huni di Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebesar 99,65%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 0,35% rumah tidak layak huni di Kota Madiun
2	Di Kota Madiun kawasan permukiman kumuh sudah tidak ada lagi (0%), namun demikian dalam rangka pencegahan tumbuh lagi permukiman kumuh masih perlu penanganan terhadap komponen komponen lingkungan yang belum tuntas
3	Rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Madiun pada tahun 2018 mencapai 98,87% sehingga masih terdapat 1,13% rumah tinggal yang belum bersanitasi
4	Masih terdapat kekurangan kebutuhan rumah (<i>backlog kepemilikan</i>) dalam rangka penyediaan perumahan bagi masyarakat didapatkan data pada tahun 2016 mencapai 3.569 unit
5	Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
6	Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman
7	Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah sebagai dampak pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun
8	Kecenderungan pertumbuhan investasi di Kota Madiun berdampak pada permintaan ijin lokasi untuk perolehan tanah dalam rangka investasi
9	Masih adanya tanah terlantar di Kota Madiun yang perlu penanganan
10	Adanya potensi konflik pertanahan di Kota Madiun seiring meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
11	Belum optimalnya sarana dan prasarana 83 makam aset Pemerintah Kota Madiun
12	<i>Coverage</i> layanan Penerangan Jalan Permukiman yang perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan Perumahan dan Permukiman di Kota Madiun dengan memperhatikan <i>maintenance</i> , penataan iluminasi serta peralatan dan utilitas pendukung lainnya
13	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau Kota Madiun hingga 20% dari luas wilayah kota

Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Isu Strategis
1	Pengembangan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dituangkan dalam peraturan di daerah
2	Pengembangan kebijakan penyediaan rumah tinggal, sarana dan prasarana serta utilitas perumahan yang dituangkan dalam peraturan di daerah
3	Penyediaan atas peningkatan kualitas lingkungan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah melalui program pemugaran, peremajaan atas pemukiman kumuh
4	Penyediaan rumah tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui fasilitasi pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah
5	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan sanitasi rumah tangga bagi masyarakat kurang mampu
6	Penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan permukiman berbasis partisipasi masyarakat
7	Peningkatan kualitas perumahan melalui penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan masyarakat berpenghasilan rendah
8	Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum maupun rumah tinggal masyarakat berpenghasilan rendah dengan melibatkan <i>Corporate Social Responsibility</i> /stakeholder dalam rangka pengembangan kerjasama antara <i>Corporate Social Responsibility</i> /stakeholder dalam bentuk kegiatan berbasis partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat pada lingkungannya.
9	Mengupayakan sumber-sumber dana alternatif untuk penyediaan/peningkatan kualitas rumah warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah diantaranya melalui <i>Corporate Social Responsibility</i>
10	Mengembangkan lingkungan permukiman tidak hanya sebagai kawasan hunian tetapi juga sebagai kawasan ekonomi/swasta
11	Pengembangan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Makam dan Penerangan Jalan Umum melalui peraturan di daerah
12	Optimalisasi tanah aset untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Makam dan Penerangan Jalan Umum Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun 2019-2024
13	Pengembangan sumber-sumber dana alternatif untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Makam dan Penerangan Jalan Umum diantaranya melalui <i>Corporate Social Responsibility</i>
14	Pengembangan kerjasama pemanfaatan tanah swasta/non pemda untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau
15	Pengembangan kerjasama dengan swasta/non pemda untuk pengembangan Penerangan Jalan Umum
16	Pemanfaatan teknologi hemat energi, ramah lingkungan dan murah untuk Penerangan Jalan Umum
17	Penyediaan tanah makam melalui perumahan
18	Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah sebagai dampak pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun
19	Kecenderungan pertumbuhan investasi di Kota Madiun berdampak pada permintaan izin lokasi untuk perolehan tanah dalam rangka investasi

No	Isu Strategis
20	Masih adanya tanah terlantar di Kota Madiun yang perlu penanganan
21	Adanya potensi konflik pertanahan di Kota Madiun seiring meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Indeks Kenyamanan Kota (livable city)	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks infrastruktur
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya permukiman yang ramah, maju dan berwawasan lingkungan	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	87,12%	89,13%	90,14%	91,17%	92,19%

Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	-	18,06	18,31	18,35	18,40
2	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Indeks Perumahan Permukiman	99,65 %	99,60 %	99,68 %	99,80 %	99,90 %
		Indeks Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Permakaman	74,59 %	76,34 %	78,48 %	80,62 %	82,76 %

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					URUSAN RUTIN																
				00001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran		100%	1.685.818.765	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.685.818.765	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
					Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		75 jenis	1.573.954.720	-	-	-	-	-	-	-	-	75 jenis	1.573.954.720	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
					Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		18 kali	111.864.045	-	-	-	-	-	-	-	-	18 kali	111.864.045	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Seluruh Indonesia
				00001	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100%	1.523.133.300	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.523.133.300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
					Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan		2 gedung	124.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 gedung	124.150.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
					Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan		57 unit	1.091.312.900	-	-	-	-	-	-	-	-	57 unit	1.091.312.900	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
					Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dilakukan pemeliharaan		45 unit	307.670.400	-	-	-	-	-	-	-	-	45 unit	307.670.400	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				00001	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
							001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor		4 jenis	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 jenis	3.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				0	000	1401	04	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/1 aporan yang disusun tepat waktu		100%	23.163.120	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	23.163.120	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							001	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/1 aporanyang disusun		10 dokumen	23.163.120	-	-	-	-	-	-	-	-	10 dokumen	23.163.120	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
								URUSAN PRIORITAS																
				1	104	1401	15	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Persentase Rumah Tinggal Layak Huni dan Bersanitasi		99,53 %	2.116.404.000	-	-	-	-	-	-	-	-	99,53 %	2.116.404.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							001	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan data/ Kajian Perumahan	Jumlah dokumen		1 dokumen	153.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	153.370.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							002	Kegiatan Penyediaan Perumahan	Jumlah lokasi		0 lokasi	152.726.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0 lokasi	152.726.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							003	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan	Jumlah lokasi		1 lokasi	179.888.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 lokasi	179.888.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							005	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Perumahan	Jumlah dokumen		1 dokumen	96.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	96.900.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							006	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah lokasi		1 kecamatan	799.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kecamatan	799.520.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							007	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan	Jumlah lokasi		10 lokasi	734.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 lokasi	734.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				2	2	1	1	Program	Persentase		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	100%		Dinas	Kota

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				0	0	5	Pelayanan Pertanahan	Pelayanan Pertanahan			116.650.0 00										116.650.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Madiun
							Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Pertanahan	Jumlah dokumen		2 doku men	116.650.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 doku men	116.650.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	1	1	Program Pengelolaan RTH, PUU dan Pemakaman	Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola		73,70 %	17.496.17 3.700	-	-	-	-	-	-	-	-	73,70 %	17.496.173.70 0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Ruang Terbuka Hijau	Jumlah dokumen		0 doku men	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 doku men	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya	Jumlah lokasi		1 lokasi	2.147.600 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	0 lokasi	2.147.600.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya	Jumlah lokasi		59 lokasi	9.322.871 .200	-	-	-	-	-	-	-	-	59 lokasi	9.322.871.200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							Kegiatan Penyediaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik		100 Titik	1.579.200 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 Titik	1.579.200.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik		5536 Titik	4.164.002 .500	-	-	-	-	-	-	-	-	5536 Titik	4.164.002.500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							Kegiatan Perencanaan, Pemantauan dan Pembuatan Data/ Kajian Pemakaman	Jumlah dokumen		0 doku men	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 doku men	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
							Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah lokasi		0 lokasi	82.500.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	0 lokasi	82.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
							0 1 1	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Pemakaman	Jumlah lokasi		7 lokasi	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	7 lokasi	200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
				1	0 4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			-	-	36.912.699.474		42.876.419.277		52.180.030.000		54.233.880.000		186.203.028.751	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks RB	1	0 4	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		-	-	80,01	9.312.818.310	80,10	12.021.276.047	80,20	14.364.030.000	80,30	14.413.880.000	80,30	50.112.004.357	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	0 4	0 1	2 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		-	-	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	47.000.000	100%	48.000.000	100%	185.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	0 4		2 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		-	-	20 Dokumen	45.000.000	20 Dokumen	45.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
									Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-	-	-	20 Laporan	47.000.000	20 Laporan	48.000.000	20 Laporan	185.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1	0 4	0 1	2 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		-	-	100%	5.016.194.000	100%	6.135.000.000	100%	6.135.000.000	100%	6.135.000.000	100%	23.421.194.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	100%	4.955.194.000	100%	6.074.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
									Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	-	-	-	34 orang/bulan	6.074.000.000	34 orang/bulan	6.074.000.000	34 orang/bulan	23.177.194.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		-	-	13 Dokumen	61.000.000	13 Dokumen	61.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
									Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		-	-	-	-	-	-	13 Laporan	61.000.000	13 Laporan	61.000.000	13 Laporan	244.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	100%	115.000.000	100%	130.010.000	100%	143.150.000	100%	132.000.000	100%	520.160.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	100%	105.000.000	100%	120.010.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
									Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	-	-	-	-	-	1 Paket	133.150.000	1 Paket	122.000.000	1 Paket	480.160.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1	0	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	100%	10.000.000	100%	10.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
									Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	-	34 orang	10.000.000	34 orang	10.000.000	34 orang	40.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				1	0	0	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum		-	-	100%	183.880.000	100%	183.880.000	100%	183.880.000	100%	183.880.000	100%	735.520.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1	0	0	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas		-	-	100%	183.880.000	100%	183.880.000	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
									Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-	-	-	20 laporan	183.880.000	20 laporan	183.880.000	20 laporan	735.520.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
				1	0	0	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah		-	-	-	-	100%	1.621.321.550	100%	3.375.000.000	100%	3.400.000.000	100%	8.396.321.550	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1	0	0	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan		-	-	-	-	100%	1.437.487.500	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
									Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	-	-	-	-	2 Unit	3.300.000.000	2 Unit	3.300.000.000	2 Unit	8.037.487.500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
				1	0	0	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor		-	-	-	-	100%	183.834.050	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	5 unit	75.000.000	8 unit	100.000.000	8 unit	358.834.050	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
				1	0	0	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah		-	-	100%	1.866.821.010	100%	1.969.295.065	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	100%	8.236.116.075	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				1	0	0	2	0															Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1	0	0	2	0																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	0	0	2	0																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	0	0	2	0																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	0	0	2	0																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	0	0	2	1																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	0	0	2	0																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
									Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		-	-	-	-	-	200 unit	480.000.000	200 unit	480.000.000	200 unit	1.883.371.300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
Terwujudnya permukiman yang ramah, maju dan berwawasan lingkungan		Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat		1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pengembangan Perumahan		-	-	100%	1.292.650.000	100%	2.745.911.000	100%	3.931.000.000	100%	4.900.000.000	100%	12.869.561.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1	04	02	201	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan		-	-	1 Dokumen	76.500.000	1 Dokumen	261.850.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	538.350.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1	04	02	206	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen data rumah yang dihasilkan		-	-	1 Dokumen	76.500.000	1 Dokumen	261.850.000	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
									Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	538.350.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
				1	04	02	203	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program		-	-	1 lokasi	1.216.150.000	1 lokasi	1.334.111.000	1 lokasi	3.731.000.000	1 lokasi	1.800.000.000	1 lokasi	8.081.261.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				1	04	02	206	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kota yang terpelihara		-	-	1 Lokasi	1.216.150.000	1 Lokasi	1.334.111.000	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
									Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan		-	-	-	-	-	3 Unit Rumah	3.731.000.000	3 Unit Rumah	1.800.000.000	3 Unit Rumah	8.081.261.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
				1	0	0	0		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		-	-	-	100%	1.149.950.000	100%	100.000.000	100%	3.000.000.000	100%	4.249.950.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
				1	0	0	0	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun		-	-	100%	1.149.950.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
									Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		-	-	-	-	-	1 laporan	100.000.000	1 laporan	3.000.000.000	100%	4.249.950.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
			Indeks Perumahan Permukiman	1	0	0	0		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh		-	-	98,50%	7.283.612.424	99,00%	5.618.815.000	99,50%	6.885.000.000	100%	6.920.000.000	100%	26.707.427.424	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	0	0	2		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani		-	-	0,50%	540.097.450	0,50%	102.000.000	0,50%	220.000.000	0,50%	220.000.000	0,50%	1.082.097.450	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	0	0	2	0	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh		-	-	1 Dokumen	209.286.000	1 Dokumen	102.000.000	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
									Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan		-	-	-	-	-	1 dokumen	220.000.000	1 dokumen	220.000.000	1 Dokumen	751.286.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Permukiman Kumuh																
				1	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dihasilkan		-	-	1 dokumen	330.811.450	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	330.811.450	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	0	0	2	0	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani		-	-	0,50 %	6.743.514.974	0,50 %	5.516.815.000	0,50 %	6.665.000.000	0,50 %	6.700.000.000	0,50 %	25.625.329.974	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen kajian/perencanaan		-	-	3 Dokumen	416.374.334	3 Dokumen	207.890.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
									Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pe mugaran Permukiman Kumuh			-	-	-	-	3 dokumen	315.000.000	3 dokumen	300.000.000	3 Dokumen	1.239.264.334	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
				1	0	0	2	0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase RTLH yang dilakukan perbaikan yang sesuai kriteria		-	-	100%	2.745.395.000	100%	1.458.500.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
									Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			-	-	-	-	160 unit	2.200.000.000	160 unit	2.200.000.000	160 unit	8.603.895.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
				1	0	0	2	0	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi pelaksanaan pembangunan pemugaran/pe remajaan permukiman kumuh		-	-	3 Lokasi	3.581.745.640	3 Lokasi	3.850.425.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
									Luas Permukiman Kumuh			-	-	-	-	16,41 ha	4.150.000.000	16,41 ha	4.200.000.000	16,41 ha	15.782.170.640	Dinas Perumahan Rakyat dan	Kota Madiun		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
																								Kawasan Permukiman	
			Indeks Pengelolaan PSU RTH, PJU dan Permakaman	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		-	-	100%	19.023.618.740	100%	22.490.417.230	100%	27.000.000.000	100%	28.000.000.000	100%	96.514.035.970	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	04	05	201		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai		-	-	100%	19.023.618.740	100%	22.490.417.230	100%	27.000.000.000	100%	28.000.000.000	100%	96.514.035.970	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				1	04	05	201	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi Prasarana, sarana dan utilitas umum yang disediakan		-	-	3 Kecamatan	19.023.618.740	3 Kecamatan	22.490.417.230	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
									Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		-	-	-	-	-	-	3 Lokasi	27.000.000.000	3 Lokasi	28.000.000.000	3 Lokasi	96.514.035.970	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
			Indeks Perumahan Permukiman						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		-	-		205.000.000		466.101.600		131.200.000		120.000.000		922.301.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun	
				2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi		-	-	100%	85.000.000	100%	349.901.600	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	464.901.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				2	10	02	201		KEGIATAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase pemberian izin lokasi		-	-	100%	85.000.000	100%	349.901.600	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	464.901.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				2	10	02	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan		-	-	100%	85.000.000	100%	349.901.600	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	464.901.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN	Persentase penyelesaian		-	-	-	-	100%	36.200.	100%	36.200.	100%	25.000.0	100%	97.400.000	Dinas Perumahan	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
									SENKETA TANAH GARAPAN	sengketa tanah garapan							000		000		00			Rakyat dan Kawasan Permukiman			
				2	1	0	4	2	KEGIATAN PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah		-	-	-	-	100%	36.200.000	100%	36.200.000	100%	25.000.000	100%	97.400.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
				2	1	0	4	2	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian sengketa, konflik, perkara pertanahan yang tertangani		-	-	-	100%	36.200.000	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
										Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	1	Doku	36.200.000	1	Doku	25.000.000	1	Doku	97.400.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
				2	1	0	1	0	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penatagunaan Tanah		-	-	100%	120.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	360.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
				2	1	0	1	2	KEGIATAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah		-	-	100%	120.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	360.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
				2	1	0	1	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan		-	-	100%	120.000.000	100%	80.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun		
									Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			-	-	-	-	-	10	laporan	80.000.000	10	laporan	80.000.000	10	laporan	360.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kota Madiun
JUMLAH													25.961.342.885		37.117.699.474	-	43.342.520.877	-	52.311.230.000	-	54.353.880.000	-	213.086.673.236				

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Perumahan Permukiman	99,65	99,65	99,60	99,68	99,80	99,90	99,90
2	Indeks Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Permakaman	71,74	74,59	76,34	78,48	80,62	82,76	82,76

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	85,69	87,12	89,13	90,14	91,17	92,19	92,19	Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
2	Indeks Perumahan Permukiman	99,65	99,65	99,60	99,68	99,80	99,90	99,90	Lanjutan Indikator Sasaran PD
3	Indeks Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Permakaman	71,74	74,59	76,34	78,48	80,62	82,76	82,76	Lanjutan Indikator Sasaran PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	persentase Pengembangan Perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
5	persentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	100%	98,10%	98,50%	99,00%	99,50%	100%	100%	Indikator Program PD
6	persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	lppd
8	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	65 KK	65 KK	105 KK	105 KK	105 KK	105 KK	lppd
9	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0%	18,73%	37,34%	55,95%	74,55%	100%	100%	lppd
10	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni	129 unit	115 unit	133 unit	60 unit	100 unit	100 unit	637 unit	lppd
11	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	37	38	38	40	45	50	50	lppd
12	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	0	0	0	0	0	0	lppd
13	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	0	0	0	0	0	0	lppd
14	Jumlah Rumah Tangga, Kepala Keluarga dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	0	0	0	0	0	0	lppd
15	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	0	0	0	0	0	0	lppd
16	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	0	0	0	0	0	0	lppd
17	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	0	0	0	0	0	0	lppd
18	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	0	0	0	0	0	0	lppd
19	Jumlah Rumah Tangga, Kepala Keluarga dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	lppd
20	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan Standart Pelayanan Minimal	0	0	0	0	0	0	0	lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan Standart Pelayanan Minimal	0	0	0	0	0	0	0	lppd
22	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan Standart Pelayanan Minimal	0	0	0	0	0	0	0	lppd
23	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan Standart Pelayanan Minimal	0	65 KK	65 KK	105 KK	105 KK	105 KK	105 KK	lppd
24	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan Standart Pelayanan Minimal	0	0	0	0	0	0	0	lppd
25	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	0	0	0	0	0	0	lppd
26	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	0 ha	52,41 ha	40,41 ha	28,41 ha	16,41 ha	0 ha	0 ha	lppd
27	Jumlah unit peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	129 unit	115 unit	133 unit	60 unit	100 unit	100 unit	637 unit	lppd
28	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0 ha	12,08 ha	10,08 ha	12,08 ha	12,08 ha	0 ha	0 ha	lppd
29	Jumlah rumah di kab/kota	42.329	42.329	42.329	42.379	42.429	42.479	42.479	lppd
30	Jumlah unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	129 unit	115 unit	133 unit	100 unit	100 unit	100 unit	677 unit	lppd
31	Jumlah rumah tidak layak huni	20 unit	21 unit	133 unit	240 unit	140 unit	40 unit	40 unit	lppd
32	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	0	0	0	0	0	0	lppd
33	Rasio rumah dan Kepala Keluarga	-	171,87%	170%	170%	170%	170%	170%	lppd
34	Jumlah rumah pembangunan baru	-	131	50	50	50	50	331	lppd
35	Jumlah perumahan yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	37	38	38	40	45	50	50	lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
36	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
37	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
39	Jumlah perumahan yang terfasilitasi Rencana Tata Ruang Non Hijau	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
40	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses Penerangan Jalan Umum	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
41	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	37	38	38	40	45	50	50	lppd
42	Jumlah pengembang yang terregistrasi	37	38	38	40	45	50	50	lppd
43	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	37	38	38	40	45	50	50	lppd
44	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
45	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	spm
46	Persentase Rumah tinggal Layak Huni dan Bersanitasi	99,95	99,95	-	-	-	-	99,95	Indikator Lama
47	Persentase Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola	-	74,59	-	-	-	-	74,59	Indikator Lama
48	persentase Pengelolaan Izin Lokasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
49	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
50	persentase Penatagunaan Tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	4,17 ha	30,52 ha	30,52 ha	30,52 ha	30,52 ha	30,52 ha	Lppd
53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	0	0	1	1	2	4	Lppd
57	Surat Keputusan Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Walikota	2	0	0	1	1	1	5	Lppd
58	Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
59	Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
60	Dokumen Izin membuka tanah	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
61	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
62	Persentase Rekomendasi Izin Pertanahan yang diterbitkan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

G. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Permasalahan
1	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan protokol kesehatan
2	Arus globalisasi dan ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturan
3	Kurang partisipasi generasi muda untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
4	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membakar sampah dan waspada bahaya kebakaran

Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Isu Strategis
1	Adanya pandemi virus Covid-19 sehingga banyaknya pelanggaran Protokol Kesehatan oleh masyarakat
2	Masih adanya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
3	Sumber Daya Manusia (SDM) petugas perlindungan masyarakat (Linmas) rendah
4	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menanggulangi kebakaran

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks rasa aman

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat	Nilai Keamanan dan Ketertiban	72,44	72,45	72,48	72,50	72,52

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	-	30 indeks	30,75 indeks	31 indeks	31,50 indeks
2	Meningkatnya penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Walikota serta peraturan Perundang-undangan Lainnya	Persentase masyarakat yang taat Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	96%	96%	97%	97%	98%
3	Meningkatkan kesiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
								2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
								Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kinerja Satpol PP dan Damkar	1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP					80,10 indeks	13.486.026.000	80,15 indeks	6.024.694.000	80,15 indeks	19.510.720.000	
	1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah					100%	163.974.000	100%	163.974.000	100%	327.948.000	
	1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Laporan	163.974.000	12 Laporan	163.974.000	48 Laporan	327.948.000	
	1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan					100%	7.710.648.000	100%	8.000.000	100%	7.718.648.000	
	1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					54 orang/bulan	7.710.648.000	54 orang/bulan	8.000.000	100%	7.718.648.000	
	1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian					100%	687.275.000	100%	700.000.000	100%	1.387.275.000	
	1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1 paket	687.275.000	1 paket	700.000.000	100%	1.387.275.000	
	1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum					100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	525.000.000	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20 laporan	250.000.000	20 laporan	275.000.000	40 laporan	525.000.000	
	1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan					100%	860.068.000	100%	998.000.000	100%	1.858.068.000	
	1	5	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan					-		-		-	-	
	1	5	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					5 unit	508.068.000	1 unit	600.000.000	6 unit	1.108.068.000	
	1	5	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 unit	198.000.000	1 unit	198.000.000	2 unit	396.000.000	
	1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan					1 unit	154.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	354.000.000	
	1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	3.034.341.000	100%	3.100.000.000	100%	6.134.341.000	
	1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					6 laporan	3.034.341.000	100%	3.100.000.000	100%	6.134.341.000	
	1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100%	779.720.000	100%	779.720.000	100%	1.559.440.000	
	1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					20 unit	500.000.000	20 unit	500.000.000	20 unit	1.000.000.000	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	400.000.000	
	1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					68 unit	79.720.000	68 unit	79.720.000	1 unit	159.440.000	
Meningkatnya penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Walikota serta peraturan Perundang-undangan Lainnya	1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan					97%	14.404.479.000	97%	8.649.765.000	97%	23.054.244.000	
	1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					97%	12.583.046.000	97%	6.929.832.000	97%	19.512.878.000	
	1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					40 kasus	1.990.176.000	40 kasus	1.640.136.000	80 kasus	3.630.312.000	
	1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan						275 kasus	1.248.315.000	275 kasus	1.900.000.000	355 kasus	3.148.315.000
	1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan					8 dokumen	152.772.000	8 dokumen	152.772.000	16 dokumen	305.544.000	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota											
	1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					6 dokumen	8.878.908.000	6 dokumen	2.924.049.000	6 dokumen	11.802.957.000	
	1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					78	312.875.000	78	312.875.000	78	625.750.000	
	1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota					100%	1.436.621.000	100%	1.436.621.000	100%	2.873.242.000	
	1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok, Masyarakat/Pelaku Usaha					4 dokumen	580.383.000	4 dokumen	580.383.000	8 dokumen	1.160.766.000	
	1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah an Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang dapat ditangani sesuai SOP					12 laporan	856.238.000	12 laporan	856.238.000	24 laporan	1.712.476.000	
	1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas					80%	384.812.000	80%	283.312.000	80%	668.124.000	
	1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda/Perkada					12 laporan	384.812.000	12 laporan	283.312.000	24 laporan	668.124.000	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatkan kesiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					100%	1.974.373.000	100%	1.974.373.000	100%	3.948.746.000		
	1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					100%	1.774.373.000	100%	1.774.373.000	100%	3.548.746.000		
	1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota setiap tahunnya					6 dokumen	1.434.995.000	6 dokumen	1.434.995.000	6 dokumen	2.869.990.000		
	1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					6 laporan	339.378.000	6 laporan	339.378.000	6 laporan	678.756.000		
	1	5	4	2.02		Inspeksi Peralatan dan Proteksi Kebakaran	Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran						90%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	400.000.000	
	1	5	4	2.01	1	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan harus memiliki Sistem Proteksi Kebakaran						6 dokumen	200.000.000	6 dokumen	200.000.000	6 dokumen	400.000.000	
							JUMLAH							29.864.878.000		16.648.832.000		46.513.710.000	

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Reformasi Birokrasi		-	30 indeks	30,75 indeks	31 indeks	31,50 indeks	31,50 indeks
2	Persentase masyarakat yang taat Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota		96%	96%	97%	97%	98%	98%
3	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Ketentraman	-	76,87	76,95	77,05	77,15	77,2	77,2	Lanjutan Indikator Tujuan Kota
2	Indeks Rasa Aman	73,55	76,05	76,15	76,2	76,27	76,35	76,35	Lanjutan Indikator sasaran kota
3	Nilai Keamanan dan Ketertiban	72,44	72,44	72,75	72,48	72,50	72,52	72,52	Indikator Tujuan PD
4	Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal	99%	97%	96%	97%	97%	98%	98%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	98%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	Indikator Program PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
8	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	98%	97%	96%	97%	97%	97%	97%	Lppd
9	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
10	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
11	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	Lppd
12	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani	3,628	2,051	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Lppd
13	Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat yang terlatih dan dikukuhkan	1.387 orang	1.348 orang	1.300 orang	1.300 orang	1.300 orang	1.300 orang	1300 orang	Lppd
14	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	99	76	76	76	76	76	76	Lppd
15	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai Penyidik Pegawai NS	4 orang	4 orang	4 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	Lppd
16	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	35 SOP	35 SOP	35 SOP	35 SOP	35 SOP	35 SOP	35 SOP	Lppd
17	Tersedianya sarana prasarana minimal	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	Lppd
18	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	Lppd
19	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	Lppd
20	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	Lppd
22	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	Lppd
23	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	Lppd
24	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	16 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	Lppd
25	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
26	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
27	Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
28	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	-	1.3 orang setiap RT	-	-	-	-	1.3 orang setiap RT	Indikator Lama
29	Persentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan	100	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

H. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024

Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Permasalahan
1	Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana
2	Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial
3	Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
4	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait saat tanggap darurat bencana
5	Masih terdapatnya potensi bencana di Kota Madiun

Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Isu Strategis
1	Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana
2	Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kebencanaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana
3	Belum tersusunnya Dokumen atau Kajian yang berhubungan dengan Kebencanaan

Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks rasa aman

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	-	-	114	113	112

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersampainya informasi kebencanaan secara berkala	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	-	-	100	100	100
2	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana melalui Pelatihan/Mitigasi	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	-	-	100	100	100
3	Meningkatnya jumlah Desa/Kelurahan Tanggap Bencana (Destana)	Jumlah Destana yang terbentuk	-	-	5 Desa/ Kel.	6 Desa/ Kel.	7 Desa/ Kel.
4	Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	-	-	100	100	100
5	Tertanganinya korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	-	-	100	100	100

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana	Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	-	-	100	100	100
7	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	26 skor	26 skor	27 skor

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
<u>Tahun 2021 :</u> Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh				<u>Tahun 2021 - 2022 :</u> Cakupan penanganan penanggulangan bencana bencana	100%		-		-		-		-		BPBD	Kota Madiun
<u>Tahun 2022 - 2024:</u> Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana				<u>Tahun 2022-2024</u> Indeks Risiko Bencana	-		114 Indeks		113 Indeks		112 Indeks		112 Indeks			
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-		26 Skor		26 Skor		27 Skor		27 Skor			
	<u>2021 :</u> Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana			<u>2021 :</u> 1. Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana	100%		-		-		-		-			

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
				2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%		100%		-		-		-			
				3. Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100%		-		-		-		-			
	2022 – 2024 :			2022-2024 :												
	1. Tersampainya informasi kebencanaan secara berkala			1. Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	-		100%		100%		100%		100%			
	2. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana melalui Pelatihan/Mitigasi			2. Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	-		100%		100%		100%		100%			
	3. Meningkatnya Jumlah Desa / Kelurahan Tanggap Bencana (Destana)			3. Jumlah Destana yang terbentuk	-		5 Desa/ Kelura han		6 Desa/ Kelura han		7 Desa/ Kelura han		7 Desa/ Kelura han			
	4. Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana			4. Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	-		100%		100%		100%		100%			
	5. Tertanganinya korban bencana			5. Persentase korban bencana yang tertangani	-		100%		100%		100%		100%			
	6. Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana			6. Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	-		100%		100%		100%		100%			

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
			PROGRAM :													
		1.05.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.75 Skor	1,939,072,000	81 Skor	2,182,695,000	81,5 Skor	2,280,000,000	82 Skor	2,456,000,000	82 Skor	8,857,767,000		
			KEGIATAN :													
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	80,000,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	12 dok	20,000,000	12 dok	20,000,000	-	-	-	-	100%	40,000,000		
		.06		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	6 laporan	20,000,000	6 laporan	20,000,000	100%	40,000,000		
			KEGIATAN :													
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	1,215,480,000	100%	1,276,195,000	100%	1,325,000,000	100%	1,376,000,000	100%	5,192,675,000		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
			SUB KEGIATAN :													
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	1,215,480,000	100%	1,276,195,000	-	-	-	-	100%	2,491,675,000		
		.01		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	13 orang/bulan	1,325,000,000	13 orang/bulan	1,376,000,000	13 orang/bulan	2,701,000,000		
			KEGIATAN :													
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	260,000,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	50,000,000	100%	60,000,000	-	-	-	-	100%	110,000,000		
		.09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	24 laporan	70,000,000	24 laporan	80,000,000	100%	150,000,000		
			KEGIATAN :													
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	-	-	100%	100,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	210,000,000		
			SUB KEGIATAN :													

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	-	-	100%	100,000,000	-	-	-	-	100%	100,000,000		
		.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	5 Unit	50,000,000	5 Unit	60,000,000	100%	110,000,000		
			KEGIATAN :													
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	456,092,000	100%	505,000,000	100%	560,000,000	100%	625,000,000	100%	2,146,092,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	100%	456,092,000	100%	505,000,000	-	-	-	-	100%	961,092,000		
		.03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	12 laporan	560,000,000	12 laporan	625,000,000	100%	1,185,000,000		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
			KEGIATAN :													
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	197,500,000	100%	221,500,000	100%	255,000,000	100%	295,000,000	100%	969,000,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional / lapangan yang layak digunakan	100%	157,500,000	100%	175,000,000	-	-	-	-	100%	332,500,000		
		.02		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	8 unit	195,000,000	100%	215,000,000	100%	410,000,000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100%	25,000,000	100%	30,000,000	-	-	-	-	100%	55,000,000		
		.09		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	1 unit	40,000,000	100%	50,000,000	100%	90,000,000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100%	15,000,000	100%	16,500,000	-	-	-	-	100%	31,500,000		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		.10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	5 unit	20,000,000	100%	30,000,000	100%	50,000,000		
			PROGRAM													
		1.05.03	Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100%	1,388,869,000	100%	1,717,305,000	100%	2,065,000,000	100%	2,505,000,000	100%	7,676,174,000		
			KEGIATAN :													
		2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	103,880,000	100%	210,565,000	100%	225,000,000	100%	245,000,000	100%	784,445,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Persentase dokumen yang disusun	-	-	100%	85,000,000	-	-	-	-	100%	85,000,000		
		.01		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	-	-	-	1 dokumen	85,000,000	1 dokumen	85,000,000	100%	170,000,000		
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	103,880,000	100%	125,565,000	-	-	-	-	100%	229,445,000		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		.02		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	-	-	-	-	300 orang	140,000,000	300 orang	160,000,000	100%	300,000,000		
			KEGIATAN :													
		2.02	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1,198,689,000	100%	1,411,740,000	100%	1,690,000,000	100%-	1,960,000,000	100%	6,260,429,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		.01		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	-	-	-	1 dokumen	85,000,000	-	-	1 dokumen	85,000,000		
			Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan	100%	92,253,000	100%	141,350,000	-	-	-	-	100%	233,603,000		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		.02		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	-	-	-	200 orang	155,000,000	200 orang	180,000,000	400 orang	335,000,000		
		.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsaagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	-	-	-	-	5 unit	50.000.000	5 unit	75,000,000	5 unit	125,000,000		
			Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	100%	78,686,000	100%	90,000,000	-	-	-	-	100	168,686,000		
		.06	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	-	-	-	6 kawasan	100,000,000	7 kawasan	120,000,000	7 kawasan	220,000,000		
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	100%	86,350,000	100%	95,000,000	-	-	-	-	100%	181,350,000		
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	100%	941,400,000	100%	1,085,390,000	-	-	-	-	100%	2,026,790,000		
		.08		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	-	-	-	-	37 orang	1,250,000,000	37 orang	1,400,000,000	37 orang	2,650,000,000		
		.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	85,000,000	1 dokumen	85,000,000		
		.010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	-	-	-	-	300 orang	50,000,000	300 orang	100,000,000	300 orang	150,000,000		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
				Tahun 2021 : Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100%	86,300,00 0	-	-	-	-	-	-	-	-		
			KEGIATAN :													
		2.03	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	86,300,00 0	100%	95,000,000	100%	100,000,000	100%	200,000,000	100%	481,300,000		
			SUB KEGIATAN :													
		.03	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	-	-	-	12 orang	50,000,000	12 orang	100,000,000	12 orang	150,000,000		
			Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	100%	86,300,00 0	100%	95,000,000	-	-	-	-	100%	181,300,000		
		.04		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	-	12 orang	50,000,000	12 orang	100,000,000	12 orang	150,000,000		
			KEGIATAN :													

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	-	-	-	-	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	150,000,000		
			SUB KEGIATAN :													
		.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	-	-	-	-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	150,000,000		
						3,327,941,000		3,900,000,000		4,345,000,000		4,961,000,000		16,533,941,000		

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase <i>Early Warning System (EWS)</i> di daerah rawan bencana	-	100%	100%	-	-	-	100
2	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>)	100%	100%	100%	-	-	-	100%
3	Persentase Korban Bencana yang tertangani	0	100%	100%	-	-	-	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	0	-	-	100%	100%	100%	100%
5	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	0	-	-	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Destana yang terbentuk	0	-	-	5 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan
7	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	0	-	-	100%	100%	100%	100%
8	Persentase korban bencana yang tertangani	0	-	-	100%	100%	100%	100%
9	Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	0	-	-	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan penanganan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	-	-	-	100%	Indikator Tujuan PD
2	Indeks Resiko Bencana	-	-	-	114 indeks	113 indeks	112 indeks	112 indeks	Indikator Tujuan PD
3	Persentase <i>Early Warning System (EWS)</i> di daerah rawan Bencana	-	100	100	-	-	-	-	Indikator Sasaran PD
4	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	-	-	-	-	Indikator Sasaran PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Persentase Korban Bencana yang tertangani	0	100%	100%	-	-	-	-	Indikator Sasaran PD
6	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	0	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	0	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
8	Jumlah Destana yang terbentuk	0	-	-	5 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurah an	7 desa/ kelurahan	Indikator Sasaran PD
9	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	0	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
10	Persentase korban bencana yang tertangani	0	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	0	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
12	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
13	Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	-	-	-	-	Indikator Program PD
14	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	845 orang	845 orang	845 orang	3.350	153.443 orang	153.443 orang	153.443 orang	Lppd
15	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	50 orang	50 orang	50 orang	1.125 orang	1.151 orang	1.151 orang	1.151 orang	Lppd
16	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	310 orang	560 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	Lppd
17	Persentase penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	0	0	100%	100%	100%	100%	Lppd
18	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
19	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	100%	100%	100%	Lppd
20	Persentase penyelesaian dokumen Sistem Informasi Rencana Kontinjensi sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	0%	100%	100%	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	4,60%	0,80%	5%	47%	50%	50%	50%	Lppd
22	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	3,80%	0,57%	5%	45%	47%	47%	47%	Lppd
23	Persentase warga negara yang mendapat layanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
24	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
25	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
26	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
27	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
28	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
29	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
30	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
31	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm

I. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

**Permasalahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak**

No	Permasalahan
1	Meningkatnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/ Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
2	Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang belum tertangani atau memperoleh perlindungan sosial
3	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang setiap saat dapat berubah
4	Kurangnya tenaga Pekerja Sosial Masyarakat yang kompeten di masing-masing kelurahan
5	Terbatasnya daya tampung panti milik Provinsi Jawa Timur
6	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/ Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
7	Meningkatnya pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak
8	Kurang optimalnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
9	Kurangnya partisipasi perempuan di kelembagaan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga legislatif
10	kurangnya kemampuan perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga
11	Kurang optimalnya kinerja kelembagaan Pengarusutamaan Gender
12	Masih kurangnya sarana dan prasarana publik yang responsif gender

**Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak**

No	Isu Strategis
1	Terbatasnya daya tampung panti milik Provinsi Jawa Timur
2	Tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan di Legislatif yang masih rendah
3	Meningkatnya angka kemiskinan
4	Meningkatnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kasus Perempuan dan Anak

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender
2	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indek Gini	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan

**Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak**

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal	92,12%	91%	92%	93%	94%
2	Terwujudnya Pemenuhan dan Perlindungan hak anak serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,18	77,07	77,18	77,20	77,22

**Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak**

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan/kelengkapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	-	-	100%	-	-
		Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	23	24	25
2	Meningkatnya perlindungan dan jaminan social PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminsasn Sosial	-	-	93%	94%	95%
3	Meningkatnya pemberdayaan social PMKS	Persentase PMKS yang diberdayakan	-	-	90%	91%	92%
4	Meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	-	19%	20%	21%
5	Meningkatnya tata Kelola pengarusutamaan gender	persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	-	-	100%	100%	100%
6	Meningkatnya perempuan yang berdaya	persentase keluarga yang berkualitas	-	3%	6%	12%	15%
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	25,21%	12,78%	13%	13%	13,5%
7	Meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	-	-	0,003 nilai	0,002 nilai	0,002 nilai

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi				
					2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah						
					Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	1																		
	1	06																	
Meningkatnya PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal																			
	1	06																	
meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial PMKS																			
meningkatnya pemberdayaan sosial PMKS																			
meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS																			
	1	06	02																
	1	06	02	03															

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Daerah Kabupaten/Kota													
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah PSM yang mengikuti pelatihan/pembinaan untuk meningkatkan kemampuan	135 orang			Rp 103.874.807					135 orang	Rp 103.874.807	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang terlatih		135 orang		Rp 445.400.350					135 orang	Rp 445.400.350	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					214 orang	Rp 390.739.300	214 orang	Rp 429.813.230	214 orang	Rp 820.552.530	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah PMKS yang didampingi oleh TKSK	80 orang			Rp 10.794.000					80 orang	Rp 10.794.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Klien PMKS yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan		80 ORANG		Rp 61.443.400					80 ORANG	Rp 61.443.400	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					3 orang	Rp 80.343.400	3 orang	Rp 88.377.740	3 orang	Rp 168.721.140	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah siswa yang mengikuti sarasehan	115 orang			Rp 5.638.600					115 orang	Rp 5.638.600	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		Terbentuknya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga			1 LEMBAGA	Rp 304.029.250					1 LEMBAGA	Rp 304.029.250	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					5 Keluarga	Rp 232.562.500	5 Keluarga	Rp 255.818.750	5 Keluarga	Rp 488.381.250	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah PSKS Kelembagaan masyarakat yang mendapat pembinaan.	5 lembaga	Rp 2.090.148.692	5 lembaga	Rp 3.049.304.515					5 lembaga	Rp 5.139.453.207	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					14 Lembaga	Rp 3.185.976.800	14 Lembaga	Rp 3.504.574.480	14 Lembaga	Rp 6.690.551.280	Kota Madiun
	1	0	0	0		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	18,7%	Rp 1.508.844.750							18,7%	Rp 1.508.844.750	Kota Madiun
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial			100%	Rp 1.742.901.123	100,0%	Rp 1.651.445.897	100%	Rp 1.810.781.787	100%	Rp 5.205.128.807	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	90%	Rp 1.279.364.645	0%						90%	Rp 1.279.364.645	Kota Madiun
						Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani			100%	Rp 1.295.044.666					100%	Rp 1.295.044.666	Kota Madiun
						Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,					100%	Rp 1.096.412.531	100%	Rp 1.206.053.784	100%	Rp 2.302.466.315	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial											
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan pangannya	155 orang	Rp 432.131.100	0%						155 orang	Rp 432.131.100	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tercukupi kebutuhan pangannya			160 orang	Rp 213.655.500					160 orang	Rp 213.655.500	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					165 orang	Rp 204.084.000	170 orang	Rp 224.492.400	170 orang	Rp 428.576.400	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan Sandangnya	10 orang	Rp 15.000.000							10 orang	Rp 15.000.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tercukupi kebutuhan sandangnya			50 orang	Rp 50.505.771					50 orang	Rp 50.505.771	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					60 orang	Rp 25.768.681	63 orang	Rp 28.345.549	63 orang	Rp 54.114.230	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu		Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	6 orang	Rp 7.000.000							6 orang	Rp 7.000.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan alat bantu			9 orang	Rp 44.173.250					9 orang	Rp 44.173.250	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					13 orang	Rp 15.457.200	15 orang	Rp 17.002.920	15 orang	Rp 32.460.120	Kota Madiun
	1	0	0	2,0	0	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	10 orang	Rp 18.200.000							10 orang	Rp 18.200.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga			12 orang	Rp 42.300.000					12 orang	Rp 42.300.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					12 orang	Rp 42.300.000	13 orang	Rp 46.530.000	13 orang	Rp 88.830.000	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	130 orang	Rp 67.500.000							130 orang	Rp 67.500.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial			60 orang	Rp 66.700.000					60 orang	Rp 66.700.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					62 orang	Rp 10.100.000	65 orang	Rp 11.110.000	65 orang	Rp 21.210.000	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah keluarga PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial	250 orang	Rp 697.843.935							250 orang	Rp 697.843.935	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial			286 orang	Rp 745.285.475					286 orang	Rp 745.285.475	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			270 orang	Rp 692.676.150		280 orang	Rp 761.943.765	280 orang	Rp 1.454.619.915	Kota Madiun	
	1	0	0	2	1	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah PMKS yang terlayani	25 orang	Rp 41.689.610							25 orang	Rp 41.689.610	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang menerima layanan kedaruratan			40 orang	Rp 132.424.670					40 orang	Rp 132.424.670	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota					60 orang	Rp 106.026.500	70 orang	Rp 116.629.150	70 orang	Rp 222.655.650	Kota Madiun
	1	0	0	2		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial		Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	Rp 229.480.105	100%	Rp 447.856.457					100%	Rp 677.336.562	Kota Madiun
						Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial		Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial					100%	Rp 555.033.366	100%	Rp 604.728.003	100%	Rp 1.159.761.369	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan		Jumlah PMKS lainnya	15 orang	Rp							15 orang	Rp	Kota

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		6	4	.	2	Pemberian Layanan Kedaruratan		yang mendapatkan layanan kedaruratan		147.492.585							147.492.585	Madiun
						Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan kedaruratan		15 orang	Rp 199.014.605					15 orang	Rp 199.014.605	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 orang	Rp 191.469.605	35 orang	Rp 210.616.566	35 orang	Rp 402.086.171	Kota Madiun
	1	0	0	.	0	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang tercukupi kebutuhan pangannya		150 orang	Rp 89.275.500					150 orang	Rp 89.275.500	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				250 orang	Rp 100.894.000	260 orang	Rp 110.983.400	260 orang	Rp 211.877.400	Kota Madiun
	1	0	0	.	0	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah PMKS Lainnya yang tercukupi kebutuhan sandangnya	100 orang	Rp 41.326.670						100 orang	Rp 41.326.670	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang tercukupi kebutuhan sandangnya		105 orang	Rp 20.646.890					105 orang	Rp 20.646.890	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 orang	Rp 20.324.317	60 orang	Rp 22.356.749	60 orang	Rp 42.681.066	Kota Madiun
	1	0	0	.	0	Sub Kegiatan		Jumlah PMKS yang	5 orang	Rp						5 orang	Rp	Kota

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		6	4	.	5	Penyediaan Alat Bantu		memerlukan alat bantu		4.260.850								4.260.850	Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan alat bantu			7 orang	Rp 10.400.830					7 orang	Rp 10.400.830	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					20 orang	Rp 10.898.480	21 orang	Rp 11.988.328	21 orang	Rp 22.886.808	Kota Madiun
	1	0	0	.	0	Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan perbekalan kesehatan			20 Orang	Rp 7.971.592					20 Orang	Rp 7.971.592	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota					100 orang	Rp 26.129.964	110 orang	Rp 28.742.960	110 orang	Rp 54.872.924	Kota Madiun
	1	0	0	.	0	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah PMKS Lainnya yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	10 orang	Rp 18.200.000							10 orang	Rp 18.200.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial			132 orang	Rp 102.347.040					132 orang	Rp 102.347.040	Kota Madiun
							Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan					135 orang	Rp 72.300.000	135 orang	Rp 79.530.000	140 orang	Rp 151.830.000	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota												
	1	0	0	2	1	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					75 orang	Rp 118.917.000	80 orang	Rp 125.000.000	80 orang	Rp 243.917.000	Kota Madiun
	1	0	0	2	1	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	10 orang	Rp 18.200.000							10 orang	Rp 18.200.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	10 orang	Rp 18.200.000							10 orang	Rp 18.200.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota					18 orang	Rp 14.100.000	20 orang	Rp 15.510.000	20 orang	Rp 29.610.000	Kota Madiun
	1	0	0			PROGRAM PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90	Rp 9.360.726.880	90%	Rp 11.312.409.780	91%	Rp 11.251.034.100	91%	Rp 13.305.707.240	91%	Rp 45.229.878.000	Kota Madiun
	1	0	0	2		Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar		persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	90	Rp 7.880.000	90%	Rp 7.840.000	95%	Rp 8.448.000	95%	Rp 9.292.800	95%	Rp 33.460.800	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak- Anak Terlantar		Jumlah anak terlantar yang didata	24 orang	Rp 3.600.000	24 orang	Rp 3.600.000					24 orang	Rp 7.200.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota					15 orang	Rp 3.960.000	15 orang	Rp 4.356.000	15 orang	Rp 8.316.000	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah anak terlantar yang di rujuk	24 orang	Rp 4.080.000	24 orang	Rp 4.040.000					24 orang	Rp 8.120.000	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					8 orang	Rp 4.488.000	8 orang	Rp 4.936.800	8 orang	Rp 9.424.800	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah anak terlantar yang dipantau	24 orang	Rp 200.000	24 orang	Rp 200.000					24 orang	Rp 400.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota					8 orang	Rp 220.000	8 orang	Rp 242.000	8 orang	Rp 462.000	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	Rp 9.352.846.880	100%	Rp 11.304.569.780	100%	Rp 11.242.586.100	100%	Rp 13.296.414.440	100%	Rp 45.196.417.200	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		jumlah Fakir miskin yang di data	10.000 orang	Rp 887.763.700	14042 orang	Rp 1.231.132.150					14042 orang	Rp 2.118.895.850	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					24685 orang	Rp 919.803.700	24685 orang	Rp 1.439.920.700	24685 orang	Rp 2.359.724.400	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		jumlah kelurahan yang melaksanakan verval DTKS	27 kelurahan	Rp 662.765.900	27 Kelurahan	Rp 851.125.630					27 Kelurahan	Rp 1.513.891.530	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota					4000 Keluarga	Rp 606.105.400	4000 Keluarga	Rp 996.184.000	4000 Keluarga	Rp 1.602.289.400	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial	3252 KK	Rp 7.780.735.730	3892 KK	Rp 9.120.309.200					3892 KK	Rp 16.901.044.930	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					4000 Keluarga	Rp 9.689.132.000	4000 Keluarga	Rp 10.667.295.000	4000 Keluarga	Rp 20.356.427.000	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan		Jumlah kelompok yang	10 KUBE	Rp 21.581.550	10 KUBE	Rp 102.002.800					10 KUBE	Rp 123.584.350	Kota Madiun

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				0 2	Pengembangan Ekonomi Masyarakat		mendapat pembinaan pengembangan ekonomi											
					Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					56 orang	Rp 27.545.000	56 orang	Rp 193.014.740	56 orang	Rp 220.559.740	Kota Madiun
	1	0 6	0 6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100%	Rp 344.885.800	100%	Rp 628.979.400	100%	Rp 686.293.965	100%	Rp 954.760.850	100%	Rp 2.614.920.015	Kota Madiun
	1	0 6	0 6	2 . 0 1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota		Persentase Taruna siaga bencana yang handal	100%	Rp 30.301.300							100%	Rp 30.301.300	Kota Madiun
					Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota		Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan			100%	Rp 91.862.500	100%	Rp 97.822.865	100%	Rp 134.513.672	100%	Rp 324.199.037	Kota Madiun
	1	0 6	0 6	2 . 0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan	3300 orang	Rp 17.890.100	3300 Orang	Rp 34.333.300					3300 Orang	Rp 52.223.400	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					300 orang	Rp 39.293.665	300 orang	Rp 52.266.828	300 orang	Rp 91.560.493	Kota Madiun
	1	0 6	0 6	2 . 0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan Sandang	1000 orang	Rp 5.377.600	1000 Orang	Rp 15.178.000					1000 Orang	Rp 20.555.600	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					300 orang	Rp 15.178.000	300 orang	Rp 25.471.644	300 orang	Rp 40.649.644	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Kabupaten/Kota												
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial		Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan Psikososial	300 orang	Rp 7.033.600							300 orang	Rp 7.033.600	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial		Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan dukungan Psikososial			300 Orang	Rp 42.351.200					300 Orang	Rp 42.351.200	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					15 orang	Rp 43.351.200	15 orang	Rp 56.775.200	15 orang	Rp 100.126.400	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota		Persentase terbentuknya kelurahan tanggap bencana	100	Rp 314.584.500							100	Rp 314.584.500	Kota Madiun
						Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota		Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana			100%	Rp 537.116.900	100%	Rp 588.471.100	100%	Rp 820.247.178	100%	Rp 1.945.835.178	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Peserta Yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	60 orang	Rp 11.750.000	60 orang	Rp 120.455.100					60 orang	Rp 132.205.100	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Kampung	Rp 137.179.800	1 Kampung	Rp 161.029.200	2 Kampung	Rp 298.209.000	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Pembinaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Tagana yang mendapatkan sosialisasi	20 orang	Rp 302.834.500							20 orang	Rp 302.834.500	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Pembinaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Tagana yang mendapatkan Pembinaan			26 Orang	Rp 416.661.800					26 Orang	Rp 416.661.800	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan	Jumlah Orang yang Melaksanakan					30 Orang	Rp 451.291.300	30 orang	Rp 659.217.978	30 orang	Rp 1.110.509.278	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						dan Pelaksanaan Pembinaan Taruna Siaga Bencana	Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota											
	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	Rp 103.194.134						100%	Rp 103.194.134	Kota Madiun	
						PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik			100%	Rp 169.320.380	100%	Rp 182.250.680	100%	Rp 236.929.556	100%	Rp 588.500.616	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota		Jumlah lokasi taman makam pahlawan nasional yang dilakukan pemeliharaan	1	Rp 103.194.134	0%					1	Rp 103.194.134	Kota Madiun	
						Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan			100%	Rp 169.320.380	100%	Rp 182.250.680	100%	Rp 236.929.556	100%	Rp 588.500.616	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota		Jumlah lokasi taman makam pahlawan yang dipelihara	1	Rp 103.194.134						1	Rp 103.194.134	Kota Madiun	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota		Jumlah Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dalam kondisi baik			1 PAKET	Rp 169.320.380				1 PAKET	Rp 169.320.380	Kota Madiun	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota					966 Makam	Rp 182.250.680	966 Makam	Rp 236.929.556	966 Makam	Rp 419.180.236	Kota Madiun
	2	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender								Indeks Pemberdayaan gender	77,07	Rp 613.181.670						77,07	Rp 613.181.670	Kota Madiun	
Meningkatnya tata kelola pengarusutamaan gender								Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG			100%		100%		100%		100%	Rp -	Kota Madiun

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya perempuan yang berdaya							Persentase keluarga yang berkualitas			6%		12%		15%		15%	Rp -	Kota Madiun
	2	0	0		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	10%	Rp 303.007.740	15%	Rp 846.501.000	100%	Rp 851.340.400	100%	Rp 936.474.440	100%	Rp 2.937.323.580	Kota Madiun
	2	0	0	2	Kegiatan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase program yang di ARG	10%	Rp 133.425.890	15%	Rp 303.301.000	100%	Rp 230.752.400	100%	Rp 253.827.640	100%	Rp 921.306.930	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah peserta pertemuan	100 orang		Rp 91.754.640					100 orang	Rp 91.754.640	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah Dokumen program yang di ARG				34 Dokumen	Rp 135.718.050			34 Dokumen	Rp 135.718.050	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				32 dokumen	Rp 91.618.400	32 dokumen	Rp 100.780.240	32 dokumen	Rp 192.398.640	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Rakor	350 orang		Rp 14.621.250					350 orang	Rp 14.621.250	Kota Madiun
						Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Rakor PUG				375 orang	Rp 57.775.550			375 orang	Rp 57.775.550	Kota Madiun
						Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				34 dokumen	Rp 67.803.000	34 dokumen	Rp 74.583.300	34 dokumen	Rp 142.386.300	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah peserta review	68 orang		Rp 12.550.000					68 orang	Rp 12.550.000	Kota Madiun
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan		Jumlah Peserta Pelatihan PPRG				70 orang	Rp 100.090.620			70 orang	Rp 100.090.620	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Pelaksanaan PUG termasuk PPRG													
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota					34 Perangkat Daerah	Rp 10.135.000	34 Perangkat Daerah	Rp 11.148.500	34 Perangkat Daerah	Rp 21.283.500	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Peserta Sosialisasi	100 orang	Rp 14.500.000							100 orang	Rp 14.500.000	Kota Madiun
						Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Peserta Sosialisasi PUG dan PPRG			75 orang	Rp 9.716.780					75 orang	Rp 9.716.780	Kota Madiun
						Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota					34 Perangkat Daerah	Rp 61.196.000	34 Perangkat Daerah	Rp 67.315.600	34 Perangkat Daerah	Rp 128.511.600	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Partisipasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	92%	Rp 136.351.780	0						92%	Rp 136.351.780	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			12,5%	Rp 173.850.000	20%	Rp 34.946.000	32,5%	Rp 38.440.600	32,5%	Rp 247.236.600	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Ssub Kegiatan sosialisasi Peningkatan		Jumlah Peserta pertemuan monev P3EL dan UP2PKK	140 ORANG	Rp 11.179.700							140 ORANG	Rp 11.179.700	Kota Madiun

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2		Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi												
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				180 orang	Rp 67.100.000					180 orang	Rp 67.100.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota					8 dokumen	Rp 34.946.000	8 dokumen	Rp 38.440.600	8 dokumen	Rp 73.386.600	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		162 ORANG	Rp 125.172.080							162 ORANG	Rp 125.172.080	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				116 orang	Rp 106.750.000		Rp -		Rp -	116 orang	Rp 106.750.000	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		48,34	Rp 33.230.070							48,34	Rp 33.230.070	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				50%	Rp 369.350.000	55%	Rp 585.642.000	60%	Rp 644.206.200	60%	Rp 1.599.198.200	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan		1	Rp -							1	Rp -	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan layanan pemberdayaan perempuan			15 Lembaga	Rp 65.216.000		Rp -		Rp -	15 Lembaga	Rp 65.216.000	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pertemuan forum/pembinaan	110 orang	Rp 33.230.070							110 orang	Rp 33.230.070	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan			35 lembaga	Rp 102.046.150					35 lembaga	Rp 102.046.150	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas					580 orang	Rp 565.817.000	580 orang	Rp 622.398.700	580 orang	Rp 1.188.215.700	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pertemuan	250 orang	Rp -							250 orang	Rp -	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pengembangan KIE			32 Lembaga	Rp 202.087.850					32 Lembaga	Rp 202.087.850	Kota Madiun
						Sub Kegiatan	Tersedianya	Jumlah Dokumen					1	Rp	1	Rp	1	Rp	Kota

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia					dokumen	19.825.000	dokumen	21.807.500	dokumen	41.632.500	Madiun
	2	0	0		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	5%	Rp 196.558.420	10%	Rp 835.086.470	20%	Rp 501.207.000	30%	Rp 551.327.700	30%	Rp 2.084.179.590	Kota Madiun
	2	0	0	2	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	70%	Rp 52.873.910	80%	Rp 189.761.150	85%	Rp 380.813.000	100%	Rp 418.894.300	100%	Rp 1.042.342.360	Kota Madiun
	2	0	0	0	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta review/pelatihan/lomba	81 orang	Rp 10.129.930							81 orang	Rp 10.129.930	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pendampingan dan pelatihan data Kualitas Keluarga			111 org	Rp 56.100.200					111 org	Rp 56.100.200	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					34 Perangkat Daerah	Rp 156.953.000	34 Perangkat Daerah	Rp 172.648.300	34 Perangkat Daerah	Rp 329.601.300	Kota Madiun
	2	0	0	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pertemuan	280 orang	Rp 20.556.980							280 orang	Rp 20.556.980	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi,		Jumlah RT yang memiliki data Kualitas Keluarga			108 RT	Rp 59.869.000					108 RT	Rp 59.869.000	Kota Madiun

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia					1 Dokumen	Rp 223.860.000	1 Dokumen	Rp 246.246.000	1 Dokumen	Rp 470.106.000	Kota Madiun
	2	0	0	0	SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KAB./KOTA		Jumlah peserta pelatihan	220 orang	Rp 22.187.000							220 orang	Rp 22.187.000	Kota Madiun
					SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KAB./KOTA		Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan peningkatan Kualitas Keluarga			81 Orang	Rp 73.791.950					81 Orang	Rp 73.791.950	Kota Madiun
	2	0	0	2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	100%	Rp 40.844.000								Rp 40.844.000	Kota Madiun
					Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak			100%	Rp 457.565.650	100%	Rp 120.394.000	100%	Rp 132.433.400	100%	Rp 710.393.050	Kota Madiun
	2	0	0	0	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan		Jumlah peserta rakor	135 orang	Rp 20.950.000							135 orang	Rp 20.950.000	Kota Madiun

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				0 2	dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta rakor peningkatan kualitas keluarga			100 org	Rp 20.949.900					100 org	Rp 20.949.900	Kota Madiun
	2	0	0	0 2 0 2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta studi tiru/jambore nasional	0 orang	Rp -							0 orang	Rp -	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Keluarga			14 lembaga	Rp 97.501.900					14 lembaga	Rp 97.501.900	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					257 orang	Rp 120.394.000	257 orang	Rp 132.433.400	257 orang	Rp 252.827.400	Kota Madiun
	2	0	0	0 2 0 2	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi 10 program pokok PKK	1 kelurahan	Rp 19.894.000							1 kelurahan	Rp 19.894.000	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pertemuan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga			102 org	Rp 339.113.850					102 org	Rp 339.113.850	Kota Madiun

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	2	0	0	0	2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	100%	Rp 102.840.510							100%	Rp 102.840.510	Kota Madiun	
						Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang terlayani dalam peningkatan Kesetaraan Gender dan Hak Anak			100%	Rp 187.759.670	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp 187.759.670	Kota Madiun	
	2	0	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan	400 orang	Rp 102.840.510					Rp -	400 orang	Rp 102.840.510	Kota Madiun	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang terlayani dalam peningkatan Kesetaraan Gender dan perlindungan Anak			81 org					81 org	Rp 187.759.670	Kota Madiun	
	2	0	0	0	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	100%	Rp 113.615.510	1 dokumen	Rp 229.549.120	1 dokumen	Rp 201.380.126	1 dokumen	Rp 277.754.436	1 dokumen	Rp 822.299.192	Kota Madiun
	2	0	0	0	2	0	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gender dan anak yang terdata	100%	Rp 113.615.510						100%	Rp 113.615.510	Kota Madiun	
							Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Persentase pengumpulan data gender dan anak			100%	Rp 229.549.120	100%	Rp 201.380.126	100%	Rp 277.754.436	100%	Rp 708.683.682	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Kabupaten/Kota													
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Rakor yang memahami dan melaksanakan data terpilah gender dan anak	50 orang	Rp 68.779.510	65 Orang	Rp 85.116.770					65 Orang	Rp 153.896.280	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia					2 Dokumen	Rp 96.028.000	2 Dokumen	Rp 102.991.292	2 Dokumen	Rp 199.019.292	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota		Jumlah peserta monev dan rakor	50 orang	Rp 44.836.000							50 orang	Rp 44.836.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota		Jumlah peserta rakor dan monev data gender dan anak			65 Orang	Rp 144.432.350					65 Orang	Rp 144.432.350	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota					2 Dokumen	Rp 105.352.126	2 Dokumen	Rp 174.763.144	2 Dokumen	Rp 280.115.270	Kota Madiun
meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak								Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	Rp 573.307.146							100%	Rp 573.307.146	Kota Madiun
Meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan								Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan			100%	Rp 419.590.865	100%	Rp 240.371.000	100%	Rp 363.550.000	100%	Rp 1.023.511.865	Kota Madiun
Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak								Prevalensi kekerasan terhadap anak			0,003	Rp 880.871.058	0,002	Rp 347.374.000	0,002	Rp 779.000.000	0,002	Rp 2.007.245.058	Kota Madiun
	2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100%	Rp 225.292.045	100%	Rp 419.590.865	100%	Rp 240.371.000	100%	Rp 363.550.000	100%	Rp 1.248.803.910	Kota Madiun
	2	0	0	2		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup		Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap	100%	Rp 27.316.815							100%	Rp 27.316.815	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Daerah Kabupaten/Kota		perempuan											
						Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan			67,39%	Rp 104.643.795	98,00%	Rp 68.287.000	100%	Rp 103.200.000	100%	Rp 276.130.795	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota		Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	9 orang	Rp 16.602.370	50 Orang	Rp 85.119.285					50 Orang	Rp 101.721.655	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	Rp 36.391.000	1 Dokumen	Rp 60.000.000	1 Dokumen	Rp 96.391.000	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	30 orang	Rp 10.714.445							30 orang	Rp 10.714.445	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			50 Orang	Rp 19.524.510					50 Orang	Rp 19.524.510	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					27 Perangkat Daerah	Rp 31.896.000	27 Perangkat Daerah	Rp 43.200.000	27 Perangkat Daerah	Rp 75.096.000	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban		Persentase pelaksanaan layanan bagi perempuan korban kekerasan	100%	Rp 156.472.020							100%	Rp 156.472.020	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
						Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase klien yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan			56%	Rp 259.655.250					56%	Rp 259.655.250	Kota Madiun	
						Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan					85,00%	Rp 155.907.000	95%	Rp 192.000.000	95%	Rp 347.907.000	Kota Madiun	
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi dan sinkronisasi	40 orang	Rp 156.472.020								40 orang	Rp 156.472.020	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan			40 orang	Rp 259.655.250						40 orang	Rp 259.655.250	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					20 Layanan	Rp 155.907.000	20 Layanan	Rp 192.000.000	20 Layanan	Rp 347.907.000	Kota Madiun	
	2	0	0	2	0	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat		Persentase perempuan yang terlayani kebutuhan spesifikasinya dalam situasi darurat	100%	Rp 41.503.210								1	Rp 41.503.210	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
						Daerah Kabupaten/Kota														
						Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif			100%	Rp 55.291.820	100%	Rp 16.177.000	100%	Rp 68.350.000	100%	Rp 139.818.820	Kota Madiun	
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Klien Perempuan Yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Situasi Darurat	29 KLIEN	Rp 26.444.320	20 klien	Rp 45.079.820					20 klien	Rp 71.524.140	Kota Madiun	
						Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik					12 Orang	Rp 7.518.000	12 Orang	Rp 34.850.000	12 Orang	Rp 42.368.000	Kota Madiun	
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	30 ORANG	Rp 15.058.890	30 orang	Rp 10.212.000					30 orang	Rp 25.270.890	Kota Madiun	
						Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	Rp 8.659.000	1 Dokumen	Rp 33.500.000	1 Dokumen	Rp 42.159.000	Kota Madiun	
	2	0	0			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak			100%	Rp 266.276.000						100%	Rp 266.276.000	Kota Madiun
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak			12,50%	Rp 470.265.980	22,43%	Rp 264.556.000	42,20%	Rp 602.000.000	42,20%	Rp 1.336.821.980	Kota Madiun	
	2	0	0	2	0	Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Dan Dunia Usaha		Persentase pelaksanaan pertemuan gugus tugas	100	Rp 44.583.000							100	Rp 44.583.000	Kota Madiun	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
						Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak			12,55%	Rp 59.659.865	22%	Rp 43.238.000	38%	Rp 70.000.000	38%	Rp 172.897.865	Kota Madiun	
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi	140 orang	Rp 44.583.000							140 orang	Rp 44.583.000	Kota Madiun	
						Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi pemenuhan hak anak			100 Orang	Rp 59.659.865						100 Orang	Rp 59.659.865	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	Rp 43.238.000	1 Dokumen	Rp 70.000.000	1 Dokumen	Rp 113.238.000	Kota Madiun	
	2	0	0	2	0	Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100%	Rp 221.693.000							100%	Rp 221.693.000	Kota Madiun	
						Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak			12,55%	Rp 410.606.115	22%	Rp 221.318.000	27%	Rp 532.000.000	27%	Rp 1.163.924.115	Kota Madiun	
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi/Sinkronisasi	30 orang	Rp 69.557.000								30 orang	Rp 69.557.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan pernikahan dini			105 Orang	Rp 93.427.695						105 Orang	Rp 93.427.695	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					100 orang	Rp 22.584.000	100 orang	Rp 112.000.000	100 orang	Rp 134.584.000	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah anak yang dibina	65 orang	Rp 70.773.000							65 orang	Rp 70.773.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang didampingi dalam peningkatan kualitas hidup anak			54 Orang		Rp 177.276.000				54 Orang	Rp 177.276.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 84.179.000	1 Dokumen	Rp 180.000.000	1 Dokumen	Rp 264.179.000	Kota Madiun	
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi ,Informasi Dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen yang tersedia	1 dokumen	Rp 67.376.000	1 Dokumen	Rp 78.233.250					1 Dokumen	Rp 145.609.250	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi ,Informasi Dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 76.214.000	1 Dokumen	Rp 175.000.000	1 Dokumen	Rp 251.214.000	Kota Madiun	
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan		Jumlah Peserta Sosialisasi/Sinkronisa si	30 orang	Rp 13.987.000							30 orang	Rp 13.987.000	Kota Madiun

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
					Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi Sekolah Ramah Anak			90 Orang	Rp 61.669.170					90 Orang	Rp 61.669.170	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 38.341.000	1 Dokumen	Rp 65.000.000	1 Dokumen	Rp 103.341.000	Kota Madiun	
	2	0	0		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak	100%			Rp 81.739.101					100%	Rp 81.739.101	Kota Madiun
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase kasus kekerasan terhadap anak		0,04%		Rp 410.605.078	0,04%	Rp 82.818.000	0,04%	Rp 177.000.000	0,04%	Rp 670.423.078	Kota Madiun
	2	0	0	2	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	100			Rp 51.532.060					100	Rp 51.532.060	Kota Madiun
					Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak		40,74%		Rp 113.635.560	59,50%	Rp 26.312.000	69,50%	Rp 50.000.000	69,50%	Rp 189.947.560	Kota Madiun
	2	0	0	2	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah	40 sekolah			Rp 51.532.060					40 sekolah	Rp 51.532.060	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Sekolah yang mendapatkan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak			30 Sekolah	Rp 113.635.560					30 Sekolah	Rp 113.635.560	Kota Madiun

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	Rp 26.312.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 76.312.000	Kota Madiun
	2	0	0	2	Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		Persentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	Rp 21.676.902							100%	Rp 21.676.902	Kota Madiun
					Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus			100%	Rp 219.410.439	100%	Rp 34.150.000	100%	Rp 82.000.000	100%	Rp 335.560.439	Kota Madiun
	2	0	0	2	0 Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah klien yang mendapatkan pendampingan dan memerlukan perlindungan khusus	8 orang	Rp 1.250.000							8 orang	Rp 1.250.000	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pendamping yang menangani Perlindungan anak			10 orang	Rp 3.850.000					10 orang	Rp 3.850.000	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					12 Layanan	Rp 5.750.000	12 Layanan	Rp 30.000.000	12 Layanan	Rp 35.750.000	Kota Madiun
	2	0	0	2	0 Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan		Jumlah peserta sosialisasi / bimbingan teknis	25 orang	Rp 20.426.902							25 orang	Rp 20.426.902	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
				Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota													
				Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Peserta pelatihan Konvensi Hak Anak		40 orang	Rp 215.560.439			40 orang	Rp 215.560.439	Kota Madiun		
				Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Rp 28.400.000	1 Dokumen	Rp 52.000.000	1 Dokumen	Rp 80.400.000	Kota Madiun		
	2	0	0	2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedian Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten /Kota		Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		100%	Rp 8.530.139			100%	Rp 8.530.139	Kota Madiun		
					Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedian Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten /Kota		Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak		100%	Rp 77.559.079	100%	Rp 22.356.000	100%	Rp 45.000.000	100%	Rp 144.915.079	Kota Madiun
	2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga/jejaring penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	20 orang	Rp 8.530.139			20 orang	Rp 8.530.139	Kota Madiun		
						Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan		Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan perlindungan khusus anak	60 orang	Rp 77.559.079			60 orang	Rp 77.559.079	Kota Madiun		

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
					Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	Rp 22.356.000	1 Dokumen	Rp 45.000.000	1 Dokumen	Rp 67.356.000	Kota Madiun
Meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	23	Rp 6.523.156.635	23	Rp 6.830.143.535	24	Rp 8.944.894.193	25	Rp 10.292.156.071	25	Rp 32.590.350.434	Kota Madiun
	1	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A	Rp 6.523.156.635	A	Rp 6.830.143.535	A	Rp 8.944.894.193	A	Rp 10.292.156.071	A	Rp 32.590.350.434	Kota Madiun
	1	0	0	2	Kegiatan Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100	Rp -	100%	Rp 89.831.480	100%	Rp 285.011.250	100%	Rp 295.000.000	100%	Rp 669.842.730	Kota Madiun
	1	0	0	2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 dokumen	Rp 129.703.700	4 dokumen	Rp 142.674.070	4 dokumen	Rp 272.377.770	Kota Madiun
	1	0	0	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	20 Dokumen								20 Dokumen	Rp -	Kota Madiun
	1	0	0	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen pengendalian perangkat daerah			20 dokumen	Rp 89.831.480					20 dokumen	Rp 89.831.480	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi					14 Laporan	Rp 26.563.400	16 Laporan	Rp 29.219.740	16 Laporan	Rp 55.783.140	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	Rp 69.982.200	2 Laporan	Rp 76.980.420	2 Laporan	Rp 146.962.620	Kota Madiun
	1	0	0	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100%	Rp 4.185.907.018	100%	Rp 4.397.131.311	100%	Rp 6.088.945.055	100%	Rp 6.697.839.561	100%	Rp 21.369.822.945	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100%	Rp 4.185.907.018							100%	Rp 4.185.907.018	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Persentase pemenuhan gaji ASN Perangkat Daerah			100%	Rp 4.357.416.261					100%	Rp 4.357.416.261	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					35 Orang	Rp 6.088.945.055	35 Orang	Rp 6.697.839.561	35 Orang	Rp 12.786.784.616	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah			13 dokumen	Rp 39.715.050					13 dokumen	Rp 39.715.050	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					13 Laporan	Rp 122.551.408	13 Laporan	Rp 134.806.549	13 Laporan	Rp 257.357.957	Kota Madiun
	1	0	0	2		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	100%	Rp 23.461.702							100%	Rp 23.461.702	Kota Madiun
	1	0	0	2		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			100%	Rp 35.774.400	0%	Rp 137.887.000	0%	Rp 151.675.700	0%	Rp 325.337.100	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					59 orang	Rp 111.400.000	59 orang	Rp 122.540.000	59 orang	Rp 233.940.000	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	1	0	0	2	1	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Persentase peserta yang paham	100%	Rp 23.461.702						100%	Rp 23.461.702	Kota Madiun	
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Persentase peserta yang paham			100%	Rp 35.774.400				100%	Rp 35.774.400	Kota Madiun	
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					60 Orang	Rp 26.487.000	60 Orang	Rp 29.135.700	60 Orang	Rp 55.622.700	Kota Madiun
	1	0	0	2		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	Rp 225.000.000	100%	Rp 194.901.000	100%	Rp 307.041.000	100%	Rp 275.000.000	100%	Rp 1.001.942.000	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase pemenuhan kebutuhan Perjalanan Dinas	100%	Rp 225.000.000	100%	Rp 194.901.000				100%	Rp 419.901.000	Kota Madiun	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					142 Laporan	Rp 307.041.000	142 Laporan	Rp 275.000.000	142 Laporan	Rp 582.041.000	Kota Madiun
	1	0	0	2		Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	100%	Rp 406.713.075	100%	Rp 295.533.980	100%	Rp 863.103.650	100%	Rp 1.133.390.810	100%	Rp 2.698.741.515	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		persentase pemenuhan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	Rp -	100%	Rp -							
						Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					19 Unit	Rp 514.566.550	40 Unit	Rp 750.000.000	40 Unit	Rp 1.264.566.550	Kota Madiun
	1	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 unit	Rp 348.537.100	1 unit	Rp 383.390.810	1 unit	Rp 731.927.910	Kota Madiun
	1	0	0	2	1	Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	Rp 406.713.075	100%	Rp 295.533.980				100%	Rp 702.247.055	Kota Madiun	
						Sub kegiatan pengadaan sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana					40 Unit	Rp 162.030.768	40 Unit	Rp 80.000.000	40 Unit	Rp 242.030.768	Kota Madiun

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan											
	1	0	0	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 1.191.802.290	100%	Rp 1.421.745.914	100%	Rp 916.021.263	100%	Rp 1.364.250.000	100%	Rp 4.893.819.467	Kota Madiun
	1	0	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100%	Rp 1.191.802.290	100%	Rp 1.091.565.914					100%	Rp 2.283.368.204	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					24 Laporan	Rp 916.021.263	24 Laporan	Rp 1.364.250.000	24 Laporan	Rp 2.280.271.263	Kota Madiun
	1	0	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah			100%	Rp 330.180.000					0%	Rp 330.180.000	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	Rp 374.400.000	12 Laporan	Rp 400.000.000	12 Laporan	Rp 774.400.000	Kota Madiun
	1	0	0	2	Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	Rp 490.272.550	100%	Rp 395.225.450	100%	Rp 346.884.975	100%	Rp 375.000.000	100%	Rp 1.607.382.975	Kota Madiun
	1	0	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan		Persentase kendaraan dinas / jabatan yang layak digunakan	100%	Rp 168.922.700	100%	Rp 170.594.000					100%	Rp 339.516.700	Kota Madiun
					Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					28 Unit	Rp 194.463.900	25 Unit	Rp 200.000.000	25 Unit	Rp 394.463.900	Kota Madiun
	1	0	0	2	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Persentase gedung yang layak digunakan	100%	Rp 245.549.850	100%	Rp 139.631.450					100%	Rp 385.181.300	Kota Madiun

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	Rp 152.421.075	2 Unit	Rp 175.000.000	2 Unit	Rp 327.421.075	Kota Madiun
	1	0	0	2	1	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya		Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100%	Rp 75.800.000							100%	Rp 75.800.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya		Persentase sarana prasarana yang layak digunakan			100%	Rp 85.000.000					100%	Rp 85.000.000	Kota Madiun
						Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					110 Unit	Rp 91.034.720	110 Unit	Rp 125.000.000	110 Unit	Rp 216.034.720	Kota Madiun

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-	-	-	93%	94%	95%	95%
2	Persentase PMKS yang diberdayakan	-	-	-	90%	91%	92%	92%
3	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	-	-	19%	20%	21%	21%
4	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	12,78%	25,21%	12,78%	13%	13%	13,5%	13,5%
5	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	-	-	-	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	persentase keluarga yang berkualitas	-	-	3%	6%	12%	15%	15%
8	Prevalensi kekerasan terhadap anak	-	-	-	0,003 nilai	0,002 nilai	0,002 nilai	0,002 nilai

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal	-	92,12%	91%	92%	93%	94%	94%	Indikator Tujuan PD
2	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-	-	-	93%	94%	95%	95%	Indikator Sasaran PD
3	Persentase PMKS yang diberdayakan	-	-	-	90%	91%	92%	92%	Indikator Sasaran PD
4	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	-	-	19%	20%	21%	21%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	-	-	90%	-	-	-	90%	Indikator Program PD
6	persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	-	-	-	50%	58%	66%	66%	Indikator Program PD
7	persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-	-	90%	90%	91%	91%	91%	Indikator Program PD
8	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	-	18,70%	-	-	-	18,70%	Indikator Program PD
9	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
10	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
11	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	100%	-	-	-	100%	Indikator Program PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
13	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	930	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
14	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
15	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3 (SLRT, WEB dan Kotak Saran)	3 (SLRT, WEB dan Kotak Saran)	3	3	3	3	3	Lppd
16	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	-	800	810	820	830	840	840	Lppd
17	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	Lppd
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	-	800	810	820	830	840	840	Lppd
19	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	-	4	4	4	4	4	4	Lppd
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	-	800	165	160	165	170	170	Lppd
21	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	-	2 (Shelter, Rumah Aman PPT)	2	2	2	2	2	Lppd
22	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	-	501 (Shelter dan ngebrok)	10	50	55	60	1.167	Lppd
23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	-	7	9	9	12	20	57	Lppd
24	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	-	3 (Kursi roda, tandu, alat bantu jalan/Krek)	5	7	9	11	11	Lppd
25	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	-	1	1	1	1	1	1	Lppd
26	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	-	24	161	165	170	175	175	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-	-	1	1	1	1	1	Lppd
28	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	473 (Peksos Profesional 5, TKSK 3, TKS 14, PSM 135, Wanita Pemimpin Kesos 98, Penyuluh Sosial 218)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	Lppd
29	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social	-	116	118	60	65	70	70	Lppd
30	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	-	2	2	2	2	2	2	Lppd
31	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	-	3	4	5	5	5	5	Lppd
32	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	102	105	107	109	111	111	Lppd
33	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	-	218	220	222	224	226	226	Lppd
34	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	72	218	220	15	17	20	20	Lppd
35	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	-	58	60	62	64	66	66	Lppd
36	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	-	7479 (Rumah Roboh dan Terdampak covid 19)	0	3.300	3.300	3.300	3.300	Lppd
37	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	-	1 (Rumah Roboh)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Lppd
38	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	0	0	0	0	0	0	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
39	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	7478 (Terdampak Covid-19)	0	0	0	0	0	Lppd
40	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	-	1	0	300	300	300	300	Lppd
41	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	-	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	Lppd
42	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	930	91	93	95	97	100	1	Spm
43	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		453	457	460	465	470	1	Spm
44	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		133	135	137	139	140	1	Spm
45	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		88	90	92	94	96	1	Spm
46	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	0	1	36	36	36	36	36	Spm
47	Persentase Penurunan PMKS	-	1,5	-	-	-	-	1,5	Indikator Lama
48	Persentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	-	92,12	91%	-	-	-	91%	Indikator Lama
49	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	-	100%	-	-	-	-	100%	Indikator Lama
50	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,05	94,38	94,4	94,44	94,49	94,51	94,51	Indikator tujuan kota
51	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,07	77,18	77,07	77,18	77,2	77,22	77,22	Lanjutan indikator sasaran kota dan Indikator Tujuan PD
52	Rasio KDRT	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	-	-	0,02%	Indikator Tujuan PD
53	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	12,78%	25,21%	12,78%	13%	13%	13,50%	13,50%	Indikator Sasaran PD
54	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
55	persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
56	persentase keluarga yang berkualitas	-	-	3%	6%	12%	15%	15%	Indikator Sasaran PD
58	Prevalensi kekerasan terhadap anak	-	-	-	0,003 nilai	0,002 nilai	0,002 nilai	0,002 nilai	Indikator Sasaran PD
59	persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	-	-	10%	15%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
60	persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	-	-	5%	10%	20%	30%	30%	Indikator Program PD
61	Jumlah dokumen Data terpilah gender dan anak	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Indikator Program PD
62	persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
63	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak	-	-	-	0,003	0,003	0,002	0,002	Indikator Program PD
64	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	-	-	-	12,50%	22,43%	42,20%	42,20%	Indikator Program PD
65	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	-	-	-	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	Indikator Program PD
66	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,01	17,53%	10%	15%	20%	30%	30%	Lppd
67	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd
68	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd
69	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	-	36 (OPD dan BUMD)	36	63	65	70	70	Lppd
70	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	-	34 OPD	68	96	123	129	129	Lppd
71	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	-	5 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, JTV, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	Lppd
72	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	-	11 (Panti Asuhan Anak)	15	15	15	15	15	Lppd
73	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
74	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	-	15 (Panti Asuhan Anak)	15	15	15	15	15	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
75	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	-	8 (Panti Asuhan)	15	15	15	15	15	Lppd
76	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	-	1 (PKK)	15	20	25	30	30	Lppd
77	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	-	45 (Kader PKK)	45	45	45	45	45	Lppd
78	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	-	1 (PKK)	10	10	15	20	20	Lppd
79	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	-	20	20	20	20	20	20	Lppd
80	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	-	3 (PERDA, Leaflet, Sosialisasi)	2	2	2	2	2	Lppd
81	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	-	1 (PPT)	1	1	1	1	1	Lppd
82	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
83	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
84	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
85	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan swasta	99,73	25,21	-	-	-	-	25,21	Indikator Lama
86	Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak	-	-	100%	100%	-	-	100%	Indikator Lama
87	Persentase peningkatan kelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak	-	-	100%	100%	-	-	100%	Indikator Lama

J. DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Permasalahan
Urusan Tenaga Kerja	
1	Tingginya pengangguran sebagai dampak Covid – 19
2	Masih terbatasnya angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Angkatan kerja sebagian besar didominasi lulusan pendidikan menengah dan pendidikan dasar
3	Kurang optimalnya Perluasan daya serap lapangan kerja dan kemitraan Pemerintah dengan dunia swasta untuk mengurangi pengangguran
4	Masih perlu ditingkatkannya pemetaan/data dukung kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Kota Madiun
5	Belum semua pencari kerja mendapatkan pelatihan karena terbatasnya kejuruan pelatihan dan anggaran
6	Pelatihan belum berbasis kompetensi dan berkesinambungan serta kurang optimalnya jaringan kemitraan dengan pihak lain dalam upaya penyerapan lulusan pelatihan
7	Perizinan lembaga pelatihan terkait dengan sistem perizinan satu pintu/OSS (<i>Online Single Submission</i>) kurang terpantau karena Sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) dilaksanakan oleh instansi lain
8	Masih terdapat tenaga kerja sektor informal (bukan penerima upah) yang belum mendapatkan jaminan Asuransi Ketenagakerjaan, karena Keterbatasan dana APBD dan data tergantung Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pusat
9	Masih terdapatnya Perselisihan Hubungan Industrial
10	Kurangnya pengetahuan pekerja tentang peraturan-peraturan perlindungan tenaga kerja dan sosialisasinya/bimtek peraturan perlindungan tenaga kerja belum optimal
11	Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
12	Pengelolaan usaha koperasi masih menggunakan pola konvensional
13	Masih perlu ditingkatkannya fungsi koperasi, dimana sebagian besar koperasi bergerak pada kegiatan simpan pinjam
14	Masih belum banyak yang memiliki Sertifikat Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bagi pengelola Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi
15	Rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia koperasi dalam pengembangan koperasi;
16	Masih lemahnya pelaku usaha di bidang manajemen pengelolaan usaha maupun inovasi

No	Permasalahan
17	Masih perlu ditingkatkannya terbangunnya jaringan kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan pelaku usaha secara maksimal
18	Kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih terbatas dalam memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produksi
Urusan Perindustrian	
19	Masih terbatasnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah
20	Kualitas Sumber Daya Manusia yang bergerak di bidang industri kecil belum optimal sehingga lemah dalam penerapan teknologi pengolahan
21	Masih perlu ditingkatkannya pemanfaatan kawasan industri dan belum adanya penetapan sentra-sentra industri kecil menengah
22	Penyebaran publikasi produk Industri Kecil Menengah belum Optimal khususnya Publikasi Produk Industri Kecil Menengah dengan Digital Marketing
23	Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional dan <i>Geographical Industry Information System</i> belum optimal
24	Kurang berkembangnya industri kreatif karena Industri kreatif belum menjadi isu utama
25	Kualitas produk Industri Kecil dan Menengah kurang memenuhi standar nasional maupun internasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produksi
26	Belum optimal fasilitasi pengurusan standarisasi dan belum adanya Tenaga ahli Standarisasi yang akan melakukan pendampingan dalam pengurusannya

Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Isu Strategis
Urusan Tenaga Kerja	
1	Adanya pengangguran di Kota Madiun
2	Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal dan kurangnya Perluasan daya serap lapangan kerja dengan kemitraan Pemerintah dengan dunia swasta untuk mengurangi pengangguran
3	Lulusan Pelatihan belum optimal terserap dalam pasar kerja, karena belum berbasis kompetensi yang di buktikan sertifikasi uji kompetensi
4	Perlindungan Tenaga Kerja sektor Formal maupun informal (bukan penerima upah) belum Optimal
Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
1	Banyaknya Koperasi yang belum menerapkan sistem manajemen yang modern dan kurangnya ketaatan pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan peraturan yang ditetapkan
2	Pengembangan Unit Usaha Koperasi belum optimal karena masih banyak yang bergerak di Simpan Pinjam
3	Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih lemah dalam bidang manajemen pengelolaan usaha, inovasi, dan pengenalan/pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4	Standarisasi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Madiun

No	Isu Strategis
	belum optimal
Urusan Perindustrian	
1	Pemberdayaan Industri Kecil Menengah dan Publikasi Produk Industri Kecil Menengah dalam era Digitalisasi Industri belum optimal
2	Standartisasi produk Industri Kecil dan Menengah di Kota Madiun belum optimal

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka
Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi			Persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor perdagangan	
			Persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor jasa	

Tujuan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	50	55	60	-	-
2	Terciptanya pelayanan ketenagakerjaan yang responsif	Persentase calon tenaga kerja yang ditempatkan	-	20	20	30	30
3	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	-	100	100	100	100
4	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor	Persentase Pertumbuhan Produk	7,3	7,3	7,35	-	-

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Industri	Domestik Regional Bruto Sektor Industri					
5	Terwujudnya industri kecil menengah yang tangguh	persentase Industri Kecil Menengah yang berstandarisasi	-	40	42	44	45
6	Terwujudnya Koperasi yang aktif Dan Usaha Mikro Yang Berkembang	persentase koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	-	80	83	85	87
		persentase Usaha Mikro yang beromset naik	-	0,05	0,08	0,09	0,12

Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	18,31 skor	18,32 skor	18,34 skor
2	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal	65	70	75	-	-
		persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	-	40	40	50	50
3	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja sektor formal	Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sesuai standart	60,25	70	71,5	-	-
		persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja	-	100	100	100	100

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja sektor informal	persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial	-	10	10	10	10
5	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja	-	10	15	20	25
6	Meningkatnya standarisasi produk pelaku industri kecil menengah komoditi makanan dan minuman	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	-	70	75	80	85
7	Meningkatnya kapasitas produksi Industri Kecil Menengah	persentase pengajuan rekomendasi permodalan yang disetujui	-	90	90	90	90
8	Meningkatnya persetujuan proses perijinan	persentase pengajuan perijinan Nomor Induk Berusaha yang direkomendasi	-	100	100	100	100
9	Meningkatnya publikasi produk Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri	0,03	0,03	0,03	-	-
		Persentase peningkatan IKM terpublikasikan	-	9	10	10	10
10	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Bersertifikat Nomor Induk Koperasi	-	3%	3%	3%	3%
11	Meningkatnya koperasi yang Unit Usahanya bertambah	Persentase jumlah koperasi yang jenis usahanya bertambah	-	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Meningkatnya Kualitas Promosi UMKM	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Beromset Naik Setelah Dipromosikan	-	15%	15%	15%	15%
13	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Beromset Naik Setelah Pembinaan	Persentase peningkatan Pelaku Usaha Mikro Yang Beromset Naik Setelah Pembinaan	-	10%	10%	10%	10%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					URUSAN RUTIN																
				2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran (%)		100 %	758.331.623												
				2.01.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan bahan penunjang : Uang Kinerja Kegiatan (UKK), ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Benda Pos, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Cetak dan Penggandaan (%)		100 %	635003823												
				2.01.01.02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas keluar daerah bagi pejabat dan staf Dinas Tenaga Kerja (kegiatan)		1 kegiatan	123.327.800												
				2.01.02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%)		100 %	88.295.850												
				2.01.02.01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan	Jumlah pemeliharaan dan perawatan gedung/		1 kegiatan	34.520.000												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Bangunan Kantor	lingkungan (unit)															
				2.01.02.02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional (kendaraan)		20 kendaraan	29.701.850												
				2.01.02.03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor (kegiatan)		1 kegiatan	24.074.000												
				2.01.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)															
				2.01.03.01	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor (%)															
				2.01.03.04	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah rehab sarana dan prasarana Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun (lokasi)															
				2.01.04	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/1 aporan yang disusun tepat waktu (B)		100 %	19.452.572												
				2.01.04.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja (dokumen)		6 dokumen	19.452.572												
					URUSAN PRIORITAS																

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				2.01.15	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)		73,04%	350.882.216												
						Persentase Lulusan Pelatihan Yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dasar (%)															
				2.01.15.01	Kegiatan Updating data Pengangguran Tenaga Kerja	Tersedianya data ketenagakerjaan atau pengangguran (dokumen)		1 dokumen	126.524.943												
				2.01.15.02	Kegiatan Penyebarluasan Optimalisasi Informasi Pasar Kerja dan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di dalam negeri maupun diluar negeri (orang)		237 orang	85.574.544												
				2.01.15.03	Kegiatan Pameran Bursa Kerja Job Market Fair	Jumlah pencari kerja yang terserap di dunia kerja (orang)															
				2.01.15.04	Kegiatan penerapan Tehnologi Tepat Guna	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan penerapan tehnologi tepat guna (orang)		40 angkatan kerja	13.792.906												
				2.01.15.05	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan ketrampilan berkompeten (orang)		35 orang	95.978.880												
				2.01.15.06	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan	Jumlah wirausaha baru yang berkembang (orang)		40 orang	29.010.943												
				2.01.16	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan	Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui		100%	472.253.448												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					KetenagaKerja an	Perjanjian Bersama (%)															
				2.01.16.01	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (kasus/ pengaduan)		20 kasus/ pengaduan	42.219.723												
				2.01.16.02	Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan (perusahaan)		25 perusahaan	50.133.908												
				2.01.16.03	Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pengetahuan tentang perlindungan tenaga kerja (orang)		100 Tenaga Kerja	133.577.532												
				2.01.16.04	Kegiatan Asuransi Tenaga Kerja Sektor Informal (SIAGA KITA)	Jumlah tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan dari PBID (orang)		7.218 Tenaga Kerja Sektor Informal	246.322.285												
				2.01.17	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten (%)															
				2.01.17.01	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah peserta pelatihan yang berkompeten (orang)															
				3.07.15	Program Pengembangan Industri Kecil	Persentase IKM yang Berstandart		19,63%	440.979.658												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Menengah	(%)															
				3.07.15.01	Kegiatan Sosialisasi Penerapan dan Fasilitasi Standart Produk Industri (HKI) bagi IKM/IRT Kota Madiun	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi HKI (IKM)		20 IKM	47.349 .421												
				3.07.15.02	Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Kuliner dan Diversifikasi Produk Industri Manufaktur dan Fasilitasi Ijin Teknis	Jumlah IKM yang mempunyai ijin PIRT (IKM)		20 IKM	37.918 .128												
				3.07.15.03	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil, Menengah Tk. Nasional; INACRAFT	Jumlah produk unggulan yang dipamerkan (jenis)		3 jenis	35.655 .293												
				3.07.15.04	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan IKM/IRT oleh DEKRANASDA	Jumlah produk unggulan kerajinan handmade yang dipamerkan (buah)		2 produk	94.544 .777												
				3.07.15.05	Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi IKM / IRT	Jumlah dokumen IKM yang belum berijin (dokumen)															
				3.07.15.06	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan bagi IKM / IRT	Jumlah IKM/IRT yang meningkat SDM nya (IKM)		30 IKM	225.51 2.039												
				3.07.16	Program Pembinaan Industri	Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice) (%)		100 %	41.523 .000												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				3.07.16.01	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian TAR dan Nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practices bagi industri hasil tembakau DBHCH	Jumlah pengujian kadar TAR dan Nikotin (kali)		1 Pengujian	41.523.000													
				3.08.15	Program Ketransmigrasian	Persentase Pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi (%)		80%	19.425.615													
				3.08.15.01	Kegiatan Penyelenggaraan ketransmigrasian	Jumlah sosialisasi ketransmigrasian (kegiatan)		1 kegiatan	19.425.615													
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								18,31		18,31		18,32		18,34		18,34			
				X	X	0	X	1														
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah					80,01	5.300.663.865	80,02	5.238.330.795	80,03	6.063.222.120	80,04	6.687.943.120	80,04	23.290.159.900	
				X	X	0	X	1														
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah					100%	40.000.000	100%	71.280.000	100%	71.280.000	100%	71.280.000	100%	253.840.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				X	X	0	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			6 dokumen	40.000.000	6 dokumen	71.280.000	6 dokumen	71.280.000	6 dokumen	71.280.000	6 dokumen	253.840.000	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	
				X	X	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan			100 %	3.569.135.000	100 %	3.867.573.000	100 %	4.846.852.640	100 %	5.035.710.640	100 %	17.319.271.280			
				X	X	0	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji Asn perangkat Dearah			100 %	3.569.135.000	100 %	3.867.573.000					100 %	17.319.271.280	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	
									Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN							36 org	4.846.852.640	36 org	5.035.710.640	72 org				
				X	X	0	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi Kepegawaian					100 %	100.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	400.000.000			
				b	X	0	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan cukai					100 orang	100.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	350 orang	400.000.000	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	
				X	X	0	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum			100 %	971.550.000	100 %	1.078.611.040	100 %	868.259.480	100 %	991.442.480	100 %	3.909.863.000			
				X	X	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif			100 %	818.900.000	100 %	844.611.040					100 %	2.982.673.000	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan							9 paket	610.859.480	9 paket	708.302.480	18 paket				
				X	X	0	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas			100 %	152.650.000	100 %	234.000.000					100 %	927.190.000	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi							75 laporan	257.400.000	75 laporan	283.140.000	150 laporan				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				X X 0 1 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah					611.517.8 65	100 %	5.716. 755	100 %	-	100 %	300.000 .000	100 %	917.234.6 20		
				X X 0 1 0 7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasio nal					-	100 %	2.673. 000		-	100 %		100 %	2.673.000	Dinas tenaga Keja, KUKM	Kota Madiu n
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan															
				X X 0 1 0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	611.517.8 65	100 %	3.043. 755					100 %			
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan										25 unit	300.000. 000		914.561.6 20	Dinas tenaga Keja, KUKM	Kota Madiu n
				X X 0 1 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan				100 %	108.461.0 00	100 %	115.1 50.00 0	100 %	126.830 .000	100 %	139.510 .000	100 %	489.951.0 00		
				X X 0 1 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasio nal yang layak digunakan				100 %	35.618.00 0	100 %	48.550 .000						100 %		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya								19 unit	53.405.0 00	19 unit	58.745.0 00	38 unit	196.318.0 00	Dinas tenaga Keja, KUKM	Kota Madiu n

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				X	X	0	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan			100%	42.243.000	100%	39.100.000					100%	172.008.000	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	
									Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi							1 unit	43.175.000	1 unit	47.490.000	1 unit				
				X	X	0	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan			100%	30.600.000	100%	27.500.000					100%	121.625.000	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	
									Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi							47 unit	30.250.000	47 unit	33.275.000	94 unit				
				2	0	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					2.373.855.860		3.129.497.052		4.407.169.422		4.407.169.422		14.202.285.916			
Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja											55%												
Terciptanya pelayan ketenagakerjaan yang responsif	Persentase calon tenaga kerja yang ditempatkan													20%		30%			30%					
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Prosentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan									70,0%												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja	informal peserta calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi																				
												40,0 %		50,0 %		50,0 %		50,0 %					
				2	0	0				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		23%	418.950.040	23%	862.016.290								
											Persentase jumlah peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi		20%		25%		30%	1.604.820.480	35%	1.604.820.480	35%	4.375.201.450	
				2	0	0	2	0	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Tersedianya peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten		90 orang	370.954.440	220 orang	812.016.290					90 orang		
											Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi				40 orang	45 orang	1.468.615.360	45 orang	1.468.615.360	130 orang	4.120.201.450		
				2	0	0	2	0	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru		90 orang	167.557.940	180 orang								
													203.396.500	40 orang								Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Jumlah peserta pelatihan ketrampilan						55 orang	612.016.290					75 orang			
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023								60 orang	918.615.360	75 orang	918.615.360	75 orang	2.616.804.950		
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									550.000.000		550.000.000		1.503.396.500		
				2 0 7 3 2	2 0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPKS yang berijin			20%	47.995.600	20%	50.000.000	20%	36.205.120	20%	36.205.120	20%	55.000.000		
				2 0 7 3 2	2 0 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)			4 kali pembinaan	47.995.600	4 kali pembinaan	50.000.000					8 kali pembinaan	55.000.000	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina								27 lembaga	36.205.120	27 lembaga	36.205.120	27 lembaga			
				2 0 7 3 5	2 0 5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja							30 perusahaan	100.000.000	30 perusahaan	100.000.000	60 perusahaan	200.000.000		
				2 0 7 3 5	2 0 1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah							2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	200.000.000	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja									15%		20%		25%		25%				
				2	0	0						79%	272.466.690	79%	548.266.522							
												10%		10%	15%	646.931.382	15%	646.931.382	15%	2.114.595.976		
				2	0	0	2	0				200 orang	272.466.690	225 orang	548.266.522							
														225 orang	230 orang	646.931.382	235 orang	646.931.382	1140 orang	2.114.595.976		
				2	0	0	2	0	0			1 aplikasi	125.866.320	1 aplikasi dan dokumen	187.176.952				1 aplikasi			
															2 dokumen	260.788.232	2 dokumen	171.997.912	2 dokumen	745.829.416	Dinas tenaga Kerja, KUKM	
				2	0	0	2	0	0			100 orang	133.671.690	175 orang	361.089.570				275 orang	1.355.837.880	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Online	sosialisasi informasi bursa kerja															
									Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)							250 orang	386.143.150	250 orang	474.933.470	500 orang				
				2	0	0	2	0	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja				5 orang	12.928.680				5 orang	12.928.680	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	
									Jumlah Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja															
Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang terselesaikan													100 %		100 %			100 %		100 %			
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja sektor formal	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja											100 %		100 %			100 %		100 %			
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja sektor informal	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapat											10%		10%			10%		10%			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			atkan jaminan social																					
				2	0	0		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					10%	1.682.439.130	10%	1.719.214.240								
													16%		16%		2.155.417.560	16%	2.155.417.560	16%	7.712.488.490			
				2	0	0	2	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					25%	550.262.330	25%	268.652.240								
															50 perusahaan	50 perusahaan	529.891.800	50 perusahaan	529.891.800	50 perusahaan	1.878.698.170			
				2	0	0	2	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				15 dokumen	295.865.550	15 dokumen	47.615.000						30 dokumen			
																20 perusahaan	224.000.000	20 perusahaan	224.000.000	40 perusahaan	791.480.550	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
						Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online																
				2075031	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Jumlah Perusahaan yang terdata dan mendapatkan Sosialisasi Sarana HI				300 Perusahaan	254.396.780	300 Perusahaan	221.037.240						600 Perusahaan			
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan								1 Dokumen	305.891.800	1 Dokumen	305.891.800	2 Dokumen	1.087.217.620	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	
				207502	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan				75%	1.132.176.800	75%	1.450.562.000	75%	1.625.525.760	75%	1.625.525.760	75%	5.833.790.320			
				207502	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan melalui PB				15 kasus/pengaduan yang terselesaikan	107.768.440	15 kasus/pengaduan yang terselesaikan	107.768.440						30 kasus/pengaduan yang terselesaikan	423.042.880	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Kabupaten/Kota																
									Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan							15 perkara	103.753.000	15 perkara	103.753.000	30 perkara				
				2	0	0	2	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga kerja Sektor Informal yang mendapatkan SLAGAKITA			3.500 tenaga kerja sektor informal	1.024.408.360	4.000 tenaga kerja sektor informal	1.342.793.560				7.500 tenaga kerja sektor informal	5.410.747.440	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	
									Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja							5.500 orang	1.521.772.760	5.500 orang	1.521.772.760	9.000 orang				
								URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						1.728.360.000		1.034.330.800		1.455.279.160		1.455.279.160		5.673.249.120		
Meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase koperasi yang berkualitas											10,53%												
	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro yang beromzet naik											0,047%												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Terwujudnya Koperasi Dan Usaha Mikro Yang Berkebang	Persentase koperasi yang bersertifikat NIK													83%		85%			87%				87%		
	Persentase Usaha Mikro yang beromset naik													0.08%		0.09%			0.12%				0.12%		
	Meningkatnya Koperasi Aktif dan Omzet Usaha Mikro	Persentase koperasi aktif										98,69%													
	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatannya Jumlah Koperasi Yang Bersertifikat NIK												3%		3%			3%				3%		
				2	1	0		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi bersertifikat NIK				80.13%	750.310.000	86,50%	500.318.900		709.308.600		709.308.600			2.669.246.100		
									Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK			75%		75%		75%			75%			75%			
				2	1	0	2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi bersertifikat NIK			125 kope rasi	750.310.000	135 kope rasi	500.318.900										

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK						30 kope rasi		35 kope rasi	709.308.600	40 kope rasi	709.308.600	40 kope rasi	2.669.246.100		
				2	170501	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah koperasi yang dibina			156 kope rasi	259.300.000 491.010.000	156 kope rasi	96.118.900 404.200.000						156 kope rasi		
												139 kope rasi									
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian								550 orang	181.250.600 528.058.000	550 orang	181.250.600 528.058.000	1.100 orang	717.920.100 1.951.326.000		
		Meningkatnya koperasi unit usahanya bertambah	Persentase jumlah koperasi yang jenis usahanya bertambah									2.5%		2.5%		2.5%		2.5%			
				2	1706	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif dengan omzet meningkat			30%	148.050.000	30%	224.161.900								
							Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah			2,5%		2.5%		2.5%	126.688.800	2.5%	126.688.800	2.5%	625.589.500	2.5%	
				2	17061	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang diangkat omsetnya			50 kope rasi	148.050.000	50 kope rasi	224.161.900	5 kope rasi	126.688.800	5 kope rasi	126.688.800	5 kope rasi	625.589.500		
							jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya					5 kope rasi									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				2	1	0	2	0	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dibangun				152 kope rasi	148.050.000	156 kope rasi	224.161.900					156 kope rasi			
															139 kope rasi							625.589.500	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	
									Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								210 unit usaha	126.688.800	215 unit usaha	126.688.800	215 unit usaha				
			Persentase Usaha Mikro yang beromzet naik										0,05 %												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Beromset Naik Setelah Pembinaan	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Yang Beromset Naik Setelah Pembinaan											10%		10%			10%		10%			
		Meningkatnya kualitas promosi UMKM	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang beromset naik setelah dipromosikan											15%		15%			15%		15%			
				2	17	;	07		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromset naik			7,00 %	830.000.000	7%									
									Persentase Usaha Mikro dibangun yang beromset naik					7%	309.850.000	7.33 %	619.281.760	8%	619.281.760	8%	2.378.413.520			
				2	17	07	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jumlah pelaku usaha mikro terfasilitasi beromset naik			10 orang	830.000.000	4 orang	309.850.000								
									Jumlah pelaku usaha mikro dibangun beromset naik							11 orang	619.281.760	12 orang	619.281.760	37orang	2.378.413.520			
				2	17	07	2.01		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi			160 orang	830.000.000	50 orang	309.850.000							Dinas tenaga Keja, KUKM	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Jumlah pelaku usaha mikro yang dibangun dan dipromosikan					50 orang						50 orang				
									Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi							150 unit		150 unit			2.378.413.520			
				3	3	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					970.405.215	955.349.185		991.096.480		991.096.480		120 unit	3.907.947.360		
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri												-10,00%											
		Meningkatnya daya saing sektor industri	Prosentase pertumbuhan industri										0,03%											
Terwujudnya IKM Yang Tangguh	Persentase IKM yang berstandarisasi													42%		44%		45%		45%				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Meningkatnya standarisasi produk pelaku industri kecil menengah komoditi makanan dan minuman	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi											75%		80%			85%		85%			
		Meningkatnya kapasitas produksi IKM	persentase pengajuan rekomendasi permodalan yang disetujui											90%		90%			90%		90%			
		meningkatnya persetujuan proses perijinan	persentase pengajuan NIB yang direkomendasi											100%		100%			100%		100%			
				3	3	0		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian			100%	563.351.320	100%	364.324.050									
									persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat			2,5%		5%		5%	458.794.560	5%	458.794.560	5%	1.845.264.490			
				3	3	0	2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perindustrian			2 dokumen	563.351.320	2 dokumen	364.324.050									
									Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan					20 IKM		22 IKM	458.794.560	22 IKM	458.794.560	22 IKM	1.845.264.490			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				3	3	0	2	0	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		2 dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	-	250.000.000	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	
				3	3	0	2	0	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Standarisasi		20 IKM	73.200.000	20 IKM	84.654.960					40 IKM	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	
																	2 dokumen	100.948.640	2 dokumen	100.948.640	4 dokumen			359.752.240
				3	3	0	2	0	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM)		80 IKM	240.151.320	65 IKM	223.955.930					145 IKM	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	
																	3 dokumen	246.845.920	3 dokumen	246.845.920	6 dokumen			957.799.090
				3	3	0	2	0	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah peserta bimbingan teknik dan pengembangan sarana standart pengawasan mutu diversifikasi				40 IKM	55.713.160					40 IKM	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									produk															
									Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							3 dokumen	111.000.000	3 dokumen	111.000.000	6 dokumen				
		meningkatnya publikasi produk IKM	persentase peningkatan IKM terpublikasi											10%	10%			10%		10%				
				3	3	0			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM yang mengikuti publikasi produk		12,80%	407.053.895	12,80%	591.025.135									
										persentase IKM yang mengikuti publikasi produk				10%		10%	532.301.920	10%	532.301.920	10%	2.062.682.870			
				3	3	0	2		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyebarluasan informasi produk IKM		3 kali penyebarluasan informasi	407.053.895	4 kali penyebarluasan informasi	591.025.135									
										Jumlah IKM yang mengikuti publikasi				40 IKM		40 IKM	532.301.920	40 IKM	532.301.920	40 IKM	2.062.682.870			
				3	3	0	2		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Publikasi Produk berbasis SIINas		3 kali Publikasi	407.053.895	4 kali Publikasi	591.025.135					7 kali Publikasi	2.062.682.870	Dinas tenaga Kerja, KUKM	Kota Madiun	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas								5 dokumen	532.301.920	5 dokumen	532.301.920	10 dokumen			
					JUMLAH ANGGARAN				2.191.143.982		10.373.284.940		10.357.507.832		12.916.767.182		13.541.488.182		47.073.642.296		

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TENAGA KERJA								
1	persentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	-	73,04%	70%				75%
2	persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sesuai standart	100%	100%	70,00%				71,50%
3	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi				40%	50%	50%	50%
4	persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja				15%	20%	25%	25%
5	persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan kerja				100%	100%	100%	100%
6	persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan social				10%	10%	10%	10%
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Persentase koperasi aktif	99,33%	98,69%	98,69%				98,69%
2	Persentase Usaha Mikro yang beromzet naik	-	-		0,05%			0,05%
3	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Bersertifikat Nik				3%	3%	3%	3%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Persentase jumlah koperasi yang jenis usahanya bertambah				2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
5	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Beromset Naik Setelah Dipromosikan				15%	15%	15%	15%
6	Persentase peningkatan Pelaku Usaha Mikro Yang Beromset Naik Setelah Pembinaan				10%	10%	10%	10%
PERINDUSTRIAN								
1	persentase pertumbuhan industri	0%	0%	0,03%		-	-	0,03%
2	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	-	-		75%	80%	85%	85%
3	persentase pengajuan rekomendasi permodalan yang disetujui	-	-		90%	90%	90%	90%
4	persentase pengajuan perijinan Nomor Induk Berusaha yang direkomendasi	-	-		100%	100%	100%	100%
5	persentase peningkatan Industri Kecil Menengah terpublikasikan	-	-		10%	10%	10%	10%

Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TENAGA KERJA									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85	8,32	8,15	5,74	5,12	5	5	Lanjutan Indikator sasaran kota
2	Persentase calon tenaga kerja yang ditempatkan	-	-		20%	30%	30%	30%	Indikator Tujuan PD
3	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	-	-		100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
4	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,29%	68,01	55%		-	-	60%	Indikator Tujuan PD
5	Persentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	-	73,04%	70%		-	-	75%	Indikator Sasaran PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sesuai standart	100%	100%	70,00%		-	-	71,50%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	-	-		40%	50%	50%	50%	Indikator Sasaran PD
8	Persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja	-	-		15%	20%	25%	25%	Indikator Sasaran PD
9	Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja	-	-		100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
10	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial	-	-		10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	-	-	10%		-	-	10%	Indikator Program PD
12	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	21,75%	0,69%	23%		-	-	23%	Indikator Program PD
13	Persentase Pencari Kerja Yang ditempatkan	85,52%	56,15%	79%		-	-	79%	Indikator Program PD
14	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	-	-		25%	30%	35%	35%	Indikator Program PD
15	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	-	-		10%	15%	15%	15%	Indikator Program PD
16	Persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	-	-		16%	16%	16%	16%	Indikator Program PD
17	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	Lppd
18	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	68%	68%	68%	68%	68%	68%	Lppd
19	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-	15.242.64 3.966	12.000.000 .000	12.500.0 00.000	12.750.0 00.000	13.000.00 0.000	13.000.000.000	Lppd
20	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	-	100%	70,00%	71,50%	72,50%	75,00%	75,00%	Lppd
21	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	-	56,15%	50%	51%	52%	53%	53%	Lppd
22	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	-	1	1	1	1	1	1	Lppd
23	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	-	0	0	0	0	0	0	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	-	5	8	10	12	15	15	Lppd
25	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	-	0%	0%	30%	30%	30%	30%	Lppd
26	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	26%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Lppd
27	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Lppd
28	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	26%	50%	38%	38%	40%	40%	40%	Lppd
29	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
30	Jumlah penganggur yang dilatih	850	35	230	230	230	230	230	Lppd
31	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
32	Persentase penyerapan lulusan	66%	66%	20%	20%	20%	20%	20%	Lppd
33	Lulusan bersertifikat kompetensi	66%	66%	20%	20%	20%	20%	20%	Lppd
34	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	-	0%	0%	25%	25%	25%	25%	Lppd
35	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	-	0%	0%	25%	25%	25%	25%	Lppd
36	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	-	0%	1%	1%	1,50%	2%	2%	Lppd
37	Data tingkat produktivitas total	-	64,00%	62,50%	63%	64%	65,00%	65,00%	Lppd
38	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	-	30%	25%	25%	27%	30%	30%	Lppd
39	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	-	48%	30%	30%	30%	30%	30%	Lppd
40	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	-	23	23	23	23	23	23	Lppd
41	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
42	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	-	100%	70%	70%	73%	75%	75%	Lppd
43	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	-	3%	5%	5%	4%	3%	3%	Lppd
44	Jumlah mogok kerja	-	0	5	5	4	4	4	Lppd
45	Jumlah penutupan perusahaan	-	0	10	10	9	9	9	Lppd
46	Jumlah perselisihan kepentingan	-	0	15	15	14	13	13	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
47	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	-	0	1	1	1	1	1	Lppd
48	Jumlah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja	-	0	15	15	14	13	13	Lppd
49	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	-	61	60	60	50	40	40	Lppd
50	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	-	0	50	50	50	50	50	Lppd
51	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	-	1	1	1	1	1	1	Lppd
52	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	-	80%	70%	70%	70%	70%	70%	Lppd
53	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	-	105	110	115	120	125	125	Lppd
54	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	-	374	300	325	350	375	375	Lppd
55	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	-	19	19	19	19	19	19	Lppd
56	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
57	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	-	0	1	1	1	1	1	Lppd
58	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
59	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	-	52	50	50	50	50	50	Lppd
60	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
61	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	-	11,50%	10%	10%	10%	10%	10%	Lppd
62	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	-	52	50	50	50	50	50	Lppd
63	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi keperluan	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
64	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
65	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
66	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
67	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi	-	60	-	-	-	-	60	Indikator Lama
68	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten	-	35 orang	-	-	-	-	35 orang	Indikator Lama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	Persentase koperasi yang berkualitas	0,70%	1,30%	10,53%		-	-	11,76%	Indikator Tujuan PD
2	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro yang beromzet naik	-	-		0,05%	-	-	0,05%	Indikator Tujuan PD
3	persentase Usaha Mikro yang beromset naik	-	-		0,08%	0,09%	0,12%	0,12%	Indikator Tujuan PD
4	persentase koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	-	-		83%	85%	87%	87%	Indikator Tujuan PD
5	Persentase koperasi aktif	99,33%	98,69%	98,69%		-	-	98,69%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Usaha Mikro yang beromzet naik	-	-		0,05%	-	-	0,05%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Bersertifikat Nik	-	-		3%	3%	3%	3%	Indikator Sasaran PD
8	Persentase jumlah koperasi yang jenis usahanya bertambah	-	-		2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Indikator Sasaran PD
9	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Beromset Naik Setelah Dipromosikan	-	-		15%	15%	15%	15%	Indikator Sasaran PD
10	Persentase peningkatan Pelaku Usaha Mikro Yang Beromset Naik Setelah Pembinaan	-	-		10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase koperasi bersertifikat Nomor Induk Koperasi	0	81,29%	80.13%		-	-	86,50%	Indikator Program PD
12	Persentase koperasi aktif dengan omzet meningkat	-	-	30%		-	-	30%	Indikator Program PD
13	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromzet naik	-	-	7,00%		-	-	7,00%	Indikator Program PD
14	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	-	-		7%	7,33%	8%	8%	Indikator Program PD
15	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat Nomor Induk Koperasi	-	-		75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	Indikator Program PD
16	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	-	-		2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Indikator Program PD
17	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	-	80%	80,65%	80,65%	80,65%	80,65%	80,65%	Lppd
18	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	-	0,42%	0,42%	0,43%	0,44%	0,45%	0,45%	Lppd
19	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Lppd
20	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	0	0	0	0	0	0	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	16,13%	16,13%	16,13%	16,13%	16,13%	16,13%	Lppd
22	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	19,35%	19,35%	19,35%	19,35%	19,35%	19,35%	Lppd
23	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	96,77%	96,77%	96,77%	96,77%	96,77%	96,77%	Lppd
24	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	-	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	Lppd
25	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	Lppd
26	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	Lppd
27	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	81,29%	81,29%	81,29%	81,29%	81,29%	81,29%	Lppd
28	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	Hasil sama dengan no.17						Lppd
29	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	Lppd
30	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	78,71%	78,71%	78,71%	78,71%	78,71%	78,71%	Lppd
31	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	Lppd
32	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	-	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	Lppd
33	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
34	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	-	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	Lppd
35	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	-	0%	0,02%	0,04%	0,06%	0,07%	0,07%	Lppd
36	Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	-	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	Lppd
37	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	-	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	Lppd
38	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	-	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
39	persentase pertumbuhan usaha mikro yang mandiri	-	0,005	-	-	-	-	0,005	Indikator Lama
40	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	-	0,42	-	-	-	-	0,42	Indikator Lama
PERINDUSTRIAN									
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	-	-12,84	7,30%		-	-	7,35%	Indikator Tujuan PD
2	persentase IKM yang berstandarisasi	-	-		42%	44%	45%	45%	Indikator Tujuan PD
3	persentase pertumbuhan industri	0%	0%	0,03%		-	-	0,03%	Indikator Sasaran PD
4	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	-	-		75%	80%	85%	85%	Indikator Sasaran PD
5	persentase pengajuan rekomendasi permodalan yang disetujui	-	-		90%	90%	90%	90%	Indikator Sasaran PD
6	persentase pengajuan perijinan Nomor Induk Berusaha yang direkomendasi	-	-		100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
7	persentase peningkatan Industri Kecil Menengah terpublikasikan	-	-		10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
8	persentase Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	-	-	100%		-	-	100%	Indikator Program PD
9	persentase Industri Kecil Menengah yang mengikuti publikasi produk	-	-	12,80%		-	-	12,80%	Indikator Program PD
10	Persentase Industri Kecil Menengah yang mengikuti publikasi produk	-	-		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	Indikator Program PD
11	persentase Industri Kecil Menengah yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	-	-		5%	5%	5%	5%	Indikator Program PD
12	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	-	0%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	Lppd
13	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	0%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	Lppd
14	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	0%	25%	25%	25%	25%	25%	Lppd
15	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Lppd
17	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	45%	45%	45%	45%	45%	45%	Lppd
18	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Lppd
19	Persentase terselesaikannya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sampai dengan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	-	0%	75%	100%	100%	100%	100%	Lppd
20	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	-	0%	50%	50%	50%	50%	50%	Lppd
21	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Lppd
22	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	-	1,28%	1%	1%	1,20%	1,20%	1,20%	Lppd
23	Pertumbuhan Sektor Pengolahan	-	-12,84	-	-	-	-	-12,84	Indikator Lama
24	Persentase Industri Kecil Menengah yang Berstandart	-	17,09	-	-	-	-	17,09	Indikator Lama
25	persentase Industri Kecil Menengah yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	-	80	-	-	-	-	80	Indikator Lama

K. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup

No	Permasalahan
1	Belum maksimalnya Sumber Daya Manusia dan kelembagaan dalam melaksanakan Pembinaan terhadap Sumber Pencemaran Air
2	Belum optimalnya pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
3	Masih diperlukan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengawas Lingkungan Hidup
4	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengelola dan mengembangkan lingkungan hidup di lingkungan sekitar masyarakat (kelurahan) dan lingkungan sekolah
5	Kurangnya Sumber Daya Manusia/Petugas pelaksana Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup
6	Belum optimalnya pelayanan pengelolaan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup
7	Belum tersusunnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8	Belum adanya penyusunan, pengembangan dan penerapan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
9	Belum adanya Standart Operasional Prosedur standart pelayanan dalam Dinas dan Perangkat Daerah terkait sebagai fasilitator pemenuhan izin lingkungan
10	Masih diperlukan adanya perubahan regulasi terkait dengan izin lingkungan
11	Belum optimalnya peran stakeholder dan masyarakat dalam upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim
12	Masih banyak pelaku usaha yang pasif dalam pemutakhiran izin lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
13	Banyak perusahaan yang belum memiliki izin lingkungan
14	Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya
15	Belum adanya kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak swasta kebersihan
16	Belum optimalnya peran bank sampah
17	Jumlah industri yang belum taat pada pencemaran air
18	Masih terdapat kegiatan/usaha yang belum memenuhi persyaratan administrasi & teknis terkait pengajuan rekomendasi ijin Tempat Penampungan Sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
19	Belum optimalnya pembinaan/sosialisasi kepada masyarakat terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim
20	Belum optimalnya pembinaan & pengawasan terhadap sumber pencemar limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

No	Permasalahan
21	Kurangnya ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan sekitar masyarakat (kelurahan) dan lingkungan sekolah
22	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi secara individu kepada para pencinta lingkungan
23	Belum optimalnya penyampaian informasi, sosialisasi/ataupun pembinaan terkait pelayanan pengelolaan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup serta penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan atau penyidikan lingkungan di luar pengadilan/melalui pengadilan
24	Belum optimalnya pembinaan untuk mengolah dan memilah sampah dari sumbernya
25	Belum optimalnya pengembangan dan sosialisasi teknologi ramah lingkungan
26	Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemantauan kualitas lingkungan
27	Pengelolaan sarana dan prasarana Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang kurang optimal
28	Belum tersedianya sistem pelayanan pengurusan rekomendasi Tempat Penampungan Sementara limbah bahan berbahaya Beracun secara elektronik
29	Belum tersedianya laboratorium lingkungan
30	Kapasitas/daya tampung Tempat Pembuangan Akhir Winongo mendekati overload

Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

No	Isu Strategis
1	Tempat Pembuangan Akhir diperkirakan akan segera penuh;
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
3	Peningkatan kualitas dan akses untuk data dan informasi yang terkait Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup

Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Indeks Kenyamanan Kota (<i>livable city</i>)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya fungsi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,15	57,69	57,77	57,85	57,93

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	15,9 indeks	15,91 indeks	15,92 indeks
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	51,28	51,29	51,30	51,31	51,32
		Indeks Kualitas udara (IKU)	83,26	82,73	82,90	83,09	83,26
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	-	-	22,40	22,41	22,42
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	97,01%	98,00%	98,50%	99,00%	99,00%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi	
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100 %	1.286.187.243												
				Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	11 jenis	1.173.215.981												
				Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	135 kali	38 X	112.971.262												
				Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100 %	1.085.473.700												
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	3 gedung	2	23.994.300												
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	60 unit	57	995.128.950												
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	91 unit	45	66.350.450												
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100 %	134.729.700												
				Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	156 org	85	134.729.700												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	36.146.685												
				Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun		10 dok	36.146.685												
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Prosentase data dan informasi SDA dan lingkungan hidup yang tersedia	6154%	64,10%	445.978.043												
				Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	1	5	194.540.537												
				Kegiatan Sosialisasi PPLH	Jumlah peserta sosialisasi		70 org	12.967.500												
				Kegiatan Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup	Jumlah data dan informasi KLH yang tersedia	1 dok	1 dok	80.434.112												
				Kegiatan Pengendalian Lahan	Jumlah lubang biopori yang terpasang	350	277	85.403.107												
				Kegiatan Inventarisasi Perusahaan/Instansi Penghasil Limbah B3 dan Penghasil Limbah Cair	Jumlah data dan informasi yang tersedia		4 dok	68.332.787												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kegiatan Pembinaan Izin TPS B3 dan Izin IPAL	Jumlah kegiatan/usaha yang mengurus izin	10	12	4.300.000												
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	44,89%	53,19%	747.189.821												
				Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan/usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya		63 perush	223.221.200												
				Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru	Jumlah kendaraan yang diuji gas emisi	1055	1138	221.957.403												
				Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah pemilik usaha/kegiatan sebagai peserta sosialisasi	0	0	7.990.000												
				Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung Iklim	Jumlah kampung iklim yang terbentuk	3	2	145.969.980												
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Gas Rumah Kaca dan Profil Kehati	Jumlah dokumen yang tersusun	1	2	117.779.616												
				Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok lomba	1 kel	0	30.265.622												
				Program Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Prosentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	40%	44,59%	354.933.375												
				Kegiatan Sosialisasi Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah peserta sosialisasi	0	0	16.495.000												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	7	8	33.920.000												
				Kegiatan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Jumlah perusahaan yang taat PROPER	3	3	4.230.000												
				Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah adiwiyata	0	7	70.201.500												
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan Yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)	Jumlah kelompok masyarakat berbudaya lingkungan hidup	0	6	173.574.947												
				Kegiatan Adopsi Regulasi tentang Izin Lingkungan	Jumlah yang mengikuti sosialisasi	0	0	0												
				Kegiatan Pembinaan Perusahaan yang Mempunyai Izin Lingkungan	Jumlah usaha/kegiatan yang taat membuat laporan	0	6	56.511.008												
				Kegiatan Edukasi dan Kader lingkungan yang Aktif	Jumlah kader lingkungan yang aktif	0	0	0												
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	74,83%	74,77	5.528.779.345												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					tangga																
				Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	11 jenis	11 jenis	646.308.770													
				Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah	Jumlah ruas jalan yang ditangani	11 ruas	11 ruas	2.899.511.111													
				Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Jumlah kelurahan dalam pengelolaan sampah	27 kel	27 kel	318.578.024													
				Kegiatan Peningkatan Kegiatan/ Usaha dalam Pengelolaan Limbah	Kegiatan/usaha yang melakukan pengelolaan limbah sesuai prosedur	0	15	14.742.000													
				Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah Akhir dengan Metode Controlled Landfill	Jumlah zona pengelolaan sampah akhir	1 zone	1 zone	1.612.787.699													
				Kegiatan Peningkatan Kerja Sama kegiatan Usaha dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah kegiatan/usaha dan kelompok masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan sampah	0	30 org	7.272.720													
				Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	Jumlah kecamatan dalam titik pantau penilaian ADIPURA	3	3	29.579.021													
	meningkatnya indek reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Daerah																			
			X		RUTIN PERANGKAT DAERAH																

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH					15,89		15,9		15,91		15,92		15,92				
			X	X	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP				A skor	13.894.5 13.290											
								Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah						A skor	16.042.26 9.915	A skor	18.148.5 78.700	A skor	20.300.0 14.970	A skor	68.385.3 76.875			
			X	X	0	1	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah				100%	125.056.000	100%	75.000.000	100%	85.000.000	100%	93.500.000	100%	378.556.000			
			X	X	0	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)				6 Dok	125.056.000	6 Dok	75.000.000					6 Dok	75.000.000			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								6 laporan	85.000.000	6 laporan	93.500.000	6 laporan	178.500.000				
					0	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan				100%	9.083.400.000	100%	8.856.372.010	100%	8.832.226.505	100%	9.715.449.156	100%	36.487.447.671			
			X	X	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah				100%	9.083.400.000	100%	8.856.372.010					100%	8.856.372.010			

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								83 orang/bulan	8.832.226.505	83 orang/bulan	9.715.449.156	83 orang/bulan	18.547.675.661			
						0105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai				100%	209.284.290										
								Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian						100%	201.000.000	100%	260.000.000	100%	310.000.000	100%	980.284.290		
							02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya			100%	209.284.290	100%	125.000.000					100%	334.284.290		
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							3 paket	150.000.000	3 paket	165.000.000	3 paket	315.000.000			
							9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Peningkatan Kapasitas Pegawai					100%	76.000.000					100%	76.000.000		
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							222 orang	110.000.000	222 orang	145.000.000	222 orang	255.000.000			
							0106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	82,67		100%	175.000.000										
								Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum						100%	137.883.000	100%	216.000.000	100%	237.600.000	100%	766.483.000		
							09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas			100%	175.000.000	100%	137.883.000					100%	312.883.000		

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
															12 laporan	216.000. 000	12 laporan	237.600. 000	12 laporan	453.600. 000			
						0 1 2 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				0%	878.007. 055	100 %	5.696.195	100%	5.696.19 5	100%	1.183.26 5.815	100%	2.072.66 5.260		
							1 1 1 1 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/ja abatan				524.906. 000	0%	0					100%	524.906. 000		
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							8 unit	0	8 unit	352.000. 000	8 unit	352.000. 000			
							2 1 1 1 1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan				0%	0							-		
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							1 unit	0	1 unit	825.000. 000	1 unit	825.000. 000			
							1 0 1 1 1	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Presentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor				353.101. 055	100 %	5.696.195						358.797. 250		
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan							2 unit	5.696.19 5	2 unit	6.265.81 5	2 unit	11.962.0 10			

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							Lainnya yang Disediakan																	
						0 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif				100%	2.000.53 0.445											
								Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100 %	5.368.280. 610	100%	7.367.65 6.000	100%	7.240.00 0.000	100%	21.976.4 67.055			
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif				100%	2.000.53 0.445									2.000.53 0.445		
								Prosentase pemenuhan kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100 %	1.230.240. 610						100%	1.230.24 0.610		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								4 lapora n	1.200.00 0.000	4 lapora n	1.320.00 0.000	4 lapora n	2.520.00 0.000			
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	presentase pemenuhan kebutuhan gaji Non ASN perangkat daerah						100 %	4.138.040. 000						100%	4.138.04 0.000		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								12 lapora n	6.167.65 6.000	12 lapora n	5.920.00 0.000	12 lapora n	12.087.6 56.000			
						0 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah				100%	1.423.23 5.500											

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							daerah																
							Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan						100 %	1.398.038.100	100%	1.382.000.000	100%	1.520.200.000	100%	5.723.473.600			
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan			100%	1.137.885.500	100 %	1.205.994.200						100%	2.343.879.700		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								6 unit	1.205.000.000	6 unit	1.325.500.000	6 unit	2.530.500.000			
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan dan mesin yang layak digunakan			100%	100.350.000	100 %	92.125.000	100%		100%		100%	192.475.000			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								15 unit	92.000.000	15 unit	101.200.000	15 unit	193.200.000			
						09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan			100%	185.000.000	100 %	99.918.900	100%		100%		100%	284.918.900			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi								3 unit	85.000.000	3 unit	93.500.000	3 unit	178.500.000			
Meningkatkan fungsi lingkungan hidup		Indeks kualitas lingkungan hidup									57,69		57,77		57,85		57,93		57,93				
							Tujuan																

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Indeks kualitas lingkungan hidup																
							sasaran																
							1. Indeks Kualitas Air (IKA)																
							2. Indeks Kualitas Udara (IKU)																
							3. Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga																
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)									51,29		51,3		51,31		51,32		51,32				
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)									82,73		82,9		83,09		83,26		83,26				
		3. Indeks Kualitas lahan									-		22,40		22,41		22,42		22,42				
			2	11	02		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP																
			2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia			69,23%	397.958.000	71,79%	419.892.000	79,49%	417.274.000	79,50%	620.000.000	79,50%	1.950.124.000			
			2	11	02	201	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia			4 dok	247.958.000	1 dok	242.274.000	1 dok	242.274.000	1 dok	430.000.000	1 dok	1.162.506.000			
			2	11	02	201	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	jumlah dokumen yang disusun			4 dok	247.958.000	1 dok	242.274.000					1 dok	490.232.000			
								Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang							1 dok	242.274.000	1 dok	430.000.000	1 dok	672.274.000			

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Disusun																
			2	1	0	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab / Kota	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia				1 dok	150.000.000	1 dok	177.618.000	1 dok	175.000.000	1 dok	190.000.000	4 dok	787.618.000		
							Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun										1 dok	95.000.000	1 dok	95.000.000		
							Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM D	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJM D Kabupaten/Kota yang Disusun								1 dok	185.000.000			1 dok	185.000.000		
			2	1	0	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	jumlah dokumen yang disusun				1 dok	150.000.000	1 dok	176.768.000					2 dok	422.618.000		
								Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup yang Disusun										1 dok	95.000.000	1 dok	95.000.000		
			2	1	0	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu				48%	1.242.680.365	49%	1.161.745.000	50%	1.149.000.000	50,10 %	1.706.700.000	50,10 %	5.260.125.365		

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2	1	0	2	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya				68 kegiatan/ usaha	934.075.365	68 kegiatan/ usaha	770.237.000	78 kegiatan/ usaha	779.000.000	79 kegiatan/ usaha	1.299.700.000	79 kegiatan/ usaha	3.783.012.365		
			2	1	0	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan lingkungan hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut			20 kali	555.992.000	15 kali	412.450.000						20 kali	968.442.000		
								Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							1 dokumen	412.000.000	1 dokumen	896.000.000	1 dokumen	1.308.000.000			
			2	1	0	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			1 dok	378.083.365	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	378.083.365		
								jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian pencemaran						3 kegiatan	357.787.000					3 kegiatan	357.787.000		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang								1 dokumen	367.000.000	1 dokumen	403.700.000	1 dokumen	770.700.000		

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Dilaksanakan																
			2	1	0	2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair				15 usaha / kegiatan	308.605.000	15 usaha / kegiatan	391.508.000	17 usaha / kegiatan	370.000.000	18 usaha / kegiatan	407.000.000	18 usaha / kegiatan	1.477.113.000		
			2	1	0	2	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran				15 kali	308.605.000	15 kali	247.008.000					15 kali	555.613.000		
								Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan							2 laporan	245.000.000	2 laporan	269.500.000	2 laporan	514.500.000			
							Penghentian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	jumlah kegiatan				-	-	2 kegiatan	144.500.000					2 kegiatan	144.500.000	baru	
								Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan							2 titik	125.000.000	2 titik	137.500.000	2 titik	262.500.000			
			2	1	0		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati				96,83 %	125.000.000							96,83 %	125.000.000		
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah						94,32 %	56.500.000	97,20 %	75.000.000	100%	225.000.000	100%	356.500.000	ganti indikator	

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2	1	0	2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota				1 lokasi	100.000.000							1 lokasi	100.000.000		
								Jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah						332 spesies	56.500.000	342 spesies	75.000.000	352 spesies	225.000.000	352 spesies	481.500.000	ganti indikator	
			2	1	0	2	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	56.500.000					2 dokumen	181.500.000		
								Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun							1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	225.000.000	2 dokumen	300.000.000			
			2	1	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				52,90 %	336.516.400	64,70 %	681.549.200	76,47 %	415.000.000	88,20 %	585.000.000	88,20 %	2.018.065.600		
			2	1	0	2	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				15 perusahaan	336.516.400	15 perusahaan	681.549.200	17 perusahaan	415.000.000	18 perusahaan	585.000.000	18 perusahaan	2.018.065.600		

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
						01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan				4 wajib usaha	192.753.900	3 perusahaan	551.549.200					4 perusahaan	744.303.100	di istem di ganti wajib usaha	
								Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan							4 dokumen	270.000.000	4 dokumen	393.000.000	4 dokumen	663.000.000			
			2	11	06	2031	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang taat membuat laporan				15 wajib usaha	143.762.500	15 wajib usaha	130.000.000					15 wajib usaha	273.762.500		
								Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							10 laporan	145.000.000	10 laporan	192.000.000	10 laporan	337.000.000			
			2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				90%	654.550.000	100%	670.000.000	100%	670.000.000	100%	1.150.000.000	100%	3.144.550.000		

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2	1	0	2	Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota				15 kegiatan	654.550.000	15 kegiatan	670.000.000	15 kegiatan	670.000.000	15 kegiatan	1.150.000.000	15 kegiatan	3.254.550.000		
							Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber Daya Manusia bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan	jumlah lembaga masyarakat yang peduli lingkungan				-	-	-	-					-	-		
								Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH										10 lembaga	110.000.000	10 lembaga	110.000.000		
			2	1	0	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup				4 kegiatan	654.550.000	4 kegiatan	670.000.000					4 kegiatan	1.324.550.000		
								Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan							4 dokumen	670.000.000	4 dokumen	1.040.000.000	4 dokumen	1.710.000.000			
			2	1	1	0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup				90%	85.000.000	100%	94.000.000	100%	100.000.000	100%	114.000.000	100%	393.000.000		

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2	1	1	2	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan				5 kasus	85.000.000	5 kasus	94.000.000	5 kasus	100.000.000	5 kasus	114.000.000	5 kasus	393.000.000		
			2	1	1	2	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota				5 kasus	39.000.000	5 kasus	39.000.000					5 kasus	78.000.000		
								Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti /Ditangani							5 dokumen	40.000.000	5 dokumen	47.000.000			87.000.000		
			2	1	1	2	Koordinasi dan Sinkronasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan	jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentuk				54 kader	46.000.000	54 kader	55.000.000					54 kader	101.000.000		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau							1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	67.000.000			127.000.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Melalui Pengadilan															
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga				94,001			98,00 %		98,50 %		99,00 %		99,00 %		99%			
			2	1	1				74%	8.215.352.000	73%	7.951.800.000	72%	8.188.000.000	71%	61.235.000.000	71%	93.705.504.000		
			2	1	1				32.350 ton	8.115.352.000							32.350 ton	8.115.352.000		
											43.777 ton	7.860.800.000	43.780 ton	8.088.000.000	43.790 ton	61.080.000.000	43.790 ton	85.144.152.000		
			2	1	1	2	0	2	2 lokasi	247.300.000	2 lokasi	235.600.000					2 lokasi	482.900.000		
													2 laporan	250.000.000	2 laporan	480.000.000	2 laporan	730.000.000		
			2	1	1	2	0	3	1 ton	5.454.300.000							1 ton	5.454.300.000		

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								jumlah volume sampah yang masuk TPA						32280 ton	2.939.200.000					32280 ton	2.939.200.000		
								Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SP A Kabupaten/Kota							32280 ton	2.998.000.000	32280 ton	7.200.000.000		10.198.000.000			
			2	1	1	2	0	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	jumlah masyarakat yang berperan aktif terhadap pengelolaan persampahan			350 orang	92.582.000	0	-					350 orang	92.582.000		
								Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat							41 kelompok	340.000.000	41 kelompok	200.000.000	41 kelompok	540.000.000			
			2	1	1	2	0	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah			11 jenis	2.321.170.000	3 jenis	4.686.000.000					3 jenis	7.007.170.000		
							0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SP A Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir						3 unit	4.500.000.000	3 unit	53.200.000.000	3 unit	57.700.000.000			

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2	1	1	2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi				35 kelompok	100.000.000	35 kelompok	91.000.000	45 kelompok	100.000.000	50 kelompok	155.000.000	50 kelompok	446.000.000		
			2	1	1	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah (Adipura)				3 kecamatan	100.000.000	3 kecamatan	91.000.000					3 kecamatan	191.000.000		
							Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja								3 unit	100.000.000	3 unit	155.000.000	3 unit	255.000.000			
			2	1	0		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)				71,0	257.127.000	71,5	41.500.000	75%	75.000.000	78%	225.000.000	78%	598.627.000		
			2	1	0	2	Penyimpanan Sementara Limbah B3	jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memenuhi syarat				15 lokasi	257.127.000	16 lokasi	41.500.000	17 lokasi	75.000.000	18 lokasi	225.000.000	18 lokasi	598.627.000		
			2	1	0	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah kegiatan / usaha yang mengurus izin				5 usaha	257.127.000	5 kegiatan / usaha	41.500.000					5 kegiatan / usaha	298.627.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Elektronik																
					Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara integrasi secara Elektronik								5 dokumen	75.000.000	5 dokumen	225.000.000	5 dokumen	300.000.000		
TOTAL														29.237.852.700						

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kualitas Air	64,47	51,28	51,29	51,30	51,31	51,32	51,32
2	Indeks Kualitas Udara	93,08	83,26	82,73	82,90	83,09	83,25	83,25
3	Persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	94,00%	97,01%	98,00%	98,50%	99,00%	99,00%	99%

Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	60,15	57,69	57,77	57,85	57,93	57,93	Lanjutan indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
2	Indeks Kualitas Air	-	51,28	51,29	51,3	51,31	51,32	51,32	Indikator sasaran PD
3	Indeks Kualitas Udara	-	83,26	82,73	82,9	83,09	83,25	83,25	Indikator sasaran PD
4	Persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	94,00%	97,01%	98,00%	98,50%	99,00%	99,00%	99%	Indikator sasaran PD
5	Persentase data Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersedia	61,54%	64,10%	69,23%	71,79%	79,49%	79,50%	79,50%	Indikator Program PD
6	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	44,89%	53,19%	48%	49%	50%	50,10%	50,10%	Indikator Program PD
7	Persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	-	-	-	94,32%	97,20%	100%	100%	Indikator Program PD
8	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	-	70,96	71	71,5	75%	78%	78%	Indikator Program PD
9	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	40%	44,59%	52,90%	64,70%	76,47%	88,20%	88,20%	Indikator Program PD
10	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	100%	90%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
11	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	-	100%	90%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
12	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	-	74,97%	74%	73%	72%	71%	71%	Indikator Program PD
13	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	-	97,01%	98,00%	98,50%	99,00%	99,00%	99%	Lppd
14	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PUU Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
15	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota		Data mencakup no. 19,20,21						Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah	-	0,0043	Lppd	1,6035	1,603	1,602	1,602	Lppd
17	Tersedianya informasi terkait kapasitas Tempat Pembuangan Akhir terhadap volume timbunan sampah	-	5,99	Lppd	5,983	5,982	5,98	5,98	Lppd
18	Tersedianya informasi terkait jumlah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dibagi jumlah sampah pada masing - masing lingkungan		belum memiliki TPS						Lppd
19	Data izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PUU Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	-	44,59%	52,90%	64,70%	76,47%	88,20%	88,20%	Lppd
20	Rasio pejabat pengawas Lingkungan Hidup di daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PUU Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	-	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	Lppd
21	Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berada di Daerah kabupaten/ kota	-	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
22	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
23	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	0	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
24	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PUU Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
25	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-	96,83%	96,83%	-	-	96,83%	Indikator Lama
26	Persentase data dan informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang tersedia	-	64,1	-	-	-	-	64,1	Indikator Lama
27	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	-	44.59	-	-	-	-	44,59	Indikator Lama

L. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024

Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Permasalahan
1	Hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan karena keterbatasan fisik, mental, penyandang difabel, maupun orang terlantar
2	Kurang optimalnya sosialisasi terkait informasi Administrasi Kependudukan.
3	Belum optimalnya kerjasama antar daerah terkait Administrasi Kependudukan.
4	Belum adanya kesesuaian antara kebutuhan pengguna data dengan kebijakan pusat
5	Ketidaksesuaian data Kependudukan dan eksistensi penduduk secara fisik
6	Kurang optimalnya pemutahiran, update data dan pembersihan data
7	Masih ada keluhan ataupun pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan Administrasi Kependudukan.
8	Tingginya tuntutan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan
9	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Isu Strategis
1	Sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Pangan, Energi, Infrastruktur)
2	Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi (Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia)
3	Sasaran Pembangunan Penegakan Hukum (Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (<i>rule of law</i>) dan terjaganya ketertiban umum).

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Madiun

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83	84	87,50	91,410	91,50

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	30,43 nilai	30,44 nilai	30,45 nilai
2	Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	92%	95,50%	96%	96,50%

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	-	65%	100%	100%	100%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi							
							2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah						
							Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan		Target	pendanaan					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	2	1	2			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30,42	N i a i	7.737.605.250,00	30,43	N i a i	7.062.966.935,00	30,47	N i a i	7.022.933.111,00	30,48	%	7.927.533.111,00	30,48	%	7.927.533.111,00	DUKCAPIL
	2	1	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,81	N i a i	6.545.755.250,00	81,02	N i a i	5.801.555.935,00	81,50	N i a i	6.193.933.111,00	81,60	N i a i	6.888.533.111,00	81,60	N i a i	6.888.533.111,00,00	DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,0	%	641.932.360,00	10,0	%	255.199.360,00	10,0	%	228.255.840,00	10,0	%	268.255.840,00	10,0	%	268.255.840,00	DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,0	%	31.572.000,00		%		-	%	-		%			%		
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,0	%	61.767.360,00	10,0	%	61.767.360,00		%			%			%		DUKCAPIL

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15	L a p o r a n	20.539.200,00	15	L a p o r a n	40.539.200,00	15	L a p o r a n	40.539.200,00	DUKCAPIL	
	2	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah	10 %	172.459.340,00	10 %	193.432.000,00									DUKCAPIL	
	2	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12	L a p o r a n	207.716.640,00	12	L a p o r a n	227.716.640,00	12	L a p o r a n	227.716.640,00	DUKCAPIL
	2	2	1	0	2	0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	10 %	3.622.933.410,00	10 %	3.030.000.000,00	10 %	4.359.073.634,00	10 %	4.479.073.634,00	10 %	4.479.073.634,00	10 %	4.479.073.634,00	DUKCAPIL	
	2	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	10 %	3.622.933.410,00	10 %	3.030.000.000,00									DUKCAPIL	
	2	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					28	O r a n g / B u l a n	4.293.193.634,00	28	O r a n g / B u l a n	4.393.193.634,00	28	O r a n g / B u l a n	4.393.193.634,00	DUKCAPIL
	2	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	D o k u m e n	65.880.000,00	12	D o k u m e n	85.880.000,00	12	D o k u m e n	85.880.000,00	DUKCAPIL
	2	2	1	0	2	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	10 %	150.947.000,00	10 %	194.811.000,00	10 %	283.363.790,00	10 %	313.363.790,00	10 %	313.363.790,00	10 %	313.363.790,00	DUKCAPIL	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	2	1	0	2	1	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 % 0	127.503.000,00	10 % 0	194.811.000,00							DUKCAPIL			
	2	1	0	2	1	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan					35 0	O r a n g	171.792.770,00	35 0	O r a n g	191.792.770,00	35 0	O r a n g	191.792.770,00	DUKCAPIL
	2	1	0	2	1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan					46 r a n g	O r a n g	111.571.020,00	46 r a n g	O r a n g	121.571.020,00	46 r a n g	O r a n g	121.571.020,00	DUKCAPIL
	2	1	0	2	1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	10 % 0	1.464.132.310,00	10 % 0	1.270.609.278,00	10 % 0	445.255.847,00	10 % 0	525.255.847,00	10 % 0	525.255.847,00	10 % 0	525.255.847,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	10 % 0	1.317.830.310,00	10 % 0	1.117.648.278,00										DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 p a k e t	274.994.880,00	12 p a k e t	294.994.880,00	12 p a k e t	294.994.880,00	12 p a k e t	294.994.880,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					12 p a k e t	18.360.967,00	12 p a k e t	38.360.967,00	12 p a k e t	38.360.967,00	12 p a k e t	38.360.967,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					12 P a k e t	41.900.000,00	12 P a k e t	61.900.000,00	12 P a k e t	61.900.000,00	12 P a k e t	61.900.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	10 % 0	146.302.000,00	10 % 0	152.961.000,00										DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 % 0		10 % 0		40 L a p o r a n	110.000.000,00	40 L a p o r a n	130.000.000,00	40 L a p o r a n	130.000.000,00	40 L a p o r a n	130.000.000,00	DUKCAPIL	

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	2	1	0	2		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	10 % 0	531.651.285,00	10 % 0	510.784.238,00	10 % 0	23.400.000,00	10 % 0	245.000.000,00	10 % 0	245.000.000,00	DUKCAPIL
	2	2	1	2	0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	10 % 0	531.651.285,00	10 % 0	510.784.238,00							DUKCAPIL
	2	2	1	2	0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan					5 U n i t	23.400.000,00	5 U n i t	245.000.000,00	5 U n i t	245.000.000,00	DUKCAPIL
	2	2	1	2	0	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	10 % 0	151.239.030,00	10 % 0	202.620.000,00	10 % 0	654.584.000,00	10 % 0	674.584.000,00	10 % 0	674.584.000,00	DUKCAPIL
	2	2	1	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor	10 % 0	151.239.030,00	10 % 0	202.620.000,00							DUKCAPIL
	2	2	1	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 L a p o r a n	654.584.000,00	12 L a p o r a n	25.000.000,00	12 L a p o r a n	25.000.000,00	DUKCAPIL
	2	2	1	2	0	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	10 % 0	390.169.275,00	10 % 0	337.532.059,00	10 % 0	200.000.000,00	10 % 0	383.000.000,00	10 % 0	383.000.000,00	DUKCAPIL
	2	2	1	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	10 % 0	25.000.000,00	10 % 0	27.500.000,00							DUKCAPIL

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					25	Unit	23.000.000,00	25	Unit	31.000.000,00	25	Unit	31.000.000,00	DUKCAPIL			
	2	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3	Unit	14.000.000,00	3	Unit	19.000.000,00	3	Unit	19.000.000,00	DUKCAPIL			
	2	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5	Unit	12.000.000,00	5	Unit	21.902.800,00	5	Unit	17.000.000,00	DUKCAPIL			
	2	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	10	%	177.699.515,00	10	%	174.124.500,00							DUKCAPIL			
	2	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1	Unit	88.000.000,00	1	Unit	213.000.000,00	1	Unit	148.000.000,00	DUKCAPIL			
	2	2	1	0	2	1	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	10	%	187.469.760,00	10	%	135.907.559,00							DUKCAPIL			
	2	2	1	0	2	1	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14	Unit	63.000.000,00	14	Unit	103.000.000,00	14	Unit	103.000.000,00	DUKCAPIL			
Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil								Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	92	%		95	%		96	%		96	%					
	2	2	2	0			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84	%	228.148.160,00	84	%	233.627.050,00	84	.50%	328.500.000,00	85	%	388.500.000,00	85	%	388.500.000,00	DUKCAPIL
	2	2	2	0	1		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	17	do	228.148.160,00	17	do	233.627.050,00								DUKCAPIL		

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								e n		e n								
	2	1	0	2		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	-	-	-	10 %	200.000.000,00	10 %	215.000.000,00	10 %	215.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	2	2	.01														
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekaman KTP EL	2.500 data	127.639.760,00	2.500 data		133.074.125,00						DUKCAPIL
	2	2	2	.01	4													
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	12 laporan	90.000.000,00	12 laporan	110.000.000,00	12 laporan	110.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	2	2	.01	4													
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah penerbitan KIA	1.000 dokumen	100.508.400,00	1.000 dokumen		100.552.925,00						DUKCAPIL
	2	2	2	.01	5													
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 dokumen	105.000.000,00	12 dokumen	105.000.000,00	12 dokumen	105.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	2	2	.01	5													
	2	1	0	2		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk	-	-	-	12 laporan	100.000.000,00	12 laporan	120.000.000,00	12 laporan	120.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	2	2	.03														
	2	1	0	2	0	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran Penduduk	-	-	-	12 laporan	100.000.000,00	12 laporan	120.000.000,00	12 laporan	120.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	2	2	.03	7													
	2	1	0	2		Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94 %	455.057.760,00	94,25 %	402.719.632,00	94,50 %	328.500.000,00	94,75 %	388.500.000,00	94,75 %	388.500,00	DUKCAPIL
	2	2	3															

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2	1	0	2		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	1.600	1.600	455.057.760,00		402.719.632,00					DUKCAPIL
	2	1	0	2		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	-	-	-	10 %	274.582.500,00	10 %	314.582.500,00	10 %	314.582.500,00	DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	1.500	1.500	100.487.520,00		110.536.272,00					DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	-	12 d o k u m e n	85.000.000,00	12 d o k u m e n	105.000.000,00	12 d o k u m e n	105.000.000,00	DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta perkawinan dan akta perceraian non muslim	100	100	354.570.240,00		292.183.360,00					DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 l a y a n a n	189.582.500,00	4 l a y a n a n	209.582.500,00	4 l a y a n a n	209.582.500,00	DUKCAPIL
	2	1	0	2		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	-	-	-	12 l a p o r a n	53.917.500,00	12 l a p o r a n	73.917.500,00	12 l a p o r a n	73.917.500,00	DUKCAPIL

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	12	1	53.917.500,00	12	1	73.917.500,00	12	1	73.917.500,00	DUKCAPIL
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	60 .5 0 %		10 0 %	10 0 %		10 0 %		10 0 %					
	2	1	0	2	0	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Akurasi database kependudukan	99 %	348.749.070,00	99 ,1 %	362.506.923,00	99 ,1 5 %	205.506.923,00	99 ,2 0 %	295.500.000,00	99 ,2 0 %	295.500.000,00	DUKCAPIL		
	2	1	0	2	0	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	77 %	347.749.070,00	77 %	362.506.923,00									
	2	1	0	2	0	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemenuhan permintaan data kependudukan					10 0 %	127.120.000,00	10 0 %	167.120.000,00	10 0 %	167.120.000,00	DUKCAPIL		
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah penyusunan laporan	13 a p o r a n	296.445.990,00	13 a p o r a n	308.105.990,00									DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data Kependudukan yang diolah dan disajikan	-	-	-	2	J e n i s	73.500.000,00	2	J e n i s	93.500.000,00	2	J e n i s	93.500.000,00	DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama dan inovasi	5 d o k u m e n	51.303.080,00	10 d o k u m e n	54.400.933,00									DUKCAPIL

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	-	-	16	Dokumen	53.620.000,00	17	Dokumen	73.620.000,00	17	Dokumen	73.620.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	0	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Penduduk	10 %	1.000.000,00	-	-										DUKCAPIL	
	2	1	0	2	0	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				12	laporan	78.380.000,00	12	laporan	128.380.000,00	12	laporan	128.380.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi	8	fasilitasi													
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-					12	laporan	78.380.000,00	12	laporan	128.380.000,00	12	laporan	128.380.000,00	DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi	16 kali														

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,59%	82%	92%	95,50%	96%	96,50%	96,50%
2	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	-	-	60,50%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,58	83	84	87,50	91,40	91,50	91,50	Indikator Tujuan PD
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,59%	82%	92%	95,50%	96%	96,50%	96,50%	Indikator Sasaran PD
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	-	-	60,50%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
4	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	96%	82%	84%	96,50%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
5	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	96%	92%	94%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
6	Akurasi database kependudukan	-	-	99%	99,10%	99,15%	99,20%	99,20%	Indikator Program PD
7	Perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik	-	99,34%	98,25%	98,50%	98,75%	99,00%	99,00%	Lppd
8	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak	-	81,76%	81,00%	90,00%	92,00%	94,00%	94,00%	Lppd
9	Kepemilikan akta kelahiran	-	98,90%	98,90%	99,00%	99,10%	99,20%	99,20%	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-	2 OPD dengan Perjanjian Kerjasama dan 20 lembaga pengguna data kependudukan	18,18%	39,39%	63,63%	90,90%	90,90%	Lppd
11	Penerbitan akta perkawinan	-	100%	99,00%	99,10%	99,20%	99,30%	99,30%	Lppd
12	Penerbitan akta perceraian	-	100%	99,00%	99,10%	99,20%	99,30%	99,30%	Lppd
13	Penerbitan akta kematian	-	100%	98,50%	98,75%	99,00%	99,25%	99,25%	Lppd
14	Penyajian data kependudukan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
15	persentase uptime SIAK	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
16	Persentase Kepemilikan dokumen Kartu Keluarga	100	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
17	Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Tanda Penduduk	98,35	99,34	-	-	-	-	99,34	Indikator Lama
18	Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak	-	80	-	-	-	-	80	Indikator Lama
19	Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran	100	98,9	-	-	-	-	98,9	Indikator Lama
20	Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kematian	-	98	-	-	-	-	98	Indikator Lama
21	Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Perkawinan	100	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
22	Persentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil		98%	-	-	-	-	98%	Indikator Lama

M. DINAS PERHUBUNGAN

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Dinas Perhubungan

No	Permasalahan
1	Belum terdapat rencana induk angkutan umum perkotaan di Kota Madiun
2	Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi
3	Fungsi sub terminal Kota Madiun belum optimal
4	Dinas perhubungan Kota Madiun tidak memiliki kewenangan dalam melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan Nasional
5	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di jalan raya
6	Masih banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya pelajar yang menggunakan sepeda motor untuk bersekolah
7	Perlengkapan jalan yang belum banyak menggunakan teknologi (belum adanya area <i>traffic control system</i> dan <i>intelligent transport system</i> di Dinas Perhubungan Kota Madiun)
8	Belum tercukupinya kebutuhan perlengkapan jalan sesuai perkembangan pembangunan di Kota Madiun

Isu Strategis Dinas Perhubungan

No	Isu Strategis
1	Laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang lebih cepat dari laju pertumbuhan jalan
2	Jalur ganda yang berpotensi rawan kecelakaan dan kemacetan
3	Perlunya pengoptimalkan Angkutan Sekolah Gratis untuk mengurangi potensi kemacetan dan kecelakaan
4	Pengoptimalkan lalu lintas mendukung kota perdagangan dan industri

Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung Dinas Perhubungan

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Indeks Kenyamanan Kota (<i>livable city</i>)	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks infrastruktur

Tujuan Dinas Perhubungan

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kota yang Maju, Berwawasan Lingkungan, dan Berkelanjutan	Kinerja ruas jalan	0,38	0,43	0,42	0,41	0,4

Sasaran Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks RB Perangkat Daerah	-	-	18,3 indeks	18,4 indeks	18,5 indeks
2	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	Rata-rata Kecepatan Lalu Lintas	37 km/jam	38 km/jam	39 km/jam	40 km/jam	41 km/jam
		Kinerja angkutan umum	42%	40%	41%	42%	43%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi			
							2021	2022	2023	2024	2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
											Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan		Target	pendanaan	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan darat							Kinerja Ruas Jalan					0,43	19.490.425.036,00	0,42	20.151.688.800,00	0,41	23.424.836.634,00	0,4	22.078.336.634,00	0,4		
	Meningkatnya Kelancaran lalu Lintas						Kecepatan Lalu Lintas					38		39	40		41		41			
							Kinerja Angkutan Umum					40%		41%	42%		43%		43%			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik						Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah					80,2										
							Indeks Reformasi Birokrasi							18,3		18,4		18,5		18,5		
		2	1	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah					80,2	11.127.415.071,00	80,3	10.972.689.800,00	80,4	13.678.215.164,00	80,5	12.226.715.164,00	80,5		
		2	1	0	2,01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi					100%	132.017.376	100%	140.200.000							

(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							perangkat daerah															
		2	1	0	2	0	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					6 Dok	132.017.376	6 Dok	140.200.000							
		X	X	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah							100%	140.200.000	100%	140.200.000	100%			
		X	X	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dok	140.200.000	6 dok	140.200.000	6 dok			
		2	1	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan				100%	6.686.758.079,00	100%	6.514.480.000,00	100%	7.352.378.644,00	100%	7.352.378.644,00	100%		
		2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6.686.758.079,00	100%	6.514.480.000	53 Orang	7.352.378.644	53 Orang	7.352.378.644	53 Orang		
		2	1	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perijinan ASN yang tercapai				100%	320.400.00,00	100%	221.011.00,00	100%	300.400.00,00	100%	300.400.00,00	100%		

(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		2	1	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	220.000.000,00	100%	124.750.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket		
		2	1	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	Persentase peserta yang paham	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	100%	100.400.000	100%	96.261.000	134 orang	100.400.000	134 orang	100.400.000	134 orang		
		2	1	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan				100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	292.333.000	100%	292.333.000	100%		
		2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	100%	200.000.000	100%	200.000.000	60 laporan	292.333.000	60 laporan	292.333.000	60 laporan		
		2	1	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan				100%	466.550.000	100%	300.000.000	100%	1.304.086.000	100%	202.586.000			
		X	X	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					15 unit	1.101.500.000						
		2	1	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan peralatan kantor	Persentase pemenuhan peralatan kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	466.550.000	100%	300.000.000	10 unit	202.586.000	10 unit	202.586.000	10 unit		

(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		2	1	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor			100%	1.871.689.616	100%	2.512.648.800	100%	2.684.817.520	100%	2.684.817.520	100%			
		2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1.871.689.616	100%	2.512.648.800	2 laporan	2.684.817.520	2 laporan	2.684.817.520	2 laporan			
		2	1	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak digunakan			100%	1.450.000.000	100%	1.084.350.000	100%	1.604.000.000	100%	1.254.000.000	100%			
		2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	100%	650.000.000	100%	650.000.000	57 unit	654.000.000	57 unit	654.000.000	57 unit			
		2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	100%	650.000.000	1 unit	284.350.000	2 Unit	800.000.000	2 Unit	450.000.000	2 Unit			

(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		2	1	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	100%	150.000.000	10 unit	150.000.000	10 unit	150.000.000	10 unit	150.000.000	10 unit		
		2	1	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas				84%	8.363.009.965	88%	9.178.999.000	92%	9.746.621.470	96%	9.851.621.470	96%		
		2	1	1	2	0	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab Kota	Persentase terlaksananya kebijakan				100%	100.000.000	100%	50.000.000							
		2	1	1	2	0	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah Dokumen				1 Dok	100.000.000									
		2	1	1	2	0	Penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota		Jumlah Sosialisasi					100%	50.000.000							
		2	1	1	2	0	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentasi perlengkapan jalan yang berfungsi baik				75%	2.935.714.110	80%	3.639.975.000	85%	4.440.537.100	90%	4.440.537.100	75%		
		2	1	1	2	0	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kab/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan		2 Unit	340.000.000			2 unit	201.500.000	2 unit	201.500.000	2 unit		

(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		2	1	1	2	0	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Persentase jumlah perengkapan jalan yang terpasang	Persentase jumlah perengkapan jalan yang terpasang	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang Tersedia	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	283 unit	1.359.780.000	200 unit	1.490.575.000	200 unit	2.119.648.050	200 unit	2.119.648.050	200 unit	
		2	1	1	2	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah perengkapan jalan yang dipelihara				5 jenis	1.235.934.110								
		2	1	1	2	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase perengkapan jalan yang dipelihara	Persentase perengkapan jalan yang dipelihara	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100%	2.149.400.000	5 unit	2.119.389.050	5 unit	2.119.389.050	100%			
		2	1	1	2	0	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik				100%	1.024.110.960	100%	38.250.000	100%	201.500.000	100%	201.500.000	100%	
		2	1	1	2	0	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	luas bangunan				45 m2	1.024.110.960								
		2	1	1	2	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase fasilitas terminal yang layak	Persentase fasilitas terminal yang layak	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		38.250.000	2 unit	201.500.000	2 unit	201.500.000	2 unit			
		2	1	1	2	0	Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase fasilitas parkir yang memiliki ijin			0	100%	868.019.000	100%	808.019.000	100%	808.019.000	100%		

(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		2	1	1	2	0	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten /Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Persentase pengurusan ijin	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			100%	168.469.000							
		2	1	1	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten /Kota		Persentase monev penyelenggaraan parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten /Kota			100%	699.550.000	2 laporan	808.019.000	2 laporan	808.019.000	2 laporan		
		2	1	1	2	0	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan lulus uji				100%	620.752.480	100%	744.780.000	100%	705.469.270	100%	810.469.270	100%		

(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		2	1	1	2	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			100%	155.200.000	10 unit	538.379.270	10 unit	538.379.270	10 unit		
		2	1	1	2	0	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terpenuhinya bukti lulus uji		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100%	514.752.480				5000 buah	105.000.000	5000 buah			
		2	1	1	2	0	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor		Persentase pemohon yang paham				100%	48.395.000						100%		
		2	1	1	2	0	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah sarana prasarana yang berfungsi	Persentase Jumlah sarana prasarana yang berfungsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 unit	106.000.000	12 unit	105.600.000	12 unit	167.090.000	12 unit	167.090.000	12 unit		
		2	1	1	2	1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase laporan				100%	435.585.000								
		2	1	1	2	0	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				160 MRL	2.117.783.780	100%	140.200.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%		

(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		2	1	1	2	0	Penataan Manajemen dan Rekamata Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen MRL	Jumlah dokumen MRL	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 dok	236.400.000	1 dok	80.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok		
		2	1	1	2	0	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah uji coba dan sosialisasi	Persentase jumlah uji coba dan sosialisasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	68.900.000	100%	60.200.000							
		2	1	1	2	0	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian				100%	1.720.483.780									
		2	1	1	2	0	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum				6 Forum	92.000.000									
		2	1	1	2	0	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota	Persentase pengurusan rekomendasi analin					100%	368.035.000	100%	445.955.000	100%	445.955.000	100%			

(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		2	1	1	2	0	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase pemenuhan rekomendasi	Persentase pemenuhan rekomendasi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	100%	368.035.000	12 laporan	445.955.000	12 laporan	445.955.000	12 laporan				
		2	1	1	2	0	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	persentase kegiatan keselamatan			100%	247.884.000	100%	1.495.880.000	100%	1.231.281.100	100%	1.231.281.100	100%			
		2	1	1	2	0	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah peserta	Jumlah peserta	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 org	60.000.000	4 org	52.180.000	4 org	52.180.000	4 org				
		2	1	1	2	0	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uni Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terlaksananya kegiatan	Persentase terlaksananya kegiatan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100%	205.502.000	100%	1.386.880.000	12 laporan	1.116.701.100	12 laporan	1.116.701.100	12 laporan		
		2	1	1	2	0	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	Jumlah kegiatan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 kegiatan	42.382.000	1 kegiatan	49.000.000	1 laporan	62.400.000	1 laporan	62.400.000	1 laporan		

(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		2	1	1	2	0	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan angkutan umum			100%	1.316.764.635	100%	1.833.860.000	100%	1.833.860.000	100%	1.833.860.000	100%			
		2	1	1	2	0	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan yang melayani	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	41 kendaraan	1.316.764.635	41 unit	1.010.960.000	41 unit	1.833.860.000	41 unit	1.833.860.000	41 unit		
		2	1	1	2	0	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah angkutan barang			23000 kend	822.900.000									

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kecepatan rata-rata lalu lintas	-	-	38 km/jam	39 km/jam	40 km/jam	41 km/jam	41 km/jam
2	Kinerja Angkutan Umum	39%	42%	40%	41%	42%	43%	43%

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kinerja ruas jalan	0,45	0,38	0,43	0,42	0,41	0,4	0,4	Indikator Tujuan PD
2	Kecepatan rata-rata lalu lintas	-	-	38 km/jam	39 km/jam	40 km/jam	41 km/jam	41 km/jam	Indikator Sasaran PD
3	Kinerja Angkutan Umum	39%	42%	40%	41%	42%	43%	43%	Indikator Sasaran PD
4	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	-	-	84%	88%	92%	96%	96%	Indikator Program PD
5	Rasio konektivitas kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	Lppd
6	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,45	0,38	0,43	0,42	0,41	0,4	0,4	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
8	Terlaksananya pelayanan uji berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
9	Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
10	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
11	Kepadatan Lalu Lintas	36,93%	33%	-	-	-	-	33%	Indikator Lama
12	Persentase Perlengkapan jalan	64%	67%	-	-	-	-	67%	Indikator Lama

N. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Permasalahan
Komunikasi dan Informatika	
1	Belum optimalnya pelaksanaan standart pelayanan informasi publik pada badan publik lingkungan pemerintah Kota Madiun
2	Sarana dan Prasarana infrastruktur Teknologi Informasi yang belum memadai dan belum optimal
3	Integrasi Sistem Informasi yang belum maksimal
4	Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung integrasi pelayanan publik
Statistik	
1	Belum optimalnya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah
2	Belum adanya penetapan tentang standart data, metadata, dan format baku data statistik sektoral
Persandian	
1	Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Isu Strategis
1	Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat
2	Menjaga hubungan kemitraan dengan media massa dengan memberikan pelayanan yang baik agar situasi tetap kondusif
3	Optimalisasi pelaksanaan <i>e-Government</i> Pemerintah Kota Madiun
4	Peningkatan kualitas data statistik sektoral dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia
5	Pengembangan layanan Persandian dan Keamanan Informasi pada sistem elektronik Pemerintah daerah

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Madiun

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik	Indeks Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	2,8	2,87	2,95	3,1
		Indeks Domain Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	2,1	2,18	2,23	2,29

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks RB Perangkat Daerah	-	-	27,01	27,07	28,05
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	-	90	91	92	93

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Terlaksananya penerapan e-government pada pelayanan publik yang terpadu dan menjangkau masyarakat	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	-	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya data statistik sektoral Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksananya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	Persentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	-	100%	100%	100%	100%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran	Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan			Indikator	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
							Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)		(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
						Indeks Reformasi Birokrasi	26,75		26,9		27,01		27,07		27,07		
	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP	A	7.830.965.000	A	6.946.339.000	A	8.050.000.000	A	8.305.000.000	31.132.304.000	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	460.000.000
	2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	115.000.000	10 dokumen	115.000.000				20 dokumen	230.000.000	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					10 laporan	115.000.000	10 laporan	115.000.000	20 laporan	230.000.000
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	3.759.400.000	100%	3.783.741.000	100%	4.000.000.000	100%	4.200.000.000	100%	15.743.141.000
	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	3.759.400.000	100%	3.783.741.000	100%				100%	7.543.141.000
							Jumlah Orang yang					37		37		37 orang	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					orang	4.000.000.000	orang	4.200.000.000		8.200.000.000
	2	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian		1.076.826.000	100%	999.400.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	4.076.226.000
	2	1	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 paket	1.076.826.000	1 paket	999.400.000					1 paket	2.076.226.000
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					50 orang	1.000.000.000	50 orang	1.000.000.000	100 orang	2.000.000.000
	2	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	91.447.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	816.447.000
	2	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	91.447.000	100%	200.000.000					100%	291.447.000
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25 laporan	250.000.000	25 laporan	275.000.000	50 laporan	525.000.000
	2	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	-	100%	-	100%	425.000.000	100%	325.000.000	100%	750.000.000
	2	1	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 unit	25.000.000		-	1 unit	25.000.000
	2	1	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					20 unit	400.000.000	12 unit	325.000.000	32 unit	725.000.000
	2	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100%	2.328.292.000	100%	1.228.338.000	100%	1.600.000.000	100%	1.650.000.000	100%	6.806.630.000
	2	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	2.328.292.000	100%	1.228.338.000					100%	3.556.630.000

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 laporan	1.600.000.000	1 laporan	1.650.000.000	2 laporan	3.250.000.000
	2	1 6	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	460.000.000	100%	619.860.000	100%	660.000.000	100%	740.000.000	100%	2.479.860.000
	2	1 6	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	165.000.000	100%	150.500.000					100%	315.500.000
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					31 unit	160.000.000	31 unit	165.000.000	31 unit	325.000.000
	2	1 6	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	132.500.000	100%	132.500.000					100%	265.000.000
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 unit	150.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	350.000.000
	2	1 6	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100%	162.500.000	100%	336.860.000					100%	499.360.000
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					50 unit	350.000.000	50 unit	375.000.000	100 unit	725.000.000
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	2	1 6	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik			77%	Rp 4.788.605.000						

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	75%	Rp 4.619.278.000			80%	Rp 5.500.000.000	82%	Rp 5.900.000.000	82%	20.807.883.000
	2	1 6	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100%	4.619.278.000	100%	4.788.605.000	100%	5.500.000.000	100%	5.900.000.000	100%	20.807.883.000
	2	1 6	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	1200 Informasi	2.589.955.000	1200 Informasi	2.388.755.000					2400 informasi	4.978.710.000
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik					12 dokumen	2.600.000.000	12 dokumen	2.750.000.000	24 dokumen	5.350.000.000
	2	1 6	02	2.01	04	Pegelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah	5 Media	1.416.495.000	5 Media	1.438.697.000					5 media	2.855.192.000
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					12 dokumen	1.600.000.000	12 dokumen	1.700.000.000	24 dokumen	3.300.000.000
	2	1 6	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100%	151.290.000	100%	249.850.000					100%	401.140.000
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					12 dokumen	300.000.000	12 dokumen	400.000.000	24 dokumen	700.000.000
	2	1 6	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif				27 kelompok	361.303.000				27 Kelompok	361.303.000
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					12 dokumen	400.000.000	12 dokumen	400.000.000	24 dokumen	800.000.000
	2	1 6	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	27 Kelompok	201.460.000								201.460.000

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Jumlah Kegiatan			1 paket	100.000.000						100.000.000
							Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya					26 orang	200.000.000	30 orang	200.000.000	30 orang	400.000.000
	2	1	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	6 Tema Informasi	260.078.000	7 Tema Informasi	350.000.000					13 tema informasi	610.078.000
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan					12 dokumen	400.000.000	12 dokumen	450.000.000	24 dokumen	850.000.000
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Jaringan TIK, Sistem Informasi dan layanan publik terintegrasi	2	1	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo			100%	Rp 10.587.483.000						
						PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Rp 9.760.450.600			100%	Rp 11.510.000.000	100%	Rp 11.860.000.000	100%	43.717.933.600
	2	1	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100%	5.718.547.600	100%	5.100.000.000	100%	5.400.000.000	100%	5.600.000.000	100%	21.818.547.600
	2	1	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	238 Domain	26.800.000	238 Domain	100.000.000					238 Domain	126.800.000

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	2 dokumen	200.000.000
	2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	1550 Titik	5.691.747.600	1750 titik	5.000.000.000					1750 titik	10.691.747.600
							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					82 unit	5.300.000.000	82 unit	5.500.000.000	82 unit	10.800.000.000
	2	16	03	2.02		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100%	4.041.903.000	100%	5.487.483.000	100%	6.110.000.000	100%	6.260.000.000		21.899.386.000
	2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	1 Paket	2.300.200.000	1 Paket	3.978.000.000					1 paket	6.278.200.000
							Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1 dokumen	4.000.000.000	1 dokumen	4.000.000.000	2 dokumen	8.000.000.000
	2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Client	180 Titik	455.000.000	180 Titik	400.000.000					180 Titik	855.000.000
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah					1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	2 dokumen	1.000.000.000
	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	7 Aplikasi	460.000.000	7 Aplikasi	460.000.000					7 aplikasi	920.000.000

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan					3 unit	460.000.000	3 unit	460.000.000	6 unit	920.000.000
	2	1 6	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi	1 paket	306.822.960	1 paket	302.558.000					1 paket	609.380.960
							Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					2 layanan	350.000.000	2 layanan	400.000.000	2 layanan	750.000.000
	2	1 6	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase perangkat daerah yang mendukung smart city	100%	404.605.000	100%	100.000.000					100%	504.605.000
							Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City					1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	450.000.000	2 dokumen	900.000.000
	2	1 6	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Sarana Information Center	1 Unit	115.275.040	1 Unit	60.925.000					1 unit	176.200.040
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)					1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	200.000.000	2 dokumen	350.000.000
	2	1 6	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah komunitas yang mendapatkan pelatihan TIK			4 komunitas	186.000.000					4 komunitas	186.000.000
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	250.000.000	2 dokumen	450.000.000
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik sektoral Perangkat Daerah yang berkualitas	2	2	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	Rp 313.278.000	1 dokumen	Rp 499.250.000	1 dokumen	Rp 550.000.000	1 dokumen	Rp 550.000.000	1 dokumen	1.912.528.000
	2	2	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 survey	313.278.000	1 survey	499.250.000	1 survey	550.000.000	1 survey	550.000.000	1 survey	1.912.528.000
	2	2	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik	1 Dokumen	313.278.000	1 Dokumen	294.850.000					2 dokumen	608.128.000
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	2 dokumen	600.000.000
	2	2	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah kegiatan			1 paket	55.000.000					1 paket	55.000.000
							Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					3 orang	100.000.000	3 orang	100.000.000	3 orang	200.000.000
	2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata			1 dokumen	Rp 149.400.000					1 dokumen	149.400.000
							Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun					1 dokumen	Rp 150.000.000	1 dokumen	Rp 150.000.000	2 dokumen	300.000.000
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	2	2	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	Rp 195.502.695	100%	Rp 350.000.000	100%	Rp 500.000.000	100%	Rp 600.000.000		1.645.502.695
	2	2	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	2 JKS	195.502.695	2 JKS	350.000.000	2 JKS	500.000.000	2 JKS	600.000.000		1.645.502.695
	2	2	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi keamanan informasi			34 OPD	50.000.000					34 OPD	50.000.000
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					1 laporan	200.000.000	1 laporan	300.000.000	2 laporan	500.000.000
	2	2	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah berita sandi yang diamankan	800 berita	195.502.695	800 berita	300.000.000					1600 berita	495.502.695
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi					34 Perangkat Daerah	300.000.000	34 Perangkat Daerah	300.000.000	34 Perangkat Daerah	600.000.000

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87,1	87,25	90	91	92	93	93
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,82	Tidak ada penilaian tahun 2020	2,83 (BAIK)	2,85 (BAIK)	2,87 (BAIK)	2,90 (BAIK)	2,90 (BAIK)	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
2	Indeks Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			2,8	2,87	2,95	3,1	3,1	Indikator Tujuan PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Indeks Domain Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			1,9	1,93	1,97	2,01	2,01	Indikator Tujuan PD
4	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87,1	87,25	90	91	92	93	93	Indikator Sasaran PD
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan informatika			100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	-	75%	75%	77%	80%	82%	82%	Indikator Program PD
7	Nilai Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Administrasi Pemerintahan		3,6					3,6	Indikator Program PD
8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Program PD
9	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo			100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
10	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	70%	72%	73,00%	74%	75%	75%	Lppd
11	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	-	81,86%	81,88%	81,90%	81,92%	81,95%	81,95%	Lppd
12	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
13	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
15	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
16	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
17	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuaidengan PM Kominfo No.5/2015	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
18	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
19	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
20	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yangtelah diimplementasikan secara elektronik	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
21	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	-	0%	10%	15%	20%	25%	25%	Lppd

22	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
23	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	-	86%	80%	82%	84%	86%	86%	Lppd
24	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
25	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
26	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
27	Persentase data yang dapat berbagi pakai	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
28	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
29	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
30	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	-	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
31	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
32	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
33	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
34	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	-	33,4	-	-	-	-	33,4	Indikator Lama
35	Persentase sasaran penyebaran informasi publik	-	75	-	-	-	-	75	Indikator Lama
36	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai	-	89	-	-	-	-	89	Indikator Lama
BIDANG STATISTIK									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan			1	1	1	1	1	Indikator Program PD
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
4	Tersedianya buku profil daerah	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
5	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	-	1	1	1	1	1	1	Lppd
6	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	-	1	1	1	1	1	1	Lppd
7	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	-	1	1	1	1	1	1	Lppd
8	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	-	0%	0	100%	100%	100%	100%	Lppd
9	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	-	0%	0	100%	100%	100%	100%	Lppd
10	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	50	60	80	-	-	-	80	Indikator Lama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
BIDANG PERSANDIAN									
1	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian			100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
2	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
3	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	65%	65%	67%	68%	70%	70%	Lppd
4	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	-	0%	0	0	0	0	0	Lppd
5	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
6	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	-	100%	70%	75%	80%	85%	85%	Lppd
7	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	-	88,23%	88,50%	88,80%	89,00%	89,50%	89,50%	Lppd
8	Indeks Keamanan Informasi			II (dua) Level				II (dua) Level	Indikator Lama
9	Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan informasi	-	25	-	-	-	-	25	Indikator Lama

O. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Permasalahan
Penanaman Modal	
1	Peningkatan kompetensi petugas pelayanan belum optimal
2	Sarana prasarana belum sesuai standart pelayanan publik
3	Pelayanan terhambat karena adanya penyesuaian regulasi
4	Belum optimalnya promosi investasi

Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Isu Strategis
1	Belum optimalnya pelayanan perizinan
2	Belum efisiennya penanaman modal di Kota Madiun

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya efektivitas investasi di Kota Madiun	Incremental Capital Output Ratio		5.00	4.79	4.58	4.37

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		32 skor	28.00 skor	28.01 skor	28.02 skor
2	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal		191 M	193 M	194 M	195 M
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase penerbitan izin sesuai Standart Pelayanan		78 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya kualitas regulasi penanaman modal yang tepat sasaran	Jumlah rekomendasi terhadap peraturan daerah/peraturan walikota yang terkait dengan investasi		2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom
5	Meningkatnya kualitas pemetaan potensi investasi	Persentase terpenuhinya informasi yang dibutuhkan investor		50%	80%	100%	100%
6	Meningkatnya pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	Presentase Pendaftar Transmigrasi Yang Terfasilitasi		3 %	3 %	3 %	3 %

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah				Lokasi
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	1	5				RUTIN PERANGKAT DAERAH													
Sasaran 1						Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	32.00 Skor		28.00 Skor		28.01 Skor		28.02 Skor		28.03 Skor			
	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.01 skor	5.561.209.120	80.02 skor	5.420.298.000	80.03 skor	5.893.386.800	80.04 skor	6.629.000.000	80.05 skor	23.503.893.920		
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	44.000.000	100%	47.370.000	100%	62.000.000	100%	63.000.000	100%	216.370.000	KOTA MADIUN	
	2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	6 dokumen	44.000.000	6 dokumen	47.370.000	6 dokumen	62.000.000	6 dokumen	63.000.000	6 dokumen	216.370.000		
				2.01	1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					5 Dokumen	5 Dokumen						
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	4.202.386.800	100%	3.900.000.000	100%	4.202.386.800	100%	4.300.000.000	100%	16.604.773.600	KOTA MADIUN	
	2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	4.202.386.800	100%	3.900.000.000	100%	4.202.386.800	100%	4.300.000.000	100%	16.604.773.600		
							<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					35 orang/bulan	37 orang/bulan						
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	1.134.822.320	100%	1.132.310.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	2.717.132.320	KOTA MADIUN	
	2	18	01	2.06	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan/perlengkapan kantor	100%	934.822.320	100%	932.310.000	0%	-	0%	-	100%	1.867.132.320		
	2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	850.000.000		
							<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat</i>					48 Laporan	50 Laporan						

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							<i>Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>											
	2	18	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	0%	0	100%	108.600.000	100%	192.000.000	100%	195.000.000	100%	495.600.000	KOTA MADIUN
	2	18	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	-	0	100%	108.600.000	100%	192.000.000	100%	195.000.000	100%	495.600.000	
							<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>					5 Unit		5 Unit				
	2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintah Daerah	0%	-	0%	-	100%	997.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.997.000.000	KOTA MADIUN
	2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan/perlengkapan kantor	0%	-	0%	-	100%	997.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.997.000.000	
							<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>					38 Laporan		38 Laporan				
	2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	180.000.000	100%	232.018.000	100%	220.000.000	100%	841.000.000	100%	1.473.018.000	KOTA MADIUN
	2	18	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	195.000.000	
							<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>					20 Unit		26 unit				
	2	18	01	2,09	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100%	80.000.000	100%	132.018.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	443.018.000	
							<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>					1 Unit						
	2	18	01	2,09	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	665.000.000	100%	835.000.000	
							<i>Jumlah Sarana dan</i>					6 Unit		7 unit				

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi											
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
sasaran 2						Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	191 M		193 M		194M		195 M			195 M	
sasaran 3						Meningkatnya kualitas pemetaan potensi investasi	Persentase terpenuhinya informasi yang dibutuhkan investor	50%		80%		100%		100%			100%	
	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	0	0	100%	161.250.000	100%	254.312.500	100%	116.587.500	100%	116.587.500	
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	0	0	1 buah	161.250.000	0	64.312.500	0	116.587.500	1 buah	116.587.500	
	2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM yang telah direvisi	0	0	1 Dokumen	100.000.000	0	-	1 dokumen	52.275.000	1 dokumen	52.275.000	
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					0		1 Dokumen				
	2	18	02	2.01	02	Penyediaan Peta Potensi Dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Pemeliharaan)	Jumlah peta investasi yang memerlukan pemeliharaan	-	-	1 paket	61.250.000	1 paket	64.312.500	1 paket	64.312.500	1 paket	64.312.500	
							Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota					1 Dokumen		1 Dokumen				
	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	13 %	373.118.200	33%	294.755.750	32%	300.650.865	39%	306.663.900	39%	306.663.900	
	2	18	03	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah investor baru	10 investor	373.118.200	20 investor	294.755.750	30 investor	300.650.865	40 investor	306.663.900	40 investor	306.663.900	KOTA MADIUN
	2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	5 kegiatan	373.118.200	5 kegiatan	294.755.750	5 kegiatan	300.650.865	5 kegiatan	306.663.900	5 kegiatan	306.663.900	
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					1 Dokumen		1 Dokumen				
sasaran 4						Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	persentase penerbitan izin sesuai SP	78%		100%		100 %		100 %			100 %	
sasaran 5						Meningkatnya kualitas regulasi penanaman modal yang tepat sasaran	Jumlah rekomendasi terhadap peraturan daerah/peraturan	-		2 rekom		2 rekom		2 rekom			2 rekom	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							walikota yang terkait dengan investasi											
	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	80%	654.079.000	85%	626.851.000	90%	696.500.000	95 %	756.500.000	95 %	2.733.930.000	
	2	18	04	2		Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Izin	1500 izin	654.079.000	3000 izin	626.851.000	3000 izin	696.500.000	3000 izin	756.500.000	3000 izin	2.733.930.000	KOTA MADIUN
	2	18	04	2.	0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan Elektronik	275 orang	346.401.000	100 orang	240.442.000	100 orang	250.000.000	120 orang	260.000.000	120 orang	1.096.843.000	
							<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>					<i>1800 Pelaku Usaha</i>		<i>2000 Pelaku Usaha</i>				
		18	04	2.	0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Komitmen Berusaha Yang Dievaluasi	10%	288.878.000	8%	236.409.000	9%	246.500.000	10%	246.500.000	10%	1.018.287.000	
							<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal</i>					<i>360 Kegiatan Usaha</i>		<i>500 Kegiatan Usaha</i>				
	2	18	04	2.	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	50 kali	18.800.000	45 kali	150.000.000	40 kali	200.000.000	35 kali	250.000.000	30 kali	618.800.000	
							<i>Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</i>					<i>40 Orang</i>		<i>40 Orang</i>				
	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	80 perusahaan	525.800.000,00	110 perusahaan	525.800.000,00	110 perusahaan	535.000.000,00	110 perusahaan	546.000.000,00	110 perusahaan	2.132.600.000,00	
	2	18	05	2		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	100 perusahaan	525.800.000,00	300 perusahaan	525.800.000,00	300 perusahaan	535.000.000,00	300 perusahaan	546.000.000,00	300 perusahaan	2.132.600.000,00	KOTA MADIUN
	2	18	05	2	0	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang di pantau	30 perusahaan	50.815.000,00	15 perusahaan	50.815.000,00	15 perusahaan	54.000.000	15 perusahaan	57.000.000	15 perusahaan	212.630.000	
							<i>Jumlah Kegiatan Usaha</i>					<i>0</i>		<i>0</i>				

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							<i>dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>					<i>Kegiatan Usaha</i>		<i>Kegiatan Usaha</i>				
	2	18	05	2	02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang memahami ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal	50 perusahaan	454.985.000,00	300 perusahaan	454.985.000,00	300 perusahaan	458.000.000	300 perusahaan	462.000.000	300 perusahaan	1.829.970.000	
							<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>					<i>300 Pelaku Usaha</i>		<i>300 Pelaku Usaha</i>				
	2	18	05	2	03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang telah memenuhi kewajiban pelaksanaan Penanaman Modal	30 perusahaan	20.000.000,00	15 perusahaan	20.000.000,00	15 perusahaan	23.000.000	15 perusahaan	27.000.000	15 perusahaan	90.000.000	
							<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan</i>					<i>20 Kegiatan Usaha</i>		<i>20 Kegiatan Usaha</i>				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	90%	31.600.000	100%	174.061.400	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	615.661.400	
	2	18	06	02:001		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	65 jenis izin	31.600.000	100 jenis izin	174.061.400	105 jenis izin	200.000.000	110 jenis izin	210.000.000	110 jenis izin	615.661.400	KOTA MADIUN
	2	18	06	02:001		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Bberusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis izin yang terintegrasi Menggunakan Sistem Elektronik	30 izin	31.600.000	53 izin	174.061.400	53 izin	200.000.000	53 izin	210.000.000	53 izin	615.661.400	
							<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>					<i>2 Dokumen</i>		<i>2 Dokumen</i>				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI												
Sasaran 6						Meningkatnya pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	Prosentase Pendaftar Transmigrasi Yang Terfasilitasi	3%		3%		3%		3%		3%		
	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian		13.500.000	20%	14.850.000	20%	31.335.000	20%	34.968.500	20%	94.653.500	
	3	32	03	0 2: 0 1		Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Sosialisasi Penataan Persebaran	40 Orang	13.500.000	40 Orang	14.850.000	40 Orang	31.335.000	40 Orang	34.968.500	40 Orang	94.653.500	KOTA MADIUN
	3	32	03	0 2: 0 1	0 5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Sosialisasi Ketransmigrasian	1 Kegiatan	13.500.000	1 Kegiatan	14.850.000	2 Kegiatan	16.335.000	2 Kegiatan	17.968.500	2 Kegiatan	62.653.500	
							<i>Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan</i>					40 Kepala Kelu- ar ga		40 Kepala Kelu- ar ga				
	3	32	03	0 2: 0 1	0 6	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	30 orang	15.000.000	35 orang	17.000.000	35 orang	32.000.000	
							<i>Jumlah Calon Transmigran dan/ atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan</i>					30 Orang		35 Orang				
	jumlah								7.159.306.3 20		7.217.866.1 50		7.911.185.165		8.599.719.90 0		29.503.990.220	

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	968,702 M	377,632 M	191 M	193 M	194 M	195 M	195 M
2	Persentase penerbitan izin sesuai Standart Pelayanan	-	-	78%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah rekomendasi peraturan walikota yang menghambat investasi	-	-	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom
4	Persentase informasi yang dibutuhkan investor	-	-	50%	80%	100%	100%	100%
5	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%

Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL									
1	Incremental Capital Output Ratio	1,7	-0,91	5	4,79	4,58	4,37	4,37	Indikator Tujuan PD
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	968,702 M	377,632 M	191 M	193 M	194 M	195 M	195 M	Indikator Sasaran PD
3	Persentase penerbitan izin sesuai Standart Pelayanan	-	-	78%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
4	Jumlah rekomendasi peraturan walikota yang menghambat investasi	-	-	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	Indikator Sasaran PD
5	Persentase informasi yang dibutuhkan investor	-	-	50%	80%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	-	0	0	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
7	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	-	19,23%	13%	33%	32%	39%	39%	Indikator Program PD
8	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	-	-	80%	85%	90%	95%	95%	Indikator Program PD
9	Jumlah Perusahaan yang melaporkan Lapoporan Kegiatan Penanaman Modal	-	-	80 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	Indikator Program PD
10	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	-	-	90%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
11	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/ kota	-66,15%	-66,17%	-49,33%	1,05%	0,52%	0,52%	0,52%	Lppd
12	Peraturan Daerah mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	-	RUPM	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
13	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	-	RUPM	0	0	1 dokumen	0	1 dokumen	Lppd
14	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	RUPM	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
15	Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	-	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
16	Kegiatan pameran penanaman modal	-	0	0	0	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
17	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	-	0	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
18	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	-	39	267	275	280	285	285	Lppd
19	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1999	2035	1500	1600	1700	1800	1800	Lppd
20	Laporan realisasi penanaman modal	968,702 M	327,632 M	191 M	193 M	194 M	195 M	195 M	Lppd
21	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	-	5 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	Pembinaan penanaman modal Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri	-	50 perusahaan	80 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	Lppd
23	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	-	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	Lppd
24	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	-	327.632.796.023	-	-	-	-	327.632.796.023	Indikator Lama
25	Persentase penyelesaian ijin yang diterbitkan tepat waktu	-	100%	-	-	-	-	100%	Indikator Lama
26	Persentase pengaduan pelayanan perizinan terselesaikan	-	100%	-	-	-	-	100%	Indikator Lama
BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI									
1	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	Indikator Sasaran PD
2	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	-	-	-	20%	20%	20%	20%	Indikator Program PD
3	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	-	0	tidak ada kawasan transmigrasi					Lppd
4	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-	0	tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitas					Lppd
5	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	-	0	tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina					Lppd

P. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

No	Permasalahan
1	Kurangnya prestasi di bidang olahraga di Kota Madiun di tingkat regional, nasional bahkan ke tingkat internasional
2	Kurangnya fasilitas sarana prasarana seni budaya untuk masyarakat seni Kota Madiun
3	Belum optimalnya peningkatan kepariwisataan yang bisa menambah daya tarik wisatawan masuk ke Kota Madiun

Isu Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

No	Isu Strategis
1	Kurangnya prestasi di bidang olahraga di Kota Madiun di tingkat regional, nasional bahkan ke tingkat internasional
2	Kurangnya fasilitas sarana prasarana seni budaya untuk masyarakat seni Kota Madiun
3	Belum optimalnya peningkatan kepariwisataan yang bisa menambah daya tarik wisatawan masuk ke Kota Madiun

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor jasa

Tujuan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya pariwisata kota yang berwawasan lingkungan	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik	8,7	8,6	8,7	-	-

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Regional Bruto					
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	351.554	375.000	400.000	425.000	450.000
2	Terlestarikannya kebudayaan daerah	Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	35	40	45	-	-
		Jumlah kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan	-	-	63	65	67
3	Terwujudnya pemuda yang berprestasi	Jumlah prestasi pemuda dan olahraga di tingkat regional dan nasional	95	41	45	-	-
		Jumlah prestasi pemuda	14 prestasi	15 prestasi	16 prestasi	17 prestasi	18 prestasi

Sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	18,31	19,83	20
2	Meningkatnya kualitas pembinaan pelaku seni dan budaya	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	4%	35%	50%	-	-
		Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	-	-	42 orang/group	44 orang/group	46 orang/group
3	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya dan Warisan Budaya tak Benda (WBTB)	Jumlah cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang berpotensi jadi destinasi wisata	-	-	5	6	7

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan pariwisata yang berwawasan lingkungan	Jumlah destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	1 destinasi	2 destinasi	20 destinasi	25 destinasi	30 destinaai
5	Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif yang berkualitas	-	-	10%	10%	10%
6	Meningkatnya kualitas pembinaan pemuda	Jumlah prestasi olahraga yang diraih	79	33	40	-	-
		Jumlah pemuda/ group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	-	-	30 pemuda/ group	31 pemuda / group	32 pemuda/ group
7	Meningkatnya kualitas sarpras pendukung kepemudaan	Persentase Kualitas Sarpras	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi			
								2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
								Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan		Target	pendanaan	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Sasaran 1						Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Nilai Reformasi Birokrasi	35		19,83			20		25		25		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	X	X	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi implementasi sikip perangkat daerah	A	5.928.463.000	A	6.054.839.300	A	7.210.103.230	A	7.890.343.553	A	7.755.973.300		
	2	2	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	40.000.000	100%	30.000.000	100%	48.000.000	25	52.000.000	100%	52.000.000		
	X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	6 dokumen	40.000.000	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	48.000.000	6 dokumen	52.000.000	6 dokumen	52.000.000		
	X	X	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	3.184.463.000	100%	3.202.119.300	100%	3.853.200.230	100%	4.238.520.253	100%	4.104.150.000		
	X	X	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang	3.184.463.000	25 orang	3.202.119.300	25 orang	3.853.200.230	25 orang	4.238.520.253	25 orang	4.104.150.000		
	2	2	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000		
	2	2	1	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya			1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000		
	X	X	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	299.700.000	100%	299.700.000	100%	299.700.000	100%	299.700.000	100%	299.700.000		
	X	X	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	299.700.000	12 bulan	299.700.000	12 bulan	299.700.000	12 bulan	299.700.000	12 bulan	299.700.000		

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	X	0	0	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	0	100%	20.790.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
	X	0	0	0	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan			1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000
	X	0	0	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000
	X	0	0	0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	0 paket	0	1 paket	20.790.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000
	X	X	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	2.124.650.000	100%	2.337.115.000	100%	2.570.826.500	100%	2.827.909.150	100%	2.827.909.150
	X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	2.124.650.000	1 paket	2.337.115.000	1 paket	2.570.826.500	1 paket	2.827.909.150	1 paket	2.827.909.150
	X	X	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	279.650.000	100%	165.115.000	100%	338.376.500	100%	372.214.150	100%	372.214.150
	X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 unit	50.000.000	30 unit	55.000.000	30 unit	60.500.000	30 unit	66.550.000	30 unit	66.550.000
	X	X	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	175.000.000	1 unit	70.000.000	1 unit	211.750.000	1 unit	232.925.000	1 unit	232.925.000
	X	X	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	54.650.000	1 unit	40.115.000	1 unit	66.126.500	1 unit	72.739.150	1 unit	72.739.150
Sasaran 2						Meningkatnya kelestarian budaya daerah	Prosentase budaya daerah yang dilestarikan	5%	3.650.000.000								
						Meningkatnya kualitas pembinaan pelaku seni dan budaya	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran			42 orang/group	1.600.000.000	44 orang/group	2.050.000.000	46 orang/group	2.475.000.000	46 orang/group	2.475.000.000
						Meningkatnya pengelolaan cagar budaya dan WBTB	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata			5 obyek	100.000.000	6 obyek	242.000.000	7 obyek	266.200.000	7 obyek	266.200.000

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
	2	2	0	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	5%	3.250.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.800.000.000	100%	2.150.000.000	100%	2.150.000.000	
	2	2	0	2		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	44 orang	3.250.000.000	44 orang	1.400.000.000	44 orang	1.800.000.000	44 orang	2.150.000.000	44 orang	2.150.000.000	
	2	2	0	2	0	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek pemajuan budaya yang dimanfaatkan	8 budaya	2.250.000.000	8 budaya	1.200.000.000	10 budaya	1.500.000.000	11 budaya	1.750.000.000	11 budaya	1.750.000.000	
	2	2	0	2	0	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penghargaan yang diberikan	3 festival	1.000.000.000									
							Jumlah Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan			20 orang/group	200.000.000	20 orang/group	300.000.000	20 orang/group	400.000.000	20 orang/group	400.000.000	
	2	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina	100 orang	200.000.000									
							Prosentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina			100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	325.000.000	100%	325.000.000	
	2	2	0	2		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni budaya yang dibina	2 jenis	200.000.000	2 jenis	200.000.000	3 jenis	250.000.000	3 jenis	325.000.000	3 jenis	325.000.000	
	2	2	0	2	0	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	40 orang	200.000.000	40 orang	200.000.000	45 orang	250.000.000	45 orang	325.000.000	45 orang	325.000.000	
	2	2	0			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata	2 Obyek	200.000.000	2 Obyek	100.000.000	2 Obyek	242.000.000	2 Obyek	266.200.000	2 Obyek	266.200.000	
	2	2	0	2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	20 obyek	200.000.000	20 obyek	100.000.000	20 obyek	242.000.000	20 obyek	266.200.000	20 obyek	266.200.000	
	2	2	0	2	0	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	20 obyek	200.000.000	20 obyek	100.000.000	20 obyek	242.000.000	20 obyek	266.200.000	20 obyek	266.200.000	
Sasaran 3						Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	375.000 orang	1.725.000.000									
						Meningkatnya kualitas pengelolaan pariwisata yang berwawasan lingkungan	Jumlah Destinasi wisata daerah yg berwawasan lingkungan			20 Destinasi	1.689.048.300	25 Destinasi	4.500.000.000	30 Destinasi	4.600.000.000	30 Destinasi	4.600.000.000	
						Meningkatnya kualitas	persentase			10%		10%		10%		10%	798.600.000	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						ekonomi kreatif	peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang berkualitas				400.000.000		726.000.000		798.600.000			
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
	3	2	0			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	2 destinasi	375.000.000									
							Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah			20%	489.048.300	25%	3.100.000.000	30%	3.100.000.000	30%	3.100.000.000	
	3	2	0	2		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	2 destinasi	375.000.000									
							Jumlah Destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan			25 destinasi	489.048.300	25 destinasi	3.100.000.000	25 destinasi	3.100.000.000	25 destinasi	3.100.000.000	
	3	2	0	2	0	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	2 lokasi	250.000.000	2 lokasi	224.048.300	2 lokasi	2.700.000.000	2 lokasi	2.700.000.000	2 lokasi	2.700.000.000	
	3	2	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	10 lokasi	125.000.000	2 lokasi	265.000.000	12 lokasi	400.000.000	14 lokasi	400.000.000	14 lokasi	400.000.000	
	3	2	0			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4 event	750.000.000									
							Prosentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan			10%	1.200.000.000	15%	1.400.000.000	20%	1.500.000.000	20%	1.500.000.000	
	3	2	0	2		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	4 event	750.000.000									
							Jumlah Destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan			25 Destinasi	1.200.000.000	25 Destinasi	1.400.000.000	25 Destinasi	1.500.000.000	25 Destinasi	1.500.000.000	
	3	2	0	2	0	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	4 event	750.000.000	4 event	1.200.000.000	4 event	1.400.000.000	4 event	1.500.000.000	4 event	1.500.000.000	
	3	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	18,68 %	600.000.000	19%	400.000.000	19,50 %	726.000.000	20%	798.600.000	20%	798.600.000	
	3	2	0	2		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	18,68 %	600.000.000	19%	400.000.000	19,50 %	726.000.000	20%	798.600.000	20%	798.600.000	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3	2	0	2	0	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	20 orang	600.000.000	2 event	400.000.000	24 orang	726.000.000	26 orang	798.600.000	26 orang	798.600.000	
Sasaran 4						Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional	Jumlah pemuda berprestasi	16 orang	700.000.000									
							Jumlah prestasi olahraga yang diraih	33 medali	4.009.317.280									
						Meningkatnya kualitas pembinaan pemuda	Jumlah pemuda /group ditingkat Kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi			30 pemuda / group	5.775.000.000	31 pemuda / group	6.510.000.000	32 pemuda / group	7.531.700.000	32 pemuda / group	7.531.700.000	
						Meningkatnya kualitas sarpras pendukung kepemudaan	persentase kualitas sarpras			100%	1.250.000.000	100%	4.500.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
	2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda berprestasi	12 orang	700.000.000									
						Jumlah pemuda berprestasi Tahun N-(N-1)/ Tahun N-1	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan			5%	475.000.000	10%	560.000.000	15%	931.700.000	15%	931.700.000	
	2	1	0	2		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda	Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan	2 event	700.000.000									
							Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi			31 Pemuda / group	475.000.000	31 Pemuda / group	560.000.000	31 Pemuda / group	931.700.000	31 Pemuda / group	931.700.000	
	2	1	0	2	0	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	100 orang	700.000.000	100 orang	475.000.000	100 orang	560.000.000	100 orang	931.700.000	100 orang	931.700.000	
	2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	35 medali	4.009.317.280									
							Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan			20%	6.550.000.000	25%	10.450.000.000	30%	11.600.000.000	30%	11.600.000.000	

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2	1	0	2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	3 sarana prasarana olahraga	1.683.197.280								
							Prosentase kualitas sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi			100%	1.250.000.000	100%	4.500.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000
	2	1	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	3 sarana prasarana olahraga	1.683.197.280	3 sarana prasarana olahraga	1.250.000.000	3 sarana prasarana olahraga	3 sarana prasarana olahraga	5.000.000.000	3 sarana prasarana olahraga	5.000.000.000	
	2	1	0	2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 event	1.026.120.000								
							Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi			31 Pemuda / group	1.800.000.000	31 Pemuda / group	2.250.000.000	31 Pemuda / group	2.300.000.000	31 Pemuda / group	2.300.000.000
	2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 event	1.026.120.000	3 event	1.800.000.000	3 event	2.250.000.000	3 event	2.300.000.000	3 event	2.300.000.000
	2	1	0	2		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	10 cabang olahraga	1.000.000.000								
							Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi			31 Pemuda / group	2.000.000.000	31 Pemuda / group	2.000.000.000	31 Pemuda / group	2.500.000.000	31 Pemuda / group	2.500.000.000
	2	1	0	2	0	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	10 cabang olahraga	1.000.000.000								
							Jumlah Organisasi Hasil Pengembangan Keolahragaan			1 Organisasi	2.000.000.000	1 Organisasi	2.000.000.000	1 Organisasi	2.500.000.000	1 Organisasi	2.500.000.000
	2	1	0	2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	3 festival olahraga	300.000.000								

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi			31 Pemuda / group	1.500.000.000	31 Pemuda/group	1.700.000.000	31 Pemuda/group	1.800.000.000	31 Pemuda / group	1.800.000.000	
	2	1	0	2	0	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	3 festival olahraga	300.000.000	3 festival olahraga	1.500.000.000	3 festival olahraga	1.700.000.000	3 festival olahraga	1.800.000.000	3 festival olahraga	1.800.000.000	

Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah prestasi olahraga yang diraih	50	79	33	40	-	-	40
2	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	-	-	-	30 pemuda/group	31 pemuda/group	32 pemuda/group	32 pemuda/ group
3	Persentase Kualitas Sarpras	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	persentase budaya daerah yang dilestarikan	4%	4%	35%	50%	-	-	50%
5	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	-	-	-	42 orang/group	44 orang/group	46 orang/group	46 orang/group
6	jumlah cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang berpotensi jadi destinasi wisata	-	-	-	5	6	7	7
7	Jumlah destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	0	1 destinasi	2 destinasi	20 destinasi	25 destinasi	30 destinaai	30 destinaai
8	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif yang berkualitas	-	-	-	10%	10%	10%	10%

Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bidang Urusan Kebudayaan									
1	Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	31,6	35	40	45	-	-	45	Indikator Tujuan PD
2	Jumlah kesenian dan kebudayaan yang terlestarikan	-	-	-	63	65	67	67	Indikator Tujuan PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	4%	4%	35%	50%	-	-	50%	Indikator Sasaran PD
4	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	-	-	-	42 orang/gro up	44 orang/gro up	46 orang/gro up	46 orang/group	Indikator Sasaran PD
5	Jumlah cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang berpotensi jadi destinasi wisata	-	-	-	5	6	7	7	Indikator Sasaran PD
6	Persentase seni budaya yang dilestarikan	4%	4%	5%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
7	Persentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	21%	21%	21%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
8	Jumlah Sumber Daya Manusia, lembaga dan pranata yang dibina	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-	-	400 orang	Indikator Program PD
9	Persentase Sumber Daya Manusia, Lembaga dan pranata kesenian yang dibina	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
10	Terlestarikannya Cagar Budaya	20	20	20	20	20	20	20	Lppd
11	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	20	20	20	366	366	366	366	Lppd
12	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	20	20	20	366	366	366	366	Lppd
13	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	20	20	20	366	366	366	366	Lppd
14	Jumlah Sumber Daya Manusia, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	0	100	100	100	100	100	Lppd
15	Register cagar budaya (pendaftaran, pengajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	148	148	148	148	148	148	148	Lppd
16	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	20	20	20	20	20	20	20	Lppd
17	Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten/kota ke luar provinsi dengan dukungan data	0	0	0	0	0	0	0	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	Pengembangan cagar budaya kabupaten/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	2	2	2	2	2	2	2	Lppd
19	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	20	20	20	20	20	20	20	Lppd
20	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
21	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
22	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
23	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	6	6	6	6	6	6	6	Lppd
24	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
25	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
26	Pemetaan sumber daya manusia cagar budaya dan permuseuman	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
27	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
28	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
29	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga									
1	Jumlah prestasi pemuda dan olahraga di tingkat regional dan nasional	50	95	41	45	-	-	45	Indikator Tujuan PD
2	Jumlah prestasi pemuda	-	14 prestasi	15 prestasi	16 prestasi	17 prestasi	18 prestasi	18 prestasi	Indikator Tujuan PD
3	Jumlah prestasi olahraga yang diraih	50	79	33	40	-	-	40	Indikator Sasaran PD
4	Jumlah pemuda/ group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	-	-	-	30 pemuda/ group	31 pemuda/ group	32 pemuda/ group	32 pemuda/ group	Indikator Sasaran PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Persentase Kualitas Sarpras	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	50 medali	79 medali	33 medali	33 medali	-	-	36 medali	Indikator Program PD
7	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	-	-	-	20%	25%	30%	30%	Indikator Program PD
8	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	-	-	-	10%	15%	20%	20%	Indikator Program PD
9	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	40,81%	40,81%	40,81%	40,81%	40,81%	40,81%	40,81%	Lppd
10	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	45,49%	45,49%	45,49%	45,49%	45,49%	45,49%	45,49%	Lppd
11	Peningkatan prestasi olahraga	50	79	33	33	35	36	36	Lppd
12	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	2	2	100	100	100	100	100	Lppd
13	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	0	0	100	0	0	100	100	Lppd
14	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	16	8	100	100	100	100	100	Lppd
15	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	0	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	Lppd
16	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	158	158	158	158	158	158	158	Lppd
17	Jumlah penyelenggaraan event Olah Raga prestasi tingkat daerah	4	3	3	3	3	4	20	Lppd
18	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	-	2	7	7	7	7	7	Indikator Lama
19	Jumlah Atlit yang Ikut Kejuaraan di Tingkat Provinsi dan Nasional	-	124	-	-	-	-	124	Indikator Lama
Bidang Urusan Pariwisata									
1	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto	8,6	8,7	8,6	8,7	-	-	8,7	Indikator Tujuan PD
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	421.753	351.554	375.000	400.000	425.000	450.000	450.000	Indikator Tujuan PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Jumlah destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	0	1 destinasi	2 destinasi	20 destinasi	25 destinasi	30 destinaai	30 destinaai	Indikator Sasaran PD
4	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif yang berkualitas	-	-	-	10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	2 destinasi	2 destinasi	2 destinasi	2 destinasi	-	-	2 destinasi	Indikator Program PD
6	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata Daerah	0	0	0	20%	25%	30%	30%	Indikator Program PD
7	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	5 event	3 event	4 event	4 event	-	-	4 event	Indikator Program PD
8	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan	0	0	5%	10%	15%	20%	20%	Indikator Program PD
10	Persentase Sumber Daya Manusia pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	-	18,68%	18,68%	19,00%	19,50%	20%	20%	Indikator Program PD
11	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	2%	-93%	1%	2%	2%	3%	3%	Lppd
12	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	-	10.67%	5%	7%	9%	10%	10%	Lppd
13	Tingkat hunian akomodasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto harga berlaku	-	4,80%	4,90%	5%	5,10%	5,20%	5,20%	Lppd
15	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	265,70%	265,80%	265,90%	266%	266,10%	266,10%	Lppd
16	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
17	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	-	704	704	704	704	704	704	Lppd
18	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	12.314	853	875	900	925	950	975	Lppd
19	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	3	5	5	5	5	5	5	Lppd
20	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	0	0	0	0	0	0	Lppd
21	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Belum ada	Belum ada	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Lppd
22	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	18,68%	18,68%	18,68%	19,00%	19,50%	20%	20%	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	0	3	3	3	3	3	Lppd
24	Pertumbuhan Sektor Pariwisata	-	8,60%	-	-	-	-	8,60%	Indikator Lama
25	Persentase Peningkatan Promosi yang dilaksanakan	-	2	-	-	-	-	2	Indikator Lama

Q. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024

Permasalahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Permasalahan
1	Masih perlunya dilakukan peningkatan pada sistem pelayanan perpustakaan untuk menghadapi era digitalisasi dan dinamika perkembangan teknologi informasi
2	Masih perlunya ditingkatkan sarana prasarana perpustakaan sehingga masyarakat memiliki minat yang tinggi untuk berkunjung
3	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan
4	Belum optimalnya Pengelolaan Arsip di Perangkat Daerah
5	Belum optimalnya Sosialisasi Perpustakaan dan Kearsipan

Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Isu Strategis
KEARSIPAN	
1	Tingkatnya tertib arsip sebagai tolak ukur kinerja perangkat daerah
2	Jumlah tenaga fungsional arsiparis/Sumber Daya Manusia pengelola kearsipan belum sesuai dengan kebutuhan
3	Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap arsip
4	Belum maksimalnya penyelamatan arsip bernilai guna sejarah
PERPUSTAKAAN	
1	Perlunya pengembangan koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang dilayani serta perkembangan ilmu pengetahuan
2	Perlunya penambahan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai dengan standard nasional perpustakaan
3	Perlunya diversifikasi ruang layanan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan
4	Perlunya penambahan dan peningkatan jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang berkompeten
5	Perlunya pengembangan dan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
6	Perlunya pembentukan citra perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis <i>smart cities</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun
2	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah
				Rata-rata Lama Sekolah

Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Tertib Administrasi Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan		56 indeks	57 indeks	58 indeks	59 indeks
2	Terwujudnya Budaya Gemar Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		2,40 skor	2,42 skor	2,44 skor	2,46 skor

Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip		9%	9%	9%	9%
2	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun		8,80 indeks	8,90 indeks	9,00 indeks	9,10 indeks
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		18,01 indeks	18,01 indeks	25,25 indeks	25,25 indeks

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi	
							2021		2022		2023		2024				
							Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	2 3	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	3.546.179.100	82 skor	4.542.772.847	82 skor	5.052.024.456	82 skor	9.153.000.000	82 skor	22.293.976.403	Kota Madiun
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2 3	0 1	2 1	0 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	30.000.000	100%	54.700.000	100%	55.000.000	100%	58.000.000	100%	197.700.000	Kota Madiun
	2 3	0 1	2 1	0 1	0 6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				12 laporan	55.000.000	12 laporan	58.000.000	24 laporan	197.700.000	Kota Madiun
						Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	10 dokumen	30.000.000	10 dokumen	54.700.000							
	2 3	0 1	2 1	0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	2.655.960.900	100%	2.867.787.447	100%	3.779.937.276	100%	3.900.000.000	100%	13.203.685.623	Kota Madiun

	2 3	0 1	2	0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				27 OB	3.779.937.276	27 OB	3.900.000.000	27 OB	13.203.685.623	Kota Madiun	
							Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	-	100%	2.867.787.447							
							Jumlah Pegawai ASN	24 orang	2.655.960.900									
	2 3	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	66.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	321.000.000	Kota Madiun
	2 3	0 1	2	0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				30 laporan	85.000.000	30 laporan	90.000.000	60 laporan	321.000.000	Kota Madiun	
							Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	-	100%	80.000.000							
							Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	90 kali	66.000.000									
	2 3	0 1	2	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	0	-	100%	527.385.400	100%	360.000.000	100%	4.300.000.000	100%	5.187.385.400	Kota Madiun
	2 3	0 1	2	0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan				5 unit	260.000.000	2 unit	50.000.000	7 unit	310.000.000	Kota Madiun	

	2 3	0 1	2 7	0 9	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan						1 unit	4.000.000.000	1 unit	4.000.000.000	Kota Madiun	
						persentase pemenuhan gedung kantor	0	-	100%	-							
	2 3	0 1	2 7	0 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				5 unit	100.000.000	12 unit	250.000.000	17 unit	877.385.400	Kota Madiun	
						persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	0	-	100%	527.385.400							
	2 3	0 1	2 8	0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	618.259.200	100%	790.000.000	100%	569.087.180	100%	580.000.000	100%	2.557.346.380	Kota Madiun
	2 3	0 1	2 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					12 laporan	569.087.180	12 laporan	580.000.000	24 laporan	Kota Madiun	
						Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			100%	790.000.000							
						Jumlah bahan penunjang	1 paket	618.259.200									

	2 3	0 1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercakupnya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	175.959.000	100%	222.900.000	100%	203.000.000	100%	225.000.000	100%	826.859.000	Kota Madiun
	2 3	0 1	2	0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					22 unit	58.000.000	22 unit	60.000.000	22 unit	234.452.000	Kota Madiun
							Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100%	-	100%	64.900.000							
							Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	22 unit	51.552.000									
	2 3	0 1	2	0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1 unit	80.000.000	1 unit	90.000.000	1 unit	344.757.000	Kota Madiun
							Persentase gedung yang layak digunakan	100%	-	100%	95.000.000							
							jumlah gedung	2 unit	79.757.000									

	2 3	0 1	2	0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				78 unit	65.000.000	78 unit	75.000.000	78 unit	247.650.000	Kota Madiun
							Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	100%	-	100%	63.000.000						
							Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	78 unit	44.650.000								

Tujuan : Terwujudnya Budaya Gemar Membaca
Indikator : Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
								2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
								Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan		Target	pendanaan
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran 1 : Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	2 3	0 2				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	5,95%		5,95%	1.661.585.000	5,95%	1.428.400.000	5,95%	6.124.208.300	5,95%	10.439.603.300	Kota Madiun
							Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan perpustakaan	72	1.225.410.000									
Indikator : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	2 3	0 2	2	0 1		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	4%		4,3%	929.300.000	4,6%	482.400.000	4,9%	590.000.000	4,9%	2.804.110.000	Kota Madiun
							Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1:3	802.410.000									

	2 3	0 2	2 1	0 1	0 1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				74 layanan	282.400.000	74 layanan	340.000.000	148 layanan	1.720.626.000	Kota Madiun
							Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara	72 perpustakaan		72 perpustakaan		774.226.000					
							Jumlah pengunjung	100.000 orang	324.000.000								
	2 3	0 2	2 1	0 1	0 2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 paket	226.720.000	-	-	-	-	-	-	226.720.000	Kota Madiun
	2 3	0 2	2 1	0 1	0 8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	3.500 eksemplar		155.074.000		-		-		206.574.000	Kota Madiun
							Jumlah koleksi	105 eksemplar	51.500.000								

	2 3	0 2	2 1	0 9	0	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			-		-	2.400 eksemplar	200.000.000	3.800 eksemplar	250.000.000	13700 eksemplar	650.190.000	Kota Madiun
							Jumlah penambahan koleksi perpustakaan	2.600 eksemplar	200.190.000										
	2 3	0 2	2 2	0 2		Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca	20 kali	-	20 kali	732.285.000	20 kali	946.000.000	20 kali	5.534.208.300	80 kali	7.635.493.300	Kota Madiun	
								10 lembaga	423.000.000										
	2 3	0 2	2 2	0 1	0	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan					218 Lokus	574.700.000	218 Lokus	680.000.000	436 Lokus	2.324.985.000	Kota Madiun	
							Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	2.500 orang	-	2.500 orang	732.285.000								
							jumlah lembaga	10 lembaga	338.000.000										
	2 3	0 2	2 2	0 2	0	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1 perpustakaan	271.300.000	1 perpustakaan	4.754.208.300		5.110.508.300		
							Jumlah perpustakaan yang dibangun dan dipelihara	1 paket	-	-	-								
							Jumlah paket	2 paket	85.000.000										

	2 3	0 2	2 2	0 2	0 4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-	-	-	-	1 perpus takaan	100.000.000	1 perpus takaan	100.000.000	2 perpus takaan	200.000.000	Kota Madiun
	2 3	0 3				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	36%	-	37%	100.000.000	37%	260.000.000	38%	280.000.000		640.000.000	Kota Madiun
	2 3	0 3	2 2	0 1		Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	-	-	168 eksemplar	100.000.000	173 eksemplar	260.000.000	178 eksemplar	280.000.000		640.000.000	Kota Madiun
	2 3	0 3	2 2	0 1	0 1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					2 orang	110.000.000	2 orang	120.000.000	4 orang	330.000.000	Kota Madiun
							Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	-	-	4 kegiatan	100.000.000							
	2 3	0 3	2 2	0 1	0 2	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah pengadaan/akuisisi naskah kuno	-	-	-	-	2 eksemplar	150.000.000	2 eksemplar	160.000.000	4 eksemplar	310.000.000	Kota Madiun

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Sistem Tertib Administrasi Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota

Indikator : Indeks Penyelenggaraan Kearsipan

Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi	
							2021		2022		2023		2024				
							Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran 2 : Meningkatnya Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	2	0			Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungja waban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	84 skor		86 skor	651.625.000	88 skor	653.500.160	90 skor	840.000.000	90 skor	2.581.457.105	Kota Madiun
	4	2					Jumlah berkas arsip yang dikelola	59.500 berkas	436.331.945								
Indikator : Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	2	0	2	0	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	-	100%	342.140.000	100%	342.576.400	100%	420.000.000	100%	1.320.740.815	Kota Madiun
	4	2		1			Jumlah berkas arsip dinamis yang dikelola	59500 berkas	216.024.415								
	2	0	2	0	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-	-	-	-	58.000 berkas	342.576.400	60.000 berkas	420.000.000	118.000 berkas	1.320.740.815	Kota Madiun
	4	2		1			Jumlah arsip dinamis yang dipelihara dan disusutkan	900 meter linier	216.024.415	912 meter linier	342.140.000						

	2 4	0 2	2 2	0 2		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip	100%	220.307.530	100%	309.485.000	100%	310.923.760	100%	420.000.000	100%	1.260.716.290	Kota Madiun
	2 4	0 2	2 2	0 2	0 2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				260 Arsip		310.923.760	270 Arsip	420.000.000	530 Arsip	1.260.716.290	Kota Madiun
							Jumlah berkas arsip statis yang diakuisis, diolah, dipreservasi dan layanan akses arsip	250 berkas	220.307.530	250 berkas	309.485.000							
	2 4	0 3				Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip	8,6 berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	8,2 skor	-	8,4 skor	149.291.000	8,6 skor	150.000.000	8,8 skor	200.000.000	8,8 skor	499.291.000	Kota Madiun
	2 4	0 3	2 2	0 1		Kegiatan Pemusnahan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	-	-	100%	149.291.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	499.291.000	Kota Madiun
	2 4	0 3	2 2	0 1	0 1	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1.600 Arsip		75.000.000	1.100 Arsip	100.000.000	2.100 Arsip	245.390.000	Kota Madiun
							Jumlah arsip in aktif yang dinilai	-	-	917 nomor berkas			70.390.000					

	2	0	2	0	0	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan					1.000 Berkas	75.000.000	1.100 Berkas	100.000.000	2.100 Berkas	253.901.000	Kota Madiun
	4	3		1	2		Jumlah pelaksanaan pemusnahan arsip	-	-	1 kali	78.901.000							
GRAND TOTAL								5.207.921.045	7.105.273.847	7.543.924.616	16.597.208.300	36.454.327.808						

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	8,6	8,7	8,8	8,9	9	9,1	9,1
2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	-	-	9%	9%	9%	9%	36%

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2024	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bidang Urusan Perpustakaan									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	2,38	2,38	2,4	2,42	2,44	2,46	2,46	Indikator Tujuan PD
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	8,6	8,7	8,8	8,9	9	9,1	9,1	Indikator Sasaran PD
3	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	5,35%	5,59%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	Indikator Program PD
4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	-	-	36%	37%	37%	38%	38%	Indikator Program PD
5	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	-	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	-	3,8 %.	4%	4,30%	4,60%	4,90%	4,90%	Lppd
7	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	-	1 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	2 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	3 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	4 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	5 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	6 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	Lppd
8	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	-	55%	56%	57%	58%	59%	59%	Lppd
9	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	-	56 Eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar	96 eksemplar	Lppd
10	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Lppd
11	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Lppd
12	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	-	33,25%	-	-	-	-	33,25%	Indikator Lama
13	Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan perpustakaan	-	87,24	72	-	-	-	72	Indikator Lama
Bidang Urusan Kearsipan									
1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	-	-	56	57	58	59	59	Indikator Tujuan PD
2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	-	-	9%	9%	9%	9%	9%	Indikator Sasaran PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, (alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	82 skor	84 skor	86 skor	88 skor	90 skor	90 skor	Indikator Program PD
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	8,2 skor	8,2 skor	8,4 skor	8,6 skor	8,8 skor	8,8 skor	Indikator Program PD
5	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	-	9%	9%	9%	9%	9%	45%	Lppd
6	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	-	15%	9%	9%	9%	9%	51%	Lppd
7	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	-	12%	6%	6%	6%	6%	36%	Lppd
8	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	-	0% Aplikasi SRIKANDI belum di launching oleh ANRI	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
9	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	-	Belum Dilakukan Pemusnahan	Belum Dilakukan Pemusnahan	1 kali	1 kali	1 kali	3 Kali	Lppd
10	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-	22 daftar arsip yang diselamatkan	25 daftar arsip yang diselamatkan	28 daftar arsip yang diselamatkan	31 daftar arsip yang diselamatkan	34 daftar arsip yang diselamatkan	34 daftar arsip yang diselamatkan	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi	-	2 Perangkat Daerah Provinsi	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	2 Perangkat Daerah Provinsi	Lppd
12	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	-	18 arsip hasil alih media	21 arsip hasil alih media	24 arsip hasil alih media	27 arsip hasil alih media	30 arsip hasil alih media	30 arsip hasil alih media	Lppd
13	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	-	2 Daftar Arsip	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	2 Daftar Arsip	Lppd
14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	-	1 (satu) SOP Layanan Peminjaman Arsip	1 (satu) SOP Layanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
15	Persentase Unit Kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	-	5 unit	-	-	-	-	5 unit	Indikator Lama
16	Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola	57.615 berkas	60,004 berkas	59.500 berkas	-	-	-	59.500 berkas	Indikator Lama

R. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Permasalahan
PANGAN	
1	Diversifikasi sumber pangan lokal relatif masih terbatas
2	Peningkatan akses pangan masyarakat memasyarakatkan lokal dan sudah berkembang tapi belum maksimal
3	Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas supply bahan pangan
4	Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/pendamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan
KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1	Keterbatasan lahan untuk pengembangan budidaya perikanan
2	Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan
3	Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal) di Kota Madiun
4	Tingginya harga pakan ikan tidak diiringi harga jual ikan yang tinggi pula
PERTANIAN	
1	Keterbatasan lahan untuk pengembangan sektor pertanian di Kota Madiun mengingat wilayah kota yang kecil
2	Tingginya alih fungsi lahan sektor pertanian menjadi non pertanian dan pemukiman penduduk
3	Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal karena belum diterapkannya sistem pertanian yang modern
4	Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia petani dalam meningkatkan produksi
5	Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas
6	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pertanian seperti irigasi
7	Keterbatasan akses petani terhadap permodalan yang berkelanjutan
8	Petani belum mendapatkan keuntungan yang baik mengingat panjangnya tata niaga produk pertanian
9	Generasi muda yang tidak tertarik di sektor pertanian
10	Sumber Daya Manusia petani di dominasi oleh para petani yang sudah tua
11	Terjadinya fluktuasi iklim yang tidak menentu yang banyak menimbulkan kerugian bagi petani

No	Permasalahan
12	Usaha peternakan belum dilakukan dengan intensif (masih menggunakan cara tradisional dan ternak tidak dikandangkan) dan belum menerapkan teknologi terbaru dalam bidang peternakan
13	Harga pakan ternak mahal/tidak terjangkau petani/peternak pengaruh mata uang dolar
14	Belum optimalnya pengawasan produk hasil ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
15	Masih kurangnya obat-obatan hewan baik jenis maupun jumlahnya
16	Kurangnya peralatan laboratorium dan kesehatan hewan
17	Kurangnya tenaga petugas pemeriksa daging untuk Rumah Potong Hewan
18	Jumlah dokter hewan sangat terbatas

Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Isu Strategis
1	Penerapan konsumsi pangan secara Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman belum optimal
2	Inovasi sistem pertanian termasuk peternakan dan Kesehatan hewan (teknologi produksi, pengolahan, Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian dan Pemasaran) belum optimal
3	Inovasi sistem perikanan (teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran) belum optimal

Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indek Gini	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri	Indeks Ketahanan Pangan	80,64	80,74	80,84	80,94	81,04

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,4	95,5	95,6	95,8	95,8
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	1,1	1,2	1,25	1,3	1,35
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Peningkatan produktivitas pertanian (ton/ha)	6,9 ton/ha	7,21 ton/Ha	7 ton/Ha	-	-
		Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	1,1	1,1	1,12	1,14	1,16
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1,2	1,21	1,214	1,216	1,221
5	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	-	80,01 skor	-	-

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi		
					Tahun 1 / 2020		Tahun 2 / 2021			Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah							
					Targ et	pendana an (Rp)	Targ et	pendana an (Rp)		Targ et	pendana an (Rp)	Targ et	pendana an (Rp)	Targ et	pendana an (Rp)	Targ et	pendana an (Rp)						
2020	2021	2022	PERM ENDA GRI BARU																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
URUSAN PANGAN											718.143.250		1.499.548.000		1.270.000.000		419.987.000		644.000.000		3.833.535.000		
	Meningkatnya Akses Pangan dan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (95,4; 95,5; 95,6; 95,8; 95,8)			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan			95,6	95,6	718.143.250												
					Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah produksi pangan hasil pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (kg)			1700	1700	248.923.500												
					Kegiatan Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Jumlah dokumen ketersediaan dan kerawanan pangan (dokume			3	3	28.997.500												

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							Kegiatan Promosi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, Sehat dan Aman	Jumlah menu konsumsi olahan pangan yang tercipta (produk)				20	20	129.493.250												
							Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan	Persentase sampel pangan segar dan olahan aman dikonsumsi (%)				86,2	86,2	185.977.000												
							Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah dokumen informasi harga, pasokan dan akses pangan (dokumen)				4	4	68.026.000												
							Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah cadangan pangan daerah dan masyarakat (ton)				120	120	56.726.000												
	Meningkatnya Akses Pangan dan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (95,4; 95,5; 95,6; 95,8; 95,8)	2	0	0	3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Angka Kecukupan Energi (%)	Prosentase Angka Kecukupan Energi (%)		100			100	1.287.926.000	100	1.095.000.000	100	289.962.000	100	468.000.000	100	3.140.888.000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2	0	0	2	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Ketersediaan Pangan Utama (ton) / 16200	Prosentase Ketersediaan Pangan utama (%)		16200			16200	309.866.000	100	300.000.000	100	166.457.000	100	225.000.000	100	1.001.323.000		
			2	0	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Jumlah Dokumen (Prog nosa Panel Harga dan Neraca Bahan Pangan) / 2	Jumlah Dokumen (NBM, Prog nosa Kebutuhan, Neraca Pangan dan Strategis)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (laporan)	2			2	55.050.000	3	60.000.000	3	16.713.500	3	30.000.000	3	161.763.500		
			2	0	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Produksi Pangan Hasil Pekarangan/ Kawasan Rum	Tertaninnya Kerawanan Pangan (kelompok)	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (laporan)	2000			2000	172.816.000	27	180.000.000	1	117.252.000	1	150.000.000	1	620.068.000		

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
								ah Pang an Lest ari (kg) / 2000																				
			2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pemantau an Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Jum lah Doku ume n stok paso kan dan harg a pang an (Ting kat grosi r, Ting kat ecer an, Ting kat prod usen , Reka pitul asi)	Jumla h Doku men stok pasoka n dan harga panga n (Tingk at grosir, Tingka t eceran , Tingka t produs en, Rekapi tulasi)	Pemanta uan Stok, pasokan dan Harga pangan (dokume n)	4			4	82.000.0 00	4	60.000.0 00	4	32.491.5 00	4	45.000.0 00	4	219.491. 500			
			2	0	0	2	0	Kegiatan Pelaksana an Pencapaia n Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukup an Gizi		Angka Kecu kupa n Ener gi / AKE (kkal/ /kap ita)	Angka Kecuk upan Energi / AKE (kkal/ kapita)		2100			2100	978.060. 000	2100	795.000. 000	2100	123.505. 000	2100	243.000. 000	2100	2.139.56 5.000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	2			2	55.050.000	2	45.000.000	1	24.855.000	1	38.000.000	1	162.905.000		
			2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Produk Pangan Lokal yang bergizi	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Produk Pangan Lokal yang bergizi dan seimbang (kali)	3			3	854.584.000	2	700.000.000	3	98.650.000	3	150.000.000	3	1.803.234.000		

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
								dan seim- bang (kali)																			
			2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantau- an dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		Jum- lah koor- dina- si penc- apai- an targe- t kons- umsi pang- an perk- apita per tahu- n	Jumla- h koordi- nasi penc- apaian target konsu- msi panga- n perk- apita per tahu- n	Jumlah Koordina- si dan Sinkroni- sasi Pemanta- uan dan Evaluasi Konsum- si Per Kapita Per Tahun (laporan)	1				1	68.426.0 00	50.000.0 00	0		1	55.000.0 00	1	173.426. 000		
	Meningk- atnya Akses Pangan dan Diversifi- kasi Pangan Masyara- kat	Skor Pola Pangan Harapan (95,4; 95,5; 95,6; 95,8; 95,8)	2	0	0			Program Penangan- an kerawana- n Pangan		Prose- ntase Daera- h Rentan dan Rawan Panga- n (%)								25%	43.842. 500	22%	45.000. 000		88.842. 500				
			2	0	0	2	0	Kegiatan Penyusun- an Peta kerentana- n dan Ketahanan pangan Kecamata- n		Tersed- ianya Peta Ketaha- nan Panga- n dan Kerent- anan Panga- n (doku- men)								1	43.842.5 00	1	45.000.0 00	1	88.842.5 00				

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2	0	0	2	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan											1	43.842.500	1	45.000.000	1	88.842.500		
	Meningkatnya Akses Pangan dan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (95,4; 95,5; 95,6; 95,8; 95,8)	2	0	0	2		Program Pengawasan Keamanan Pangan			80				211.622.000	80	175.000.000	80	86.182.500	80	131.000.000	80	603.804.500			
			2	0	0	2		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota			8				211.622.000	8	175.000.000	8	86.182.500	8	131.000.000	8	603.804.500			
								Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar (lokasi)																		
								Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar (lokasi)																		

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
			2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota		Jumlah Peserta Penguatan Kelembagaan (orang)	Jumlah Peserta Penguatan Kelembagaan (orang)	450			180	128.033.000	200	100.000.000	1	25139.500	1	70.000.000	1	323.172.500											
			2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Sampel pangan segar asal tumbuhan yang terpelembaga (sampel)	Jumlah Sampel pangan segar asal tumbuhan yang terpelembaga (sampel)	45		45	83.589.000	45	75.000.000	1	61.043.000	1	61.000.000	1	280.632.000												
URUSAN PERIKANAN																																			
	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi (1,1 ; 1,2 ; 1,25 ; 1,3 ; 1,35)						Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan (%)			1	1																						
								Kegiatan Pendampingan, Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap			320	320	412.505.000																					

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							Budidaya Perikanan	(ton)																		
							Kegiatan Peningkatan Mutu, Pengolahan dan Promosi Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)			15,25	15,25	99.278.300													
	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi (1,1 ; 1,2 ; 1,25 ; 1,3 ; 1,35)	3	2	0	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)		277		277	296.130.000	280	395.000.000	285	159.900.000	290	235.500.000	290	1.086.530.000				
			3	2	0	2	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budi daya dan Tangkap (ton/tahun)			378		378	243.130.000	-	-	-	-	-	-	-	378	243.130.000			
			3	2	0	2	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan (orang)			180		180	243.130.000	-	-	-	-	-	-	-	180	243.130.000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3	2	0	2	n dan Pelatihan				245				245	53.000.000	245	395.000.000	250	159.900.000	260	235.500.000	260	843.400.000		
				5	4	4	Kegiatan Pengelolaa n Pembudid ayaan Ikan		Jum lah pem budi daya ikan yang mem perol eh kegi atan pem berd ayaa n (pen didik an dan pelat ihan /pen yulu han dan pend ampi ngan /ke mitr aan usah a/ke mud ahan akse s iptek dan infor masi /dan peng uata n kele mba gaan) (RTP																	

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3	2	0	2	0)																	
			3	2	0	2	0				2			2	53.000.000	2	150.000.000	0	0	1	50.000.000	1	253.000.000			
			3	2	0	2	0				4			-	-	4	20.000.000	3	20.000.000	4	30.000.000	4	70.000.000			
			3	2	0	2	0		-		3			-	-	3	225.000.000	100	139.900.000	120	155.500.000	120	520.400			
	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya	3	2	0	2	0		-		89			-	-	89	80.000.000	89	35.000.000	89	41.000.000	89	156.000.000			
			3	2	0	2	0		-		89			-	-	89	80.000.000	89	35.000.000	89	41.000.000	89	156.000.000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	an	Produksi (1,1 ; 1,2 ; 1,25 ; 1,3 ; 1,35)							ap (ton)																	
			3	2	0	2		-	Jumla h nelaya n/usa ha perika nan tangka p yang memp eroleh kegiat an pembe rdayaa n (pendi dikan dan pelatih an/pe nyulu han dan penda mping an/ke mitraa n usaha /kemu dahan akses iptek dan inform asi/da n pengu atan kelem bagaa n)		435				-		435	80.000.0 00	435	35.000.0 00	435	41.000.0 00	435	156.000. 000		

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3	2	0	2	0		-	Jumlah dokumen Penyuluhan, Monitoring Perikanan Tangkap	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten /Kota	2			-	-	2	80.000.000	2	35.000.000	2	41.000.000	2	156.000.000		
	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi (1,1 ; 1,2 ; 1,25 ; 1,3 ; 1,35)	3	2	0	2	0			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan							15,6	459.215.600	16	422.732.000	16,1	214.032.000	16,1	341.000.000	16,1	1.436.979.600
			3	2	0	2	0			Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah pengolahan dan pemasar ikan yang dibangun (orang)	50					50	459.215.600	50	141.540.000	50	67.141.000	50	75.000.000	50	742.896.600

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3	2	0	2	0		n Skala Mikro dan Kecil		488			488	459.215.600	3	141.540.000	30	67.141.000	30	75.000.000	30	142.000.000			
									ng)																	
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota																	
									Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan (orang) / 488																	
									Jumlah dokumen penyuluhan, pembinaan dan monitoring pengolahan dan pemasaran (dokumen)																	
									Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko (unit usaha)																	
			3	2	0	2	0		Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		24			-	-	24	281.192.000	26	146.891.000	26	266.000.000	26	694.083.000			
									Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga																	

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3	2	0	2	0		(ton)																	
			5	6	0	2	0		Jumlah pelaku usaha perika nan yang menda pat fasilita s (UMK M)	Jumlah Pelaku Usaha Perikana n Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupat en/Kota yang Terfasilit asi	10			-	-	10	281.192. 000	12	146.891. 000	14	266.000. 000	14	290.000. 000			
URUSAN PERTANIAN													2.984.4 31.175		2.419.0 04.000		2.810.2 59.000		2.876.6 52.000		7.129.0 00.000		15.184. 915.000			
	Meningk atkan Kesejah teraan Petani	Rasio Pendapata n Petani dengan Biaya Produksi (1,1 ; 1,1 ; 1,12 ; 1,14 ;1,16)							Program Peningkat an Kesejahter aan Petani	Peningk atan Produkti vitas pertania n	7,21	7,21	2.598.7 09.515													
									Kegiatan Peningkat an Produktivi tas Pertanian	Produkti vitas padi tanaman pangan dan hortikult ura (ton/ha)	7,21	7,21	997.704. 790													
									Kegiatan Peningkat an Mutu dan Pemasara n Hasil Pertanian	Jumlah produk hasil pertania n yang dikemas dan dipasark an (produk)	1	1	62.444.7 60													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Kegiatan Dukungan Pembiayaan Pertanian	Persentase cakupan petani penerima subsidi pupuk dan AUTP (%)				80	80	1.235.224.285											
					Kegiatan Penerapan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang menerapkan sistem budidaya tanaman ramah lingkungan (ha)				10	10	177.147.240											
					Kegiatan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian	Jumlah petani yang mendapatkan pelatihan/pembinaan/penyuluhan (orang)				100	117	126.188.440											
	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi (1,1 ; 1,1 ; 1,12 ; 1,14 ;1,16)			Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha peternakan (%)				2	2	385.721.660											
					Kegiatan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah produksi peternakan/daging (ton)				1800	1800	87.568.920											

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
							Kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produk hasil peternakan yang dipasarkan (produk)				20	20	71.121.920														
							Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak/ Hewan Peliharaan	Jumlah ternak dan hewan peliharaan yang terlayani / diperiksa (ekor)				3000	3000	136.373.100														
							Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase sampel bahan pangan asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal; %)				94,75	94,75	90.657.720														
	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi (1,1 ; 1,1 ; 1,12 ; 1,14 ;1,16)	3	2	0	7	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	50			50	1.608.737.600	55	1.781.771.600	60	2.000.624.000	65	2.871.000.000	65	8.262.133.200					

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3	2	0	2	Kegiatan Pengawasan Pengguna an Sarana Pertanian		Prosentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani (%)		50			50	1.350.937.600	75	1.581.771.600	75	1.930.184.000	80	2.771.000.000	80	7.633.893.200			
			3	2	0	2	Sub Kegiatan Pengawasan Pengguna an Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas , Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah monitoring dan evaluasi pengawasan penggunaan sarana pertanian (lokasi)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	39			39	326.588.200	39	50.000.000	1	23.550.000	1	26.000.000	39	426.138.200			
			3	2	0	2	Sub Kegiatan Pendampingan Pengguna an Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah sarana pertanian yang diberikan (paket)	Jumlah Pemandangan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1			1	1.024.349.400	2	1.531.771.600	1	1.906.634.000	1	2.745.000.000	2	7.207.755.000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3	2	0	2	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten /Kota		Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik (%)		75			75	257.800.000	75	200.000.000	75	70.440.000	75	100.000.000	75	628.240.000			
			3	2	0	2	0	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Jumlah sampel Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman yang diawasi (lokasi)	12			12	257.800.000	12	200.000.000	12	70.440.000	12	100.000.000	12	628.240.000			
	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi (1,1 ; 1,1 ; 1,12 ; 1,14 ;1,16)	3	2	0	7	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Pengembangan Prasarana yang berfungsi dengan baik (%)		50			50	29.653.000	50	542.900.000	75	233.727.000	100	3.420.000.000	100	4.226.280.000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								i deng an baik (%)																		
			3	2	0	2	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian (%)	Prosentase pengembangan prasarana pertanian (%)		50			50	29.653.000	-	-	75	16.138.000	100	320.000.000	100	365.791.000			
			3	2	0	2	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Penyusunan Laporan/Peta / Peraturan Daerah tentang LP2B, KP2B dan LCP2B Kota Madiun (dokumen)	Penyusunan Laporan/Peta / Peraturan Daerah tentang LP2B, KP2B dan LCP2B Kota Madiun (dokumen)	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (dokumen)	1			1	29.653.000	0	0	0	0	1	300.000.000	1	329.653.000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3	2	0	2	0			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian (laporan)	1			1	29.653.000	0	0	1	16.138.000	1	20.000.000	1	65.791.000			
			3	2	0	2	0			Prosentase Prasarana Pertanian yang Terbangun / Rehabilitasi / Dipelihara (%)	25			0	-	25	542.900.000	25	217.589.000	25	3.100.000	25	3.860.489.000			
			3	2	0	2	0			Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (unit)	0			0	-	0	-	0	-	2	1.000.000	2	1.000.000			
			3	2	0	2	0			Jumlah JUT Dibangun/ Direhabilitasi / dipelihara (unit)	0			0	-	1	542.900.000	2	52.815.000	2	1.500.000	2	2.095.715.000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3	2	0	2	0	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan			Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)	0			0	-	1	-	1	8.009.000	1	300.000.000	1	308.009.000		
			3	2	0	2	0	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	0			0	-	0	-	2	156.765.000	2	300.000.000	3	456.765.000		
	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi (1,206 1,21 1,214 1,216 1,221)	3	2	0			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				10			10	478.050.000	10	175.000.000	10	260.856.000	10	310.000.000	10	1.173.906.000		
			3	2	0	2	0	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupa			Prosentase Keberhasilan Pelayanan	80			80	210.500.000	80	100.000.000	80	155.797.000	80	300.000.000	80	621.297.000		

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							n dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten Kota		Pelaksanaan Kesehatan Hewan (%)																	
			3	2	0	2	0	Sub Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah Hewan yang Menda pat Pelayan Kesehatan Hewan (Ekor)	3250			3250	210.500.000	2850	100.000.000	4	155.797.000	4	155.000.000	4	621.297.000			
			3	2	0	2	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten /Kota		Jenis Pelayanan yang direkomendasikan (izin medik veteriner dan izin paramedik veteriner) (jenis)		1			1	105.850.000	0	0	1	15.000.000	1	50.000.000	1	120.850.000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			3	2	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Dok ume n nask ah akad emik /rap erda /per da/p erwa l terk ait pela yana n jasa medi k veter iner (dok ume n)	Doku men naska h akade mik/ra perda/ perda/ perwal terkait pelaya nan jasa medik veterin er (doku men)	Jumlah pelayana n jasa medik veteriner (laporan)	1			1	105.850. 000	0	0	1	15.000.0 00	1	50.000.0 00	1	120.850. 000		
			3	2	0	2	0	Kegiatan Penerapan dan Pengawas an Persyarata n Teknis Kesehataka n Masyarakat Veteriner		Prosen tase Jumla h sampil Produ k asal Hewan yang Aman dikons umsi (%)	Prosen tase Jumla h sampil Produ k asal Hewan yang Aman dikons umsi (%)	80			80	161.700. 000	80	75.000.0 00	80	90.059.0 00	80	105.000. 000	80	431.759. 000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3	2	0	2	0	Sub Kegiatan Pendampi ngan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			Jumla h Unit Usaha Hewan dan Produ k Hewan yang menda pat penda mping an (unit)								10	25.000.0 00	10	25.000.0 00	10	50.000.0 00		
			3	2	0	2	0	Sub Kegiatan Pengawas an peredaran hewan dan produk Hewan		Jum lah sam pel prod uk asal hewan yang diperik sa (sampe l) 200	200			200	161.700. 000	200	75.000.0 00	10	65.059.0 00	10	80.000.0 00	10	381.759. 000			
	Meningk atkan Kesejah teraan Petani	Rasio Pendapata n Petani dengan Biaya Produksi (1,1 ; 1,1 ; 1,12 ; 1,14 ;1,16)	3	2	0	5		Program Pengendal ian dan Penanggul angan Bencana Pertanian		Prose ntase lahan aman benca na pertan ian (%)	70			70	171.200 .400	72	111.750 .000	74	112.370 .000	76	150.000 .000	76	543.320 .400			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3	2	0	2	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Luas lahan aman bencana pertanian (ha/th)		1750			1750	171.200.400	1750	111.750.000	1900	112.370.000	2000	150.000.000	2000	545.320.400			
			3	2	0	2	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		Luas lahan yang aman dari gangguan OPT dengan penerapan peneyrapa n budi daya ramah lingkungan (ha)		10			10	171.200.400	10	111.750.000	50	112.370.000	50	150.000.000	50	545.320.400			
	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produktivitas Pertanian (7,20 7,21 7,22 7,23 7,24)	3	2	0	6	Program Perizinan usaha Pertanian		-						-	10	50.000.000	12	33.600.000	15	70.000.000	15	153.600.000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3	2	0	2	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten /Kota		-	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten (Jenis)					-	2	50.000.000	2	33.600.000	2	70.000.000	2	153.600.000			
			3	2	0	2	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		-	Jumlah petani yang produksinya lolos uji layak mutu (orang)	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (dokumen)				-	4	50.000.000	8	33.600.000	12	70.000.000	12	153.600.000			
	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi (1,1 ; 1,1 ; 1,12 ; 1,14 ;1,16)	3	2	0		Program Penyuluhan Pertanian		Prosentase Jumlah SDM Pertanian terlatih (%)	Prosentase Jumlah SDM Pertanian terlatih (%)	15			15	131.363.000	20	148.837.400	20	235.475.000	20	308.000.000	20	823.675.400			
			3	2	0	2	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah SDM Pertanian Terlatih (orang)	Jumlah SDM Pertanian Terlatih (orang)	135			135	131.363.000	78	148.837.400	200	235.475.000	200	308.000.000	200	823.675.400			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			3	2	0	2	0		Doku men penilai an kelas kelom pok tani dan gapokt an (doku men)	Jumlah Kelemba gaan Petani di Kecamat an dan Desa yang Ditingka tkan Kapasita snya (unit)	1			1	131.363. 000	0		3	138.975. 000	3	158.000. 000	3	428.338. 000			
			3	2	0	2	0		-	Jumla h Sarana dan Prasar ana Penyulu han Pertania n yang disedia kan dan dimanf aatkan (paket)	0			0	-	1	42.905.0 00	2	96.500.0 00	2	150.000. 000	2	289.405. 000			
			3	2	0	2	0		-	Pelatih an dan sekola h lapang yang diselen ggarak an (jenis)	0			0	-	1	105.932. 400	-	0	-	0	1	105.932. 400			
RUTIN														1.211.6 14.860		5.287.7 01.000		5.399.9 79.000		7.246.3 50.000		6.385.7 74.000		24.319. 804.000		

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran (%)				100	100	883.751.860												
							Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran (jenis)				20	20	764.021.860												
							Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah petugas yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi keluar daerah/ laporan hasil yang disusun (laporan)				31	31	119.730.000												
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik (%)				100	100	191.583.000												
							Kegiatan	Jumlah				2	2													

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	gedung dan bangunan yang dipelihara (unit)						120.000.000														
							Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)				22	22	43.200.000														
							Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara (unit)				35	35	28.383.000														
							Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu (%)				100	100	136.280.000														
							Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun (dokumen)				16	16	136.280.000														

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2	0	0		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A			A	5.191.134.000	A	5.333.479.000	A	6.302.856.900	A	8.036.000.000	A	24.863.472.900			
			2	0	0	2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100			100	125.500.000	100	136.000.000	100	102.025.000	100	133.000.000	100	496.525.000			
			2	0	0	2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah (dokumen)	20			20	125.500.000											

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								ngka t Daer ah																		
			2	0	0	2	0		Jumla h Doku men Perenc anaan, Penge ndalia n dan Evalua si Perang kat Daera h	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokume n)	20					20	136.000. 000	8	102.025. 500	8	133.000. 000	8	410.000. 000			
			2	0	0	2	0		Persenta se Pemen uhan Doku men Admini strasi keuan gan (%)	Persen tase Pemen uhan Doku men Admini strasi keuan gan (%)	100			100	3.459.33 0.000	100	3.892.00 0.000	100	4.975.91 8.000	100	5.150.00 0.000	100	17.477.2 48.000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								(%)																		
			2	0	0	2	0				100	-	-	100	3.459.33 0.000	100	3.892.00 0.000	27	4.975.91 8.000	27	5.150.00 0.000	100	17.477.2 48.000			
			2	0	0	2	0				100	-	-	-	-	100	0	100	44.298.5 00	100	55.000.0 00	100	99.298.5 00			
			2	0	0	2	0				0	-	-	-	-	-	-	3	44.298.5 00	3	55.000.0 00	6	99.298.5 00			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2	0	0	2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum (%)		100			100	135.243.000	100	181.979.000	100	883.667.400	100	1.073.000.000	100	2.273.889.400			
			2	0	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	1							19	627.605.500	19	700.000.000	19	1.327.605.500			
			2	0	0	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)								12	18.541.900	12	23.000.000	12	41.541.900			
			2	0	0	2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (%)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	100			100	135.243.000	100	181.979.000	12	237.520.000	12	350.000.000	12	904.742.000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2	0	0	2	Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah		Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintahan Daerah (%)		100			100	178.000.000	100	0	100	0	100	1.625.000.000	100	1.803.000.000			
			2	0	0	2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan			Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)	100			0	0	0	0	0	0	1	525.000.000	1	525.000.000			
			2	0	0	2	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase pemenuhan gedung yang layak digunakan	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	100			100	178.000.000	0	0	0	0	1	150.000.000	100	328.000.000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								n (%)																		
			2	0	0	2	0				100			0	0	0	0	0	0	1	525.000.000	1	525.000.000			
			2	0	0	2	1		Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor (%)	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor (%)	100			100	96.567.000	100	6.500.000	1	5.434.000	8	300.000.000	8	408.501.000			
			2	0	0	2			Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100			100	968.061.000	100	968.350.000	0	0	0	0	100	1.936.411.000			

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Pemenuhan peralatan / perengkapan / perlengkapan kantor yang representatif (%)	Persentase Pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif (%)	100			100	968.061.000	100	968.350.000	0	0	0	0	100	1.936.411.000		
			2	0	0	2	0	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan (%)	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan (%)	100			100	325.000.000	100	155.150.000	100	291.517.000	100	1.000.000.000	100	1.771.667.000		

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Persentase Kendaraan Dinas Perorangan / jabatan yang layak digunakan (%)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	100			100	55.500.00	100	65.000.00	34	75.397.00	35	110.000.000	100	305.897.000		
			2	0	0	2	0	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperlihara (unit)	0			0	0	0	0	15	9.497.500	15	15.000.000	15	24.497.500		
			2	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Persentase gedung yang layak digunakan (%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	100			100	219.500.000	100	45.650.000	1	171.952.000	3	800.000.000	3	1.237.102.000		

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
			2	0	0	2	1	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya		Persentase Sarana Prasarana Gedung yang layak digunakan yang layak digunakan (%)	Persentase Sarana Prasarana Gedung yang layak digunakan (%)	100			100	50.000.000	100	44.500.000	122	34.670.500	75	75.000.000	75	204.170.500							
JUMLAH TOTAL														5.425.972.585			9.865.031.600			10.317.970.000			10.008.430.900			16.426.500.000			46.561.432.500		

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Skor Pola Pangan Harapan	-	95,4	95,5	95,6	95,8	95,8	95,8
2	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	-	1,1	1,2	1,25	1,3	1,35	1,35
3	Peningkatan produktivitas pertanian (ton/ha)	7,21 ton/Ha	6,9 ton/ha	7,21 ton/Ha	7 ton/Ha	-	-	7 ton/Ha
4	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1,205	1,206	1,21	1,214	1,216	1,221	1,221
5	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi			1,1	1,12	1,14	1,16	1,16

Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bidang Urusan Pangan									
1	Indeks Ketahanan Pangan	-	80,64	80,74	80,84	80,94	81,04	81,04	Indikator Tujuan PD
2	Skor Pola Pangan Harapan	-	95,4	95,5	95,6	95,8	95,8	95,8	Indikator Sasaran PD
3	Persentase Angka Kecukupan Energi (%)	0	0	100	100	100	100	100	Indikator Program PD
4	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	0	0	80	80	80	80	80	Indikator Program PD
5	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	-	-	-	-	25%	22%	22%	Indikator Program PD
6	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	-	138,56	100	100	100	100	100	Lppd
7	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	-	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
8	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	-	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
9	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	-	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
10	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	-	-	1	1	1	1	1	Lppd
12	Tertanganinya kerawanan pangan	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
13	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	-	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
14	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
15	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	-	1,38	-	-	-	-	1,38	Indikator Lama
16	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama	-	0,18	-	-	-	-	0,18	Indikator Lama
Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan									
1	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	-	1,1	1,2	1,25	1,3	1,35	1,35	Indikator Sasaran PD
2	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	274,8	275,3	277	280	285	290	290	Indikator Program PD
3	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/tahun)	15,4	15,5	15,6	16	16,1	16,5	16,5	Indikator Program PD
4	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	-	-	-	89	89	89	89	Indikator Program PD
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: <i>one data</i> Kementerian Kelautan dan Perikanan)	357,7 ton	362,9 ton	365	369	375	381	381	Lppd
6	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (Rumah Tangga Produsen)	-	435 RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	Lppd
7	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Jumlah Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
9	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	-	90 Orang	0	245	250	260	260	Lppd
10	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	-	477.406 ekor	477.406 ekor	497.400 ekor	517.400 ekor	537.406 ekor	537.406 ekor	Lppd
11	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	-	-	5%	-	-	-	5%	Indikator Program PD
12	Persentase peningkatan Pendapatan pelaku usaha perikanan	-	1%	-	-	-	-	1%	Indikator Lama
Bidang Urusan Pertanian									
1	Peningkatan produktivitas pertanian (ton/ha)	7,21 ton/Ha	6,9 ton/ha	7,21 ton/Ha	7 ton/Ha	-	-	7 ton/Ha	Indikator Sasaran PD
2	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1,205	1,206	1,21	1,214	1,216	1,221	1,221	Indikator Sasaran PD
3	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi			1,1	1,12	1,14	1,16	1,16	Indikator Sasaran PD
4	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	-	-	50	55	60	65	65	Indikator Program PD
5	Persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	-	-	50	50	75	100	100	Indikator Program PD
6	Persentase Jumlah Hewan dan Produk asal Hewan yang Terawasi (%)	-	-	75%	75%			75%	Indikator Program PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Jumlah Menular (%)	-	50,86	10	10	10	10	10	Indikator Program PD
8	Persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	-	-	70	72	74	76	76	Indikator Program PD
9	Persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	-	-		10	12	15	15	Indikator Program PD
10	Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia Pertanian Terlatih (%)	-	-	15	20	20	20	20	Indikator Program PD
11	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Nilai sama dengan indikator no.1							Lppd
12	Sarana pertanian yang diberikan	-	13 jenis	1	2	2	2	7	Lppd
13	Prasarana pertanian yang digunakan	-	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	Lppd
14	Penerbitan izin usaha pertanian	-	-	0	2	2	2	2	Lppd
15	Persentase prasarana yang digunakan	-	66.7%	75	75	75	75	75	Lppd
16	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kabupaten/kota	-	-	-	50	50	50	50	Lppd
17	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (%)	-	50,86	50	50	50	50	50	Lppd
18	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	-	2%	-	-	-	-	2%	Indikator Lama
19	Nilai Tukar Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan	-	1,389	-	-	-	-	1,389	Indikator Lama

S. INSPEKTORAT

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024

Permasalahan Inspektorat

No	Permasalahan
1	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah masih belum optimal
2	Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan

Isu Strategis Inspektorat

No	Isu Strategis
1	Bahwa titik berat pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat tidak hanya melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah serta memperbaiki kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Namun juga sebagai <i>quality assurance</i> yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi;
2	Mengawal siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Dengan cara melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, kontrak yang bernilai strategis sampai dengan reviu laporan keuangan dan laporan kinerja;
3	Merubah metodologi pengawasan, dari yang sifatnya reguler atau operasional, menjadi pengawasan yang sifatnya kinerja dan terfokus;
4	Memposisikan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagai mitra bagi perangkat daerah lainnya. Paradigma lama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagai pengawas yang identik dengan mencari kesalahan sudah harus ditinggalkan dan menjadi seorang pengawas yang mampu memberikan jasa konsultasi dan penyelesaian masalah bagi perangkat daerah lainnya;
5	Selanjutnya sesuai Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat serta Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung Inspektorat

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis <i>smart cities</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tujuan Inspektorat

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Yang Akuntabel dan Profesional	Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
		Level Maturitas SPIP Kota Madiun	-	-	3 indeks	3 indeks	3 indeks

Sasaran Inspektorat

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		25	25	26	27
2	Efektivitas Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Pemerintahan Saerah	persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	91%	92%	93%	-	-
		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	2+	2+	2+	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Laporan keuangan tersampaikan tepat waktu			100%	100%	100%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat			89 indeks	90 indeks	91 indeks
		Nilai Survey Kepuasan atas Kinerja Inspektorat			4.15	4.2	4.25
		Persentase Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang terselesaikan dengan cepat dan tepat			100%	100%	100%
		Persentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang bersertifikat dan profesional			100%	100%	100%
		Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu			100%	100%	100%
		Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pengawasan yang disusun sesuai dengan Etika dan Profesionalisme			100%	-	-
		Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Administrasi Pengawasan yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu			100%	-	-
		Persentase laporan tindak lanjut hasil pengawasan			100%	100%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		internal dan eksternal yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu					
		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Ketaatan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja perangkat daerah			60%	-	-
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah			60%	-	-
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja keuangan daerah			60%	-	-
		Persentase rekomendasi hasil reuiu rencana keuangan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah			60%	-	-
		Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun			71 nilai	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Nilai rata - rata evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat minimal dalam kategori Baik pada perangkat daerah Kota Madiun			76,01	79,01	80,01
		Penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi			2.00	2.50	3.00
		Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			2.00	2.50	3.00
		Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diusulkan untuk mendapatkan predikat menuju WBK			1 unit	1 unit	1 unit
		Persentase rekomendasi rencana aksi hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah			60%	65%	70%
		Persentase rekomendasi hasil reuiu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan			60%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kinerja perangkat daerah					
		Indeks persepsi pegawai Inspektorat atas Kepuasan Kinerja Inspektorat Kota Madiun			3.50	3.75	4.00
		Persentase realisasi dukungan layanan manajemen pengawasan internal			60%	70%	80%
		Persentase realisasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Madiun			60%	70%	80%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Tujuan)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (Tahun 2020)		Tahun 2 (Tahun 2021)		Tahun 3 (Tahun 2022)		Tahun 4 (Tahun 2023)		Tahun 5 (Tahun 2024)				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Meningkatnya Kinerja Inspektorat			Indeks RB	25,00	25,00		25,00		25,00		26,00		27,00		27,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Baik	83,40	25,00	5.571.621,80	83,45	6.773.789,00	83,47	9.516.293,20	83,50	10.296.446,04	84,00	10.217.960,26	84,00		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal kategori baik	100%	100%	99.288,00	100%	107.375,00	100%	85.105,00	100%	1.877,03	100%	2.000,00	100%	-	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 dok	12 dok	99.288,00	10 dok	107.375,00	10 dok	85.105,00	10 dok	1.877,03	10 dok	2.000,00	52 dok		
			Administrasi Keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	100%	4.723.068,80	100%	5.818.408,00	100%	7.773.908,00	100%	9.171.965,99	100%	9.300.000,00	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	4.723.068,80	100%	5.818.408,00	100%	7.773.908,00	100%	9.171.965,99	100%	9.300.000,00	100%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Administrasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85	89	699.538,00	89	783.114,00	90	837.707,00	90	498.116,00	90	535.960,26	91		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 jenis	8 jenis	455.849,00	100%	544.401,00	100%	625.551,25	100%	285.960,26	100%	285.960,26	100%		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 kali	45 kali	243.689,00	65 kali	238.713,00	65 kali	212.155,75	65 kali	212.155,75	65 kali	250.000,00	65 kali		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	-	-	100%	-	100%	540.822,21	100%	573.068,00	100%	300.000,00			
			Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 jenis	-	-	0	-	1 jenis	92.301,00	1 jenis	123.068,00	-	-	1 jenis		
			Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 jenis	-	-	0	-	4 jenis	448.521,21	3 jenis	450.000,00	2 jenis	300.000	10 jenis		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	100%	49.727,00	100%	64.892,00	100%	278.751,00	100%	51.419,02	100%	80.000,00			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 paket	1 paket	15.866,00	1 paket	24.912,55	1 paket	22.700,00	1 paket	22.700,00	1 paket	25.000,00	1 paket		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	5.000,00	1 unit	4.978,65	1 unit	233.250,00	1 unit	13.719,02	1 unit	20.000,00	1 unit				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	5 jenis	5 jenis	28.861,00	5 jenis	35.000,80	5 jenis	22.801,00	5 jenis	15.000,00	5 jenis	35.000,00	5 jenis				
Meningkatnya Pengendalian & Pengawasan pengelolaan keuangan	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku			Level Maturitas SPIP Kota Madiun	2			3		3		3		3		3		Kota Madiun		
				Prosentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	91%	91%		92%		93%		94%		95%		95%				
				Level Kapabilitas APIP	2	2		2+		2+		3		3		3		3		
				Penilaian Mandiri SPIP		-		-		3,2		3,4		3,4		3,4		3,4		
				Laporan Keuangan tersampaikan tepat waktu		-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
				Nilai IKM Inspektorat		-		-		89 indek		90 indeks		91 indeks		91 indeks		91 indeks		
				Nilai Survey Kepuasan atas Kinerja Inspektorat		-		-		4,15		4,20		4,25		4,25		4,25		
				Persentase Tindak Lanjut pengaduan masyarakat yang terselesaikan dengan cepat dan tepat		-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		-		-		100%		100%		100%		100%		100%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				yang bersertifikat dan profesional														
				Porsentase Laporan BMD yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu		-		-		100%		100%		100%		100%		
				Persentase rumusan kebijakan Penyelenggaraan pengawasan yang disusun sesuai dengan Etika dan profesionalisme		-		-		100%		-		-		100%		
				Persentase laporan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu		-		-		100%		-		-		100%		
				Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan ketaatan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja perangkat daerah		-		-		60%		-		-		60%		
				Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan ketaatan yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah		-		-		60%		-		-		60%		
				Persentase rekomendasi		-		-		60%		-		-		60%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				hasil pengawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah														
				Persentase rekomendasi hasil reuiu rencana keuangan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah		-		-		60%		-		-		60%		
				Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun		-		-		71 nilai		-		-		71 nilai		
				Nilai rata-rata Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal dalam kategori Baik pada perangkat daerah Kota Madiun		-		-		76,01		79,01		80,01		80,01		
				Penilaian Mandiri maturitas SPIP terintegrasi		-		-		2,00		2,50		3,00		3,00		
				Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP		-		-		2,00		2,50		3,00		3,00		
				Jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diusulkan untuk mendapatkan		-		-		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				predikat menuju WBK														
				persentase Rekomendasi rencana aksi hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah		-		-		60%		-		-		60%		
				persentase Rekomendasi hasil revidi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah		-		-		60%		-		-		60%		
				Indeks Persepsi pegawai Inspektorat atas Kepuasan Kinerja Inspektorat Kota Madiun		-		-		3,50		3,75		4,00		4,00		
				Persentase realisasi dukungan layanan manajemen pengawasan internal		-		-		60%		70%		80%		80%		
			PROGRAM PENYELENGGA RAAAN PENGAWASAN	Prosentase OPD yang muturitas SPInya Level 3	25%	25%	360.653,00	30%	971.339,00	35%	1.237.019,00	40%	393.774,73	45%	433.152,20	45%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat Kota Madiun		17 dok	360.653,00	29 dok	639.241,00	29 dok	957.688,00	29 dok	373.737,43	29 dok	411.111,17	133 dok		
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	3 dok	50.041,60	3 dok	51.772,00	3 dok	51.772,00	3 dok	56.949,20	12 dok		
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	34 dok	12 dok	269.253,00	15 dok	438.147,06	15 dok	459.516,00	15 dok	145.854,87	15 dok	160.440,35	72 dok		
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	4 dok	15.779,94	4 dok	24.507,00	4 dok	24.507,00	4 dok	26.957,70	16 dok		
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Keuangan Pemerintah Daerah	5 dok	5 dok	91.400,00	3 dok	114.452,00	3 dok	402.728,00	3 dok	132.438,56	3 dok	145.682,42	17 dok		
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring TLHP BPK RI dan Tindak lanjut Hasil pemeriksaan APIP	-	-	-	4 dok	20.820,41	4 dok	19.165,00	4 dok	19.165,00	4 dok	21.081,50	16 dok		
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	-	-	-	1 dok	322.098,00	100%	279.331,00	100%	20.037,30	100%	22.041,03	100%		
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-	-	-	-	-	-	-	2dok	10.016,00	2 dok	11.017,60	4 dok		
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	-	-	-	1 dok	322.098,00	1 dok	279.331,00	1 dok	20.037,30	1 dok	22.041,03	4 dok		
			PROGRAM PERUMUSAN	Prosentase Dokumen	100%		386.950,00	100%	1.019.62	100%	1.138.997	100%	868.707,00	100%	955.577,70	100%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi					1,08		,00							
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	2 dok	2 dok	6.600,00	2 dok	3.696,00	2 dok	6.623,00	2 dok	6.623,00	2 dok	7.285,30	2 dok		
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang telah disusun	2 dok	2 dok	6.600,00	2 dok	3.696,00	2 rekom	6.623,00	2 rekom	6.623,00	2 rekom	7.285,30	10 dok		
			Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	5 dok	5 dok	380.350,00	6 dok	1.015.925,08	6 dok	1.132.374,00	6 dok	862.084,00	6 dok	948.292,40	100%		
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3 dok	3 dok	293.625,00	4 dok	425.529,08	34 OPD	466.539,00	34 OPD	196.249,00	34 OPD	215.873,90	15 dok		
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan korupsi	1 dok	1 dok	86.725,00	2 dok	590.396,00	3 keg	665.835,00	2 dok	665.835,00	2 dok	732.418,50	9 dok		

Indikator Kinerja Utama Inspektorat

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	-	91%	92%	93%	94%	95%	93%
2	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	-	2+	2+	2+	3	3	3
3	Laporan keuangan tersampaikan tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat	-	-	-	89 indeks	90 indeks	91 indeks	91 indeks
5	Nilai Survey Kepuasan atas Kinerja Inspektorat	-	-	-	4.15	4.2	4.25	4.25
6	Persentase Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang terselesaikan dengan cepat dan tepat	-	-	-	100%	100%	100%	100%
7	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikat dan profesional	-	-	-	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pengawasan yang disusun sesuai dengan Etika dan Profesionalisme	-	-	-	100%	-	-	100%
10	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Administrasi Pengawasan yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	-	-	-	100%	-	-	100%
11	Persentase laporan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	-	-	-	100%	-	-	100%
12	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Ketaatan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja perangkat daerah	-	-	-	60%	-	-	60%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	-	-	-	60%	-	-	60%
14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	-	-	-	60%	-	-	60%
15	Persentase rekomendasi hasil reuiu rencana keuangan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja keuangan daerah	-	-	-	60%	-	-	60%
16	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun	-	-	-	71 nilai	-	-	71 nilai
17	Nilai rata - rata evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat minimal dalam kategori Baik pada perangkat daerah Kota Madiun	-	-	-	76,01	79,01	80,01	80,01
18	Penilaian mandiri maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi	-	-	-	2.00	2.50	3.00	3.00
19	Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	-	-	-	2.0	2.50	3.00	3.00
20	Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diusulkan untuk mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
21	Persentase rekomendasi rencana aksi hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	-	-	-	60%	65%	70%	70%
22	Persentase rekomendasi hasil reuiu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	-	-	-	60%	-	-	60%
23	Indeks persepsi pegawai Inspektorat atas Kepuasan Kinerja Inspektorat Kota Madiun	-	-	-	3.50	3.75	4.00	4.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	Persentase realisasi dukungan layanan manajemen pengawasan internal	-	-	-	60%	70%	80%	80%
25	Persentase realisasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Madiun	-	-	-	60%	70%	80%	80%

Indikator Kinerja Kunci Inspektorat

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Madiun	2	2	3	3	-	-	3	Indikator Tujuan PD
2	Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	-	-	-	3.2	3.3	3.4	3.4	Indikator Tujuan PD
3	persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	-	91%	92%	93%	94%	95%	95%	Indikator Sasaran PD
4	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	-	2+	2+	2+	3	3	3	Indikator Sasaran PD
5	Laporan keuangan tersampaikan tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat	-	-	-	89 indeks	90 indeks	91 indeks	91 indeks	Indikator Sasaran PD
7	Nilai Survey Kepuasan atas Kinerja Inspektorat	-	-	-	4.15	4.2	4.25	4.25	Indikator Sasaran PD
8	Persentase Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang terselesaikan dengan cepat dan tepat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
9	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikat dan profesional	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1)
10	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pengawasan yang disusun sesuai dengan Etika dan Profesionalisme	-	-	-	100%	-	-	100%	Indikator Sasaran PD
12	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Administrasi Pengawasan yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	-	-	-	100%	-	-	100%	Indikator Sasaran PD
13	Persentase laporan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	-	-	-	100%	-	-	100%	Indikator Sasaran PD
14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Ketaatan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja perangkat daerah	-	-	-	60%			60%	Indikator Sasaran PD
15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	-	-	-	60%			60%	Indikator Sasaran PD
16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	-	-	-	60%			60%	Indikator Sasaran PD
17	Persentase rekomendasi hasil reuiu rencana keuangan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja keuangan daerah	-	-	-	60%			60%	Indikator Sasaran PD
18	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun	-	-	-	71 nilai	75 nilai	81 nilai	81 nilai	Indikator Sasaran PD
19	Nilai rata - rata evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat minimal dalam kategori Baik pada perangkat daerah Kota Madiun	-	-	-	76,01	79,01	80,01	80,01	Indikator Sasaran PD
20	Penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	-	-	-	2.00	2.50	3.00	3.00	Indikator Sasaran PD
21	Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	-	-	-	2.0	2.50	3.00	3.00	Indikator Sasaran PD
22	Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diusulkan untuk mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Indikator Sasaran PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1)
23	Persentase rekomendasi rencana aksi hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	-	-	-	60%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
24	Persentase rekomendasi hasil reuiu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	-	-	-	60%	-	-	60%	Indikator Sasaran PD
25	Indeks persepsi pegawai Inspektorat atas Kepuasan Kinerja Inspektorat Kota Madiun	-	-	-	3.50	3.75	4.00	4.00	Indikator Sasaran PD
26	Persentase realisasi dukungan layanan manajemen pengawasan internal	-	-	-	60%	70%	80%	80%	Indikator Sasaran PD
27	Persentase realisasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Madiun	-	-	-	60%	70%	80%	80%	Indikator Sasaran PD
28	persentase Organisasi Perangkat Daerah yang maturitas Satuan Pengawas Internal nya level 3	-	-	-	35%	40%	45%	45%	Indikator Program PD
29	persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
30	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	-	2	3	3	3	3	3	Lppd
31	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	-	2+	2+	2+	3	3	3	Lppd
32	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat	-	25 Orang	-	-	-	-	25 Orang	Indikator Lama
33	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang Terpenuhi	-	100%	-	-	-	-	100%	Indikator Lama

T. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Permasalahan
1	Keterbatasan wacana dan wawasan Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi dalam memahami ruang lingkup Penelitian dan Pengembangan
2	Belum adanya kesamaan pemahaman tentang database Penelitian dan Pengembangan
3	Belum tersusunnya roadmap kelitabangan sebagai pedoman dalam penyusunan kajian, riset, penelitian dan pengembangan
4	Tidak semua usulan terkait rencana kajian, penelitian dan pengembangan dapat diakreditasi
5	Tidak semua penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah pengusul
6	Tidak semua penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan ditindaklanjuti dengan kebijakan oleh pimpinan sesuai yang direkomendasikan

Isu Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Isu Strategis
1	Perubahan Aturan yang pesat serta pesinergian aturan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2	Perkembangan sistem aplikasi/teknologi informasi yang cepat berkembang
3	Kecepatan dan kualitas Koordinasi dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
4	Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Inovasi Daerah	

Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Tercapainya Target Sasaran – sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	70%	80%	85%	-	-
2	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional yang berorientasi pada pelayanan public berbasis smart cities	Indeks Perencanaan	32	33	34	35	36
3	Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas						

Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah	Indeks Kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	31	32	33	34	35
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan	Sinergitas dokumen perencanaan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Daerah, Rencana Perangkat Kerja Daerah)	100%	100%	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indeks Kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah	31	32	33	34	35
3	Meningkatnya capaian kinerja program RKPD	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	91%	100%	100%	-	-
		Persentase capaian kinerja program Rencana Kerja Pemerintah Daerah	90%	91%	92%	93%	94%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada komponen perencanaan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada komponen perencanaan	23,65	24	24,5	25	,25,5
5	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun pada area akuntabilitas	Persentase sasaran Perangkat Daerah yang berbasis outcome	90%	91%	92%	93%	94%
6	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	1892	1892	1900	1925	1950
7	Meningkatnya kualitas penelitian/kajian	Indeks kualitas penelitian/kajian	32	33	34	35	36
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan konsep Smart City	Persentase program SMART CITY yang dilaksanakan	75%	80%	85%	90%	95%
9	Meningkatnya kualitas Satu Data Indonesia	Persentase peningkatan jumlah usulan jenis data untuk diajukan rekomendasi	5%	5%	5%	5%	5%
10	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	25	27	32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Meningkatnya kualitas perencanaan tematik penanganan Covid-19	Persentase program penanganan Covid-19 yang dilaksanakan	0	91	0	0	0
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	-	80,01 skor	-	-

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
								2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
								Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan		Target	pendanaan
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran 1																		
	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80,01	-	80,03	8.457.706.187	80,05	8.322.763.267	81	8.322.763.267	81	8.322.763.267	
	X	X	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	-	100%	88.215.400	100%	88.215.400	100%	88.215.400	100%	88.215.400	
	5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	-	7 dokumen	66.979.200	7 dokumen	66.979.200	7 dokumen	66.979.200	7 dokumen	66.979.200	
	5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	-	12 dokumen	11.050.600	12 dokumen	11.050.600	12 dokumen	11.050.600	12 dokumen	11.050.600	
	5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	-	2 dokumen	10.185.600	2 dokumen	10.185.600	2 dokumen	10.185.600	2 dokumen	10.185.600	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%		100%	5.680.875.000	100%	5.680.875.000	100%	5.680.875.000	100%	5.680.875.000	
	5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	-	100%	5.550.950.000	100%	5.550.950.000	100%	5.550.950.000	100%	5.550.950.000	
	5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan L Keuangan Akhir Tahun S Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L	13 dokumen	-	13 dokumen	129.925.000	13 dokumen	129.925.000	13 dokumen	129.925.000	13 dokumen	129.925.000	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD											
	5	01	01	1.03		Administrasi Kepegawaian	Persentase perjanjian kinerja/SKP ASN yang tersusun	100%			359.974.957		359.974.957		359.974.957		359.974.957	
	5	01	01	1.03	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	-	100%	176.934.957	100%	176.934.957	100%	176.934.957	100%	176.934.957	
	5	01	01	1.03	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	-	100%	183.040.000	100%	183.040.000	100%	183.040.000	100%	183.040.000	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%		100%	455.934.000,00	100%	455.934.000,00	100%	455.934.000,00	100%	455.934.000,00	
	5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	-	100%	455.934.000	100%	455.934.000	100%	455.934.000	100%	455.934.000	
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%		100%	756.023.940,00	100%	756.023.940,00	100%	756.023.940,00	100%	756.023.940,00	
	5	01	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atas bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	-	100%	756.023.940	100%	756.023.940	100%	756.023.940	100%	756.023.940	
	5	01	01	2.08		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%		100%	791.861.325	100%	656.918.405	100%	656.918.405	100%	656.918.405	
	5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	-	100%	791.861.325	100%	656.918.405	100%	656.918.405	100%	656.918.405	
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%		100%	324.821.565	100%	324.821.565	100%	324.821.565	100%	324.821.565	
	5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	
	5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	-	100%	199.500.000	100%	199.500.000	100%	199.500.000	100%	199.500.000	
	5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan	100%		100%		100%		100%		100%		

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-		75.321.565		75.321.565		75.321.565		75.321.565	
Sasaran 2																		
	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100%		100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	3 dokumen		3 dokumen	1.264.338.885	3 dokumen	1.264.338.885	3 dokumen	1.264.338.885	3 dokumen	1.264.338.885	
	5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 kali		1 kali	196.858.600	1 kali	196.858.600	1 kali	196.858.600	1 kali	196.858.600	
	5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	jumlah berita acara pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas PD	1 kali		1 kali	215.898.500	1 kali	215.898.500	1 kali	215.898.500	1 kali	215.898.500	
	5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah Berita Acara musrenbang kota	1 kali		1 kali	462.896.775	1 kali	462.896.775	1 kali	462.896.775	1 kali	462.896.775	
	5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota yang ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD)	1 dokumen		1 dokumen	388.685.010	1 dokumen	388.685.010	1 dokumen	388.685.010	1 dokumen	388.685.010	
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	2 dokumen		2 dokumen	309.000.000	2 dokumen	309.000.000	2 dokumen	309.000.000	2 dokumen	309.000.000	
	5	01	02	2.03	01	Koordinasi, pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			2 dokumen	99.000.000	2 dokumen	99.000.000	2 dokumen	99.000.000	2 dokumen	99.000.000	
	5	01	02	2.03	03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi			4 dokumen	210.000.000	4 dokumen	210.000.000	4 dokumen	210.000.000	4 dokumen	210.000.000	
Sasaran 3																		
	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100%	-	100%	2.376.650.000,00	100%	2.376.650.000,00	100%	2.376.650.000,00	100%	2.376.650.000,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1 dokumen	-	1 dokumen	628.000.000	1 dokumen	628.000.000	1 dokumen	628.000.000	1 dokumen	628.000.000	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	0	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%		100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	
	5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 dokumen		14 dokumen	20.000.000	14 dokumen	20.000.000	14 dokumen	20.000.000	14 dokumen	20.000.000	
	5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%		100%	486.581.500	100%	486.581.500	100%	486.581.500	100%	486.581.500	
	5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen		1 dokumen	6.418.500	1 dokumen	6.418.500	1 dokumen	6.418.500	1 dokumen	6.418.500	
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1 dokumen	-	1 dokumen	893.800.000	1 dokumen	893.800.000	1 dokumen	893.800.000	1 dokumen	893.800.000	
	0	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen		1 dokumen	153.800.000	1 dokumen	153.800.000	1 dokumen	153.800.000	1 dokumen	153.800.000	
	5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan	Jumlah Perangkat	1		1		1		1		1		

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	dokumen		dokumen	740.000.000	dokumen	740.000.000	dokumen	740.000.000	dokumen	740.000.000		
	5	01	04	2,03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1 dokumen	-	1 dokumen	854.850.000	1 dokumen	854.850.000	1 dokumen	854.850.000	1 dokumen	854.850.000		
	5	01	03	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen		182.000.000	1 dokumen	182.000.000	1 dokumen	182.000.000	1 dokumen	182.000.000		
	5	01	03	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 dokumen		491.500.000	1 dokumen	491.500.000	1 dokumen	491.500.000	1 dokumen	491.500.000		
	5	01	03	2,03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen		98.550.000	1 dokumen	98.550.000	1 dokumen	98.550.000	1 dokumen	98.550.000		
	5	01	03	2,03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 dokumen		82.800.000	1 dokumen	82.800.000	1 dokumen	82.800.000	1 dokumen	82.800.000		
	Sasaran 4																	
	5	05				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100%		100%	1.220.033.946,00	100%	1.220.033.946,00	100%	1.220.033.946,00	100%	1.220.033.946,00	
	5	05	02	2,01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	dokumen	-	dokumen	403.603.067	1 dokumen	403.603.067	1 dokumen	403.603.067	1 dokumen	403.603.067	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	5	05	02	2,01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				217.922.020	1 dokum en	217.922.020	1 dokum en	217.922.020	1 dokum en	217.922.020	
	5	01	03	2,03	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				185.681.047	1 dokum en	185.681.047	1 dokum en	185.681.047	1 dokum en	185.681.047	
	5	05	02	2,01		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah	dokum en	-	dokum en	226.415.307	1 dokum en	226.415.307	1 dokum en	226.415.307	1 dokum en	226.415.307	
	5	05	02	2,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				226.415.307	1 dokum en	226.415.307	1 dokum en	226.415.307	1 dokum en	226.415.307	

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sinergitas dokumen perencanaan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah)	100%	100%	100%	100%	-	-	100%
2	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	93%	91%	100%	100%	-	-	100%
3	Indeks Kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	-	31	32	33	34	35	35
4	Indeks Kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah	-	31	32	33	34	35	35
5	Persentase capaian kinerja program Rencana Kerja Pemerintah Daerah	-	90%	91%	92%	93%	94%	94%
6	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada komponen perencanaan	-	23,65	24	24,5	25	,25,5	25,5
7	Persentase program penanganan covid-19 yang dilaksanakan	-	0	91	0	0	0	0
8	Persentase sasaran Perangkat Daerah yang berbasis outcome		90%	91%	92%	93%	94%	94%
9	Indeks Inovasi Daerah	-	1892	1892	1900	1925	1950	1950
10	Indeks kualitas penelitian/kajian		32	33	34	35	36	36
11	Persentase program SMART CITY yang dilaksanakan		75%	80%	85%	90%	95%	95%
12	Persentase peningkatan jumlah usulan jenis data untuk diajukan rekomendasi		5%	5%	5%	5%	5%	5%

Indikator Kinerja Kunci Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2024 2020	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Unsur PERENCANAAN									
1	Tercapainya Target Sasaran – sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	86%	70%	80%	85%	-	-	85%	Indikator Tujuan PD
2	Indeks Perencanaan	-	32	33	34	35	36	36	Indikator Tujuan PD
3	Sinergitas dokumen perencanaan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah)	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Sasaran PD
4	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	93%	91%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Sasaran PD
5	Indeks Kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	-	31	32	33	34	35	35	Indikator Sasaran PD
6	Indeks Kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah	-	31	32	33	34	35	35	Indikator Sasaran PD
7	Persentase capaian kinerja program Rencana Kerja Pemerintah Daerah	-	90%	91%	92%	93%	94%	94%	Indikator Sasaran PD
8	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada komponen perencanaan	-	23,65	24	24,5	25	,25,5	25,5	Indikator Sasaran PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	persentase program penanganan covid-19 yang dilaksanakan	-	0	91	0	0	0	0	Indikator Sasaran PD
10	persentase sasaran Perangkat Daerah yang berbasis outcome		90%	91%	92%	93%	94%	94%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
12	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
13	Sinergitas dokumen perencanaan Kota Madiun, Provinsi dan Nasional	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
14	Penerapan Kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
15	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
16	Persentase capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
17	Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
18	Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
19	Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan/Persentase capaian target sasaran pembangunan Kota Madiun Bidang Prasarana Wilayah	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
20	Persentase Pemerintah Kota yang capaian kinerjanya lebih dari 80	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Unsur PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Indeks Inovasi Daerah	-	1892	1892	1900	1925	1950	1950	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Sasaran PD
2	Indeks kualitas penelitian/kajian		32	33	34	35	36	36	Indikator Sasaran PD
3	Persentase program <i>SMART CITY</i> yang dilaksanakan		75%	80%	85%	90%	95%	95%	Indikator Sasaran PD
4	Persentase peningkatan jumlah usulan jenis data untuk diajukan rekomendasi		5%	5%	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

U. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Permasalahan
1	Minimnya komitmen Perangkat Daerah dalam menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu
2	Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial
3	Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah

Isu Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Isu Strategis
1	Tuntutan penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual
2	Penertiban barang milik daerah

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Badan Keuangan dan Aset Daerah**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis <i>smart cities</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	23,49	23,49	23,49
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan sesuai Wajar Tanpa Pengecualian	100%	100%	100%	-	-
		Persentase tersusunnya Laporan BTT	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset daerah	Persentase aset yang dilindungi	77%	80%	80%	-	-
		Persentase pemanfaatan aset daerah	-	96%	96%	96%	96%
		Persentase bidang tanah pemerintah kota yang bersertifikat	80%	80%	88%	89%	90%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
								2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
								Target	pendanaaan	Target	pendanaaan	Target	pendanaaan	Target	pendanaaan	Target	pendanaaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi						115.111.560.131,00		65.190.905.885,00		62.922.352.625,00		68.905.132.000,00		312.129.950.641,00	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi			51.021.944.546,00		51.820.233.266,00		52.951.025.625,00		57.641.000.000,00		213.434.203.437,00	
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah		8 Laporan	21.032.000,00	8 Laporan	21.032.000,00	8 Laporan	3.000.000,00	8 Laporan	3.000.000,00	8 Laporan	48.064.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah		8 Dokumen	21.032.000,00	8 Dokumen	21.032.000,00						42.064.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
						0 1	2 0 1	0 6	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Lapora n	3.000.000, 00	8 Lapora n	3.000.000,00	8 Lapora n	6.000.000 ,00	BKAD	
						0 1	2 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan		100%	35.367.12 8.046,00	100%	34.938.34 5.046,00	100%	37.000.00 0.000,00	100%	37.000.000. 000,00	100%	144.305.4 73.092,00
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Gaji ASN Perangkat daerah		100%	35.367.12 8.046,00	Orang / Bulan	34.938.34 5.046,00						70.305.47 3.092,00
						0 1	2 0 2	0 1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Orang / Bulan	37.000.00 0.000,00	Orang / Bulan	37.000.000.0 00,00	Orang / Bulan	74.000.00 0.000,00	BKAD	
						0 1	2 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum		100%	200.000.0 00,00	100%	200.000.0 00,00	100%	400.000.0 00,00	100%	400.000.00 0,00	100%	1.200.000 .000,00
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas		100%	200.000.0 00,00	100%	200.000.0 00,00						400.000.0 00,00
						0 1	2 0 6	0 9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				70 Lapora n	400.000.0 00,00	70 Lapora n	400.000.000, 00	70 Lapora n	800.000.0 00,00	BKAD	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								SKPD												
					0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan BMD Urusan Pemerintahan Daerah	100%	192.664.500,00	100%	187.077.000,00	100%	84.000.000,00	100%	-	100%	463.741.500,00	
								Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Dinas Perorangan/ Jabatan	100%	-	100%	187.077.000,00						#VALUE!	
					0	2	0		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					Unit	-	Unit	-	Unit	-	BKAD
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	192.664.500,00	-	-						#VALUE!	
					0	2	1		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					9 Unit	84.000.000,00	8 Unit	-	Unit	84.000.000,00	
					0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100%	14.973.000.000,00	100%	16.235.779.220,00	100%	15.226.025.625,00	100%	20.000.000.000,00	100%	66.434.804.845,00	BKAD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	14.973.000,00	100%	16.235.779.220,00						31.208.779.220,00	
					0108	203		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Laporan	15.226.025.625,00	1 Laporan	20.000.000.000,00	1 Laporan	35.226.025.625,00	
					0109	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan		100%	268.120.000,00	100%	238.000.000,00	100%	238.000.000,00	100%	238.000.000,00	100%	982.120.000,00	BKAD
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Persentase Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan / Jabatan yang Layak Digunakan		100%	61.120.000,00	100%	80.000.000,00						141.120.000,00	
					0109	201	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						36 Unit	80.000.000,00	36 Unit	80.000.000,00	Unit	160.000.000,00	BKAD
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Persentase Gedung yang Layak Digunakan		100%	120.000.000,00	100%	50.000.000,00						170.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
						0 1	2 0	0 9	Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.00 0,00	1 Unit	50.000.000,0 0	Unit	100.000.0 00,00	BKAD		
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Prasarana Digunakan	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung yang Layak Digunakan		100%	87.000.00 0,00	100%	108.000.0 00,00				195.000.0 00,00			
						0 1	2 0	1 0	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	108.000.0 00,00	8 Unit	108.000.000, 00	Unit	216.000.0 00,00	BKAD		
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		5	0	0	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target		100%	60.340.67 3.185,00	100%	11.270.98 7.599,00	100%	7.871.642 .000,00	100%	9.164.447.0 00,00	100%	88.647.74 9.784,00	BKAD
			Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran yang Tepat Waktu dan Berkualitas	5	0	0	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu		100%	906.617.6 00,00	100%	927.300.4 60,00	100%	1.210.263 .000,00	100%	2.503.068.0 00,00	100%	5.547.249 .060,00	
									Koordinasi dan Penyusunan KUA dan	Jumlah Dokumen yang Disusun		34 Doku men	103.729.6 00,00	34 Doku men	72.797.51 0,00					176.527.1 10,00		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				5	0	0	0	PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun					2 Doku men	103.729.000,00	2 Doku men	1.396.534.000,00	2 Doku men	1.500.263.000,00	BKAD	
								Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen yang Disusun		2 Doku men	78.729.600,00	2 Doku men	78.704.510,00					157.434.10,00		
				5	0	0	0	Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					2 Doku men	78.729.000,00	2 Doku men	78.729.000,00	2 Doku men	157.458.000,00	BKAD	
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA yang Tervasilitasi		2 Doku men	35.840.120,00	2 Doku men	37.184.940,00					73.025.060,00		
				5	0	0	0	Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi					1 Doku men	37.184.000,00	1 Doku men	37.184.000,00	1 Doku men	74.368.000,00	BKAD	
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA yang Tervasilitasi		2 Doku men	36.418.480,00	2 Doku men	34.347.600,00					70.766.080,00		
				5	0	0	0	Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi					1 Doku men	36.419.000,00	1 Doku men	36.419.000,00	1 Doku men	72.838.000,00	BKAD	
								Koordinasi dan Penyusunan	jumlah Dokumen yang Disusun		2 Doku men	261.188.800,00	2 Doku men	256.906.120,00					518.094.920,00		
				5	0	0	0	Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD					2 Doku men	261.889.000,00	2 Doku men	261.889.000,00	2 Doku men	523.778.000,00	BKAD	
								Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen yang Disusun		2 Doku men	215.602.800,00	2 Doku men	176.924.410,00					392.527.210,00		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				5	0	0	0	Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD					2 Dokumen	215.602.000,00	2 Dokumen	215.602.000,00	2 Dokumen	431.204.000,00	BKAD	
								Koordinasi dan Penyusunan Regulasi	Jumlah Dokumen yang Disusun		1 Dokumen	175.108.200,00	1 Dokumen	270.435.370,00					445.543.570,00		
				5	0	0	0	Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran					1 Dokumen	476.711.000,00	1 Dokumen	476.711.000,00	1 Dokumen	953.422.000,00	BKAD	
			Presentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akuntabel	5	0	0	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan		100%	250.000.000,00	100%	265.243.000,00	100%	290.000.000,00	100%	290.000.000,00	100%	1.095.243.000,00	BKAD
								Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kasda		55 Dokumen	130.000.000,00	55 Dokumen	145.243.000,00					275.243.000,00		
				5	0	0	0		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					55 Dokumen	150.000.000,00	55 Dokumen	150.000.000,00	55 Dokumen	300.000.000,00		
								Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	Jumlah Dokumen Pengeluaran Kas		3 Jenis Dokumen	120.000.000,00	3 Jenis Dokumen	120.000.000,00					240.000.000,00		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				5	0	0	0	Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait					3 Dokumen	140.000.000,00	3 Dokumen	140.000.000,00	3 Dokumen	280.000.000,00	BKAD	
			Presentase Tersusnya LKPD Sesuai SAP	5	0	0	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Permintaan Laporan Keuangan yang Terfasilitasi		100%	1.296.629.000,00	100%	1.296.379.000,00	100%	1.371.379.000,00	100%	1.371.379.000,00	100%	5.335.766.000,00	BKAD
								Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Produk Hukum		2 Produk Hukum	280.000.000,00	2 Produk Hukum	280.000.000,00						560.000.000,00	
				5	0	0	2	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					2 Laporan	300.000.000,00	2 Laporan	300.000.000,00	2 Laporan	600.000.000,00	BKAD	
								Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis		2 Buku	40.000.000,00	2 Buku	40.000.000,00						80.000.000,00	
				5	0	0	2		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban					2 Dokumen	45.000.000,00	2 Dokumen	45.000.000,00	2 Dokumen	90.000.000,00	BKAD	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
									Pelaksanaan APBD												
									Penyusunan Kebijakan dan Dokumen		3 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	100.000.000,00						200.000.000,00	
				5	0	0	2	0	Jumlah Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			-		-	4 Dokumen	150.000.000,00	4 Dokumen	150.000.000,00	4 Dokumen	300.000.000,00	BKAD
									Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota		500 Orang /Pendampingan	876.629.000,00	500 Orang /Pendampingan	876.379.000,00						1.753.008.000,00	
				5	0	0	2	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota					600 Orang	876.379.000,00	600 Orang	876.379.000,00	600 Orang	1.752.758.000,00	BKAD	
			Presentase Tersusunnya Laporan BTT	5	0	0	2	0	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase BTT	100%	57.887.426.585,00	100%	8.782.065.139,00	100%	5.000.000.000,00	100%	5.000.000.000,00	100%	76.669.491.724,00	BKAD
									Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen Pengajuan		57.887.426.585,00		8.782.065.139,00						66.669.491.724,00	
				5	0	0	2	0	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						12 Laporan	5.000.000.000,00	12 Laporan	5.000.000.000,00	12 Laporan	10.000.000.000,00	BKAD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan dan Perlindungan Aset Daerah		5	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang Dilindungi		100%	3.748.942.400,00	100%	2.099.685.020,00	100%	2.099.685.000,00	100%	2.099.685.000,00	100%	10.047.997.420,00	
				5	0	0	2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD		22 Laporan	3.748.942.400,00	22 Laporan	2.099.685.020,00	22 Laporan	2.099.685.000,00	22 Laporan	2.099.685.000,00	22 Laporan	10.047.997.420,00	
								Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah		5 Dokumen	157.740.000,00	5 Dokumen	157.740.000,00						315.480.000,00	
			Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	5	0	0	2		Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah					2 Laporan	157.740.000,00	2 Laporan	157.740.000,00	2 Laporan	315.480.000,00	BKAD	
								Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang Dipelihara		2 Dokumen	3.541.202.400,00	2 Dokumen	1.891.945.020,00						5.433.147.420,00	
			Persentase Bidang Tanah Pemerintah Kota yang Bersertifikat	5	0	0	2		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah					2 Laporan	1.891.945.000,00	2 Laporan	1.891.945.000,00	2 Laporan	3.783.890.000,00	BKAD	
								Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jenis dan Tipe Barang yang Sudah Terstandart		18 Buku	50.000.000,00	18 Buku	50.000.000,00						100.000.000,00	
				5	0	0	2		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					18 Laporan	50.000.000,00	18 Laporan	50.000.000,00	18 Laporan	100.000.000,00	BKAD	

Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan sesuai Wajar Tanpa Pengecualian	100%	100%	100%	100%	-	-	100%
2	Persentase pemanfaatan aset daerah	-	-	96%	96%	96%	96%	96%
3	Persentase aset yang dilindungi	70,85%	77%	80%	80%	-	-	80%
4	Persentase tersusunnya Laporan BTT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase bidang tanah pemerintah kota yang bersertifikat	-	80%	80%	88%	89%	90%	90%

Indikator Kinerja Kunci Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2024 2020	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Lanjutan Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan sesuai Wajar Tanpa Pengecualian	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Sasaran PD
3	Persentase pemanfaatan aset daerah	-	-	96%	96%	96%	96%	96%	Indikator Sasaran PD
4	Persentase aset yang dilindungi	70,85%	77%	80%	80%	-	-	80%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase tersusunnya Laporan BTT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
8	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
9	Persentase bidang tanah pemerintah kota yang bersertifikat	-	80%	80%	88%	89%	90%	90%	Indikator Sasaran PD
10	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
12	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	19,68%	21%	21,10%	21,20%	21,20%	21,30%	21,30%	Lppd
13	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto NonMigas	2,52%	2,49%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Lppd
14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (<i>expenditures</i>)	66,15%	60,63%	60,70%	60,90%	62,20%	63%	63%	Lppd
15	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	83,36%	79,38%	80%	80%	80%	80%	80%	Lppd
16	Deviasi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	107	106%	93,15%	95,50%	102%	103%	103%	Lppd
17	Manajemen Aset	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Lppd
18	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya	19,47%	22,15%	21,50%	20,10%	19%	18%	18%	Lppd
19	Persentase Peningkatan nilai Aset Pemerintah Daerah	-	6	-	-	-	-	6	Indikator Lama
20	Persentase Bidang tanah bersertifikat	-	77%	-	-	-	-	77%	Indikator Lama
21	Persentase Kontribusi Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
22	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-	Tepat Waktu	Indikator Lama
23	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-	Tepat Waktu	Indikator Lama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
25	Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD	-	8.407.092.860	-	-	-	-	8.407.092.860	Indikator Lama

V. BADAN PENDAPATAN DAERAH

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Badan Pendapatan Daerah

No	Permasalahan
1	Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia petugas pungut
2	Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan
3	Belum optimalnya penggalian potensi terhadap wajib pajak daerah baru
4	Kurangnya akurasi data pajak daerah

Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

No	Isu Strategis
1	Meningkatkan kemandirian fiskal daerah
2	Peningkatan pelayanan pajak daerah

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Badan Pendapatan Daerah**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis <i>smart cities</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tujuan Badan Pendapatan Daerah

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya penerimaan pajak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai transaksi yang terjadi di masyarakat	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	76.350.000.000	82.260.000.000	92.000.000.000	-	-
Capaian Target Pajak Daerah		-	-	100%	100%	100%	
Persentase peningkatan target pajak daerah		-	-	5%	5%	5%	

Sasaran Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	21,1	21,8	22,1
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Perangkat Daerah	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	-	-	81	-	-
3	Meningkatnya kualitas pemantauan wajib pajak	persentase Peningkatan Target Pajak daerah	36%	37%	38%	-	-
		persentase peningkatan objek pajak yang dipantau dengan IT	-	-	5%	5%	5%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pembayaran pajak	persentase peningkatan pembayaran pajak melalui transaksi elektronik	-	-	5%	5%	5%
5	Meningkatnya kualitas penagihan Wajib Pajak	persentase Pencapaian Target Pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	-	-	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kepatuhan WP (Wajib Pajak)	Persentase WP (Wajib Pajak) yang membayar tepat waktu	-	-	100%	100%	100%
7	Optimalnya penggalan pemetaan potensi WP (Wajib Pajak) baru	Persentase pertumbuhan WP (Wajib Pajak) baru	-	-	100%	100%	100%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lo kasi		
								2019		2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah	
								Realisasi (K)	Rp	Realisasi (K)	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan Kemandirian Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Daerah						Peningkatan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah																
		Meningkatnya Kinerja Badan Pendapatan Daerah				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			100%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Kegiatan Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis			8 Jenis	483.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 Kali			15 Kali	88.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Program Pemeliharaan Barang	100%			100%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								Milik Daerah	Kondisi Baik																
								Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Perbaikan Gedung Kantor	1 Unit			1 Unit	208.063.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Yang Diperbaiki	2 Unit			2 Unit	44.229.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor	5 Jenis			5 Jenis	239.652.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			100%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket			1 Paket	1.153.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Dokumen Perencanaan / Laporan Yang Disusun Tepat Waktu	100%			100%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Kegiatan	Penyusunan	7			7	2.500.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen OPD	Dokumen			Dokumen	000											
		Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah							Prosentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	2%			2%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah	100%			100%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Obyek Pajak Daerah	Jumlah Basis Data Yang Update	150 WP			150 WP	22.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Kegiatan Cetak Masal dan Penyampaian SPPT	Jumlah Penerbitan SPPT PBB dan DHKP	55.000 SPPT			55.000 SPPT	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Kegiatan Pemeliharaan Frame Reklame	Jumlah Frame Yang Bersih dan Rapi	32 Titik			32 Titik	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Kegiatan Monitoring Rekonsili	Prosentase Kepatuhan PPAT	100%			100%	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								asi dan Pelaporan Penerimaan BPHTB																	
								Evaluasi Penyampaian SPPT PBB	Prosentase Jumlah SPPT PBB yang Tersampaikan	100%			100%	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	6 Aplikasi			-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	Prosentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1.5%			1.5%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Kegiatan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Berprestasi dan Gebyar Undian PBB	Jumlah Wajib Pajak Berprestasi dan Gebyar Undian PBB	207 WP			182 WP	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Kegiatan Verifikasi Data Piutang Pajak	Penyelesaian Piutang Pajak	22 WP			22 WP	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak	Peningkatan Kesadaran Petugas Pungut PBB	150 Petugas Pungut			150 Petugas Pungut	166.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								Daerah																	
								Kegiatan Pemberian Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Pemberian Souvenir Kepada Wajib Pajak PBB	5.500 Souvenir			5.500 Souvenir	497.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Kegiatan Rekonsiliasi dan Pembinaan Petugas Pungut	Peningkatan Capaian Penerimaan Pajak Daerah	450 Petugas Pungut			450 Petugas Pungut	56.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Peningkatan Kepatuhan WP terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah dan Petugas Pungut PBB	1 Dokumen			1 Dokumen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Piutang Pajak Non PBB	Dokumen Hasil Monev Piutang Pajak Non PBB	1 Dokumen			1 Dokumen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PERMEN 90 TAHUN 2019

Meningkatkan Kemandirian Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Daerah									Peningkatan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah															
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	5	0	0									80,01		80,5		81		81,5		81,5	

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Daerah		5	0	0			PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPA TEN/ KOTA	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah					BB	9.273. 257.0 00,00	BB	10.009. 082.000 ,00	BB	11.283. 907.000 ,00	BB	12.49 7.738. 000,0 0	A	43.70 6.984. 000,0 0	BAP END A
				5	0	0	2		Perencana an, Pengang garan, dan evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	Dokumen Perencanaan / Laporan yang di susun tepat waktu		0	0	20 Dok ume n	10.80 0.000, 00	20 Dok ume n	5.000.0 00,00	20 Dok ume n	13.068. 000,00	20 Dok ume n	14.37 4.000, 00	20 Dok ume n	50.12 2.000, 00	BAP END A	
				5	0	0	2	0	Koordina si dan Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0	0	20 Dok ume n	10.800 .000,0 0	20 Dok ume n	5.000.00 0,00	8 lapor an	13.068.0 00,00	8 lapor an	14.374 .000,0 0	8 lapor an	50.122 .000,0 0	BAP END A	
				5	0	0	2		Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah	Prosentase Terlaksanany a Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0	100 %	8.429. 382.0 00,00	100 %	9.309.0 82.000, 00	100 %	10.199. 552.000 ,00	100 %	11.21 9.507. 000,0 0	100 %	39.12 0.761. 000,0 0	BAP END A	
				5	0	0	2	0	Penyedia an gaji dan tunjanga n ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0	0	100 %	8.429. 382.00 0,00	100 %	9.309.08 2.000,00	33 O rang / bula n	10.199.5 52.000,0 0	33 O rang / bula n	11.219 .507.0 00,00	33 O rang / bula n	39.120 .761.0 00,00	BAP END A	
				5	0	0	2		Administ rasi Kepegaw aian	Prosentase Terlaksanany a Administ rasi Kepegawaian		0	0	100 %	91.00 0.000, 00	100 %	0,00	100 %	110.110 .000,00	100 %	121.1 21.00 0,00	100 %	422.3 31.00 0,00	BAP END A	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				5	0	0	2	0				0	0	100	88.000	100	0,00	100	106.480.	100	117.12	100	408.40	BAP
				2	0	1	0	2				0	0	100	.000,0	%		100	000,00	%	8.000,	100	8.000,	END
					5	0	0	2				0	0	100	0	0,00	2	3.630.00	2	3.993.	2	13.923	BAP	
					2	1	0	5				0	0	100	3.000.	100	0,00	laporan	0,00	laporan	000,00	laporan	.000,0	END
					5	0	0	2				0	0	100	50.00	100	30.000.	100	60.500.	100	66.55	100	232.0	BAP
					2	1	0	6				0	0	100	0.000,	%	000,00	%	000,00	%	0.000,	100	50.00	END
					5	0	0	2				0	0	100	50.000	100	30.000.0	30	60.500.0	30	66.550	30	232.05	BAP
					2	1	0	6				0	0	100	.000,0	%	00,00	laporan	00,00	laporan	.000,0	laporan	0.000,	END
					5	0	0	2				0	0	100	-	100	0,00	100	40.000.	100	50.00	100	483.0	BAP
					2	1	0	7				0	0	100	%		%	000,00	%	0.000,	100	00.00	0,00	END
					5	0	0	2				0	0	0	0	0	0	0	0	12	300.00	12	300.00	BAP
					2	1	0	7				0	0	0	0	0	0	0	0	unit	0.000,	unit	0.000,	END
					5	0	0	2				0	0	0	0	0	0	0	0	100	700.00	100	700.00	BAP
					2	1	0	7				0	0	0	0	0	0	0	0	%	0.000,	%	0.000,	END
																							A	

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				5	0	0	2	0	Pengadaa n Gedung Kantor atau Banguna n lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%			0	0	0	-	0	0	0	0	1 unit	400.00 0.000. 00	1 unit	483.00 0.000, 00	BAP END A
				5	0	0	2	1	Pengadaa n Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n lainnya	Prosentase pemenuhan kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang disediakan	100%			0	0	100 %	-	100 %	0,00	100 %	40.000.0 00.00	100 %	50.000 .000.0 0	100 %	483.00 0.000, 00	BAP END A
				5	0	0	2	1	Pengadaa n Sarana dan Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%			0	0	0	0	0	0	0	0	13 unit	190.00 0.000, 00	13 unit	190.00 0.000, 00	BAP END A
				5	0	0	2	0	Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			0	0	100 %	532.5 75.00 0,00	100 %	500.000 .000,00	100 %	585.832 .000,00	100 %	708.8 57.00 0,00	100 %	2.413. 096.0 00,00	BAP END A
				5	0	0	2	0	Penyedia an jasa peralatan dan perlengka pan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%			0	0	100 %	532.57 5.000, 00	100 %	500.000. 000,00	2 doku men	585.832. 000,00	2 doku men	708.85 7.000, 00	2 doku men	2.413. 096.00 0,00	BAP END A
				5	0	0	2	0	Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	100%			0	0	100 %	159.5 00.00 0,00	100 %	165.000 .000,00	100 %	274.845 .000,00	100 %	317.3 29.00 0,00	100 %	985.6 24.00 0,00	BAP END A

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				5	0	0	2	0	Daerah																	
				2	1	0	0	1	Penyedia an jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%		0	0	100 %	44.500.000,00	100 %	40.000.000,00	30 unit	53.845.000,00	30 UNIT	59.229.000,00	30 UNIT	206.524.000,00	BAP END A	
				5	0	0	2	0	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%		0	0	100 %	15.000.000,00	100 %	75.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	1 unit	125.000.000,00	1 unit	315.000.000,00	BAP END A	
				5	0	0	2	1	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	100%		0	0	100 %	100.000.000,00	100 %	50.000.000,00	1 unit	121.000.000,00	1 unit	133.100.000,00	1 unit	464.100.000,00	BAP END A	
Meningkatnya Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Peningkatan Target Pajak daerah												100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
				5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10%	0	0	0	0	695.305.000,00	10%	1.103.290.000,00	10%	1.447.675.000,00	10%	1.499.358.000,00	10%	4.995.628.000,00	BAP END A	

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									2. Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	41%						41%		42%		43%		44%			
				5	0	0	2		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	0	0	0	0		695.305.000,00	100%	1.103.290.000,00	100%	1.447.675.000,00	100%	1.499.358.000,00	100%	4.995.628.000,00	BAP END A
				5	0	0	2	0	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	2 Dokumen			0	0		4.400.000,00	2 Dokumen	4.600.000,00	2 Dokumen	6.900.000,00	2 Dokumen	9.200.000,00	2 Dokumen	25.100.000,00	BAP END A
				5	0	0	2	0	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	450 Wajib Pajak	0	0	0	0	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	560.987.000,00	1 Dokumen	707.487.000,00	1 Dokumen	833.687.000,00	1 Dokumen	2.452.161.000,00	BAP END A
				5	0	0	2	0	Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	125 Objek Pajak	0	0	0	0	1 Dokumen	9.750.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	69.750.000,00	BAP END A
				5	0	0	2	0	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	2 Aplikasi	0	0	0	0	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	400.000.000,00	1 Dokumen	1.550.000.000,00	BAP END A
				5	0	0	2	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2 Laporan	0	0	0	0	4.303 WP	-	4.303 WP	87.298.000,00	4.303 WP	20.000.000,00	4.303 WP	25.000.000,00	4.303 WP	132.298.000,00	BAP END A

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																	
				5	0	0	2	0	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	60.035 Wajib Pajak	0	0	0	0	1 Dokumen	42.300 .000,00	1 Dokumen	50.000.0 00,00	1 Dokumen	55.000.0 00,00	1 Dokumen	60.000 .000,00	1 Dokumen	207.30 0.000,00	BAP END A
				5	0	0	2	0	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.500 Wajib Pajak	0	0	0	0	1 Dokumen	10.750 .000,00	8.92 3 Wajib Pajak	37.200.0 00,00	8.92 3 Wajib Pajak	42.200.0 00,00	8.92 3 Wajib Pajak	49.200 .000,00	8.92 3 Wajib Pajak	139.35 0.000,00	BAP END A
				5	0	0	2	1	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	86.905 .000,00	156 WP	56.716.0 00,00	156 WP	77.678.0 00,00	156 WP	77.678 .000,00	156 WP	298.97 7.000,00	BAP END A
				5	0	0	2	1	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	50 Wajib Pajak	0	0	0	0	1 Dokumen	10.600 .000,00	1 Dokumen	35.070.0 00,00	1 Dokumen	11.700.0 00,00	1 Dokumen	12.300 .000,00	1 Dokumen	69.670 .000,00	BAP END A
				5	0	0	2	1	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian Dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Wajib Pajak	0	0	0	0	1 Dokumen	30.600 .000,00	1 Dokumen	6.419.00 0,00	1 Dokumen	6.710.00 0,00	1 Dokumen	7.293. 000,00	1 Dokumen	51.022 .000,00	BAP END A

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Peningkatan Target Pajak daerah	35%	36%	37%	38%	-	-	38%
2	Persentase Peningkatan objek pajak yang dipantau dengan memanfaatkan IT	-	-	-	5%	5%	5%	5%
3	Persentase Peningkatan Pembayaran Pajak melalui transaksi elektronik	-	-	-	5%	5%	5%	5%
4	Persentase Pencapaian Target Pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	82.332.000.000	76.350.000.000	82.260.000.000	92.000.000.000	-	-	95.000.000.000	Indikator Tujuan PD
2	Capaian Target Pajak Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
3	Persentase peningkatan target pajak daerah	-	-	-	5%	5%	5%	5%	Indikator Tujuan PD
4	persentase Peningkatan Target Pajak daerah	35%	36%	37%	38%	39%	40%	40%	Indikator Sasaran PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	persentase peningkatan objek pajak yang dipantau dengan IT	-	-	-	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
6	persentase peningkatan pembayaran pajak melalui transaksi elektronik	-	-	-	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
7	persentase Pencapaian Target Pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
8	persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Indikator Program PD
9	Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	37%	41%	41%	41%	42%	43%	43%	Indikator Program PD
10	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
11	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	-	118	-	-	-	-	118	Indikator Lama

W. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMABNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMABNGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

**Permasalahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

No	Permasalahan
1	Jumlah Aparatur Sipil Negara belum sesuai dengan Analisis jabatan/Analisis Beban Kerja dan peta jabatan
2	Penempatan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kompetensinya masih belum optimal
3	Partisipasi Aparatur Sipil Negara dalam pengembangan kompetensi kurang
4	Anggaran peningkatan kompetensi masih kurang
5	Terbatasnya jenis diklat yang bisa diselenggarakan/diikuti

**Isu Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

No	Isu Strategis
1	Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Merit.
2	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Menghadapi Era Industri 4.0
3	Integrasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ E-Government

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis <i>smart cities</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara	Indeks Sistem Merit	130,5	170	190	220	250

Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	26,8	26,85	27
2	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Persentase perencanaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan	-	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Persentase kesesuaian usulan pengadaan dengan formasi yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas Pengembangan kompetensi	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	-	30	33	-	-
		Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai PP 11 Thn 2017 (20JP/orang/tahun)	30%	30%	33%	35%	37%
5	Meningkatnya kualitas pengembangan karir, promosi dan mutasi	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	34,38	23,52	25,5	-	-
		Persentase penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan SKJ	-	50%	50%	60%	70%
6	Meningkatnya manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara	Persentase penilaian kinerja pegawai dengan hasil baik	-	95%	95%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Sasaran Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bernilai baik (lebih dari 75)	-	90%	90%	90%	90%
7	Meningkatnya penghargaan dan disiplin	Persentase terpenuhinya penggajian, penghargaan sesuai dengan aturan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara	-	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
8	Tersedianya sistem informasi adminstrasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang mutakhir	-	100%	100%	100%	100%
9	Tercapainya pelayanan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	Persentase Pemberhentian Aparatur Sipil Negara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SASARAN	KODE					INDIKATOR	2023		2024		AKHIR PERIODE		LOKASI	KET	
							TARGET	PENDANAAN	TARGET	PENDANAAN	TARGET	PENDANAAN			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PENDAPATAN ASLI DAERAH									
	4	1	02	201		Retribusi Penyewaan Bangunan	Persentase realisasi pendapatan	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	GEDNG DIKLAT	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A	7,198,664,220	A		A		BKPSDM	
	X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen Penganggaran dan Evaluasi	100		100		100			
	X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	19.400.000	5	19.400.000	5	19.400.000		
	X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100		100		100			
	X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	6.099.847.949	40	6.500.000.000	40	6.500.000.000		
	X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100		100		100			
	X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	323.200.000	80	323.200.000	80	323.200.000		
	X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100			

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	XX	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	50.000.000	10	100.000.000	10	150.000.000		
	X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	100		100		100			
	X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	446.318.000	18	446.318.000	18	446.318.000		
	X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100		100		100			
	X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	15.000.000	19	15.000.000	19	15.000.000		
	X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	148.710.000	2	150.000.000	2	150.000.000		
	X	XX	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	47.925.000	8	50.000.000	8	50.000.000		
	5	03				KEPEGAWAIAN			2,411,777,300		2.771.992.000		2.796.992.000		
	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai IKM								
	5	03	02	201		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi								
Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	5	03	02	201	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2	1.0030.200.000	2	1.019.913.060	2	1.019.913.060		
Tercapainya pelayanan pemberhentian PNS	5	03	02	201	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	182	89.360.000	200	89.940.000	200	89.940.000		
Tersedianya sistem informasi administrasi kepegawaian	5	03	02	201	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Update Dokumen Kepegawaian	3.000	110.000.000	3.000	120.000.000	3.000	120.000.000		
Meningkatnya kualitas pengembangan karir, promosi dan mutasi	5	03	02	202		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100		100		100			
	5	03	02	202	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	702	375.626.200	209	380.000.000	209	380.000.000		

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah								
	5	03	02	202	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	455	86,158.000	400	93.680.000	400	93.680.000		
	5	03	02	203		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi	100		100		100			
	5	03	02	203	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	150	600.000.000	110	500.000.000	110	500.000.000		
	5	03	02	204		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Realisasi Evaluasi Kinerja	100		100		100			
Meningkatnya manajemen kinerja ASN	5	03	02	204	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	39.391.000	1	39.391.000	1	39.391.000		
Meningkatnya penghargaan dan disiplin	5	03	02	204	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1429	60.130.000	1370	68.630.000	1370	68.630.000		
	5	03	02	204	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60	77.340.000	60	80.000.000	60	80.000.000		
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			3,898,915,600						
Meningkatnya kualitas Pengembangan kompetensi	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	13		13		14			
	5	04	02	201		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	85		85		85			
	5	04	02	201	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	277	1.976.825.000	115	1.976.245.000	115	1.860.000.000		
	5	04	02	202		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	80		80		80			
	5	04	02	202	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	177	1.922.090.600	125	2.650.000.000	125	2.750.000.000		
								13,509,357,120		13.797.729.060		14.506.484.060			

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Penempatan Pegawai dalam Jabatan sesuai dengan Standart Kompetensi Jabatan	-	-	50%	50%	60%	70%	70%
2	Persentase penilaian kinerja pegawai dengan hasil baik	-	-	95%	95%	-	-	95%
3	Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	-	-	30	33	-	-	33
4	Persentase kesesuaian usulan pengadaan sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase perencanaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase SKP ASN yang bernilai baik (lebih dari 75)	0	0	90%	90%	90%	90%	90%
7	Persentase Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
8	Persentase terpenuhinya penggajian, penghargaan sesuai dengan aturan yang berlaku	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase data kepegawaian yang mutakhir	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Pemberhentian Aparatur Sipil Negara tepat waktu	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017	-	30%	30%	33%	35%	37%	37%

Indikator Kinerja Kunci Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bidang Urusan Kepegawaian									
1	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	69,65	69,66	69,66	70	-	-	69,66	Indikator Tujuan PD
2	Indeks Sistem Merit	-	130,5	170	190	220	250	250	Indikator Tujuan PD
3	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	17,25	34,38	23,52	25,5	-	-	23,52	Indikator Lama
4	Prosentase Penempatan Pegawai dalam Jabatan sesuai dengan Standart Kompetensi Jabatan	-	-	50%	50%	60%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase penilaian kinerja pegawai dengan hasil baik	-	-	95%	95%	-	-	95%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	-	-	30%	33%	-	-	33%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase kesesuaian usulan pengadaan sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
8	Persentase perencanaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
9	Persentase Sasaran Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bernilai baik (lebih dari 75)	0	0	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Sasaran PD
10	Persentase Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase terpenuhinya penggajian, penghargaan sesuai dengan aturan yang berlaku	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Persentase data kepegawaian yang mutakhir	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
13	Persentase Pemberhentian Aparatur Sipil Negara tepat waktu	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
14	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kepegawaian	87,97	87,62	87,52	87,6	87,7	87,7	87,7	Indikator Program PD
15	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	167%	184%	222%	268%	339%	339%	Lppd
16	Rasio pegawai Fungsional (%) (Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	10%	11%	14%	17%	18%	18%	Lppd
17	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	72%	74%	80%	84%	87%	87%	Lppd
18	Persentase Nilai Sasaran Kinerja Pegawai Pegawai yang Bernilai Baik	-	100%	-	-	-	-	100%	Indikator Lama
19	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur	-	113	-	-	-	-	113	Indikator Lama
20	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian sesuai Standart Operasional Prosedur	-	145	-	-	-	-	145	Indikator Lama
21	Persentase Penyelesaian Surat Keputusan Terkait Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai Standart Operasional Prosedur	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
22	Persentase Penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai Standart Kompetensi Manajerial	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	Persentase Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
24	Persentase Pengembangan Aparatur Sipil Negara	-	112	-	-	-	-	112	Indikator Lama
Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan									
25	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017	-	30%	30%	33%	35%	37%	37%	Indikator Sasaran PD
26	Persentase Realisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	10%	12%	13%	14%	14%	Indikator Program PD

X. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024

Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Permasalahan
1	Semakin menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa dan karakter kebangsaan dalam kehidupan masyarakat
2	Berkurangnya rasa nasionalisme dan semangat kebhinekaan sebagai satu bangsa agar tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
3	Perlu peningkatan kewaspadaan dini guna mencegah timbulnya konflik di masyarakat
4	Belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak konstitusional dalam berdemokrasi
5	Menumbuhkan peran Partai Politik dalam penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di masyarakat
6	Belum optimalnya peran serta aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah
7	Peningkatan pembinaan status kelembagaan organisasi kemasyarakatan
8	Belum optimalnya koordinasi dalam penanganan ketahanan ekonomi
9	Peningkatan koordinasi dalam pencegahan penanggulangan narkoba
10	Peningkatan dalam pembinaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan

Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Isu Strategis
1	Menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air di masyarakat khususnya pelajar dan generasi muda
2	Dengan adanya 14 Perguruan Pencak Silat dan 24 suku di Kota Madiun yang rentan menimbulkan konflik sosial di masyarakat
3	Mendukung peran Partai Politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
4	Mendorong organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan
5	Meningkatkan koordinasi dalam penanganan ketahanan ekonomi
6	Meningkatkan koordinasi dan peran forum kerukunan umat beragama untuk mencegah timbulnya konflik antar umat beragama
7	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba

**Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya kerukunan masyarakat dan kenyamanan lingkungan	Indeks Kerukunan	74,03	74,30	74,40	74,46	75,00

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks RB		15,30	18,31	25,30	27,31
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan	Persentase konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Partisipasi Partai Politik dan Orkemas dalam Pembangunan Daerah	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Peningkatan Orkemas yang Berbadan Hukum	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kerukunan Beragama, Kehidupan Sosial dan Budaya	Jumlah Konflik Keagamaan, Kehidupan Sosial dan Budaya	-10	-10	-10	-10	-10

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator									Lokasi		
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
									Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terwujudnya Kerukunan Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan							Indeks Kerukunan	74,30		74,40		74,46		75		75			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah						Indeks RB	15,30		18,31		25,30		27,31					
									6.924.484.517		8.112.431.714		10.484.539.044		11.758.248.280		11.758.248.280		
		8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A nilai 80,01	3.538.252.867	A nilai 80,35	4.049.508.697	A nilai 80,50	5.526.179.347	A nilai 81	6.631.363.583	A nilai 81	6.631.363.583	
		8	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	30.600.000		30.600.000		53.437.000		59.100.000		59.100.000	
		8	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	-	-	10 dokumen	12.837.000	10 dokumen	13.500.000	10 dokumen	13.500.000	
		8	01	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	-	30.600.000	-	30.600.000	2 laporan	40.600.000	2 laporan	45.600.000	2 laporan	45.600.000	

(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Kinerja SKPD												
		8	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	2.887.145.114	100%	2.987.145.114	100%	4.088.008.819	100%	5.100.000.000	100%	5.100.000.000	
		8	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang	2.887.145.114	23 orang	2.987.145.114	23 orang	4.088.008.819	23 orang	5.100.000.000	23 orang	5.100.000.000	
		8	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	-	-	-	-	100%	62.469.945	100%	65.000.000	100%	65.000.000	
		8	01	01	2.05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	30 orang	62.469.945	30 orang	65.000.000	30 orang	65.000.000	
		8	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	563.115.753	100%	762.263.583	100%	962.263.583	100%	1.062.263.583	100%	1.062.263.583	
		8	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	524.115.753	1 paket	712.263.583	1 paket	712.263.583	1 paket	712.263.583	1 paket	712.263.583	
		8	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	39.000.000	laporan	50.000.000	laporan	250.000.000	laporan	350.000.000	laporan	350.000.000	
		8	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan barang milik daerah	100%	-	100%	197.500.000	100%	280.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	

(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8	01	01	2.07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	4 unit sepeda motor	120.000.000	6 unit sepeda motor	180.000.000		150.000.000		150.000.000	
		8	01	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	-	3 laptop, 3 printer, 1 kamera	77.500.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
		8	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	57.392.000	100%	72.000.000	100%	80.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000	
		8	01	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	24.892.000	-	27.000.000	1 mobil, 21 sepeda motor	35.000.000		40.000.000	100%	40.000.000	
		8	01	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	7.500.000	-	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	25.000.000	100%	35.000.000	14 AC, 18 laptop, 9 komputer, 16 printer	35.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan							Persentase konflik yang tertangani	100%		100%		100%		100%		100%		

(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	289.298.500	100%	344.152.347	100%	314.049.297	100%	314.049.297	100%	314.049.297		
		8	01	02	2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah jenis kegiatan	6 jenis	289.298.500	6 jenis	344.152.347	6 jenis	314.049.297	6 jenis	314.049.297		314.049.297		
		8	01	02	2.01	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 org	289.298.500	org	344.152.347	org	314.049.297	org	314.049.297	org	314.049.297	
		8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang terfasilitasi	100%	1.503.198.050	100%	1.803.048.050	100%	1.685.250.000	100%	1.853.775.000	100%	1.853.775.000		
		8	01	06	2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	0 konflik	1.503.198.050	0 konflik	1.803.048.050	0 konflik	1.685.250.000	0 konflik	1.853.775.000	0 konflik	1.853.775.000		

(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8	01	06	2.01	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	org	1.503.198.050	org	1.803.048.050	org	1.305.350.000	1.435.885.000	org	1.435.885.000	
		8	01	06	2.01	06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 dokumen	379.900.000	1 dokumen	417.890.000	1 dokumen	417.890.000	
		8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yg dilakukan dengan pemangku kepentingan	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	60.000.000	
		8	01	05	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah koordinasi	3 kali	60.000.000	3 kali	60.000.000	3 kali	60.000.000	3 kali	60.000.000	60.000.000	
		8	01	05	2.01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	100 org	60.000.000	org	60.000.000	org	60.000.000	org	60.000.000	60.000.000	

(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Daerah											
	Meningkatnya Partisipasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah						Persentase Partai Politik Pemenang Pemilu yang Lolos Verifikasi	100%		100%		100%		100%		100%		
		8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	100%	871.058.100	100%	1.139.076.250	100%	2.220.062.030	100%	2.220.062.030	100%	2.220.062.030	
		8	01	03	2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	80%	871.058.100		1.139.076.250		2.220.062.030		2.220.062.030		2.220.062.030	

(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8	01	03	2. 01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	org	725.062.000	org	993.080.150	33 org	980.581.030	33 org	980.581.030	33 org	980.581.030	
		8	01	03	2. 01	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	org	145.996.100	125 org	145.996.100	125 org	34.353.000	125 org	34.353.000	125 org	34.353.000	

(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		8	01	03	2.01	05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	1 laporan	1.205.128.000	1 laporan	1.205.128.000	1 laporan	1.205.128.000		
	Meningkatnya Partisipasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah							Jumlah Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	-	-		1 organisasi		1 organisasi		1 organisasi			
		8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase status kelembagaan Orkemas	68%	272.985.000	68%	222.985.000	68%	185.337.000	68%	185.337.000	68%	185.337.000	
		8	01	04	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tingkat keaktifan organisasi kemasyarakatan	75%	272.985.000	75%	222.985.000	75%	185.337.000	75%	185.337.000	75%	185.337.000	

(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8	01	04	2.01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	org	272.985.000	org	222.985.000	75 org	185.337.000	75 org	185.337.000	75 org	185.337.000	
	eningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kerukunan Beragama, Kehidupan Sosial dan Budaya							Jumlah Konflik Keagamaan, Kehidupan Sosial dan Budaya	-10 kejadian/konflik		-10 kejadian/konflik	-10 kejadian/konflik		-10 kejadian/konflik		-10 kejadian/konflik		-10 kejadian/konflik	
		8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yg dilakukan dengan pemangku kepentingan	100%	389.692.000	100%	493.661.370	100%	493.661.370	100%	493.661.370	100%	493.661.370	
		8	01	05	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah koordinasi	3 kali	389.692.000	3 kali	493.661.370	3 kali	493.661.370	3 kali	493.661.370	3 kali	493.661.370	
		8	01	05	2.01	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 org	389.692.000	400 org	493.661.370	400 org	493.661.370	400 org	493.661.370	400 org	493.661.370	

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase konflik yang tertangani	96,15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Peningkatan Orkemas yang Berbadan Hukum	-	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi
4	Jumlah Konflik Keagamaan, Kehidupan Sosial dan Budaya	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10

Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kerukunan	B (73,95) (Harmonis)	(B 74,03) (Harmonis)	B (74,30) (Harmonis)	B (74,40) (Harmonis)	B (74,46) (Harmonis)	B (75,00) (Harmonis)	B (75,00) (Harmonis)	Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase konflik yang tertangani	96,15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
3	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
4	Jumlah Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	-	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	Indikator Sasaran PD
5	Jumlah Konflik Keagamaan, Kehidupan Sosial dan Budaya	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	Indikator Sasaran PD
6	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
7	persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
8	persentase Status Kelembagaan Orkemas	81,80%	72,91%	68%	69%	69%	70%	70%	Indikator Program PD
9	persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
10	Konflik horizontal di dalam masyarakat	0 konflik	0 konflik	0 konflik	-	-	-	0 konflik	Indikator Program PD
11	Persentase masyarakat yang memahami nilai-nilai Nasionalisme	-	-	100%	-	-	-	100%	Indikator Program PD
12	Persentase pemahaman masyarakat dibidang politik	-	-	100%	-	-	-	100%	Indikator Program PD
13	Persentase konflik yang terfasilitasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
14	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum	-	40%	45%	-	-	-	45%	Indikator Lama
15	Cakupan Hubungan Sosial	-	2,6	-	-	-	-	2,6	Indikator Lama
16	Persentase Organisasi Kemasyarakatan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

Y. KECAMATAN TAMAN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024

Permasalahan Kecamatan Taman

No	Permasalahan
1	Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
2	Kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal
3	Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representatif
4	Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan
5	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja
6	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kecamatan dengan Kelurahan, maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7	Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi

Isu Strategis Kecamatan Taman

No	Isu Strategis
1	Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat di kelurahan tidak optimal. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif masih rendah
2	Masih perlu ditingkatkannya kompetensi aparatur pemerintahan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas
3	Masih perlunya peningkatan peran serta masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat, pemuda dan <i>stakeholder</i> yang ada di wilayah Kelurahan maupun Kecamatan dalam proses perencanaan maupun pembangunan daerah
4	Masih diperlukannya peningkatan standar kompetensi aparatur melalui pelatihan dan diklat dalam rangka menyambut era digitalisasi dan aplikasi, dimana pada masa saat ini setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun pelayanan menggunakan teknologi

No	Isu Strategis
5	Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana yang diperoleh aparaturnya pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat
6	Permasalahan umum dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang ditentukan oleh kemauan dan kepedulian sosial dari warga masyarakat. Di era saat ini semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan

Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung Kecamatan Taman

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis <i>smart cities</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun

Tujuan Kecamatan Taman

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan yang baik	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	21,48	21,56	21,64	21,72	21,80
		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan	100%	100%	100%	-	-

Sasaran Kecamatan Taman

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	78,11	80,49	80,58	80,76	80,90
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (masyarakat dan mitra kecamatan)	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	2,60	3,25	3,30	3,50	3,70
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Taman	100%	100%	100%	100%	100%
4	meningkatkan pemberdayaan masyarakat kecamatan	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	11%	22%	33%	44%	55%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Taman

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												unit kerja OPD penanggung jawab
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya pemerintahan Kecamatan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		78.11		80.49	11,964,523,606	80.58	11,329,439,485	80,76	13.651.463.063	80,90	14.334.036.216	80,90	15.050.738.027	Kecamatan Taman
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah					58,967,520		78,787,547	100%	9.267.887	100%	9.731.281	100%	10.217.845	Kecamatan Taman
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun			12 dokumen	58,967,520	12 dokumen	78,787,547	18 dokumen	9.267.887	18 dokumen	9.731.281	18 dokumen	10.217.845	Kecamatan Taman	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan				9,388,384,545		9,850,172,584	100%	12.388.328.104	100%	13.007.744.509	100%	13.658.131.735	Kecamatan Taman	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100 %	9,388,384,545	100 %	9,850,172,584	76 Orang/Bulan	12.388.328.104	76 Orang/Bulan	13.007.744.509	100%	13.658.131.735	Kecamatan Taman	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian				7,412,175		18,151,972	100%	18.151.972	100%	19.059.571	100%	20.012.549	Kecamatan Taman	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			100 %	7,412,175	100 %	18,151,972	100 Orang	18.151.972	100 Orang	19.059.571	100 Orang	20.012.549	Kecamatan Taman	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah				1,657,809,351		1,195,184,282	100%	998.572.000	100%	1.048.500.600	100%	1.100.925.630	Kecamatan Taman	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100 %	1,639,787,350	100 %	1,096,612,282	21 paket	900.000.000	21 paket	945.000.000	100%	992.250.000	Kecamatan Taman	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	18,022,001	100 %	98,572,000	10 Laporan	98.572.000	10 Laporan	103.500.600	100%	108.675.630	Kecamatan Taman
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang layak digunakan					651,828,265		2,195,100	100%	2.195.100	100%	2.304.855	100%	2.420.098	Kecamatan Taman
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak					-	11 Unit	357,600	1 Unit	357.600	1 Unit	30.000.000	1 Unit	31.500.000	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor/Bangunan				2 Paket	651,828,265	2 Paket	1,837,500	1 Unit	1.837.500	1 Unit	1.929.375	1 Unit	2.025.844	Kecamatan Taman

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara				200,121,750		184,948,000	100%	234.948.000	100%	246.695.400	100%	259.030.170	Kecamatan Taman	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			100%	63,621,750	100%	48,448,000	16 Unit	48.448.000	16 Unit	50.870.400	16 Unit	53.413.920	Kecamatan Taman	
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			100%	100,000,000	100%	100,000,000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	157.500.000	2 Unit	165.375.000	Kecamatan Taman	
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/			100%	36,500,000	100%	36,500,000	6 Unit	36.500.000	6 Unit	38.325.000	6 Unit	40.241.250	Kecamatan Taman	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
					Direhabilitasi														
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			88 Skor	8,112,850,452	88.29 Skor	7,030,198,834	88 Skor	5.506.077.883	88 Skor	5.781.381.777	88 Skor	6.070.450.866	Kecamatan Taman	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan				8,046,209,512		6,946,790,007	100%	5.479.874.496	100%	5.753.868.220	100%	6.041.561.632	Kecamatan Taman	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mojorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100%	887,479,738	100%	803,853,550	12 Laporan	660.519.497	12 Laporan	693.545.472	12 Laporan	728.222.745	Kecamatan Taman	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan			100%	950,773,030	100%	794,476,545	12 Laporan	630.555.272	12 Laporan	662.083.035	12 Laporan	695.187.187	Kecamatan Taman	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
				Wilayah Kecamatan Kelurahan Pandean	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Banjarejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100 %	817,422,187	100 %	767,082,000	12 Laporan	601.276.632	12 Laporan	631.340.464	12 Laporan	662.907.487	Kecamatan Taman	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kuncen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100 %	521,179,707	100 %	526,312,500	12 Laporan	355.224.342	12 Laporan	372.985.559	12 Laporan	391.634.837	Kecamatan Taman	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Manisrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah			100 %	1,142,104,310	100 %	944,994,648	12 Laporan	756.170.369	12 Laporan	793.978.887	12 Laporan	833.677.832	Kecamatan Taman	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
					Kecamatan														
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kejuron	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100 %	845,179,616	100 %	787,925,828	12 Laporan	632.858.235	12 Laporan	664.501.147	12 Laporan	697.726.204	Kecamatan Taman	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Josenan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100 %	915,300,135	100 %	730,589,826	12 Laporan	559.657.369	12 Laporan	587.640.237	12 Laporan	617.022.249	Kecamatan Taman	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Demangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100 %	1,060,739,039	100 %	728,046,410	12 Laporan	596.149.147	12 Laporan	625.956.604	12 Laporan	657.254.435	Kecamatan Taman	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Taman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100 %	906,031,750	100 %	863,508,700	12 Laporan	687.463.634	12 Laporan	721.836.816	12 Laporan	757.928.656	Kecamatan Taman	
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi				66,640,940		83,408,827	100%	26.203.387	100%	27.513.556	100%	28.889.234	Kecamatan Taman	
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			100 %	66,640,940	100 %	83,408,827	4 Dokumen	26.203.387	4 Dokumen	27.513.556	100%	28.889.234	Kecamatan Taman	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah usulan prioritas Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD				3,373,446,350		3,210,061,090	100%	2.954.468.365	100%	3.102.191.783	100%	3.257.301.372	Kecamatan Taman		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3,373,446,350		3,210,061,090	100%	2.954.468.365	100%	3.102.191.783	100%	3.257.301.372	Kecamatan Taman		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			18 usulan	254,851,690	18 usulan	291,351,905	7 Lembaga Kemasyarakatan	334.146.465	18 usulan	350.853.788	18 usulan	368.396.478	Kecamatan Taman		
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojorejo			-	-	3 paket	205,000,000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	525.000.000	1 Unit	551.250.000	Kecamatan Taman		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandean	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 paket	240,945,140	3 paket	515,764,750	1 Unit	60.000.000	1 Unit	63.000.000	1 Unit	66.150.000	Kecamatan Taman	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjarejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 paket	262,354,000	3 paket	175,000,000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	210.000.000	1 Unit	220.500.000	Kecamatan Taman	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuncen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	3 paket	200,125,000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	420.000.000	1 Unit	441.000.000	Kecamatan Taman	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manisrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 paket	398,000,000	3 paket	200,000,000	1 Unit	175.000.000	1 Unit	183.750.000	1 Unit	192.937.500	Kecamatan Taman	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejuron	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 paket	239,935,000	3 paket	200,000,000	1 Unit	115.000.000	1 Unit	120.750.000	1 Unit	126.787.500	Kecamatan Taman	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Josenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 paket	201,085,970	3 paket	200,000,000	1 Unit	140.000.000	1 Unit	147.000.000	1 Unit	154.350.000	Kecamatan Taman	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 paket	209,968,000	3 paket	238,060,000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	157.500.000	1 Unit	165.375.000	Kecamatan Taman	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 paket	439,780,000	3 paket	356,500,000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	262.500.000	1 Unit	275.625.000	Kecamatan Taman	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100 %	250,000,000	100 %	72,937,535	2 Pokmas / Ormas	75.000.000	2 Pokmas / Ormas	78.750.000	2 Pokmas / Ormas	82.687.500	Kecamatan Taman	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandean	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100 %	165,775,500	100 %	73,603,000	2 Pokmas / Ormas	73.603.000	2 Pokmas / Ormas	77.283.150	2 Pokmas / Ormas	81.147.308	Kecamatan Taman	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjarejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-	-	100 %	75,000,000	2 Pokmas / Ormas	75.000.000	2 Pokmas / Ormas	78.750.000	2 Pokmas / Ormas	82.687.500	Kecamatan Taman	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kuncen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-	-	100 %	38,887,500	2 Pokmas / Ormas	38.887.500	2 Pokmas / Ormas	40.831.875	2 Pokmas / Ormas	42.873.469	Kecamatan Taman	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manisrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100 %	260,125,750	100 %	75,000,000	2 Pokmas / Ormas	75.000.000	2 Pokmas / Ormas	78.750.000	2 Pokmas / Ormas	82.687.500	Kecamatan Taman	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Josenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan			100 %	250,000,000	100 %	75,000,000	2 Pokmas / Ormas	75.000.000	2 Pokmas / Ormas	78.750.000	2 Pokmas / Ormas	82.687.500	Kecamatan Taman	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
					an Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kejuron	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100 %	200,625,300	100 %	67,831,400	2 Pokmas / Ormas	67.831.400	2 Pokmas / Ormas	71.222.970	2 Pokmas / Ormas	74.784.119		Kecamatan Taman
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Demangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-	-	100 %	75,000,000	2 Pokmas / Ormas	75.000.000	2 Pokmas / Ormas	78.750.000	2 Pokmas / Ormas	82.687.500		Kecamatan Taman
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Taman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-	-	100 %	75,000,000	2 Pokmas / Ormas	75.000.000	2 Pokmas / Ormas	78.750.000	2 Pokmas / Ormas	82.687.500		Kecamatan Taman

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
					Kelurahan														
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan							1 Lembaga / Forum	37,595,000	1 Lembaga / Forum	39,474,750	1 Lembaga / Forum	41,448,488		
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							1 laporan	37,595,000	1 laporan	39,474,750	1 laporan	41,448,488		
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kecamatan	Persentase Terfasilitasi Pencegahan Gangguan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase hasil pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan				456,693,990	100%	663,185,090	100%	566.062.850	100%	594.365.993	100%	624.084.292	Kecamatan Taman	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
			Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti				300,156,800		304,789,150	100 %	264.872.350	100 %	278.115.968	100 %	292.021.766	Kecamatan Taman	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			100 %	300,156,800	100 %	304,789,150	12 laporan	264.872.350	12 laporan	278.115.968	12 laporan	292.021.766	Kecamatan Taman	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti				156,537,190		358,395,940	100%	301.190.500	100%	316.250.025	100%	332.062.526	Kecamatan Taman	
				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			100%	156,537,190	100%	358,395,940	10 Laporan	301.190.500	100%	316.250.025	100%	332.062.526	Kecamatan Taman	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan dan tidak dilaksanakan perangkat				114,893,950		156,717,790	100%	102.223.710	100%	107.334.896	100%	112.701.640	Kecamatan Taman	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
					daerah lain														
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan kepala daerah yang ditindaklanjuti				114,893,950		156,717,790	100%	102.223.710	100%	107.334.896	100%	112.701.640	Kecamatan Taman	
				Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan			1 kali	41,385,330		1 kali	91,906,300	200 Orang	71.989.500	200 Orang	75.588.975	200 Orang	79.368.424	Kecamatan Taman

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										unit kerja OPD penanggung jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
					an dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			100 %	47,695,660	100 %	36,539,490	4 laporan	28.272.000	4 laporan	29.685.600	4 laporan	31.169.880	Kecamatan Taman	
				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			2 dokumen	25,812,960	2 dokumen	28,272,000	3 dokumen	1.962.210	3 dokumen	2.060.321	3 dokumen	2.163.337	Kecamatan Taman	
TOTAL									24,022,408,348		22,389,602,289		22.780.295.871		23.919.310.664		25.115.276.197		

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Taman

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman		11%	22%	33%	44%	55%	55%
2	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman		2,60	3,25	3,30	3,50	3,70	3,70
3	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Taman		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Taman

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Tujuan PD
2	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman		11%	22%	33%	44%	55%	55%	Indikator Sasaran PD
3	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman		2,6	3,25	3,3	3,5	3,7	3,7	Indikator Sasaran PD
4	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Taman		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%				100%	Indikator Sasaran PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Taman		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	88,3	88,29	88,12	88,46	88,78	88,94	88,94	Indikator Program
8	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Taman dan tidak dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah lain		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
9	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Taman		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
10	Jumlah usulan prioritas musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD di kecamatan	18 usulan	18 usulan	18 usulan	-	-	-	18 usulan	Indikator Program PD
11	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
12	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah	-	10	-	-	-	-	10	Indikator Lama
14	Indeks perkembangan kelurahan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

Z. KECAMATAN MANGUHARJO

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Kecamatan Manguharjo

No	Permasalahan
1	Kualitas dan kuantitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal
2	Menurunnya semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan sebagai akibat berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan

Isu Strategis Kecamatan Manguharjo

No	Isu Strategis
1	Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat di kelurahan tidak optimal. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif masih rendah.
2	Belum optimalnya Sumber Daya Aparatur Kelurahan untuk mengisi data-data potensi Profil dan Monografi di kelurahan
3	Permasalahan umum dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang ditentukan oleh kemauan dan kepedulian sosial dari warga masyarakat. Di era saat ini semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan

Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung Kecamatan Manguharjo

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis <i>smart cities</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Madiun

Tujuan Kecamatan Manguharjo

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan yang baik	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	21,48	15,00	15,00	18,31	18,35
		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan	100%	100%	100%	-	-

Sasaran Kecamatan Manguharjo

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Manguharjo	79,37	80,01	80,01	80,05	80,10
2	meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo	2.77	3.08	3.08	3.08	3.08
3	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Manguharjo	100%	100%	100%	100%	100%
4	meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	11%	33%	44%	55%	66%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Manguharjo

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi							
									2020		2021		2022		2023				2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
									targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et	Rp			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
																23.806.757.564		24.552.917.895							
Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kecamatan	Nilai Sakip OPD	80,01 Skor	X	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor			79,37 Nilai		80,01 Nilai	11.536.794.226	80,05 Nilai	12.832.851.052	80,10 Nilai	13.187.816.056	80,10 Nilai	13.187.816.056	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo		
				X	1	2		Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persen (%)			100%		100%	68.784.000	100%	72.223.200	100%	75.834.360	100%	75.834.360	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				X	1	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Perangkat Daerah	Dokumen			20 Dokumen		20 Dokumen	68.784.000								Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Kinerja SKPD																
			X X	1 0 1	2 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					20	72.223.200	20	75.834.360	20	75.834.360	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			X X	0 1	2 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persen (%)		100%	9.852.245.010	100%	9.508.666.943	100%	9.953.531.808	100%	10.451.208.399	10.451.208.399	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			X X	0 1	2 0 2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Persen (%)		100%	9.850.245.010	100%	9.506.666.943						Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					70	9.951.431.808	70	10.449.003.399	70	10.449.003.399	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			X X	0 1	2 0 2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan perangkat daerah	Dokumen		13 Dokumen	2.000.000	13 Dokumen	2.000.000						Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan					26	2.100.000	26	2.205.000	26	2.205.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					n Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD																
			X X 1 0 2 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	Persen (%)				100 %	7.200.000	100 %	7.200.000	100 %	7.560.000	100 %	7.938.000	100 %	7.938.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			X X 1 0 2 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang								70	159.930.985	70	159.930.985	70	159.930.985	Kecamatan Manguharjo	
			X X 1 0 2 5	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Presentase peserta yang memahami	Persen (%)				100 %	7.200.000	100 %	7.200.000							Kecamatan Manguharjo	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang								100	7.560.000	100	7.938.000	100	7.938.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			X X 1 0 2 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persen (%)				100 %	143.751.000	100 %	128.715.000	100 %	143.751.000	100 %	143.751.000	100 %	143.751.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			X X 1 0 2 6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Persen (%)				100 %	143.751.000	100 %	128.715.000							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan								12	143.751.000	12	143.751.000	12	143.751.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					SKPD																
			X X	0 1	2 ,	0 7				100 %		100 %	149.029.5 00	100 %	880.00 0.000	100 %	650. 000. 000	100 %	650.000.000	Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
			X X	0 1	2 ,	0 7	0			100 %		100 %	16.632.00 0							Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
														9	540.00 0.000	0	100. 000. 000	0	100.000.000	Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
			X X	0 1	2 ,	0 7	0			100 %		100 %	125.000.0 00							Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
														1	200.00 0.000	1	100. 000. 000	1	100.000.000	Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
			X X	0 1	2 ,	0 7	1			100 %		100 %	7.397.500							Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit								10 Unit Komputer PC	140.000.000	18 Unit AC Blower	450.000.000	10	450.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			XX1,08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persen (%)				100%	1.178.763.520	100%	1.470.773.880	100%	1.562.281.056	100%	1.640.395.109	100%	1.640.395.109	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			XX1,08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Persen (%)				100%	1.178.763.520	100%	1.470.773.880							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan								12	1.562.281.056	12	1.640.395.109	12	1.640.395.109	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			XX1,09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persen (%)				100%	176.157.200	100%	203.624.903	100%	213.503.988	100%	218.689.188	100%	218.689.188	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
			X X	0 1	2 0	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan				100 %		100 %	59.559.200							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit							15	64.500.000	15	64.500.000	15	64.500.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	
			X X	0 1	2 0	0 9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan				100 %		100 %	98.765.703							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit							6	103.703.988	6	108.889.188	6	108.889.188	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	
			X X	0 1	2 0	1 9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	persentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan				100 %		100 %	45.300.000							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					bangunan lainnya																
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit								60	45.300.000	60	45.300.000	60	45.300.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2,80 Indeks	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor			90,54 Nilai	5.839.326.200	90,49 Nilai	7.189.758.228	90,03 Nilai	6.553.593.481	90,03 Nilai	6.881.273.156	90,03 Nilai	6.881.273.156	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			01	02	202	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persen (%)		100 %	5.777.120.760	100 %	7.127.552.778	100 %	6.488.277.769	100 %	6.812.691.658	100 %	6.812.691.658	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			01	02	203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan		100 %	5.777.120.760	100 %	7.127.552.778	100 %	6.488.277.769	100 %	6.812.691.658	100 %	6.812.691.658	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Peningkatan	Prosentase terselesaik				100 %	676.435.	100 %	944.241.9							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Manguharjo	anya permohonan rekomendasi di kelurahan						390		27								n Manguharjo	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan								12	750.938.570	12	788.485.499	12	788.485.499	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Sogaten	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan					100%	606.059.440	100%	737.064.585							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan								12	676.361.217	12	710.179.278	12	710.179.278	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Prosentase terselesaikanya permohonan					100%	564.646.940	100%	680.050.833								Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Patihan	rekomendasi di kelurahan															rjo
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan							12	631.740.417	12	663.327.438	12	663.327.438	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Ngegong	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan				100%	537.925.440	100%	721.326.580							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan							12	600.900.237	12	630.945.249	12	630.945.249	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan				100%	679.919.280	100%	755.447.545							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Kelurahan Winongo																
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan								12	761.351.724	12	799.419.310	12	799.419.310	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Madiun Lor	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan				100%	647.663.200	100%	837.376.000							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan								12	729.558.375	12	766.036.294	12	766.036.294	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Pangonggan	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan				100%	556.909.650	100%	720.672.579							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan								12	624.412.635	12	655.633.267	12	655.633.267	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Nambangan Lor	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan					100%	792.635.280	100%	905.300.000							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan								12	919.726.689	12	965.713.023	12	965.713.023	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan					100%	714.926.140	100%	826.072.739							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan								12	793.287.905	12	832.952.300	12	832.952.300	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			0123	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Sarana Pelayanan Umum	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	Persen (%)				100%	62.205.440	100%	62.205.440	100%	65.315.712	100%	68.581.498	100%	68.581.498	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			0123	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Pertemuan				8 Kali	62.205.440	8 Kali	62.205.440							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	Dokumen								1	65.315.712	1	68.581.498	1	68.581.498	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase kelurahan yang terklarifikasi swasembada	44%	013	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				100%		100%	2.644.100.425	100%	3.150.000.000	100%	3.150.000.000	100%	3.150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				0132	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat				100%		100%	2.644.100.425	100%	3.150.000.000	100%	3.150.000.000	100%	3.150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				0132	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang Manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota				11%		12%	282.113.460							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencana									7	283.080.378	7	297.234.397	7	297.234.397	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					an Pembangu nan di Kelurahan																
			0 1 3 2 0 2	Pembangu nan Sarana dan Prasaraan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Unit				27 pake t	2.645.00 0.000	27 pake t	1.125.599. 410	27 pake t	1.800. 000.00 0	27 pake t	1.80 0.00 0.00 0	27 pake t	1.800.000.00 0	Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
				Pembangu nan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manguharj o	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi					3 pake t	350.000. 000	3 pake t	67.539.50 0							Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit								2	200.00 0.000	2	200. 000. 000	2	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
				Pembangu nan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi					3 pake t	350.000. 000	3 pake t	322.785.8 00							Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit								2	200.00 0.000	2	200. 000. 000	2	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
				Pembangu nan Sarana dan Prasarana Kelurahan n Patihan	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi					3 pake t	350.000. 000	3 pake t	129.000.0 00							Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	Unit								2	200.00 0.000	2	200. 000. 000	2	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
					Terbangun																		
					Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Ngegong	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi					3 paket	198.000.000	3 paket	48.850.000							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit							2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Winongo	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi					3 paket	350.000.000	3 paket	48.106.905								Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit							2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madiun Lor	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi					3 paket	367.000.000	3 paket	106.120.000								Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit							2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangongan	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi					3 paket	120.000.000	3 paket	51.939.800								Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					gan																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit							2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Lor	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi				3 paket	500.000.000	3 paket	253.920.000							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit							2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Kidul	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi				3 paket	60.000.000	3 paket	97.337.405							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit							2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			0130203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat					100%		100%	1.236.387.555	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam					40%		40%	100.000.000							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Manguharjo	Kegiatan Pemberdayaan																rjo
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas								5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sogaten	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					35%		35%	210.551.020							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas								5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patihan	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					30%		30%	141.000.000							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas								5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngegong	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					30%	-	30%	168.347.550							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas								5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Winongo	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					40%	-	40%	115.267.785							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas								5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Madiun Lor	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					40%	-	40%	141.100.000							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Pokmas /Ormas								5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pangongan	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					35%	-	35%	128.112.200							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas								5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nambangan Lor	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					30%	-	30%	57.009.000							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas								5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					45%	-	45%	175.000.000							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas							5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			0132	003	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga kemsyarakatan Tingkat Kecamatan	Lembaga /forum							2 Forum	133.466.530	2 Forum	133.466.530	2 Forum	133.466.530	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			0132	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan							1	133.466.530	1	133.466.530	1	133.466.530	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase terfasilitasinya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	014	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen (%)			100%	263.985.880	100%	815.576.400	100%	1.079.290.212	100%	1.133.254.723	100%	1.133.254.723	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			014	201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	Persen (%)			100%	129.180.440	100%	324.385.300	100%	831.847.212	100%	873.439.573	100%	873.439.573	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			014	202	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan				12 Kali	129.180.440	12 Kali	324.385.300							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
						Jumlah Laporan Pelaksanaan	Laporan							1	831.847.212	1	873.439.573	1	873.439.573	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												573				Man guha rjo
			0 1 4 0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Prosentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti					100 %	134.805. 440	100 %	491.191.1 00	100 %	247.44 3.000	100 %	259. 815. 150	100 %	259.815.150	Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
			0 1 4 0 2 0 1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan					14 Kali	134.805. 440	14 Kali	491.191.1 00							Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
					Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Lapo ran								1	247.44 3.000	1	259. 815. 150	1	259.815.150	Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
			0 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase kewenangan yang	Pers en (%)				100 %	181.926. 494	100 %	181.926.4 94	100 %	191.02 2.819	100 %	200. 573.	100 %	200.573.960	Kecamatan Manguharjo	Keca mata n

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)											960					Man guha rjo
			0 1	0 5	2 0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Persen (%)			100 %	181.926.494	100 %	181.926.494	100 %	191.022.819	100 %	200.573.960	100 %	200.573.960	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			0 1	0 5	2 0 1	0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi			2 Kali	111.926.494	2 Kali	111.926.494							Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
							Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang									350	117.522.819	350	123.398.960	350	123.398.960	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	
			01501	205	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan					100%		55.000.000	100%	55.000.000								Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani	Laporan									1	57.750.000	1	60.637.500	1	60.637.500	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
							Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan																	rjo	
			0 1	0 5	2 0 1	0 7	Pelaksana an Semua Urusan Pemerinta h yang Bukan Merupaka n Kewenang an Daerah dan Tidak Dilaksana kan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan					2 doku men		2 doku men	15.000.00 0								Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pmerintah an yang Bukan Merupaka n Kewenang an Daerah dan Tidak Dilaksana kan oleh Instansi Vertikal										2	15.750 .000	2	16.5 37.5 00	2	16.537.500	Kecamatan Manguharjo	Keca mata n Man guha rjo	

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Manguharjo

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	0%	11%	33%	44%	55%	66%	66%
2	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo		2,77	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
3	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Manguharjo		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Manguharjo

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Tujuan PD
2	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	0%	11%	33%	44%	55%	66%	66%	Indikator Sasaran PD
3	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo		2,77	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	Indikator Sasaran PD
4	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Manguharjo		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%				100%	Indikator Sasaran PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Manguharjo		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	93,34	90,54	90,49	90,03	90,03	90,03	90,03	Indikator Program
8	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Manguharjo dan tidak dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah lain		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
9	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Manguharjo		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
10	Jumlah usulan prioritas musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD di kecamatan	18 usulan	18 usulan	18 usulan	-	-	-	18 usulan	Indikator Program PD
11	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
12	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah	-	10	-	-	-	-	10	Indikator Lama
14	Indeks perkembangan kelurahan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

AA. KECAMATAN KARTOHARJO

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Kecamatan Kartoharjo

No	Permasalahan
1	Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
2	Kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal
3	Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative
4	Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan
5	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja
6	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kecamatan dengan Kelurahan, maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7	Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi

Isu Strategis Kecamatan Kartoharjo

No	Isu Strategis
1	Masih perlu ditingkatkannya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pembangunan
2	Masih perlu ditingkatkannya Sumber Daya Manusia di kelurahan dalam mengelola data dan aplikasi profil serta monografi kelurahan sehingga pemetaan potensi wilayah kelurahan belum tersajikan dengan baik
3	Sarana dan prasarana kecamatan belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat
4	Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia di kecamatan dan kelurahan

Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung Kecamatan Kartoharjo

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis <i>smart cities</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Madiun

Tujuan Kecamatan Kartoharjo

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan yang baik	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	24, 87	15	15	15	15
		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan	100%	100%	100%	-	-

Sasaran Kecamatan Kartoharjo

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	78,79	80,01	80,05	80,1	80,15
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (masyarakat dan mitra kecamatan)	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo	2,85	2,9	2,93	2,96	2,99
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Kartoharjo	100%	100%	100%	100%	100%
4	meningkatkan pemberdayaan masyarakat kecamatan	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	22%	33%	44%	55%	66%

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kartoharjo

Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Lokasi		
							2021		2022			2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
							Target	pendanaan	Target	pendanaan		Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target		pendanaan	
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Sasaran 2	1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	A	10.930.705.433	A	10.620.493.313	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80,1	13.198.531.692	80,15	13.210.800.670	A	13.210.800.670	
	1	1	1	02:01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	58.003.140	100%	68.913.300	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	15.266.520	100%	17.556.498	100%	17.556.498	
	1	1	1	02:01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	19.331.840	6 dokumen	57.776.800	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 dokumen	15.266.520	20 dokumen	17.556.498	20 dokumen	17.556.498	
	1	1	1	02:01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	12 dokumen	19.928.000	12 dokumen	7.027.000								
	1	1	1	02:01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	2 dokumen	18.743.300	2 dokumen	4.109.500								

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	1	1	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	8.302.839.400	100%	8.381.822.530	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	11.491.585.446	100%	11.491.585.446	100%	11.491.585.446	
	1	1	1	02:01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	8.300.839.400	100%	8.379.822.530	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/bulan	11.489.585.446	70 orang/bulan	11.489.585.446	70 orang/bulan	11.489.585.446	
	1	1	1	02:07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 dokumen	2.000.000	13 dokumen	2.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 dokumen	2.000.000	13 dokumen	2.000.000	13 dokumen	2.000.000	
	1	1	1	02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	3.878.600	100%	7.192.555	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	14.700.000	100%	16.905.000	100%	8.452.500	
	1	1	1	02:05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang paham	100%	3.878.600	100%	7.192.555	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70	14.700.000	70	16.905.000	70	8.452.500	
	1	1	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	0	156.615.000	87,7	124.246.000	IKM Perangkat Daerah	87,75	138.900.000	87,8	138.900.000	87,8	138.900.000	
	1	1	1	02:06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	156.615.000	100%	124.246.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	138.900.000	12 laporan	138.900.000	12 laporan	138.900.000	

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	1	1	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100%	634.133.255	100%	387.509.000	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100%	375.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000		
	1	1	1	02:07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang representatif	100%	336.350.000	100%	199.300.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	
	1	1	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100%	297.783.255	100%	188.209.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	175.000.000	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	
	1	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	1.518.777.038	100%	1.499.143.928	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	1.018.244.726	100%	1.018.244.726	100%	1.018.244.726	
	1	1	1	02:08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	1.518.777.038	100%	1.499.143.928	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.018.244.726	12 laporan	1.018.244.726	12 laporan	1.815.589.846	
	1	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	256.459.000	100%	151.666.000	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	144.835.000	100%	127.609.000	100%	127.609.000	
	1	1	1	02:09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	100%	25.251.000	100%	25.251.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 unit	25.251.000	14 unit	25.251.000	14 unit	25.251.000	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							layak digunakan												
	1	1	1	02:09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak digunakan	100%	18.756.000	100%	10.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	31.624.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	
	1	1	1	02:09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100%	175.677.000	100%	74.800.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	53.000.000	1 unit	55.650.000	1 unit	55.650.000	
	1	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100%	36.775.000	100%	41.615.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit	34.960.000	60 unit	36.708.000	60 unit	36.708.000	
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,7	7.476.445.846	87,75	6.902.855.400	Indek Kepuasan Masyarakat	87,8	5.068.294.200	87,85	5.321.708.910	87,85	5.321.708.910	
	7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	7.409.437.606	100%	6.838.223.400	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	5.029.400.000	100%	5.280.870.000	100%	5.280.870.000	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	7	1	2	02:	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	100%	874.497.135	100%	805.261.435	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	590.700.000	12 laporan	620.235.000	12 laporan	620.235.000	Kelurahan Kanigoro
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	100%	897.943.928	100%	736.288.852	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	534.200.000	12 laporan	560.910.000	12 laporan	560.910.000	Kelurahan Kartoharjo
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	100%	784.516.393	100%	711.089.645	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	530.000.000	12 laporan	556.500.000	12 laporan	556.500.000	Kelurahan Kelun
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	100%	985.590.540	100%	852.451.881	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	639.800.000	12 laporan	671.790.000	12 laporan	671.790.000	Kelurahan Klegen
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	100%	833.228.250	100%	786.013.300	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 laporan	590.700.000	12 laporan	620.235.000	12 laporan	620.235.000	Kelurahan Oro - oro Ombo

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Kecamatan Kartoharjo						kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	100%	742.147.994	100%	759.142.972	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	538.000.000	12 laporan	564.900.000	12 laporan	564.900.000	Kelurahan Pilangbang
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	100%	791.140.076	100%	794.105.915	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	600.000.000	12 laporan	630.000.000	12 laporan	630.000.000	Kelurahan Rejomulyo
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	100%	753.868.290	100%	700.869.400	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	508.000.000	12 laporan	533.400.000	12 laporan	533.400.000	Kelurahan Sukosari
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	100%	746.505.000	100%	693.000.000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	498.000.000	12 laporan	522.900.000	12 laporan	522.900.000	Kelurahan Tawangrejo

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	7	1	2	02:03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100%	67.008.240	100%	64.632.000	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100%	38.894.200	100%	40.838.910	100%	40.838.910	
	7	1	2	02:03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi / pertemuan	6 pertemuan	67.008.240	3 pertemuan	64.632.000	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 dokumen	38.894.200	3 dokumen	40.838.910	3 dokumen	40.838.910	
Sasaran 2	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	jumlah usulan prioritas musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	18 usulan	4.028.206.193	18 usulan	3.052.276.276	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	4.553.803.575	100%	3.509.233.879	100%	3.509.233.879	
	7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	4.028.206.193	100%	3.052.276.276	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	4.553.803.575	100%	3.509.233.879	100%	3.509.233.879	
	7	1	3	02:02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang	100%	266.491.210	100%	259.000.770	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	7 lembaga kemasyarakatan	269.452.075	7 lembaga kemasyarakatan	282.924.679	7 lembaga kemasyarakatan	282.924.679	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Kelurahan	kota					Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
	7	1	3	02:	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	3.761.714.983	2 paket	2.327.432.471	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	3.843.053.500	2 unit	1.800.000.000	2 unit	1.800.000.000	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	445.750.000	2 paket	238.494.375	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	771.392.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	Kelurahan Kanigoro
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	337.600.000	2 paket	299.119.280	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	214.119.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	Kelurahan Kartoharjo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	524.429.600	2 paket	290.181.755	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	540.266.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	Kelurahan Kelun
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	407.000.000	2 paket	317.161.400	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	435.580.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	Kelurahan Klegen
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	465.829.420	2 paket	300.655.360	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	405.220.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	Kelurahan Oro - oro Ombo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	542.666.513	2 paket	159.954.930	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	174.551.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	Kelurahan Pilangbang o
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	363.594.750	2 paket	200.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	556.597.500	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	Kelurahan Rejomulyo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	347.549.900	2 paket	296.115.371	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	445.328.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	Kelurahan Sukosari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang	2 paket	327.294.800	2 paket	225.750.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	2 unit	300.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	Kelurahan Tawangrejo

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Kelurahan	terpenuhi					Terbangun							
	7	1	3	02:	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	465.843.035	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	364.988.800	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	49.532.500	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	57.168.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Kanigoro
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	33.931.860	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	40.484.300	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Kartoharjo
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	43.454.850	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	38.026.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Kelun
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	32.838.600	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	46.308.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Klegen
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	32.963.150	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	43.451.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Oro - oro Ombo
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	38.283.180	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	33.147.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Pilangbang o
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti	100%	-	100%	150.000.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	5 pokmas	41.367.500	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Rejumulyo

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						kegiatan pemberdayaan masyarakat						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	33.860.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	22.762.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Sukosari
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	50.978.895	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	42.275.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Tawangrejo
	7	01	03	20	3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 lembaga / forum	76.309.200	1 lembaga / forum	76.309.200	1 lembaga / forum	76.309.200	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 laporan	76.309.200		76.309.200		76.309.200	
	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	171.476.620	100%	700.192.835	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	452.740.000	100%	498.014.000	100%	498.014.000	
	7	1	4	02:	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	75.356.540	100%	409.312.440	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	239.140.000	100%	263.054.000	100%	263.054.000	
	7	1	4	02:	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi / pertemuan	4 pertemuan	75.356.540	24 jenis pertemuan	409.312.440	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh	16 laporan	239.140.000	16 laporan	263.054.000	16 laporan	263.054.000	

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											Agama dan Tokoh Masyarakat							
	7	1	4	02:02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	96.120.080	100%	290.880.395	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	213.600.000	100%	234.960.000	100%	234.960.000	
	7	1	4	02:01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi / pertemuan	9 pertemuan	96.120.080	11 pertemuan	290.880.395	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 laporan	213.600.000	11 laporan	234.960.000	11 laporan	234.960.000	
	7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	136.144.080	100%	173.179.750	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	184.219.400	100%	236.000.000	100%	236.000.000	
	7	1	5	02:01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100%	136.144.080	100%	173.179.750	Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100%	184.219.400	100%	236.000.000	100%	236.000.000	
	7	1	5	02:01	Pembinaan Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Jumlah Sosialisasi	0 kegiatan	24.831.360	1 kegiatan	31.968.050	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	275 orang	100.000.000	175 orang	100.000.000	175 orang	100.000.000	

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
	7	1	5	02:01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	100%	71.481.360	100%	56.249.100	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	90.000.000	4 Laporan	90.000.000	
	7	1	5	02:01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	2 dokumen	39.831.360	2 dokumen	84.962.600	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 dokumen	9.219.400	2 dokumen	46.000.000	2 dokumen	46.000.000	
JUMLAH									22.742.978.172		21.448.997.574			23.457.588.867		22.775.757.459		22.775.757.459	

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kartoharjo

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	11%	22%	33%	44%	55%	66%	66%
2	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo		2,85	2,9	2,93	2,96	2,99	2,99
3	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Kartoharjo		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Kartoharjo

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Tujuan PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	11%	22%	33%	44%	55%	66%	66%	Indikator Sasaran PD
3	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo		2,85	2,9	2,93	2,96	2,99	2,99	Indikator Sasaran PD
4	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Kartoharjo		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%				100%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Kartoharjo		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	87,56	87,7	87,7	87,75	87,8	87,85	87,85	Indikator Program

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Kartoharjo dan tidak dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah lain		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
9	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kartoharjo		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
10	Jumlah usulan prioritas musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD di kecamatan	18 usulan	18 usulan	18 usulan	-	-	-	18 usulan	Indikator Program PD
11	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
12	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
13	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah	-	10	-	-	-	-	10	Indikator Lama
14	Indeks perkembangan kelurahan	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

BB. DINAS PERDAGANGAN

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Dinas Perdagangan

No	Permasalahan
1	Belum maksimalnya revitalisasi pasar rakyat
2	Belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun yaitu retribusi pengelolaan pasar rakyat dan retribusi tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
3	Belum adanya jaminan ketersediaan barang pokok tertentu dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau
4	Kurang maksimalnya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
5	Belum terwujudnya pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur
6	Belum terbangunnya sistem penyelenggaraan perdagangan serta belum optimalnya informasi jumlah dan volume usaha perdagangan

Isu Strategis Dinas Perdagangan

No	Isu Strategis
1	Penguatan Sistem Perdagangan
2	Penguatan Kualitas Sarana dan Prasarana
3	Optimalisasi Pembangunan Sistem Teknologi Perdagangan dan Teknologi Pengelolaan Pasar Rakyat
4	Optimalisasi Fungsi Tera Ulang di Daerah dan Pasar Rakyat

Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung Dinas Perdagangan

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor jasa
				Persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor perdagangan

Tujuan Dinas Perdagangan

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Peran Perdagangan terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	24,05	24,05	24,05	-	-
		Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	-	-	24,05	24,05	24,05

Sasaran Dinas Perdagangan

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya volume usaha perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	1,76	0,5	0,6	0,7	0,8
2	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	-	-	14,59	5	5
3	Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Layanan UTP dan pengawasan BDKT yang terealisasi	-	-	100	100	100
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks RB Perangkat Daerah	-	3,86	18,31	18,31	18,31

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun (2021)		Tahun (2022)		Tahun (2023)		Tahun (2024)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan peran perdagangan terhadap perekonomian daerah	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	18,31		18,31		18,31		18,31		18,31			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A (Skor)	9.790.847.343	A (Skor)	9.549.876.897	A (Skor)	10.520.853.560	A (Skor)	13.730.409.150	A (Skor)	13.730.409.150	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah.	100%	79.150.480	100%	54.007.200	100%	25.609.950	100%	25.609.950	100%	25.609.950	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	6 Dokumen	79.150.480	6 Dokumen	54.007.200							Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	25.609.950	6 Dokumen	25.609.950	6 Dokumen	25.609.950	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	6.854.097.308	100%	7.616.000.000	100%	8.990.740.000	100%	8.990.740.000	100%	8.990.740.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	6.854.097.308	100%	7.616.000.000								
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					75 orang/bulan	8.990.740.000	75 orang/bulan	8.990.740.000	75 orang/bulan	8.990.740.000	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai			100%	174.299.000	100%	176.915.450	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya			100%	174.299.000								
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 paket	176.915.450	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	350.000.000	100%	201.010.800	100%	207.059.200	100%	457.059.200	100%	457.059.200	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor											Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							2 paket	250.000.000	2 paket	250.000.000	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	350.000.000	100%	201.010.800								
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					30 Laporan	207.059.200	30 Laporan	207.059.200	30 Laporan	207.059.200	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%	357.267.050					100%	1.745.000.000	100%	1.745.000.000	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pemerintah Daerah													
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/ jabatan												
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							3 Unit	80.000.000	3 Unit	80.000.000	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan												
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							3 unit	900.000.000	3 unit	900.000.000	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemenuhan peralatan dan mesin	100%	357.267.050										
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							10 unit	365.000.000	10 unit	365.000.000	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor												
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							3 unit	400.000.000	3 unit	400.000.000	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
				Penyediaan	Persentase	100%	940.611.5	100%			100%		100%		100%	Dinas	Kota

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah		05		1.067.561.807		782.923.570		1.150.000.000		1.150.000.000	Perdagangan Kota Madiun	Madiun
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	940.611.505	100%	1.067.561.807								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 laporan	782.923.570	2 laporan	1.150.000.000	2 laporan	1.150.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	1.209.721.000	100%	436.998.090	100%	337.605.390	100%	1.162.000.000	100%	1.162.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	100%	279.021.000	100%	260.515.740							Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					44 unit	234.060.190	44 unit	360.000.000	44 unit	360.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100%	800.700.000	100%	49.978.750								
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan					3 unit	15.336.000	3 unit	602.000.000	3 unit	602.000.000	Dinas Perdagangan Kota	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi											Madiun	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100%	130.000.000	100%	126.503.600								
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					3 unit	88.209.200	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
			Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100%	388.870.000	100%	107.083.000	100%	98.772.500	100%	155.000.000	100%	155.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	
				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100%	388.870.000	100%	107.083.000	100%	98.772.500	100%	155.000.000	100%	155.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	75 surat	388.870.000	75 surat	107.083.000								
					Jumlah					75		75		75		Dinas	Kota

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					dokumen	98.772.500	dokumen	155.000.000	dokumen	155.000.000	Perdagangan Kota Madiun	Madiun	
		Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100%	8.242.965.872									Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun	
		Meningkatnya Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat						100%	6.261.231.818	100%	6.315.963.990	100%	3.256.000.000	100%	3.256.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
						Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	17 Pasar	3.832.794.552	17 Pasar	1.794.828.040	17 Pasar	2.342.878.990	17 Pasar	3.256.000.000	17 Pasar	3.256.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
						Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 pasar	2.676.470.725	3 pasar	733.783.000							Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan					3 unit	1.620.746.000	3 unit	1.783.000.000	3 unit	1.783.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
						Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 pasar	1.156.323.827	17 pasar	1.061.045.040							Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
						Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					17 unit	722.132.990	17 unit	1.473.000.000	17 unit	1.473.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah peningkatan omset pasar rakyat	3.200.000.000	4.410.171.320										
					Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			100%	4.466.403.778	100%	3.973.085.000	100%	4.814.000.000	100%	4.814.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan promosi pasar	2 kali	982.520.600										
					Jumlah Pembinaan dan pengendalian yang dilaksanakan			2 kali	670.130.383							Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					2 dokumen	360.310.000	2 dokumen	932.000.000	2 dokumen	932.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah orang yang melaksanakan pengelolaan pasar	118 orang	3.427.650.720	118 orang	3.796.273.395							Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					4 dokumen	3.612.775.000	4 dokumen	3.882.000.000	4 dokumen	3.882.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
		Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100%	77.966.680	100%	77.500.800	100%	87.300.000	100%	257.993.000	100%	257.993.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting							100%	150.000.000	100%	150.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pelaksanaan pengendalian Ketersediaan Barang												
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	100%	77.966.680	100%	75.089.600	100%	69.307.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemantauan	3 kali	77.966.680	3 kali	75.089.600							Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					3 laporan	69.307.000	3 laporan	80.000.000	3 laporan	80.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar											Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)							1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
					Kabupaten/Kota														
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Tersaluranya pupuk dan pestisida kepada petani berhak			100%	2.411.200	100%	17.993.000	100%	17.993.000	100%	17.993.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
				Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan			2 kali	2.411.200							Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					2 laporan	17.993.000	2 laporan	17.993.000	2 laporan	17.993.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
		Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTPP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100%	342.050.000									Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
		Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Layanan UTPP dan pengawasan BDKT yang terealisasi					100%	216.946.035	100%	209.724.100	100%	287.000.000	100%	287.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun		
						Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	12 bulan	342.050.000	12 bulan	216.946.035	12 bulan	209.724.100	12 bulan	287.000.000	12 bulan	287.000.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
						Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTPP) yang sudah di tera atau tera ulang	7000 utpp	328.900.000	7000 utpp	204.753.055							Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					7000 unit	200.556.100	7000 unit	262.000.000	7000 unit	262.000.000	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan Produk dalam kemasan yang telah diawasi	9 Lokasi	13.150.000	9 Lokasi	12.192.980							Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina					150 orang	9.168.000	150 orang	25.000.000	150 orang	25.000.000	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
		Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	15 Produk	379.622.600									Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
					Persentase produk perdagangan yang dipromosikan			100%	243.423.850	100%	414.174.850	100%	776.300.000	100%	776.300.000	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.	4 Kali	379.622.600	4 Kali	243.423.850	4 Kali	414.174.850	4 Kali	776.300.000	4 Kali	776.300.000	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya promosi produk perdagangan	4 Kali	224.152.600	4 Kali	135.087.400							Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun
					Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam					4 UMKM	203.874.850	4 UMKM	566.000.000	4 UMKM	566.000.000	Dinas Perdagangan an Kota Madiun	Kota Madiun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota												
				Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem informasi baik baru dan pemeliharannya	2 jenis	155.470.000	2 jenis	108.336.450							Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun
					Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan					2 dokumen	210.300.000	2 dokumen	210.300.000	2 dokumen	210.300.000	Dinas Perdagangan Kota Madiun	Kota Madiun

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	0	1,76	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
2	Persentase Layanan UTTP dan pengawasan BDKT yang terealisasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	-	-	-	14,59%	5%	5%	5%

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,82	-10,83	2,16	10,16	10,16	10,16	10,16	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa	-	-0,93	0,58	11,32	11,32	11,32	11,32	Indikator Sasaran Kota
3	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	23,56	24,05	24,05	-	-	-	24,05	Indikator Tujuan PD
5	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	-	-	-	24,05	24,05	24,05	24,05	Indikator Tujuan PD
6	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	0	1,76	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	Indikator Sasaran PD
7	Persentase Layanan UTTP dan pengawasan BDKT yang terealisasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
8	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	-	-	-	14,59%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
9	persentase perusahaan yang memperbarui perijinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
10	Persentase Bahan Pokok dengan Harga Stabil	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Program PD
11	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
12	persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	-	15 produk	15 produk	15 produk	-	-	15 produk	Indikator Program PD
14	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
15	persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	-	0	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
16	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	62,63	62,63	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
17	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	0,00%	98,06%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
18	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
19	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :								
	a. Pusat perbelanjaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	b. Toko swalayan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
20	Persentase penerbitan TDG	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
21	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
22	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
23	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
25	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Lppd
26	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
27	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		95%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
38	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
39	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat	-	1,76	-	-	-	-	1,76	Indikator Lama
40	Jumlah Omset Pasar Rakyat	-	3.106.554.387.840	-	-	-	-	3.106.554.387.840	Indikator Lama
41	Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal	-	0	-	-	-	-	0	Indikator Lama

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.